



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

PERUBAHAN RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat karunia-Nya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 Tanggal 10 Januari 2024.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja OPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

DEWA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.09A/2024).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.....	I-8
1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024	I-9
1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025	I-10
1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039	I-15
1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan	I-17
1.5 Sistematika Penulisan	I-17
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DAERAH	
2.1 Sejarah Kota Dumai	II-1
2.2 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-4
2.2.1.3 Topografi	II-4
2.2.1.4 Geologi	II-5
2.2.1.5 Hidrologi	II-6
2.2.1.6 Klimatologi	II-8
2.2.1.7 Penggunaan Lahan	II-10
2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-20
2.2.2.1 Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.....	II-20
2.2.2.2 Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan	II-20
2.2.2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan	II-20
2.2.3 Wilayah Rawan Bencana	II-22
2.2.3.1 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	II-22
2.2.3.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir	II-23
2.2.3.3 Kawasan Rawan Bencana Abrasi	II-24
2.2.4 Demografi	II-25
2.2.4.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	II-25
2.2.4.2 Perkembangan Sebaran Penduduk	II-26
2.2.4.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk	II-27
2.2.4.4 Perkembangan Sex Rasio Penduduk	II-29
2.2.4.5 Struktur Usia Penduduk	II-31
2.2.4.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk	II-32
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-35
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-35
2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-35
2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	II-46
2.3.1.3 Perkembangan PDRB Perkapita	II-49
2.3.1.4 Pertumbuhan Laju Inflasi	II-52
2.3.1.5 Indeks Gini	II-55
2.3.1.6 Perkembangan Kemiskinan	II-56
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-62
2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-62
2.3.2.2 Angka Melek Huruf	II-63
2.3.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-64
2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-65

	2.3.2.5	Angka Harapan Hidup	II-66
	2.3.2.6	Pengeluaran Ril Perkapita (PPP)	II-67
	2.3.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	II-67
	2.3.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-68
	2.3.2.9	Jumlah Penduduk Bekerja	II-69
	2.3.2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-70
	2.3.2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	II-71
	2.3.2.12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II.....	II-71
	2.3.2.13	Index Kepuasan Masyarakat	II-72
	2.3.2.14	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-73
	2.3.2.15	Opini BPK	II-74
	2.3.2.16	Pangan (PPH dan Rawan Pangan)	II-74
	2.3.2.17	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	II-75
	2.3.2.18	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	II-76
	2.3.2.19	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-77
	2.3.2.20	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB.....	II-78
	2.3.2.21	Pravalensi Balita Gizi Buruk	II-79
	2.3.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-83
	2.3.3.1	Perkembangan Seni Budaya	II-83
	2.3.3.2	Perkembangan Olah Raga	II-86
2.4	Aspek Pelayanan Umum.....		II-87
	2.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-87
	2.4.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-87
	2.4.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-99
	2.4.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-137
	2.4.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-148
	2.4.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-152
	2.4.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-156
	2.4.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-158
	2.4.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-158
	2.4.2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-165
	2.4.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-170
	2.4.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-173
	2.4.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	II-177
	2.4.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-182
	2.4.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa	II-184
	2.4.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-186
	2.4.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-189
	2.4.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika..	II-194
	2.4.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-196
	2.4.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	II-198
	2.4.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga..	II-200
	2.4.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-202
	2.4.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-203
	2.4.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-204
	2.4.2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-209
	2.4.2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-211
	2.4.3	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan	II-211
	2.4.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	II-211
	2.4.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-213
	2.4.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-214
	2.4.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-219
	2.4.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.....	II-220
	2.4.3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	II-222
	2.4.4	Fokus Urusan Penunjang	II-223
	2.4.4.1	Bidang Perencanaan Pembangunan	II-223

	2.4.4.2	Bidang Keuangan Daerah	II-224
	2.4.4.3	Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	II-225
	2.4.4.4	Bidang Penelitian dan Pengembangan	II-229
	2.4.4.5	Bidang Pengawasan	II-229
	2.4.4.6	Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)	II-231
	2.4.4.7	Sekretariat DPRD	II-232
2.5		Aspek Daya Saing Daerah	II-233
	2.5.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-233
	2.5.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita	II-233
	2.5.1.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita.....	II-234
	2.5.1.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	II-235
	2.5.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-236
	2.5.2.1	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	II-236
	2.5.2.2	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum...	II-237
	2.5.2.3	Ketaatan Terhadap RTRW	II-238
	2.5.2.4	Luas Wilayah Produktif	II-238
	2.5.2.5	Luas Wilayah Industri	II-238
	2.5.2.6	Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum.....	II-239
	2.5.2.7	Penginapan/Hotel	II-240
	2.5.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-240
	2.5.3.1	Angka Kriminalitas	II-240
	2.5.3.2	Jumlah Demonstrasi	II-241
	2.5.3.3	Lama Proses Perijinan	II-241
	2.5.3.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.....	II-244
	2.5.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-245
	2.5.4.1	Kualitas Ketenagakerjaan	II-245
	2.5.4.2	Persentase Lulusan S1/S2/S3	II-245
	2.5.4.3	Tingkat atau Rasio Ketergantungan	II-246
	2.5.4.4	Rasio Penduduk yang Bekerja	II-246

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3.1		Kinerja Keuangan Masa Lalu (2018-2022)	III-1
	3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
	3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-2
	3.1.1.2	Belanja Daerah	III-13
	3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III-16
	3.1.2	Neraca Daerah.....	III-18
3.2		Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2026	III-23
	3.2.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	III-23
	3.2.1.1	Proyeksi Pendapatan Daerah	III-23
	3.2.1.2	Proyeksi Belanja Daerah	III-28
	3.2.1.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-31
	3.2.1.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-34

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1		Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
	4.1.1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
	4.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-2
	4.1.2.1	Aspek Pelayanan Umum	IV-2
	4.1.2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar...	IV-2
	4.1.2.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-6
	4.1.2.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan	IV-13
	4.1.2.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang	IV-15
	4.1.2.2	Aspek Daya saing	IV-17
	4.1.2.2.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	IV-17
	4.1.2.2.2	Fokus Infrastruktur Wilayah	IV-17
	4.1.2.2.3	Fokus Iklim Berinvestasi	IV-18
	4.1.2.2.4	Fokus Sumberdaya Manusia	IV-18
4.2		Isu-Isu Strategis	IV-18
	4.2.1	Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	IV-19
	4.2.2	Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039	IV-20
	4.2.3	Isu Pembangunan Daerah Dengan Kabupaten Tetangga	IV-23

4.2.4	Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai	IV-25
4.2.5	Isu Strategis Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (RPJM Provinsi Riau 2019-2024)	IV-26
4.2.6	Isu-Isu Strategis Kota Dumai	IV-27
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		
5.1	Visi Pembangunan Kota Dumai	V-1
5.2	Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	V-2
5.3	Keselarasan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi Rpjmd Kota Dumai.....	V-5
5.4	Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai dengan Misi RPJMD Provinsi Riau.....	V-6
5.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	V-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
6.1	Strategi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	VI-4
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		
8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-1
8.2	Idikator Kinerja Daerah (IKD)	VIII-3
BAB IX PENUTUP		
9.1	Program Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

Tabel 1.1	Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025 ...	I-13
-----------	---	------

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-2
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.4	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.....	II-7
Tabel 2.5	Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2022.....	II-8
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 -2022.....	II-9
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 -2022.....	II-10
Tabel 2.8	Peruntukan Pola Ruang di Kota Dumai Tahun 2019-2039.....	II-11
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-22
Tabel 2.10	Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-25
Tabel 2.11	Perkembangan Sebaran Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II-26
Tabel 2.12	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II-28
Tabel 2.13	Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-30
Tabel 2.14	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-33
Tabel 2.15	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2022.....	II-36
Tabel 2.16	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010 - 2022	II-39
Tabel 2.17	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010 - 2022	II-41
Tabel 2.18	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Belaku Tahun 2017 - 2022	II-44
Tabel 2.19	Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2022.....	II-45
Tabel 2.20	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2010 - 2022.....	II-48
Tabel 2.21	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2011 – 2022	II-50
Tabel 2.22	Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011 - 2022.....	II-51
Tabel 2.23	Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017 - 2022.....	II-52
Tabel 2.24	Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2011 – 2022.....	II-54
Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010 -2022.....	II-57
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2010 -2022).....	II-63
Tabel 2.27	Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2010 -2022.....	II-64
Tabel 2.28	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2010 - 2022.....	II-65
Tabel 2.29	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai. Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2010 - 2022	II-66
Tabel 2.30	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun 2017-2022..	II-67
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-68
Tabel 2.32	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-68
Tabel 2.33	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-69

Tabel 2.34	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-70
Tabel 2.35	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2017 - 2022	II-71
Tabel 2.36	Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kota Dumai Tahun 2017-202.....	II-72
Tabel 2.37	Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2017-2022..	II-73
Tabel 2.38	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-74
Tabel 2.39	Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-74
Tabel 2.40	Perkembangan Skor PPH Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-75
Tabel 2.41	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-76
Tabel 2.42	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-77
Tabel 2.43	Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-78
Tabel 2.44	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-78
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-80
Tabel 2.46	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-81
Tabel 2.47	Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2017-2022.....	II-83
Tabel 2.48	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-84
Tabel 2.49	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-84
Tabel 2.50	Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-85
Tabel 2.51	Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2022.....	II-85
Tabel 2.52	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-86
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-87
Tabel 2.54	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-88
Tabel 2.55	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-88
Tabel 2.56	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-89
Tabel 2.57	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-90
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-92
Tabel 2.59	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-92
Tabel 2.60	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-93
Tabel 2.61	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2022...	II-94
Tabel 2.62	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022.	II-96
Tabel 2.63	Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-96
Tabel 2.64	Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Tahun Ajaran 2022/2023.....	II-97
Tabel 2.65	Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-98
Tabel 2.66	Jumlah SKB dan PKBM, Jumlah Tenaga Kependidikan dan Jumlah Siswa Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-98
Tabel 2.67	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-99

Tabel 2.68	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	II-101
Tabel 2.69	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-101
Tabel 2.70	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-102
Tabel 2.71	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-104
Tabel 2.72	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-105
Tabel 2.73	Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-105
Tabel 2.74	Perkembangan Rasio Posyandu Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-107
Tabel 2.75	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2017-2022.....	II-108
Tabel 2.76	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2022.....	II-108
Tabel 2.77	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-109
Tabel 2.78	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2017-2022.....	II-111
Tabel 2.79	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022.....	II-111
Tabel 2.80	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-115
Tabel 2.81	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-115
Tabel 2.82	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-117
Tabel 2.83	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-118
Tabel 2.84	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-120
Tabel 2.85	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-121
Tabel 2.86	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 - 2022.....	II-123
Tabel 2.87	Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-124
Tabel 2.88	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-126
Tabel 2.89	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-126
Tabel 2.90	Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-127
Tabel 2.91	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-127
Tabel 2.92	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2022.....	II-128
Tabel 2.93	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2022.....	II-129
Tabel 2.94	Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten.....	II-130
Tabel 2.95	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-138
Tabel 2.96	Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2022.....	II-139
Tabel 2.97	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-140
Tabel 2.98	Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2017-2022....	II-141
Tabel 2.99	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 - 2022.....	II-141
Tabel 2.100	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-142
Tabel 2.101	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-142
Tabel 2.102	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-143
Tabel 2.103	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-145
Tabel 2.104	Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-145

Tabel 2.105	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2017-2022.....	II-147
Tabel 2.106	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017-2022.....	II-149
Tabel 2.107	Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-149
Tabel 2.108	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2017-2022..	II-149
Tabel 2.109	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2022.....	II-150
Tabel 2.110	Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-151
Tabel 2.111	Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-152
Tabel 2.112	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-153
Tabel 2.113	Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-153
Tabel 2.114	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-154
Tabel 2.115	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2017-2022..	II-154
Tabel 2.116	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-155
Tabel 2.117	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-155
Tabel 2.118	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai Tahun 2017-2012.....	II-155
Tabel 2.119	Persentase Penegakan PERDA di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-156
Tabel 2.120	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-157
Tabel 2.121	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-159
Tabel 2.122	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017- 2022.....	II-160
Tabel 2.123	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-161
Tabel 2.124	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2014- 2022.....	II-162
Tabel 2.125	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-162
Tabel 2.126	Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1/S2/S3 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-163
Tabel 2.127	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2022.....	II-164
Tabel 2.128	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-165
Tabel 2.129	Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-165
Tabel 2.130	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-166
Tabel 2.131	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2017-2022.....	II-166
Tabel 2.132	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-168
Tabel 2.133	Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2017-2022.....	II-169
Tabel 2.134	Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-170
Tabel 2.135	Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2022.....	II-171
Tabel 2.136	Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-171
Tabel 2.137	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-172
Tabel 2.138	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	II-174
Tabel 2.139	Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani.....	II-176
Tabel 2.140	Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan.....	II-176
Tabel 2.141	Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2022.....	II-177
Tabel 2.142	Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2022.....	II-178
Tabel 2.143	Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-179
Tabel 2.144	Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2022.....	II-179
Tabel 2.145	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-180
Tabel 2.146	Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-180
Tabel 2.147	Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-180
Tabel 2.148	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-181

Tabel 2.149	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-182
Tabel 2.150	Kepemilikan KTP Tahun 2017-2022.....	II-183
Tabel 2.151	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017-2022.....	II-183
Tabel 2.152	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2022.....	II-183
Tabel 2.153	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	II-184
Tabel 2.154	Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	II-184
Tabel 2.155	Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-184
Tabel 2.156	Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2022.....	II-186
Tabel 2.157	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2022.....	II-187
Tabel 2.158	Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2020-2022.....	II-188
Tabel 2.159	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-189
Tabel 2.160	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-189
Tabel 2.161	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022.....	II-190
Tabel 2.162	Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-191
Tabel 2.163	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-191
Tabel 2.164	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-192
Tabel 2.165	Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-192
Tabel 2.166	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai, 2017-2022.....	II-193
Tabel 2.167	Jumlah Orang atau Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-194
Tabel 2.168	Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2022.....	II-194
Tabel 2.169	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-196
Tabel 2.170	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2022.....	II-196
Tabel 2.171	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022.....	II-197
Tabel 2.172	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022.....	II-197
Tabel 2.173	Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022.....	II-198
Tabel 2.174	Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2016-2019.....	II-198
Tabel 2.175	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 – 2022.....	II-199
Tabel 2.176	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-199
Tabel 2.177	Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022....	II-200
Tabel 2.178	Data Jumlah Pemuda Kota Dumai Tahun 2022.....	II-200
Tabel 2.179	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-201
Tabel 2.180	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-201
Tabel 2.181	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017-2022.....	II-201
Tabel 2.182	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2022.....	II-202
Tabel 2.183	Data Bidang Olahraga Kota Dumai 2017-2022	II-202
Tabel 2.184	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-203
Tabel 2.185	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2017-2022..	II-204
Tabel 2.186	Data Objek Pemajuan Kebudayaan	II-205
Tabel 2.187	Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-209
Tabel 2.188	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2022	II-210
Tabel 2.189	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2017-2022.....	II-210
Tabel 2.190	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-211
Tabel 2.191	Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2017-2022.....	II-211
Tabel 2.192	Jumlah Produksi Perikanan, Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan.....	II-211
Tabel 2.193	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-212
Tabel 2.194	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017– 2022.....	II-213
Tabel 2.195	Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-214
Tabel 2.196	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-214

Tabel 2.197	Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-215
Tabel 2.198	Luas, Prosuksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-215
Tabel 2.199	Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-216
Tabel 2.200	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 – 2022.....	II-217
Tabel 2.201	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2022.....	II-218
Tabel 2.202	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina 2017-2022.....	II-218
Tabel 2.203	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-219
Tabel 2.204	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-219
Tabel 2.205	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-220
Tabel 2.206	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-220
Tabel 2.207	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-221
Tabel 2.208	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2022.....	II-221
Tabel 2.209	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai 2017-2022.....	II-222
Tabel 2.210	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai 2017-2022.....	II-223
Tabel 2.211	Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2017-2022.....	II-223
Tabel 2.212	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-224
Tabel 2.213	Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-225
Tabel 2.214	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-227
Tabel 2.215	Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai Tahun 2022.....	II-228
Tabel 2.216	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	II-229
Tabel 2.217	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-230
Tabel 2.218	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2017-2022.....	II-230
Tabel 2.219	Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-232
Tabel 2.220	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-233
Tabel 2.221	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-234
Tabel 2.222	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-235
Tabel 2.223	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-236
Tabel 2.224	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-237
Tabel 2.225	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-237
Tabel 2.226	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-238
Tabel 2.227	Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-239
Tabel 2.228	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-240
Tabel 2.229	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai.....	II-240
Tabel 2.230	Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2017-2022.....	II-240
Tabel 2.231	Jumlah Demonstrasi di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-241
Tabel 2.232	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai.....	II-242
Tabel 2.233	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-243
Tabel 2.234	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-246
Tabel 2.235	Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-246
Tabel 2.236	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-247
Tabel 2.237	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-248

BAB. III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi PAD Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-5
Tabel 3.3	Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-6
Tabel 3.4	Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-7
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 -2022.....	III-9
Tabel 3.6	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022..	III-10
Tabel 3.7	Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Dana Perimbangan Kota Dumai 2018-2022.....	III-11
Tabel 3.8	Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 -2022.....	III-12
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-13
Tabel 3.10	Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-14
Tabel 3.11	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-15
Tabel 3.12	Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-17
Tabel 3.13	Neraca Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-20
Tabel 3.14	Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2018-2022.....	III-22
Tabel 3.15	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2026 Kota Dumai.....	III-26
Tabel 3.16	Kontribusi Realisasi PAD Kota Dumai Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2026.....	III-27
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2026.....	III-30
Tabel 3.18	Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	III-32
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai.....	III-32
Tabel 3.20	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026...	III-35

BAB. IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB. V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5.1	Keselarasan Misi RPJPD 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	V-5
Tabel 5.2	Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	V-6
Tabel 5.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-9
Tabel 5.4	keselarasan antara agenda pembangunan (prioritas pembangunan) daerah RPJMD Tahun 2021-2024 dengan agenda pembangunan nasional (Prioritas pembangunan nasional) pada RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-13

BAB. VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026.....	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-5
Tabel 6.3	Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2026) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025.....	VI-7
Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026.....	VI-13
Tabel 6.5	Standard Pelayanan Minimal.....	VI-16
Tabel 6.6	Indikasi Program Pembangunan dan Perangkat Daerah Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai.....	VI-20
Tabel 6.7	Indikasi Program Pembangunan dan Perangkat Daerah Pelaksana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Dumai.....	VI-21
Tabel 6.8	Program Prioritas Kepala Daerah.....	VI-21
Tabel 6.9	Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Dumai.....	VI-23

BAB. VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERENGGAT DAERAH

Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026.....	VII-2
-----------	---	-------

Tabel 7.2	Indikasi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.....	VII-4
-----------	--	-------

BAB. VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2022-2026.....	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Dumai Tahun 2022-2026.....	VIII-4

BAB. IX. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2	Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-8
Gambar 1.3	Tema/Fokus Tahap Pembangunan Daerah	I-12
Gambar 1.4	Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap Visi – Misi KDH dan Renstra PD.....	I-15
Gambar 1.5	Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap RPJMD dan Renstra PD	I-16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Dumai	II-3
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai	II-23
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	II-24
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Lonsor Kota Dumai	II-23
Gambar 2.5	Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022.....	11-27
Gambar 2.6	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022	II-28
Gambar 2.7	Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-31
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2022	II-32
Gambar 2.9	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2017-2022	II-34
Gambar 2.10	Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai 2010 dan 2022.....	II-38
Gambar 2.11	Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai, 2010 dan 2022.....	II-43
Gambar 2.12	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2022.....	II-45
Gambar 2.13	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2022.....	II-47
Gambar 2.14	Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai 2010-2022.....	II-50
Gambar 2.15	Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, Tahun 2017-2022.....	II-53
Gambar 2.16	Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai 2022.....	II-55
Gambar 2.17	Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-202..	II-56
Gambar 2.18	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022.....	II-58
Gambar 2.19	Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022.....	II-59
Gambar 2.20	Perkembangan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022.....	II-60
Gambar 2.21	Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022.....	II-61
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-65
Gambar 2.23	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2022.....	II-66
Gambar 2.24	Trend Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2013 - 2022 Sumber: RISKESDAS & SS	II-82
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-100
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-102
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-104
Gambar 2.28	Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-109
Gambar 2.29	Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-110
Gambar 2.30	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2017-2022	II-112
Gambar 2.31	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-113
Gambar 2.32	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-114
Gambar 2.33	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-116
Gambar 2.34	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-117
Gambar 2.35	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	II-119

Gambar 2.36	Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-121
Gambar 2.37	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	II-123
Gambar 2.38	Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2017 sampai dengan 2022.....	II-137
Gambar 2.39	Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (km) di Kota Dumai Tahun 2017-2022 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Dalam Angka 2018, BPS Kota Dumai Tahun 2023.....	II-139

BAB. III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022	III-5
Gambar 3.2	Perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2018-2022	III-8
Gambar 3.3	Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kota Dumai tahun 2018-2022.....	III-10
Gambar 3.4	Perkembangan KFDPI Kota Dumai tahun 2018-2022	III-12

BAB. IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Gambar 5.1	Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Nawaita RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-7
Gambar 5.2	Pemetaan Kinerja Misi 1.....	V-45
Gambar 5.3	Pemetaan Kinerja Misi 2.....	V-45
Gambar 5.4	Pemetaan Kinerja Misi 3.....	V-46
Gambar 5.5	Pemetaan Kinerja Misi 4.....	V-46

BAB. VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB. VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERENGGAT DAERAH

BAB. VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB. IX. PENUTUP



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB I

PENDAHULUAN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, didalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan Konsep Otonomi daerah, maka Pembangunan didaerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan. Dokumen tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

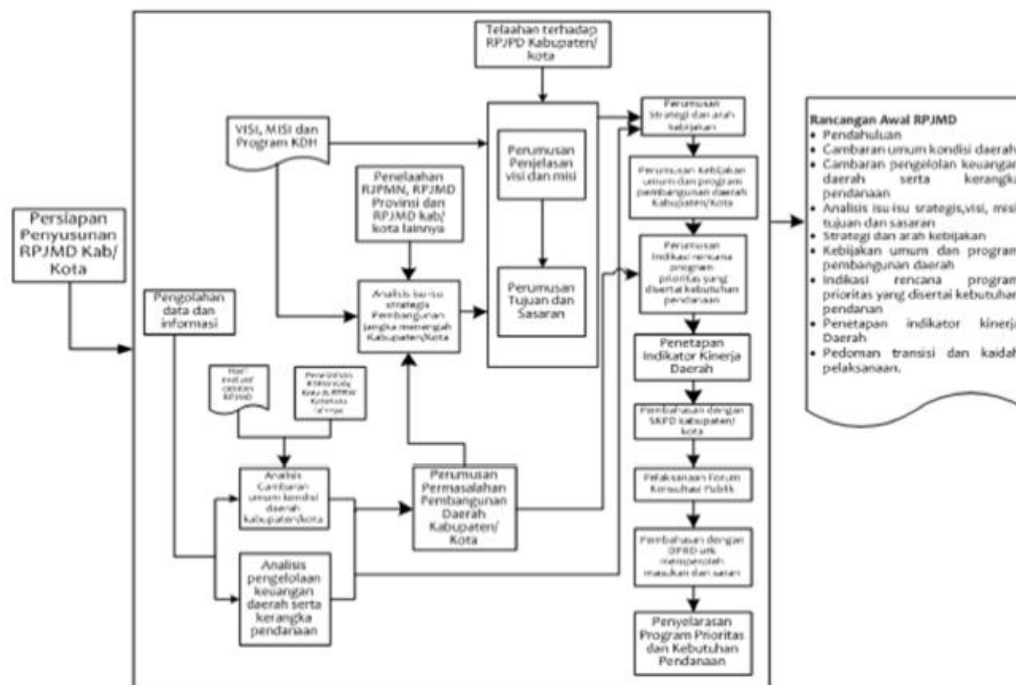
Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Kota Dumai telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik maka diwajibkan menyusun RPJMD. Lebih lanjut, pada pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, oleh karena itu pada tanggal 24 Agustus 2021, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021.

Harus dilakukannya perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 didukung oleh hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam rangka penyempurnaan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di antaranya :

1. Penyesuaian kembali tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota Dumai dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026 pasca disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.;
2. Penyesuaian kembali indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah serta indikator kinerja yang menjadi tugas daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional, kebutuhan daerah dalam menyusun rencana pembangunan, serta kemampuan daerah dalam menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi real di daerah;
3. Penyesuaian kembali indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Dumai di tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis seperti proses penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah dilakukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Penyusunan RPJMD
 Sumber: Diolah Permendagri No. 86 Tahun 2017

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai tahun 2005–2025, dimana Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap IV RPJPD Kota Dumai tahun 2005–2025. Disamping itu, Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 ini juga disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dikarenakan penetapan Peraturan Daerah masih terkendala di pemerintah provinsi maka yang digunakan adalah rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2014-2034.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keberlangsungan sumber daya yang tersedia tersebut serta harus mampu menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

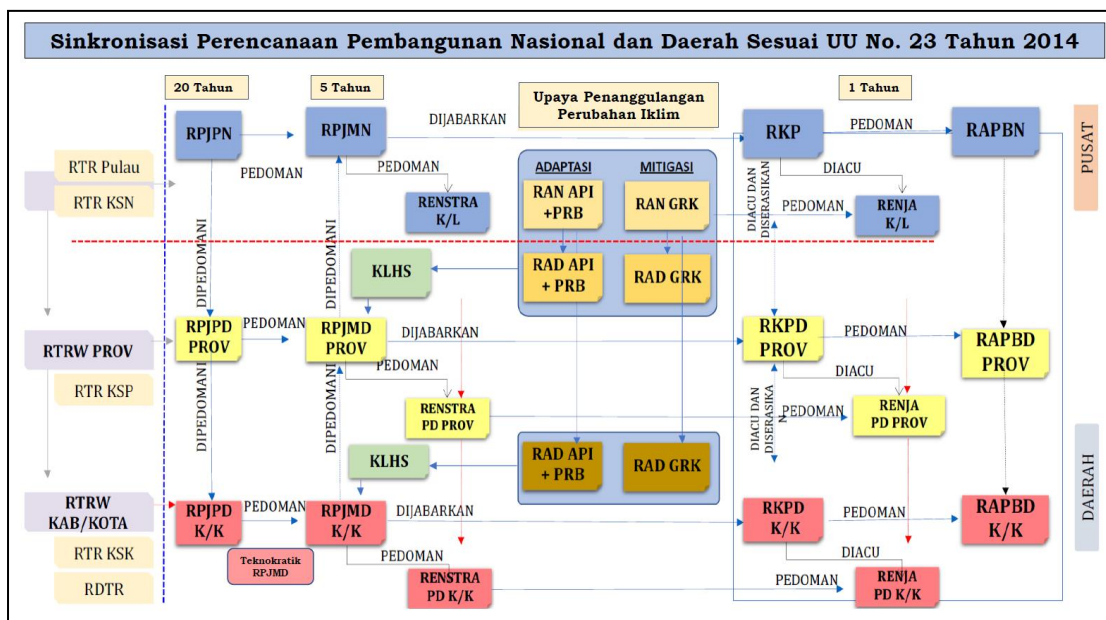
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).
28. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021).
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kota Dumai memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMN dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk mewujudkan hamonisasi pembangunan daerah yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacu dalam RPJP Kota Dumai akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah. Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan RPJMD

Selain dokumen RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RTRW, dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, yaitu dokumen Kajian lingkungan hidup strategis dan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sesuai dengan amanat Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-undang no.23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Dumai menyusun RPJMD Kota Dumai dengan mempedomani Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Secara umum RPJMD Kota Dumai akan menterjemahkan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun ke lima arahan utama presiden tersebut adalah:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun kegiatan-kegiatan strategi pemerintah pusat yang berlokasi di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Jalan tol trans Sumatera Aceh-Lampung, Kota Dumai termasuk bagian dari jalan tol Pekanbaru-Medan (Rantau Parapat-Sp.Sigambal-Dumai).
- b. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak (Kilang RDMP)
- c. SPALD-S skala kota (Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT);
- d. Sistem Pengelolaan Persampahan skala kota (TPA)

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dijelaskan bahwa visi yang akan dicapai pada akhir perencanaan RPJMD Provinsi Riau adalah terwujudnya Riau yang berdaya saing, bermartabat dan unggul di Indonesia yang diterjemahkan kedalam lima misi pembangunan Provinsi Riau. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menyusun RPJMD, Pemerintah Kota Dumai mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun kebijakan pembangunan Provinsi Riau yang terkait dengan kota Dumai, antara lain:

- a. Kota Dumai merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi riau dari perspektif ekonomi dan sosial budaya melalui pengembangan Kawasan Strategis Duri-Dumai-Rupat yang diharapkan dapat tumbuh sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Provinsi Riau pada khususnya dan ekonomi regional pada umumnya. Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa hasil perhitungan menunjukkan estimasi prioritas sektor unggulan perekonomian pada Kawasan Duri-Dumai-Rupat di masa yang akan datang adalah Prioritas I yaitu Sektor Pertanian khususnya Sub sektor Perkebunan dan Kehutanan, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian; Prioritas II adalah sektor (1) Industri Pengolahan.

Pengembangan kawasan ini didasarkan atas faktor-faktor lokasi, Kawasan Duri-Dumai-Rupat memiliki berbagai keunggulan. Faktor-faktor lokasi yaitu terdiri dari: (a) Faktor Endowment; (b) Pasar dan Harga; (c) Bahan Baku dan Energi; (d) Aglomerasi; (e) Kebijakan Pemerintah dan (f) Biaya Angkut. Faktor selanjutnya

yaitu pasar dan harga, dengan letak Kawasan Duri-Dumai-Rupat yang sangat strategis yaitu dekat dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan negara ASEAN lainnya menjadi keuntungan tersendiri dalam memasarkan produk yang dihasilkan pada kawasan ini. Ditambah lagi dengan tersedianya bahan baku dan energi yang melimpah pada kawasan ini dan daerah hinterlandnya.

Kota Dumai sebagai lokasi industri telah memunculkan gejala aglomerasi. Berkumpulnya berbagai jenis industri mengakibatkan timbulnya penghematan eksternal ekonomi, ini terjadi karena faktor-faktor luar dan dinikmati oleh semua industri yang ada di kota Dumai, seperti ketersediaan infrastruktur dan bahan baku yang mudah didapat. Kebijakan Pemerintah pada Kawasan Duri-Dumai-Rupat menjadi faktor pendorong bagi pengembangan kawasan ini. Kebijakan Pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, terminal agribisnis, balai latihan kerja dan infrastruktur pendukung lainnya pada Kawasan Duri-Dumai-Rupat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan ini

- b. Kota Dumai merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis nasional untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi melalui
 - 1) Akselerasi pengembangan kawasan industri dan pusat-pusat aglomerasi industri.
 - 2) Mendorong pembangunan jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan jalan tol Dumai-Sp. Sigambal-rantau prapat serta pengembangan Pelabuhan Dumai.
 - 3) Mendorong terbangunnya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan terbangunnya struktur kepelabuhan secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dan moda transportasi lainnya.
 - 4) Mendorong Pengembangan Bandara pinang Kampai
 - 5) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui SPAM Regional.
 - 6) Mendorong pembangunan kilang minyak dengan melakukan upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi

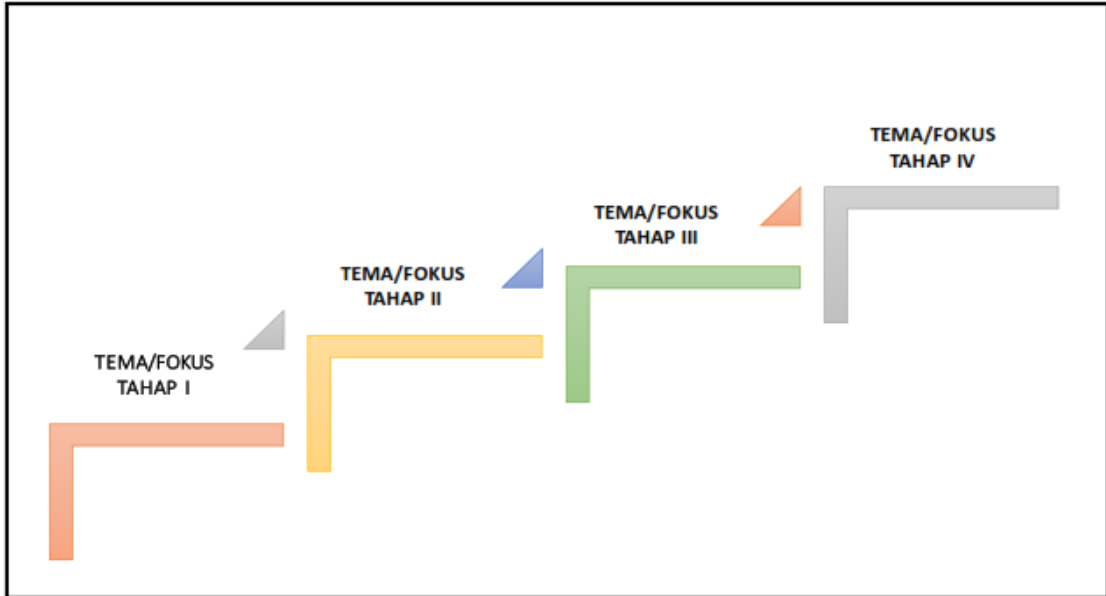
pembangunan jangka panjang daerah. Pentahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai untuk jangka waktu 20 tahun, terbagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dengan waktu pelaksanaan untuk setiap periode atau tahapan RPJMD selama lima tahun yaitu RPJMD pertama (tahun 2005-2010); RPJMD kedua (tahun 2011-2015); RPJMD ketiga (tahun 2016-2020) dan RPJMD keempat (tahun 2021-2026). RPJMD Kota Dumai 2021-2026 merupakan tahapan IV RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025. Adapun visi dan misi jangka panjang yang tertuang pada Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 adalah:

“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU”

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Adapun tahapan pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahapan prioritas pembangunan daerah yang akan dituangkan implementasinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.



Gambar 1.3 Tema/Fokus Tahap Pembangunan Daerah

Adapun Tahapan Prioritas pembangunan jangka panjang Kota Dumai Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

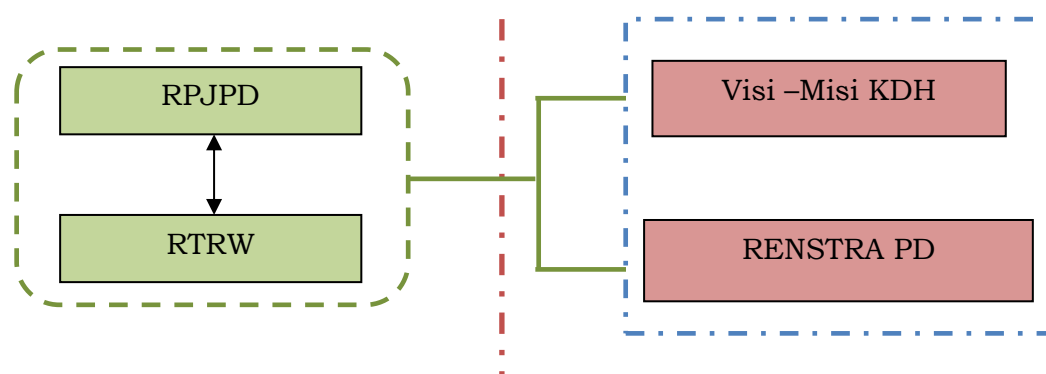
Misi	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing	Terbangunnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu	Terbangunnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Mengoptimalkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Terlaksananya pembangunan di berbagai bidang yang menyediakan infrastruktur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang
Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan	Mendorong pemerintahan yang memiliki sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi sesuai keahlian dibidang masing-masing, serta mendorong pelayanan	Terselenggaranya pemerintahan yang mengembangkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi dibidangnya, dan pelayanan publik yang secara terpadu, cepat, sederhana dan terjangkau	Meningkatnya pemerintahan dalam mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompetensi dibidangnya, dan akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar	Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima

Misi	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
keperintahan daerah yang baik	publik yang terpadu, cepat dan sederhana sehingga tercipta pemerintahan yang baik	seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik	pelayanan primadalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	
Mewujudkan lingkungan kota yang hijau	Terbangunnya pegelolaan kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pegelolaan kota yang ramah lingkungan, sesuai daya dukung lingkungan dan mengendalikan pembangunan kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pegelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.	Terwujudnya pegelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kota Dumai tahun 2019- 2039.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional dijelaskan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya kedalam dokumen rencana pembangunan. Hal ini menekankan bahwa rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 5 tahun. Rencana tata ruang adalah hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD menjadi krusial karena dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat implementatif dan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Gambar berikut menggambar konsistensi perencanaan jangka panjang ke jangka menengah

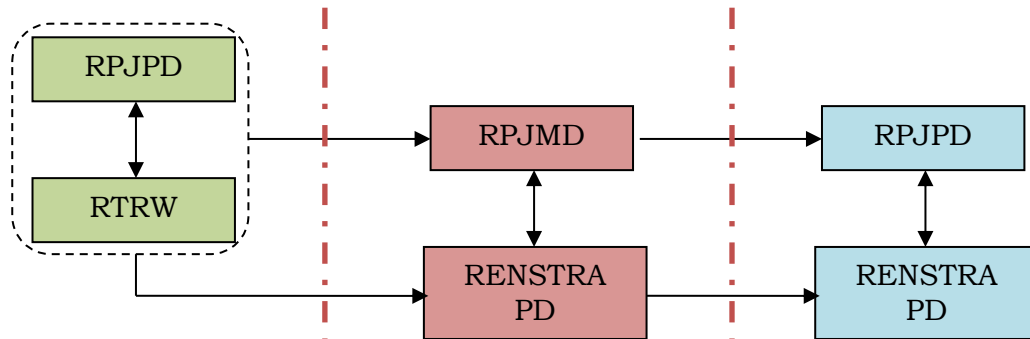


Gambar 1.4 Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap Visi – Misi KDH dan Renstra PD

Sumber: Bappenas, 2015

Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan iteratif dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, RTRW (rencana tata ruang) juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, khususnya bagi urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), penetapan destinasi

kawasan pariwisata (urusan pariwisata), dan sebagainya. Kedudukan dan keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) terhadap RTRW dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.5 Sinkronisasi antara RPJPD dan RTRW terhadap RPJMD dan Renstra PD

Sumber: Bappenas, 2015

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri dalam negeri nomor yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB kabupaten/kota, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Dumai adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Dumai.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah menyediakan data kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data kinerja dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dalam rangka mempersiapkan penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026;
3. Sebagai dasar pertimbangan penyusunan RKPD Kota Dumai dan dokumen Renstra OPD tahun 2021-2026
4. Menjaga konsistensi rancangan dokumen RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
5. Sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah terpilih untuk melakukan *takeaction* implementasi janji kampanye yang terangkum dalam visi, misi dan program unggulan yang akan dilaksanakan pada periode 2021-2026;
6. Penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain, seperti: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RTRW nasional, RTRW Provinsi Riau, dan RTRW Kota Dumai.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini diawali dengan pengantar analisis. Kondisi umum geografis menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kondisi demografi menjelaskan ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub bab ini diawali dengan pengantar analisis, selanjutnya dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Di dalam sub bab ini juga dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Sub bab ini diawali dengan pengantar analisis, selanjutnya dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Di dalam sub bab ini juga dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan

2.4 Aspek Daya Saing

Sub bab ini diawali dengan pengantar analisis, selanjutnya dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Di dalam sub bab ini juga dipaparkan

tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama

(IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX Penutup



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat sejarah, aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa zaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut: 1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa; 2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert; 3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan;

Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan WaliKota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten

Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². Sampai saat ini Kota Dumai memiliki 7 kecamatan dengan 36 Kelurahan

Filosofis dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan dan memperbesar peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi.

Saat ini Kota Dumai memiliki *tagline* yaitu Kota IDAMAN yang merupakan singkatan dari kota tujuan Investasi yang berDayasaing dengan pemerintahan Amanah yang didukung oleh masyarakat Mandiri dan berAdab serta lingkungan yang Nyaman.

2.2. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) hektar dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada Tabel dibawah.

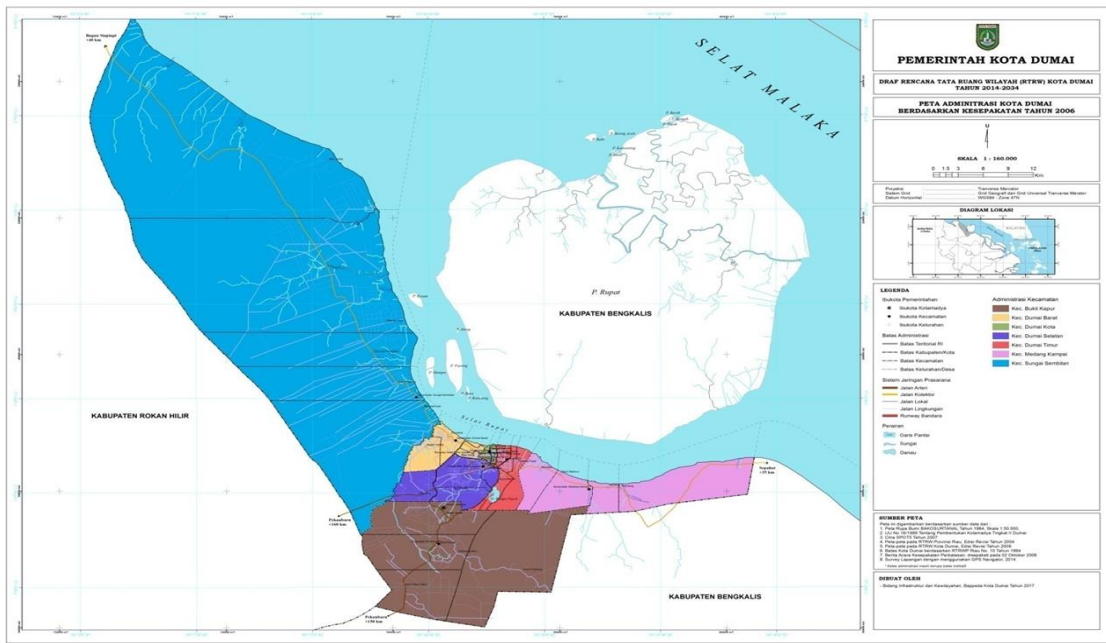
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2022

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,42	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,20	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
Total			2.066,72	100,00	36

Sumber : Perda Kota Dumai No 15 Tahun 2019-2039 tentang RTRW Kota Dumai

Secara administratif Kota Dumai seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Selat Rupat
 Sebelah Timur : Kec Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis
 Sebelah Selatan : Kec Batin Solapan Kabupaten Bengkalis
 Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang dan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Dumai
 Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan dengan rincian Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan
di Kota Dumai Tahun 2022

No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	1 Bukit Nenas
		2 Bagan Besar
		3 Bukit Kayu Kapur
		4 Gurun Panjang
		5 Kampung Baru
		6 Bagan Besar Timur
		7 Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1 Bagan Keladi
		2 Pangkalan Sesai
		3 Purnama
		4 Simpang Tetap Darul Ichsan
3	Dumai Kota	1 Bintan
		2 Dumai Kota
		3 Laksamana
		4 Rimba Sekampung
		5 Sukajadi
4	Medang Kampai	1 Guntung
		2 Mundam
		3 Pelintung
		4 Teluk Makmur
5	Dumai Timur	1 Bukit Batrem
		2 Buluh Kasap
		3 Jaya Mukti
		4 Tanjung Palas
		5 Teluk Binjai
6	Dumai Selatan	1 Bukit Datuk
		2 Bukit Timah
		3 Bumi Ayu
		4 Mekar Sari
		5 Ratu Sima
7	Sungai Sembilan	1 Bangsal Aceh
		2 Tanjung Penyembal
		3 Basilam Baru
		4 Batu Teritip
		5 Lubuk Gaung
		6 Sungai Geniot

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2023.

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0' 38"-101° 43' 33" Bujur Timur, 01° 26' 50"-02° 15' 40" Lintang Utara dan memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) hektar.

2.2.1.3 Topografi

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada Tabel dibawah. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15%.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketinggian (M DPL)	Jarak ke Ibukota (Km)
1	Bukit Kapur	25-50	18
2	Medang Kampai	2-5	18
3	Sungai Sembilan	0-25	10
4	Dumai Barat	0-3	7
5	Dumai Selatan	0,25	5
6	Dumai Timur	0,15	18
7	Dumai Kota	2	-

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Kota Dumai berada di tepi pantai Selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai.

Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

2.2.1.4 Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus

dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kwartir) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Trophaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5 m yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah Kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai, maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

2.2.1.5 Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa)

dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel di bawah Sungai Buluuala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Tabel 2.4
Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Geniot 2. Sungai Geniot Kecil 3. Sungai Buluhala 4. Sungai Teras 5. Sungai Penyengat 6. Sungai Ilir 7. Sungai Danau 8. Sungai Hulu 9. Sungai Sembilan 10. Sungai Mampu 11. Sungai Mampu Kecil 12. Sungai Nerbit Kecil 13. Sungai Nerbit Besar 14. Sungai Paul 15. Sungai Mesjid 16. Sungai Banain 17. Sungai Saliyo 18. Sungai Bulu Ala 19. Sungai Tambuan 20. Sungai Teritib 21. Sungai Selat Mati 10. Sungai Lubuk Gaung
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim

kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2017 dan debit andalan FJ Mock.

Berdasarkan hasil perhitungan, Kota Dumai memiliki nilai Daya Dukung Air > 1 yang artinya masih mencukupi kebutuhan penduduk dan belum terlampaui. Berdasarkan perhitungan status daya dukung air di Kota Dumai, terdapat 3 kecamatan yang memiliki kategori daya dukung terlampaui, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan perhitungan debit andalan tersebut diketahui bahwa terdapat satu kecamatan yang memiliki status daya dukung air yang sudah terlampaui yaitu di Kecamatan Dumai Kota. Status daya dukung yang terlampaui tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut tidak mencukupi kebutuhan penduduk yang tinggal di wilayah itu. Kecamatan Dumai Kota memiliki ketersediaan 1.694.901 m³/tahun sementara kebutuhan airnya lebih besar yaitu 2.055.395 m³/tahun.

2.2.1.6 Klimatologi

Suhu menjadi salah satu variabel perubahan iklim. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyonom (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Biasanya pengukuran suhu dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F).

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2022 berkisar antara 20,0°C-35,8°C, dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 35,80°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari yaitu 20,50°C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2022 berkisar antara 40%-100% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan April, Agustus, Oktober dan Desember yaitu 100% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 40%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
1.	Januari	35,10	20,50	26,50	99,00	48,00	84,20
2.	Februari	35,20	22,00	26,50	99,00	52,00	85,00
3.	Maret	34,40	22,60	27,40	99,00	67,00	81,80
4.	April	35,00	22,40	27,20	100,00	56,00	86,60

No	Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
5.	Mei	35,80	22,20	27,70	99,00	50,00	83,50
6.	Juni	34,20	22,00	26,20	98,00	40,00	84,40
7.	Juli	35,60	21,50	27,20	99,00	49,00	84,70
8.	Agustus	34,30	22,20	26,70	100,00	56,00	85,80
9.	September	34,30	21,20	26,70	99,00	51,00	84,50
10.	Oktober	35,00	21,80	26,50	100,00	48,00	86,00
11.	Nopember	34,60	22,30	26,50	99,00	50,00	86,70
12.	Desember	33,90	21,40	26,10	100,00	60,00	91,80

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2017-2022 mengalami penurunan dari 188 hari pada tahun 2017 menjadi 178 hari hujan pada tahun 2022 turun sebesar 5,32% namun rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 1,84%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus dan Oktober masing-masing sebanyak 20 hari dan paling sedikit terjadi bulan Januari sebanyak 8 hari. Perkembangan jumlah hari di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	20	14	10	13	15	8	-11,97
2	Februari	21	5	5	13	6	15	35,99
3	Maret	9	12	12	8	11	12	9,32
4	April	17	21	11	15	20	14	3,12
5	Mei	15	21	19	7	19	10	18,28
6	Juni	15	6	4	10	15	16	22,67
7	Juli	13	9	10	5	16	9	21,32
8	Agustus	9	17	14	7	15	20	33,77
9	September	13	20	13	8	25	21	35,38
10	Oktober	15	20	22	23	13	20	11,65
11	November	21	20	21	12	25	15	5,14
12	Desember	20	19	18	9	21	18	11,76
JUMLAH		188	184	159	130	201	178	1,84

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dari 2.599 mm³ kemudian meningkat menjadi 2.742 mm³ pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,94%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus yaitu 422,80 mm³ sedangkan paling sedikit terjadi pada bulan Januari yaitu 61,40 mm³. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Bulan	Curah Hujan (MM)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	411,70	96,60	150,60	78,40	81,00	61,40	-17,89
2	Februari	418,00	44,30	43,00	74,70	67,60	267,70	53,58
3	Maret	182,60	90,70	132,00	69,10	2690	196,30	41,96
4	April	181,00	166,30	177,00	240,50	230,20	200,40	3,39
5	Mei	145,00	187,40	86,00	304,10	240,60	279,50	44,80
6	Juni	95,00	48,60	185,00	178,50	125,70	159,10	45,06
7	Juli	106,70	157,40	93,00	268,00	324,10	122,50	30,70
8	Agustus	237,50	79,90	66,00	213,40	424,50	422,80	47,62
9	September	237,80	447,30	79,00	350,40	252,80	317,30	69,39
10	Oktober	179,40	447,30	347,00	153,50	430,60	286,90	43,66
11	November	238,30	289,70	178,00	366,80	319,00	176,00	6,24
12	Desember	166,00	247,30	182,70	209,90	184,00	251,60	12,43
JUMLAH		2.599	2.303	1.719	2.507	2.949	2.742	3,94

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.2.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, Secara umum Kota Dumai mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan yang terdiri dari pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pengaturan penyerbukan alami (pollination), pemeliharaan kualitas udara dan pengendalian hama dan penyakit. Nilai jasa ekosistem pengaturan di Kota Dumai secara keseluruhan tergolong sedang, tinggi dan sangat tinggi. Jasa pengaturan yang tergolong sangat tinggi adalah jasa Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (0,627) dan Pengaturan penyerbukan alami (pollination) (0,628). Nilai jasa dengan kriteria tinggi adalah pengaturan iklim (0,571), pengaturan tata aliran air dan banjir (0,511), pengolahan dan penguraian limbah (0,488), pemeliharaan kualitas udara (0,579) dan pengendalian hama dan penyakit (0,588). Nilai jasa dengan kriteria sedang hanya Pemurnian air (0,362).

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel di bawah. Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Peruntukan Pola Ruang di Kota Dumai Tahun 2019-2039

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung			
1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya		
	a. Kawasan Hutan Lindung		
	b. Kawasan Bergambut		
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61	1,73
	b. Sempada Pantai	279,83	0,14
	c. Sempadan Sungai	189,20	0,09
	d. Sempadan Danau	32,25	0,02
	e. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)	208,95	0,10
3	Kawasan Konservasi		-
	a. Suaka Alam		-
	b. Resapan Air		-
B. Kawasan Peruntukan Budidaya			
1	Kawasan Hutan Produksi		-
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	11.851,26	5,74
	b. Kawasan hutan Produksi Tetap	121.234,68	58,72
	c. Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	18.870,58	9,14
2	Kawasan Pertanian		-
	a. Kawasan Tanaman Pangan	10.368,75	5,02
	b. Kawasan KP2B		-
	c. Kawasan Hortikultura		-
	c. Kawasan Perkebunan	3.567,47	1,73
3	Kawasan Perikanan	1.051,04	0,51
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
	a. Kawasan pertambangan mineral logam		-
	a. Kawasan pertambangan Batubara		-
5	Kawasan Industri	7.602,83	3,68
6	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45	0,41
7	kawasan Peruntukan pergudangan	253,32	0,12
8	Kawasan Rencana Bandar Udara	670,28	0,32
9	Kawasan Pelabuhan	419,32	0,20
10	Kawasan Pendidikan	17,06	0,01
11	Kawasan Kesehatan	12,81	0,01
12	Kawasan Olahraga	56,79	0,03
13	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	0,01
14	Kawasan Pariwisata	216,89	0,11
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	36,11	0,02
16	Kawasan TPA	10,64	0,01
17	Kawasan Pemukiman		-
	a. Kawasan Pemukiman Perkotaan		-
	1. Kawasan Perkantoran	49,93	0,02
	2. Kawasan Perumahan	25.051,00	12,13
	b. Kawasan Pemukiman Perdesaan		-
Total Perntukan Kawasan		206.476,83	100,00
C. Outline			
1	Luas Wilayah	206.673,36	
2	Lainnya	196,53	

Sumber RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai dan sempadansungai

- b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- c) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- d) Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang ditetapkan sesuai peraturan, dikarenakan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan memiliki dataran tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Penetapan sempadan pantai di Kota Dumai berada di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah yang ditetapkan di Kota Dumai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perumahan dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai

C. Kawasan Lindung Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai

rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Menurut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan, Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha, Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkok Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Mesjid, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,50 Ha.

D. Kawasan Danau atau Waduk

Kawasan sekitar Danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kawasan di sekitar danau atau waduk di Kota Dumai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.
- 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Danau Putri Tujuh merupakan danau alamiah yang terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha.

Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata. Sebagai kawasan lindung danau dan waduk harus dijaga kelestariannya walaupun telah terjamah oleh kegiatan budidaya. Upaya penanganan untuk kawasan waduk dan danau adalah dengan cara pengawasan dan pembatasan pengembangan kawasan wisata danau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan ekosistem danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk di wilayah Kota Dumai dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan air di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24.300.000 M² Atau 24,3 Km²

F. Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

G. Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu ruang terbuka hijau di luar kawasan perkotaan tetapi masih di dalam administrasi Kota Dumai. Di Kota Dumai ruang terbuka hijau wilayah meliputi kawasan suaka margasatwa di Kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di Kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap

lingkungan-lingkungan Perumahan. Baik itu berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai Barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai Timur dengan luas lahan 27,76 Ha

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Wali Kota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha, Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

A. Kawasan Perumahan

Kawasan Perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pertanian yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan Perumahan terdiri dari:

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

Perumahan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di Pertanian. Kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh Desa selain ibukota Kecamatan.

B. Kawasan Pusat Pemerintahan

Kawasan pusat pemerintahan terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Walikota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan)

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta. Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasiskan hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri

Kawasan industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/ sedang yang tersebar merata di setiap Kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar, Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT. Bukit Kapur Reksa, PT. S.M.A.R.T. Corporation, PT. Sarana Sawitindo Utama, PT. Inti Benua Perkasatama, dan PT. Sarana Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang di Kota Dumai untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

G. Kawasan Militer

Kawasan militer kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah Kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting, sejalan dengan perkembangan Kota Dumai, yakni: TNI-AD, TNI-AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI-AL memiliki pangkalan TNI-AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.

H. Kawasan Migas dan Non Migas

Kawasan migas dan non migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha. b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Pertamina Hulu Rokan yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459,72 Ha.

I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu *Airstrip* 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (*runway*) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing-masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (*Runway Center Line*) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut

J. Kawasan Pelabuhan

Kawasan pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah

memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

K. Kawasan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka yang termasuk ruang terbuka non hijau, sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Lapangan olahraga dalam konteks stata ruang pada prinsipnya sangat didasari oleh aktivitas dari olah raga yang prasarananya direncanakan tersebut, yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga menjadi dasar perhitungan dimensi, perkerasannya dan batas-batas kawasan atau ruang yang harus disediakan.

L. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri dari usaha perikanan laut dan usaha perikanan air tawar. Hasil Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai pada tahun 2022 mencapai 710.569 Kg (71,08 persen) dan perikanan kolam, tambak dan keramba mencapai 289.117 Kg (28,92 persen).

M. Kawasan Peternakan

Produksi ternak jenis sapi di Kota Dumai mengalami penurunan di tahun 2021 ke 2022. Hal ini terlihat dari banyaknya ternak sapi yang pada tahun 2021 sebanyak 5.166 ekor dan tahun 2022 sebanyak 8.095 ekor. Kondisi ini sama dengan ternak jenis kerbau, kuda, domba, dan babi yang mengalami peningkatan. Pengembangan usaha yang terpadu peternakan dengan pertanian lahan kering diharapkan adanya suatu hubungan yang menguntungkan, di mana sisa hasil dari tanaman pangan dapat dipergunakan untuk bahan makanan ternak dan limbah ternak merupakan pupuk organik untuk peningkatan kesuburan tanah

N. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi penanaman: a. Pangan yang ada di Kota Dumai memproduksi sendiri komoditas yang berupa tanaman pangan yaitu berupa padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Tidak semua Kecamatan di Kota Dumai pada kondisi saat ini bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman pangan, ada beberapa Kecamatan yang memproduksi komoditas tertentu dan ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi komoditas tertentu. Untuk komoditas padi sawah hanya diproduksi di Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, b. Tanaman Sayuran di Kota Dumai pada kondisi sekaran pada umumnya bisa memenuhi kebutuhan akan sayuran di Kota Dumai. Hasil analisis menunjukkan produksi sayuran jenis tanaman petsai yang diproduksi di Kecamatan Bukit

Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan menunjukkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman petsai Kota Dumai bahkan bisa diekspor. Tanaman bayam yang diproduksi hampir di semua Kecamatan di Kota Dumai, produksi tanaman bayam ini menurut analisis bisa memenuhi kebutuhan akan tanaman bayam di Kota Dumai, c. Tanaman buah-buahan yang ada di Kota Dumai adalah mangga, durian, pisang dan Nenas bisa untuk diekspor.

Jasa penyediaan pangan diseluruh wilayah kecamatan di Kota Dumai tersebar dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jasa penyediaan pangan di Kota Dumai pada kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah secara berturut-turut seluas 15.618,86 ha, 12.663,37 ha, 63.728,44 ha, 4.814,27 ha, dan 107.314,29 ha. Jasa penyediaan pangan terluas berada pada kriteria kelas sangat rendah, sedangkan yang terkecil adalah rendah.

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pertanian Lahan basah adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah. Kriteria untuk kawasan Pertanian Lahan Basah diantaranya memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Kota Dumai mempunyai 5 kawasan perkebunan yaitu:

- 1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Tanjung Penyembal, dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907,38 Ha.
- 2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1.900,56 Ha.
- 3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456,73 Ha
- 4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915,63 Ha
- 5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554,37 Ha.

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah.

2.2.2.1 Potensi Pengembangan Pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan

Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun perikanan.

2.2.2.2 Potensi Pengembangan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan kondisi geografis, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupat, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berdasarkan kondisi hidrologi, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 sungai besar dan kecil yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

2.2.2.3 Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Berdasarkan kondisi geologi, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah Kota Dumai

ini memiliki rata-rata kedalaman 0,5 meter dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di Kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

Kota Dumai telah disepakati secara nasional menjadi pusat kegiatan yang harus dapat melayani kegiatan yang bersifat internasional, yakni mewakili Provinsi Riau yang memiliki batas wilayah berhadapan langsung dengan Negara lain yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura. Selain itu kota Dumai juga tidak hanya melayani kepentingan Provinsi Riau tersebut tetapi juga kota Dumai harus mampu melayani kepentingan wilayah Sumatera Utara bagian selatan dan wilayah Sumatera barat bagian utara yang akan memerlukan layanan untuk kepentingan kegiatan perdagangan yang bersifat internasional.

Di dalam arahan rencana penataan ruang wilayah kota Dumai hingga akhir tahun 2038 adalah meningkatkan aksesibilitas kota Dumai sebagai pusat kegiatan internasional terhadap kawasan – kawasan yang membutuhkan layanan, yang berarti harus dilakukan penataan ruang wilayah sistem jaringan transportasi baik darat, sungai, danau, udara, yang harus mampu mencakup luasan wilayah yang di kehendaki untuk di layani, yakni Sumatera utara bagian selatan, seluruh Provinsi Riau, dan Sumatra barat bagian utara.

Selain layanan yang bersifat kemudahan yang lebih tinggi (aksesibilitas) berupa sistem jaringan transportasi, juga di perlukan persediaan sumber energim(kelistrikan) yang mampu menunjang seluruh kegiatan layanan, agar mampu melayani sebagai mana keinginan untuk dapat melayani secara nasional maupun internasional. Perlunya ketersediaan sumber daya air, dan telekomunikasi serta infrastruktur fisik lainnya yang harus mampu menunjang penetapan fungsi kota Dumai sebagai gerbang internasional sendiri.

Strategi untuk mendukung arahan penataan ruang wilayah kota Dumai sebagai gerbang internasional, sebagai mana di uraikan di atas adalah melakukan penyusunan penataan ruang wilayah seluruh infrastruktur maupun sub struktur dan supra struktur yang diperlukan oleh kota Dumai untuk mampu menjadi pusat

kegiatan layanan yang berskala internasional, baik pentahapan jangka pendek (5 tahun mendatang), jangka menengah (5-10 tahun mendatang) dan jangka panjang (20 tahun mendatang).

Dukungan berupa infrastruktur tersebut harus di lakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan berbagai penataan ruang wilayah yang memiliki kepentingan yang sama meskipun dalam skala yang lebih kecil, sehingga akan terjadi integrasi penataan ruang wilayah yang baik, penataan ruang wilayah terhadap infrastruktur yang telah ada maupun penataan ruang wilayah infrastruktur baru yang akan dipersiapkan hingga akhir masa perencanaan jangka panjang itu sendiri.

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan sesuatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.2.3.1 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan diwilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

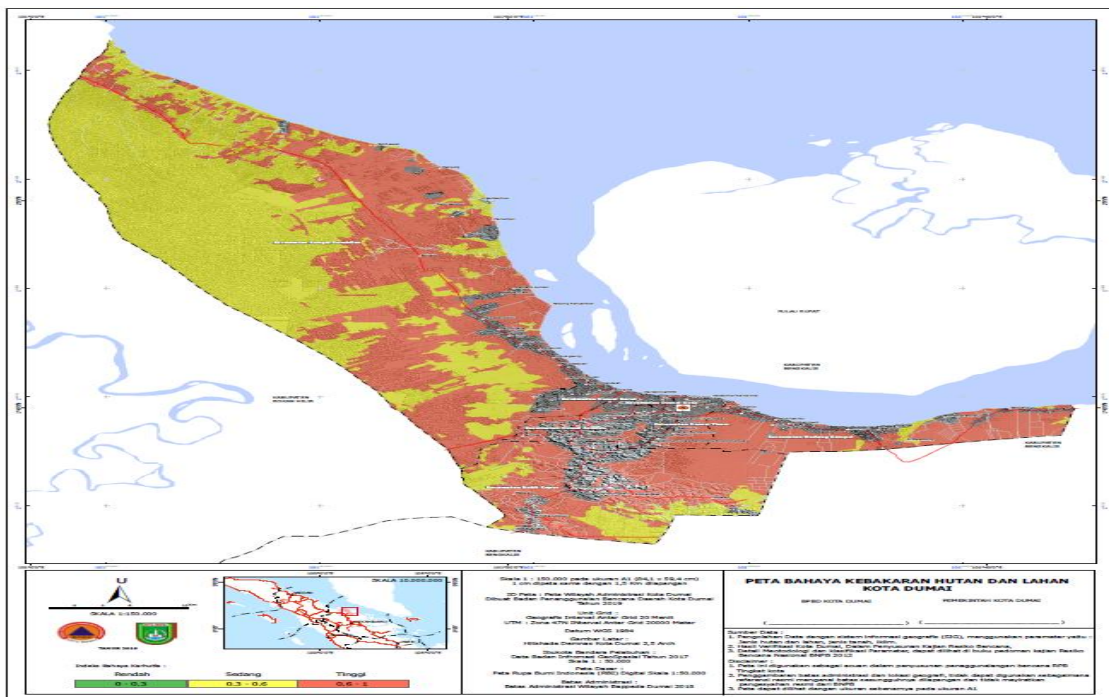
Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2017-2022 terjadi penurunan, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 115 kejadian dan Kembali turun hingga menjadi 31 kejadian pada tahun 2022. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2022, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Januari dan Juli dengan masing-masing 6 kejadian seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai, Tahun 2017-2022

No	Bulan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Januari	2	0	3	15	2	6	82,67
2	Februari	2	29	20	23	14	2	241,82
3	Maret	3	33	24	25	7	5	175,26
4	April	7	14	8	7	0	5	-11,07
5	Mei	5	0	6	0	1	0	-60,00

No	Bulan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6	Juni	3	7	5	2	5	4	34,95
7	Juli	3	7	9	3	7	6	42,86
8	Agustus	1	23	14	3	3	1	403,13
9	September	15	2	14	1	5	0	144,10
10	Oktober	1	0	0	0	6	2	-33,33
11	November	5	0	3	0	0	0	-40,00
12	Desember	2	0	3	0	0	0	-40,00
Jumlah Kejadian		49	115	109	79	50	31	5,45

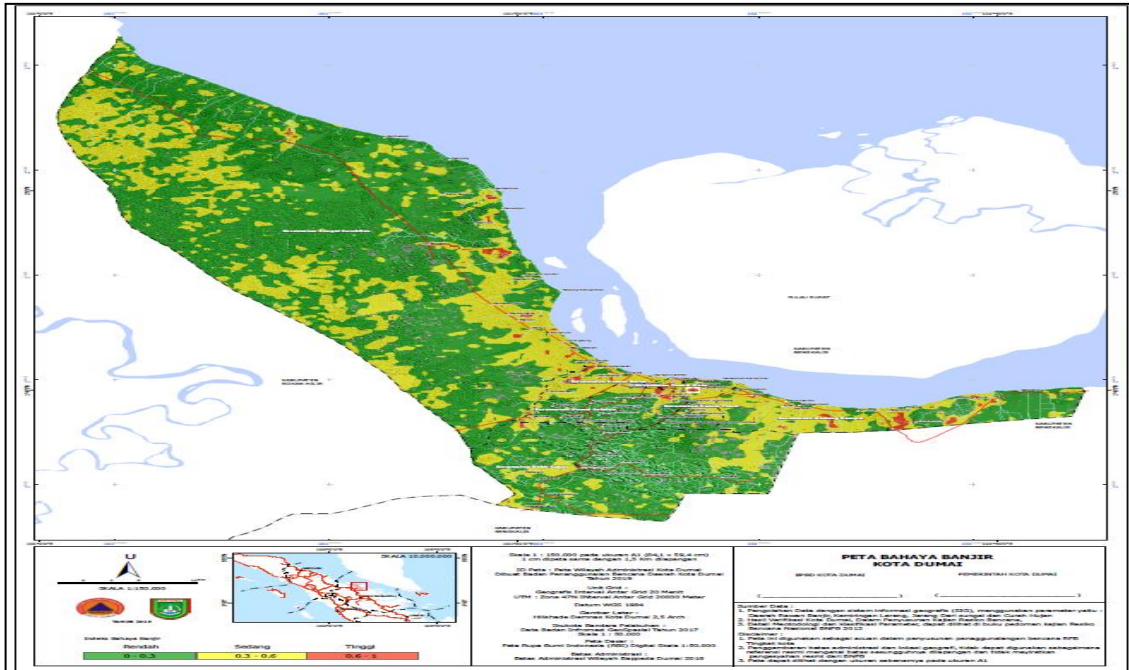
Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 2.2: Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai

2.2.3.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir

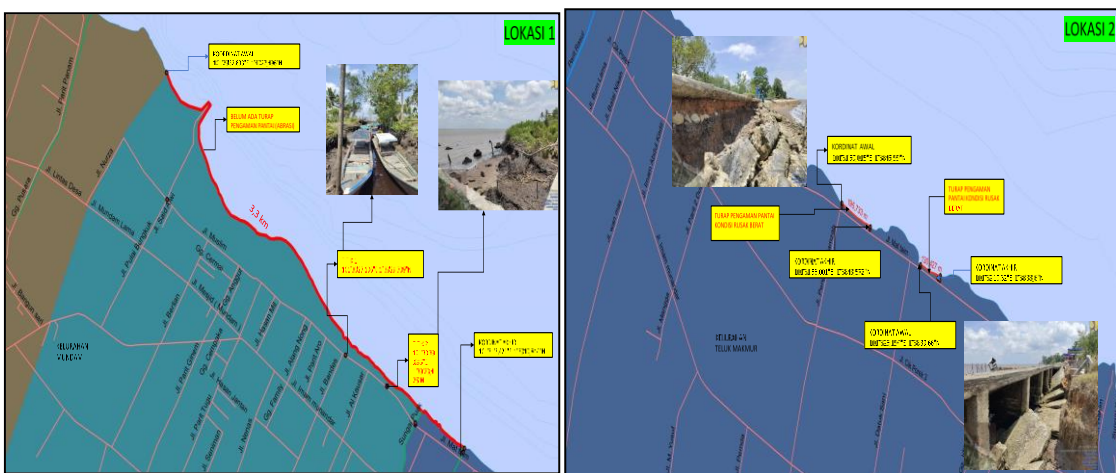
Selain bencana kebakaran hutan dan lahan, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan utama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar 2.3, maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama. Pada tahun 2021 genangan banjir Kota Dumai seluas 863 ha sedangkan tahun 2022 genangan banjir di Kota Dumai seluas 737 Ha.



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

2.2.3.3 Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Wilayah pesisir Kota Dumai memiliki kerawanan bencana abrasi, dimana dari tahun ke tahun, garis pantai di sebagian wilayah Pesisir Kota Dumai memiliki kemunduran yang signifikan. Peta rawan longsor tepi pantai akibat abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Lonsor Kota Dumai

Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau.

2.2.4 Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasi target pasar barang dan jasa.

2.2.4.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami penambahan dari 297.638 Jiwa tahun 2017 menjadi 331.832 jiwa pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2017-2022 sebesar 2,20% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,21% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,19% per tahun selama periode tahun 2017-2022, jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.10
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator Kependudukan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Laki-Laki (Jiwa)	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201	2,19
Perempuan (Jiwa)	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631	2,21
Sex Rasio	105,40	105,41	105,16	105,69	105,49	105,30	(0,02)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	172,31	175,58	178,77	183,28	187,14	191,99	2,19
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,96	1,90	1,82	2,58	2,11	2,59	7,08
Luas Wilayah (Km ²)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.728,38	1.728,38	1.728,38	0,00

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga setelah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Siak selama periode tahun 2017-2022. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

2.2.4.2 Perkembangan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu data sebaran kependudukan yang sangat penting dalam perencanaan untuk mengetahui permintaan barang dan jasa pelayanan seperti kebutuhan lahan untuk perumahan, pertanian, industri dan utilitas lainnya di masa yang akan datang.

Jika dilihat sebaran penduduk menurut Kecamatan, selama periode 2017-2022 pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 9,90% per tahun dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Kota -2,79% per tahun. Sedangkan distribusi penduduk per Kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 21,73% dan distribusi jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai hanya sebesar 5,58% dari jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2022. Perkembangan sebaran jumlah, pertumbuhan dan distribusi penduduk selama periode 2017-2022 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kecamatan	Tahun						Rata-Rata Pertumbuh an/ Tahun (%)	Distribusi Penduduk Tahun 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Bukit Kapur	45.479	46.522	47.565	51.564	53.004	54.734	3,80	16,49
Medang Kampai	11.923	12.140	12.351	16.794	17.592	18.512	9,90	5,58
Sungai Sembilan	32.546	33.231	33.909	41.738	43.382	45.298	7,12	13,65
Dumai Barat	42.364	43.247	44.119	44.292	45.132	46.198	1,75	13,92
Dumai Selatan	53.629	54.592	55.523	52.791	53.406	54.276	0,27	16,36
Dumai Timur	64.127	65.299	66.435	68.930	70.339	72.106	2,38	21,73
Dumai Kota	47.570	48.261	48.910	40.673	40.597	40.708	-2,79	12,27
Kota Dumai	297.63 8	303.29 2	308.81 2	316.78 2	323.45 2	331.83 2	2,20	100,00

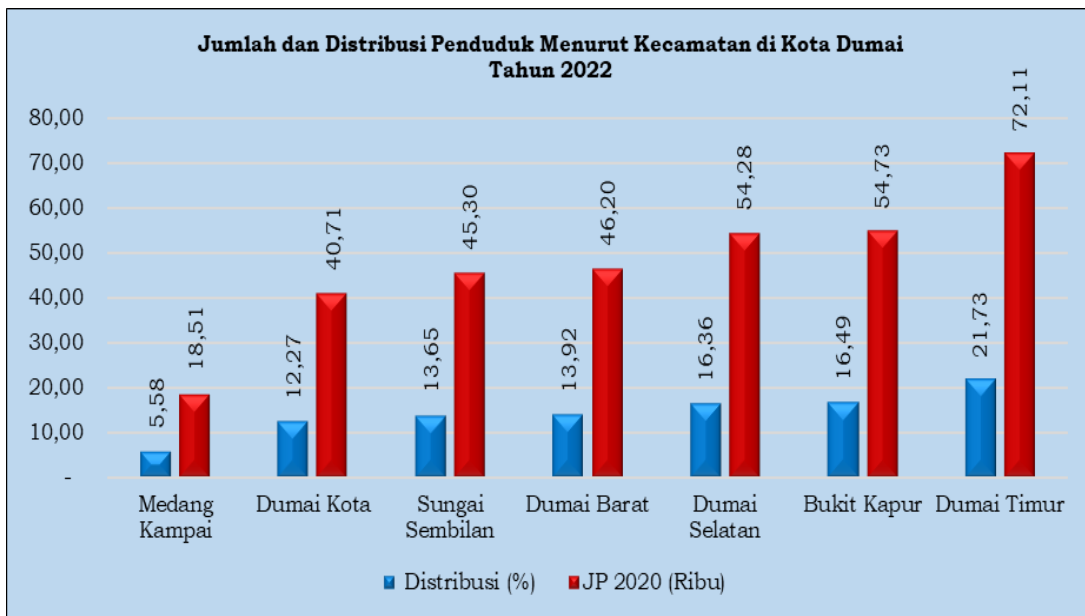
Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas rata-rata Kota Dumai selama tahun 2017-2022 tersebar di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Timur, Dumai Selatan dan Bukit Kapur.

Ada tiga faktor yang menyebabkan persebaran penduduk penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta adanya dukungan

kebijakan pemerintah yang lebih terutama dalam penanganan persoalan social dan ekonomi.

Selain itu kesempatan kerja, penduduk lebih suka tinggal di daerah di mana mereka dapat bekerja, tersedia infrastruktur transportasi, kejahatan tingkat kejahatan yang tinggi membuat masyarakat enggan tinggal di suatu daerah karena mereka tidak merasa aman. Perkembangan sebaran jumlah dan distribusi penduduk selama periode tahun 2022 menurut Kecamatan di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.5: Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2022

2.2.4.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas (km²). Perkembangan kepadatan penduduk Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 menunjukkan terjadinya peningkatan dari 172 jiwa/km² tahun 2017 bertambah menjadi 192 jiwa/km² pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2,20% per tahun.

Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah relatif sama dengan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: Faktor fisik; Faktor iklim; Faktor tanah; Faktor vegetasi; Faktor suplai air; Faktor kebencanaan & penyakit; Faktor komunikasi; Faktor ekonomi; Faktor politis dan Faktor sumber daya alam. Berikut Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai menurut Kecamatan selama periode 2017-2022.

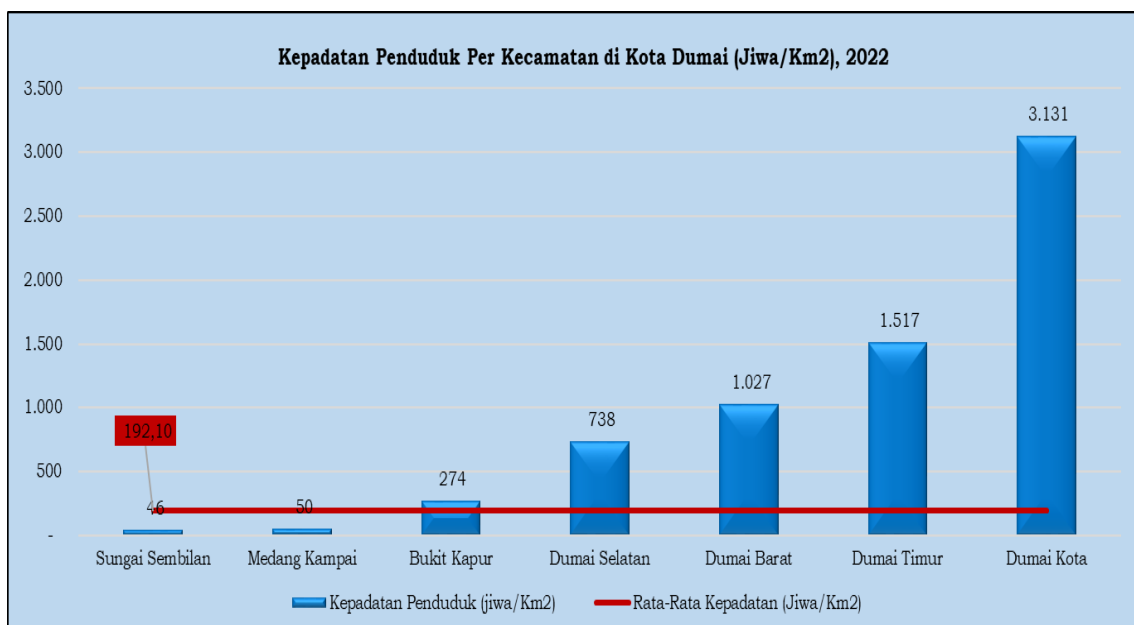
Tabel 2.12
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan
Tahun 2017-2022

Kecamatan	Luas wilayah (Km)	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Dumai, 2017-2022						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)	Ranking Kepadatan 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Dumai Kota	13,00	3.659	3.712	3.762	3.129	3.123	3.131	-2,79	1
Dumai Timur	47,52	1.349	1.374	1.398	1.451	1.480	1.517	2,38	2
Dumai Barat	44,98	942	961	981	985	1.003	1.027	1,75	3
Dumai Selatan	73,50	730	743	755	718	727	738	0,27	4
Bukit Kapur	200,00	227	233	238	258	265	274	3,80	5
Medang Kampai	373,00	32	33	33	45	47	50	9,90	6
Sungai Sembilan	975,38	33	34	35	43	44	46	7,12	7
Kota Dumai	1.727,38	172	176	179	183	187	192	2,20	0

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022, kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 3.131 jiwa/km² hal ini dapat dimaklumi jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi pusat pemukiman, kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai). Hal tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 46 jiwa/km².

Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Kota Dumai menunjukkan bahwa hanya ada dua Kecamatan dimana kepadatannya di bawah rata-rata Kota Dumai sebanyak 192 jiwa/km² yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 46 jiwa/km² dan 50 jiwa/km² sementara lima Kecamatan lainnya dengan kepadatan di atas rata-rata Kota Dumai. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.6: Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja dan tempat tinggal yang ada, tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Sehingga, nantinya ada orang-orang yang tidak bisa mengakses tempat tinggal ataupun lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kepadatan penduduk yang terlalu tinggi terhadap suatu wilayah.

- 1) Munculnya kawasan-kawasan kumuh (*slum*) dengan tempat tinggal informal serta lingkungan hidup yang tidak layak huni
- 2) Tidak cukupnya lapangan pekerjaan sehingga muncul sektor-sektor informal seperti PKL dan buruh ilegal yang tidak terdokumentasikan dengan baik
- 3) Turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat
- 4) Turunnya *image* estetik dari sebuah perkotaan jika ada permukiman kumuh
- 5) Terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah tersebut
- 6) Risiko munculnya penyakit dari lingkungan hidup kawasan kumuh yang tidak bersih
- 7) Munculnya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak mampu mengakses sarana dan prasarana dasar
- 8) Kurangnya sarana dan prasarana dasar untuk menunjang orang-orang yang sangat banyak (kurang lebarnya jalan, kurang banyaknya kereta, kurang baiknya jaringan fiber optik internet, dsb)

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari suatu daerah yang penduduknya terlalu padat cenderung negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah guna untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan *carrying capacity*.

Pada dasarnya, pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi-inovasi baru dapat meningkatkan kemampuan suatu wilayah untuk menampung penduduk dan aktivitas manusia. Teknologi baru seperti transportasi yang lebih efisien, perumahan vertikal, pengelolaan sampah berteknologi tinggi, dan kemajuan pada penyediaan sarana prasarana dasar dapat meningkatkan *Carrying Capacity* dari suatu wilayah.

2.2.4.4 Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

Sex ratio dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Kota Dumai selama tahun 2017-2022 mengalami penurunan sebesar 0,52% per tahun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 150.761 jiwa dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 146.877 jiwa dengan sex ratio sebesar 102,64. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan sex rasio, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 170.201 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 161.631 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,30. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 105 jiwa penduduk laki-laki.

Penurunan sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya. Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai, 2015-2020.

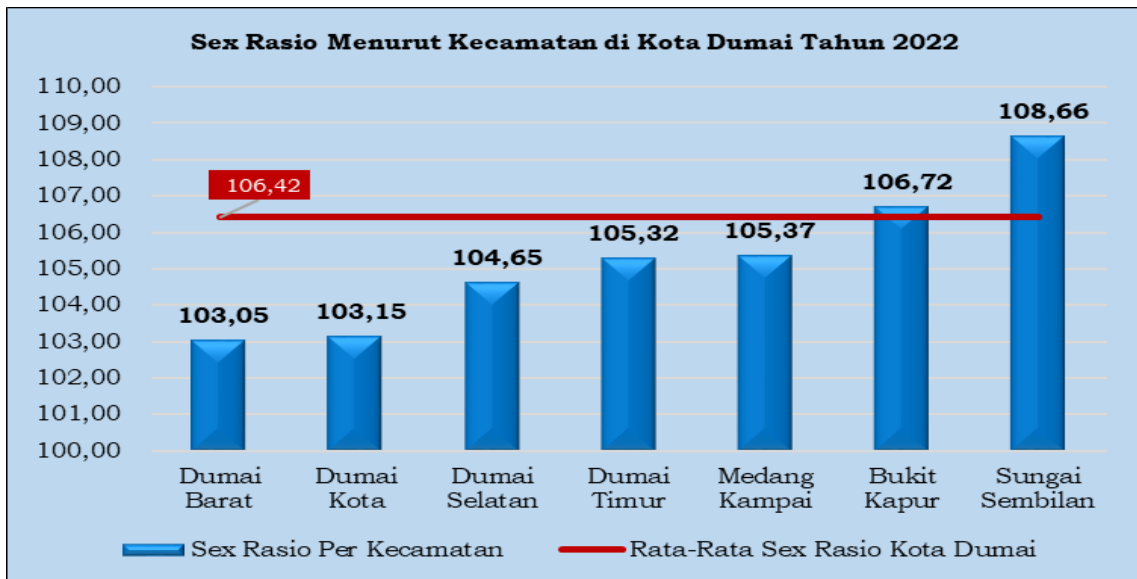
Jika dilihat perkembangan sex rasio per Kecamatan maka terdapat Kecamatan yang memiliki penurunan sex rasio tertinggi yaitu Kecamatan Medang Kampai dengan pertumbuhan sebesar -0,49% per tahun selama tahun 2017-2022 atau turun dari 108,12 tahun 2017 menjadi 105,37 tahun 2022.

Tabel 2.13
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Perkembangan Sex Rasio Penduduk						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bukit Kapur	105,29	108,15	107,88	107,33	107,02	106,72	0,28
2	Medang Kampai	108,12	111,09	110,84	106,64	106,00	105,37	-0,49
3	Sungai Sembilan	105,78	108,66	108,39	109,05	108,85	108,66	0,55
4	Dumai Barat	100,82	103,51	103,26	103,48	103,26	103,05	0,44
5	Dumai Selatan	102,01	104,75	104,49	105,03	104,84	104,65	0,52
6	Dumai Timur	102,38	105,14	104,88	105,66	105,49	105,32	0,57
7	Dumai Kota	99,46	102,10	101,86	103,19	102,99	103,15	0,74
	Kota Dumai	102,64	105,40	105,16	105,69	105,47	105,30	0,52

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022 sex rasio terendah terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 103,05 dan tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 108,66. Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa terdapat 4 Kecamatan dengan sex rasio di atas rata-rata dan 3 Kecamatan di bawah rata-rata Kota Dumai. Sex rasio penduduk menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2022 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2.7: Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022

Perkembangan data mengenai rasio jenis kelamin atau sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan keterlibatan perempuan dalam bidang kewirausahaan.

2.2.4.5 Struktur Usia Penduduk

Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berumur antara 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 13.745 atau 4,14%. Sedangkan

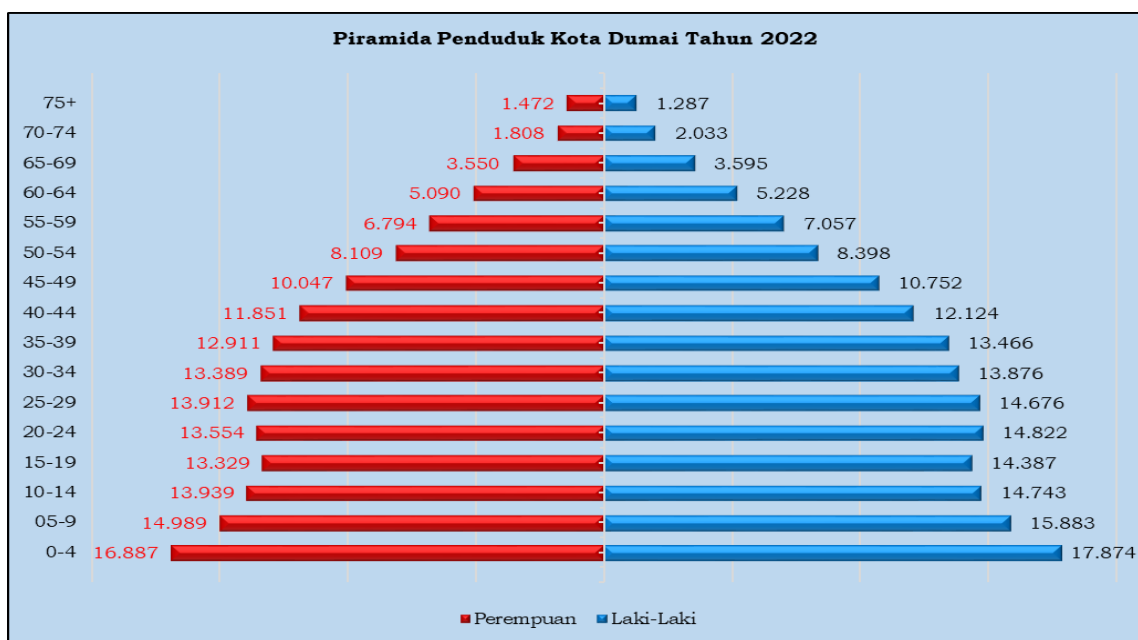
Bila umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) pada tahun 2022. Maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 67,44% atau sebanyak 223.772 jiwa dan sebesar 32,56% atau sebanyak 108.060 jiwa tidak produktif. Kelompok umur tidak produktif (belum produktif) yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 94.315 jiwa atau 28,42% dan kelompok umur tidak produktif 65-75+ sebanyak 13.745 jiwa atau sebesar 4,14%.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan

pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada kelompok umur tidak produktif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.8: Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2022

2.2.4.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 dan 64 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Selama periode 2017-2022, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,46% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 11,38% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -0,78% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas

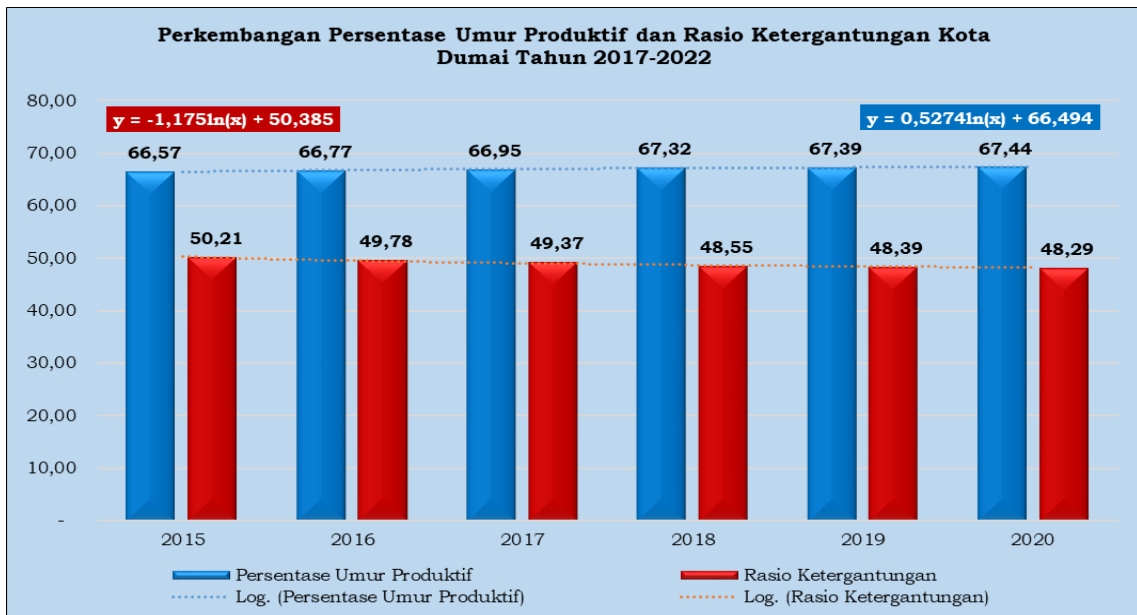
yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2017-2022 sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	0-4	33.996	34.063	34.085	33.966	34.249	34.761	0,45
2	5-9	30.038	30.552	31.037	30.224	30.502	30.872	0,56
3	10-14	27.137	27.326	27.494	27.870	28.178	28.682	1,11
4	15-19	25.542	25.875	26.231	27.314	27.436	27.716	1,66
5	20-24	24.750	24.616	24.554	27.734	28.022	28.376	2,89
6	25-29	27.103	27.437	27.614	27.552	27.987	28.588	1,08
7	30-34	25.431	25.765	26.157	26.371	26.768	27.265	1,40
8	35-39	23.488	23.737	24.017	25.283	25.744	26.377	2,36
9	40-44	21.087	21.701	22.183	22.967	23.438	23.975	2,60
10	45-49	18.287	19.047	19.786	19.389	20.052	20.799	2,63
11	50-54	14.346	15.056	15.779	15.108	15.754	16.507	2,91
12	55-59	10.896	11.495	12.108	12.515	13.161	13.851	4,92
13	60-64	7.218	7.767	8.315	9.020	9.619	10.318	7,41
14	65-69	4.470	4.758	5.078	6.162	6.658	7.145	9,98
15	70-74	2.051	2.183	2.330	2.827	3.287	3.841	13,53
16	75+	1.799	1.915	2.044	2.480	2.597	2.759	9,10
Umur Produktif		198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772	2,46
Umur Belum Produktif		91.171	91.941	92.616	92.060	92.929	94.315	0,68
Umur Tidak Produktif		8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	13.745	10,69
Persentase Umur Produktif		66,57	66,77	66,95	67,32	67,39	67,44	0,26
Rasio Ketergantungan		50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29	-0,78
Jumlah Penduduk		297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,07

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Tingginya *dependency ratio* tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok umur produktif. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengimbangnya tingginya *dependency ratio* adalah dengan kenaikan UMR/UMK. UMK Kota Dumai tahun 2022 Rp 3.414.160,86 atau mengalami kenaikan sekitar 0,90 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 3.383.834,29. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 30.326,86. Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2017-2022.



Gambar 2.9: Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2017-2022.

Dampak dari tingginya rasio ketergantungan antara penduduk antara lain:

- 1) Penerimaan pajak yang lebih rendah. Pensiunan membayar pajak penghasilan lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membayar pajak; belanja pemerintah lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk membayar pensiun negara dan manfaat terkait seperti jaminan pendapatan minimum. Ada juga tuntutan yang lebih besar untuk pengeluaran tidak langsung untuk pensiunan. Orang di atas 65 tahun lebih mungkin memerlukan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ada tuntutan yang lebih besar ditempatkan pada pengeluaran pemerintah oleh kenaikan rasio ketergantungan;
- 2) Potensi kenaikan pajak yang lebih tinggi. Tekanan pada keuangan pemerintah dapat menyebabkan tarif pajak yang lebih tinggi pada penduduk pekerja atau produktif, yang dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja dan mengurangi pendapatan. Pemerintah mungkin terpaksa menggunakan lebih banyak pendapatan dari pajak tidak langsung atau pajak kekayaan.
- 3) Dana pensiun yang lebih rendah. Pertambahan pensiunan juga meningkatnya kebutuhan dana pensiun. Juga dapat menyebabkan krisis kredit dan suku bunga rendah. Tekanan untuk menaikkan usia pensiun. Karena kenaikan biaya pensiun, ada tekanan untuk menaikkan usia pensiun baik di sektor swasta maupun sektor publik.
- 4) Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perkembangan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut mengikut perkembangan harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDRB yang dihasilkan dalam suatu wilayah terdiri dari PDRB ADHB dan ADHK terhadap 17 lapangan usaha.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat baik yang disebabkan oleh penambahan jumlah produksi dan kenaikan harga barang dan jasa, struktur perekonomian sektoral dan struktur perekonomian regional yaitu mengetahui kontribusi Kota Dumai terhadap perekonomian wilayah.

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas pada tahun 2010 adalah Rp. 17,49 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 45,05 triliun tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,26% per tahun. Peningkatan nilai PDRB ADHB ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat berupa terjadinya peningkatan jumlah produksi dan harga barang/jasa di Kota Dumai.

Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 27,84 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 9,76% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,750 milyar tahun 2022.

Selanjutnya jika diamati perkembangan pertumbuhan secara relative, maka sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010-2022 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 30,33% per tahun dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp. 9,08 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 140,55 milyar tahun 2022. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalan yaitu hanya tumbuh sebesar 4,31% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHB Rp. 85,13 milyar pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp. 139,35 milyar tahun 2022.

Tabel 2.15
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2022

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110,86	1.195,52	1.247,51	1.290,66	1.437,57	1.551,17	1.687,64	1.806,63	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76	6,86
B	Pertambangan dan Penggalian	85,13	87,98	90,72	93,22	108,90	120,47	121,86	116,79	120,04	128,17	129,55	132,99	139,35	4,31
C	Industri Pengolahan	9.227,34	9.468,33	9.345,37	10.909,92	12.499,50	13.544,27	15.088,11	6.611,66	18.660,48	20.867,98	21.772,85	24.294,17	27.843,51	9,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,08	8,60	7,67	7,56	11,69	18,03	24,52	27,10	28,10	31,77	73,72	92,98	140,55	30,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	3,37	3,52	3,45	3,65	4,04	4,29	4,74	4,88	5,33	5,60	6,04	6,60	6,09
F	Konstruksi	2.064,27	2.230,76	2.337,09	2.556,62	2.562,18	2.869,88	3.214,66	3.533,02	3.786,76	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4.510,78	6,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392,88	3.681,73	3.861,65	4.014,81	4.589,15	4.691,52	5.000,29	5.250,80	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00	5,50
H	Transportasi dan Pergudangan	429,14	477,52	551,24	615,01	727,11	807,76	862,15	918,54	973,79	1.055,62	726,59	757,62	889,95	7,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,04	113,14	126,32	162,08	200,38	235,07	260,52	280,82	303,73	319,40	260,31	314,99	335,60	11,34
J	Informasi dan Komunikasi	127,00	145,29	173,01	198,54	234,99	270,71	294,25	333,68	380,26	418,39	457,24	478,07	500,69	12,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322,90	308,61	462,45	578,40	366,13	355,03	367,27	375,46	390,06	397,13	409,20	449,22	517,34	5,84
L	Real Estate	78,11	87,93	92,72	100,01	113,12	127,22	134,71	143,28	153,05	161,76	164,08	168,40	182,03	7,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,71	0,81	0,97	1,07	1,22	1,42	1,55	1,66	1,84	2,06	1,63	1,65	1,75	8,33

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389,03	407,17	453,57	474,55	494,47	524,62	541,62	553,24	568,68	587,76	590,24	605,35	667,05	4,64
P	Jasa Pendidikan	67,85	84,45	89,70	96,84	122,92	142,98	149,35	155,05	161,94	177,13	185,34	192,27	199,18	9,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,59	25,74	29,85	33,35	37,78	46,88	49,79	53,47	56,82	65,84	77,38	86,28	93,68	12,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	65,25	79,47	83,01	95,67	117,70	142,50	159,68	176,90	196,64	220,03	181,04	193,57	225,57	11,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		17.495,45	18.406,42	18.956,36	21.231,77	23.628,47	25.453,57	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.056,39	8,26

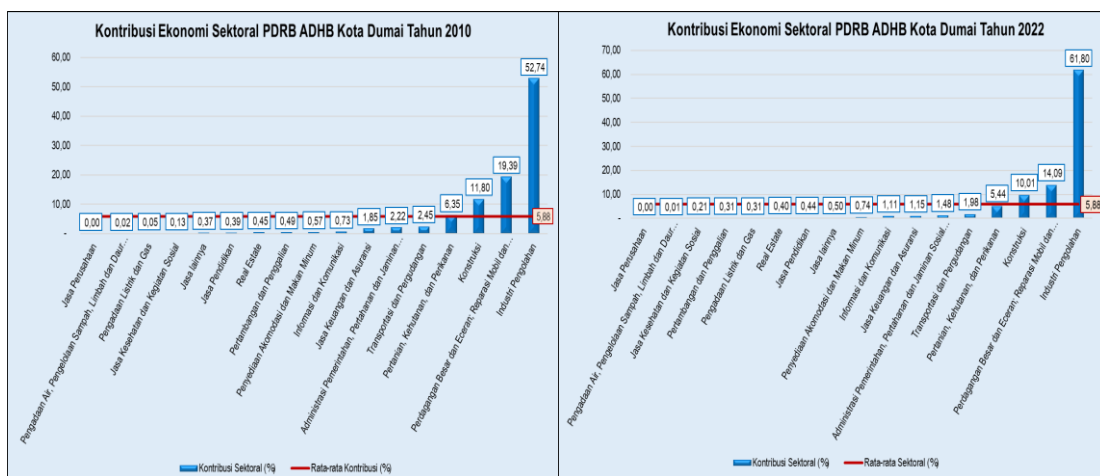
Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Selanjutnya perkembangan kontribusi sektoral PDRB ADHB terhadap perkembangan perubahan struktur perekonomian Kota Dumai Tahun 2010-2022 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah.

Tabel tersebut menunjukkan terdapat sembilan sektor ekonomi pada PDRB ADHB yang mengalami penurunan kontribusi selama tahun 2010-2022. Sektor dengan penurunan kontribusi tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar -3,58% per tahun dan terendah adalah sektor real estate menurun sebesar -0,76% per tahun atau turun dari 0,45% pada tahun 2010 menjadi 0,40% pada tahun 2022.

Sebaliknya sektor yang mengalami peningkatan kontribusi sebanyak delapan sektor. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 20,89% per tahun dan sektor dengan peningkatan pertumbuhan terendah adalah jasa perusahaan sebesar 0,05% per tahun.

Selanjutnya jika diamati dari aspek perubahan struktur ekonomi dari tahun 2010 ke 2022 menunjukkan terjadinya perubahan struktur ekonomi pada enam sektor antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pengadaan Listrik dan Gas; Pertambangan dan Penggalian; Real Estate; Jasa Pendidikan dan Jasa lainnya. Sektor dengan perubahan struktur yang paling tinggi adalah pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2010 berada di urutan ke 10 dengan kontribusi sebesar 0,49% kemudian mengalami penurunan ke urutan ke 14 dengan kontribusi sebesar 0,31% pada tahun 2022. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.10: Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai, 2010 dan 2022

Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2022

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Kontribusi 2010-2022 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,09	6,04	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	-1,19
B	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,48	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	-3,58
C	Industri Pengolahan	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,21	53,96	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	1,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0,31	20,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	-1,91
F	Konstruksi	11,80	12,12	12,33	12,04	10,84	11,27	11,50	11,64	11,45	11,20	10,85	10,00	10,01	-1,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,43	17,88	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	-2,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,59	2,91	2,90	3,08	3,17	3,08	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	-1,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,61	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0,74	2,73
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	1,11	3,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,68	2,44	2,72	1,55	1,39	1,31	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1,15	-1,98
L	Real Estate	0,45	0,48	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,40	-0,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0057	0,0045	0,0041	0,0039	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,21	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	1,82	1,72	1,63	1,63	1,52	1,48	-3,25
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,46	0,47	0,46	0,52	0,56	0,53	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	1,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	3,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,43	0,44	0,45	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0,50	2,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas selama tahun 2010-2022 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 3,93% per tahun atau naik dari Rp. 17,49 triliun pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp. 27,73 triliun tahun 2022. Peningkatan nilai PDRB ADHK ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan jumlah produksi barang/jasa di Kota Dumai. Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 17,24 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,36% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,080 milyar tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,93% per tahun.

Selanjutnya secara relatif sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010-2022 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 23,89% per tahun dengan nilai PDRB ADHK meningkat dari Rp. 9,08 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 82,60 milyar tahun 2022. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dan bahkan mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalian yaitu tumbuh sebesar -0,53% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHK pada tahun 2010 yaitu Rp. 85,13 milyar kemudian turun menjadi Rp. 79,58 milyar tahun 2022. Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah produksi barang dan jasa pada sektor tersebut, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah aktifitas ekonomi termasuk investasi. Pengurangan investasi akibat terjadinya penurunan harga komoditas migas selama periode tahun 2010-2022. Harga migas khususnya harga minyak bumi dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke 2022 sebesar -3,55% atau turun dari 79,48 USD per barrel pada tahun 2010 menjadi 76,66 USD per barrel pada tahun 2022. Perkembangan nilai dan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2022

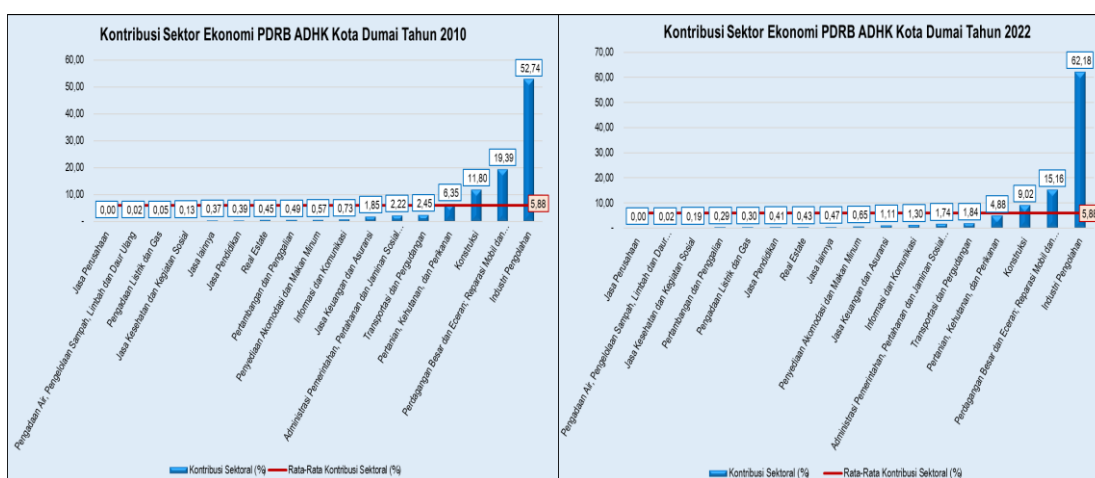
Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110,86	1.132,32	1.131,62	1.119,97	1.138,07	1.139,16	1.152,20	1.190,35	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31	1,67
B	Pertambangan dan Penggalian	85,13	85,55	86,42	86,48	87,26	87,42	83,89	79,73	76,74	78,51	77,47	77,97	79,58	-0,53
C	Industri Pengolahan	9.227,34	9.771,77	10.035,48	10.414,55	11.059,23	11.382,36	12.032,42	12.654,79	13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,04	17.241,07	5,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,08	9,86	10,52	11,61	13,20	14,48	17,11	17,29	17,84	19,14	45,61	57,81	82,60	23,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	3,31	3,34	3,36	3,43	3,52	3,52	3,68	3,72	3,95	4,11	4,43	4,79	3,27
F	Konstruksi	2.064,27	2.041,23	2.117,41	2.181,41	2.081,31	2.119,78	2.184,09	2.300,70	2.360,06	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2.502,10	1,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392,88	3.543,89	3.652,94	3.735,62	3.771,27	3.776,04	3.857,61	3.967,11	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23	1,89
H	Transportasi dan Pergudangan	429,14	453,61	503,24	537,46	590,80	602,75	620,94	650,89	675,94	712,13	465,48	467,44	510,17	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,04	107,99	123,32	134,38	146,74	150,19	154,07	163,77	174,35	180,83	145,58	173,38	181,31	5,58
J	Informasi dan Komunikasi	127,00	144,67	170,55	206,13	229,29	245,70	255,85	271,85	287,48	308,20	336,68	350,59	360,50	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322,90	292,16	397,96	471,33	285,15	265,54	266,88	264,91	270,44	270,75	280,07	292,58	307,31	1,14

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
L	Real Estate	78,11	81,75	83,06	86,99	90,25	94,77	96,11	99,41	103,20	108,66	110,43	113,30	119,37	3,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,71	0,77	0,83	0,88	0,96	1,03	1,07	1,14	1,25	1,34	1,05	1,06	1,08	3,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389,03	402,02	412,48	419,72	421,47	429,99	430,68	431,15	432,38	442,43	432,88	442,18	482,18	1,84
P	Jasa Pendidikan	67,85	74,95	78,21	82,52	89,92	94,63	95,15	97,72	101,57	107,28	108,79	111,57	114,00	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,59	24,43	26,53	28,65	29,38	32,31	32,59	34,38	36,29	40,22	46,10	50,86	53,09	7,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	65,25	71,96	75,95	84,60	94,63	102,02	107,39	115,97	125,95	137,02	109,57	115,97	131,19	6,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		17.495,47	18.242,26	18.909,85	9.605,67	20.132,38	0.541,69	21.391,57	22.344,84	23.538,47	24.856,89	24.597,99	26.068,27	27.725,88	3,93

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Jika diamati dari aspek perkembangan kontribusi sektoral dari selama tahun 2010-2022 menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dimana terdapat sepuluh sektor yang mengalami penurunan kontribusi antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sebaliknya terdapat tujuh sektor yang mengalami peningkatan kontribusi dan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan dimana pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 52,74% dan meningkat menjadi 62,18% pada tahun 2022. Kondisi ini wajar karena Kota Dumai merupakan salah wilayah yang terdapat di Provinsi Riau dengan jumlah kawasan industri terbanyak terutama yang berskala besar dengan perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang pengolahan migas dan non migas seperti industri pengolahan turunan CPO dan sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu hub port terhadap ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau dan bahkan terbesar di Sumatera. Jelasnya lihat Gambar dibawah berikut.



Gambar 2.11: Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai, 2010 dan 2022

Tabel 2.18
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2022

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Kontribusi 2010-2022 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,21	5,98	5,71	5,65	5,55	5,39	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	4,88	-2,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,47	0,46	0,44	0,43	0,43	0,39	0,36	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	-4,26
C	Industri Pengolahan	52,74	53,57	53,07	53,12	54,93	55,41	56,25	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	62,18	1,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,19	0,22	0,30	19,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,62
F	Konstruksi	11,80	11,19	11,20	11,13	10,34	10,32	10,21	10,30	10,03	9,89	9,69	9,15	9,02	-2,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	19,43	19,32	19,05	18,73	18,38	18,03	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	15,16	-1,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,49	2,66	2,74	2,93	2,93	2,90	2,91	2,87	2,86	1,89	1,79	1,84	-1,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,65	0,69	0,73	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,59	0,67	0,65	1,51
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,90	1,05	1,14	1,20	1,20	1,22	1,22	1,24	1,37	1,34	1,30	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,60	2,10	2,40	1,42	1,29	1,25	1,19	1,15	1,09	1,14	1,12	1,11	-2,69
L	Real Estate	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,43	0,43	-0,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0054	0,00	0,00	0,00	-0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,20	2,18	2,14	2,09	2,09	2,01	1,93	1,84	1,78	1,76	1,70	1,74	-2,01
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,41	0,41	0,42	0,45	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,41	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,19	0,20	0,19	3,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,50	0,50	0,52	0,54	0,55	0,45	0,44	0,47	2,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

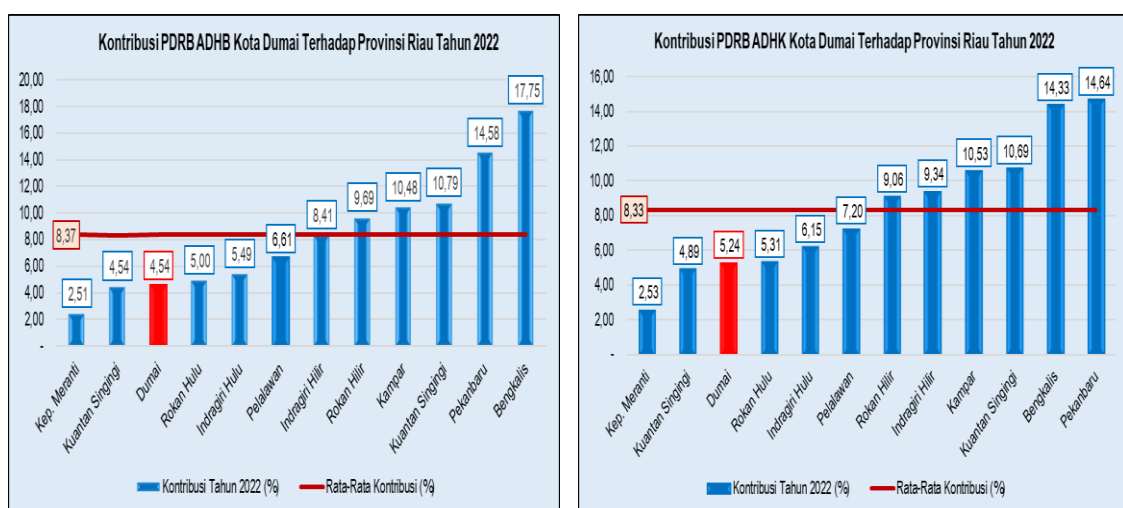
Sementara itu jika dilihat perkembangan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai terhadap perekonomian Provinsi Riau selama tahun 2010-2022 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,35% per tahun atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,19% per tahun menurut PDRB ADHB. Selanjutnya menurut PDRB ADHK terjadi peningkatan sebesar 1,18% per tahun dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 4,74% per tahun. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2022

No	Perkembangan Kontribusi	Tahun													Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	4,50	3,79	3,39	3,49	3,48	3,90	4,10	4,31	4,40	4,75	4,99	4,76	4,54	4,19
2	Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	4,50	4,45	4,44	4,49	4,49	4,58	4,66	4,74	4,88	5,02	5,02	5,15	5,24	4,74
3	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	0,00	-15,82	-10,44	2,97	-0,49	12,12	5,19	4,97	2,12	8,14	4,97	-4,60	-4,56	0,35
4	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	0,00	-1,23	-0,09	1,17	-0,02	1,80	1,92	1,75	2,92	2,72	0,09	2,53	1,73	1,18

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang perkembangan posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan kabupaten kota terhadap Provinsi Riau tahun 2022. Kontribusi PDRB ADHB Kota Dumai berada di posisi ke tiga terendah dengan kontribusi sebesar 4,54% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,37%. Sedangkan pada PDRB ADHK di urutan ke tiga terendah hanya berkontribusi sebesar 5,24% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,33%. Lihat Gambar dibawah ini.



Gambar 2.12: Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2022.

Rendahnya posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan sembilan kabupaten kota lainnya pada tahun 2022, tidak terlepas dari jumlah penduduk yang sedikit atau hanya 5,01% dari jumlah

penduduk Provinsi Riau, wilayah produksi menghasilkan barang dan jasa hanya seluas 2,42% dari luas wilayah Provinsi Riau, walaupun memiliki produktivitas pekerja pada 17 lapangan usaha sangat tinggi berada pada posisi ketiga untuk PDRB ADHB sebesar Rp. 281,49 juta per pekerja dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 270,58 juta per pekerja dan posisi keempat pada PDRB ADHK sebesar Rp. 190,61 per pekerja dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar Rp. 183,10 juta per pekerja.

Melihat kondisi ini maka untuk meningkatkan kontribusi Kota Dumai pada perekonomian Provinsi Riau adalah dengan peningkatan investasi pada sektor ekonomi terutama sektor industri pengolahan dan sektor jasa perdagangan yang memiliki nilai tambah tinggi atau dengan kata lain industri berbasis teknologi inovasi dan kreasi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi.

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, produktivitas wilayah dan struktur ekonomi wilayah baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral.

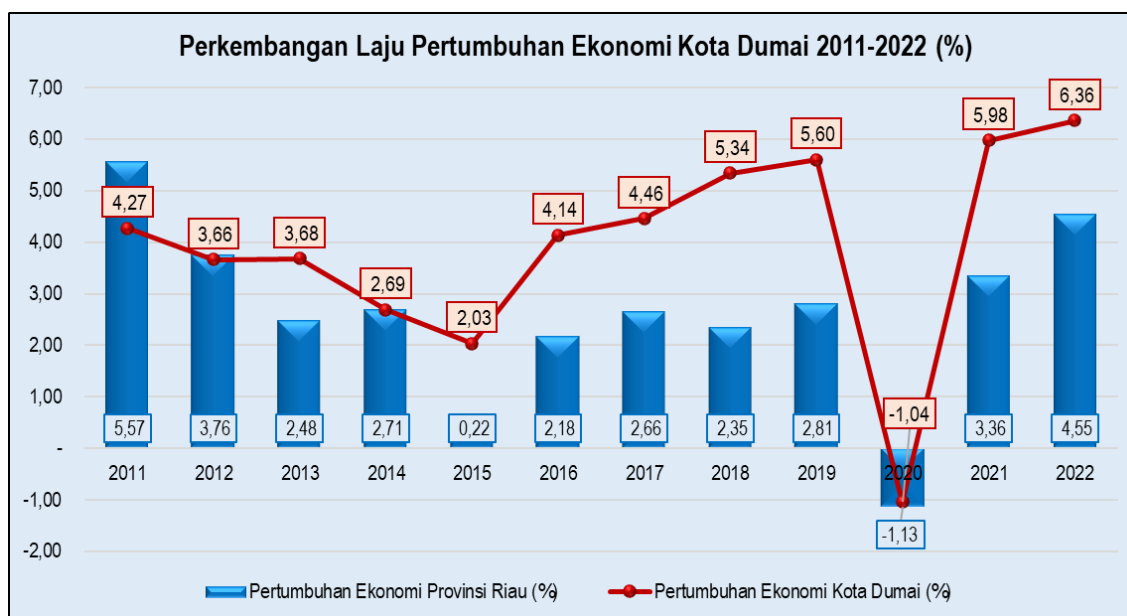
Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Mengetahui kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
2. Menyusun tipologi perkembangan wilayah (tipologi klassen);
3. Dasar penyusunan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. Mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. Ddasar untuk perumusan kebutuhan investasi;
6. Dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2011-2022 sebagaimana pada Gambar 2.14 menunjukkan sangat fluktuatif, dimana periode 2011-2015 mengalami trend penurunan, kemudian tahun 2015-2019 trend peningkatan dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,04%, namun demikian masih di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan

konstruksi sebesar -1,13%. Selanjutnya pada tahun 2020-2022 kembali mengalami trend peningkatan.



Gambar 2.13: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2022

Jika diamati selama periode 2011-2022, hanya pada tahun 2011, 2012 dan 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Selama periode 2011-2022, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 23,89% per tahun, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 9,22% per tahun. Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terendah dan bahkan cenderung tumbuh negative adalah Pertambangan dan Pengalihan.

Selanjutnya khusus pada tahun 2020, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,04% disebabkan oleh delapan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negative. Kedelapan sektor adalah sektor Pertambangan dan Pengalihan tumbuh -1,32%; Konstruksi tumbuh -3,02%; Transportasi dan Pergudangan tumbuh -34,64%; Jasa perusahaan tumbuh -21,64%; Jasa lainnya tumbuh -20,03%; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tumbuh -19,49%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -10,30%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh -2,16%. Negativanya pertumbuhan delapan sektor tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.

Tabel 2.20
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2022

Kategori	Sektoral	Tahun													Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	1,93	-0,06	-1,03	1,62	0,10	1,14	3,31	2,77	2,01	4,15	3,97	0,14	1,67
B	Pertambangan dan Penggalian	100,00	0,49	1,01	0,07	0,90	0,18	-4,04	-4,96	-3,75	2,31	-1,32	0,65	2,06	-0,53
C	Industri Pengolahan	100,00	5,90	2,70	3,78	6,19	2,92	5,71	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72	5,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	8,59	6,71	10,37	13,65	9,72	18,16	1,05	3,18	7,29	138,30	26,75	42,88	23,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,00	1,22	0,96	0,64	1,95	2,65	0,00	4,55	1,09	6,18	4,05	7,79	8,13	3,27
F	Konstruksi	100,00	-1,12	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91	1,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	4,45	3,08	2,26	0,95	0,13	2,16	2,84	1,91	2,87	-10,30	9,02	3,33	1,89
H	Transportasi dan Pergudangan	100,00	5,70	10,94	6,80	9,92	2,02	3,02	4,82	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	9,04	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58	6,30	6,46	3,72	-19,49	19,10	4,57	5,58
J	Informasi dan Komunikasi	100,00	13,91	17,89	20,87	11,24	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	-9,52	36,21	18,44	-39,50	-6,88	0,50	-0,74	2,09	0,11	3,44	4,47	5,03	1,14
L	Real Estate	100,00	4,66	1,60	4,73	3,75	5,01	1,41	3,43	3,81	5,29	1,63	2,60	5,36	3,61
M,N	Jasa Perusahaan	100,00	8,45	8,01	6,23	8,50	7,45	3,88	6,54	9,65	7,20	-21,64	0,95	1,89	3,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	100,00	3,34	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16	0,11	0,29	2,32	-2,16	2,15	9,05	1,84
P	Jasa Pendidikan	100,00	10,46	4,35	5,51	8,96	5,24	0,55	2,70	3,94	5,62	1,41	2,56	2,18	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,00	3,56	8,60	7,99	2,56	9,96	0,87	5,49	5,56	10,83	14,62	10,33	4,38	7,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	100,00	10,28	5,54	11,39	11,86	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12	6,37
Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas		100,00	4,27	3,66	3,68	2,69	2,03	4,14	4,46	5,34	5,60	-1,04	5,98	6,36	3,93

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

2.3.1.3 Perkembangan PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita harga berlaku dan harga konstan Kota Dumai Tahun 2010-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.21, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 69,10 Juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 135,78 juta per kapita pada tahun 2022 atau naik dengan pertumbuhan 5,86% per tahun. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 69,10 juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 83,55 juta per kapita pada tahun 2022 atau dengan pertumbuhan 1,62% per tahun.

Berdasarkan Tabel dibawah dapat dilihat bahwa percepatan peningkatan pendapatan per kapita PDRB Harga Berlaku masyarakat Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut tergambar dari rata-rata per kapita provinsi pada tahun 2010 sebesar Rp. 69,70 juta pada PDRB Harga Berlaku

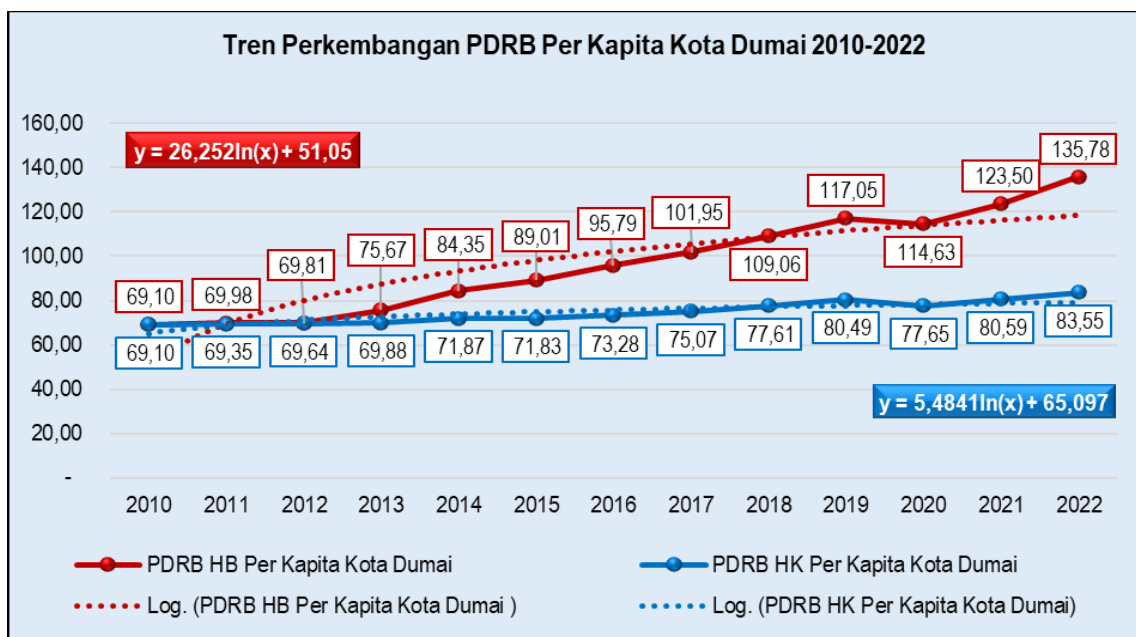
atau lebih tinggi dari per kapita PDRB Harga Berlaku Kota Dumai hanya Rp. 69,10 juta atau PDRB harga berlaku Provinsi Riau lebih tinggi sebesar 0,86%. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Kota Dumai menurut PDRB harga berlaku sebesar Rp. 135,78 juta lebih rendah sebesar 10,41% dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Riau sebesar Rp. 149,91 juta. Kondisi menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat, walaupun jumlah penduduk Kota Dumai bertambah dari 253.178 jiwa pada tahun 2010 menjadi 331.832 jiwa pada tahun 2022 atau sebanyak 31,07% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,28% per tahun.

Tabel 2.21
Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2010-2022

No	PDRB Per Kapita	Tahun												Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	69,10	69,98	69,81	75,67	84,35	89,01	95,79	101,95	109,06	117,05	114,63	123,50	135,78	5,86
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	69,70	84,81	95,00	100,69	109,78	102,89	104,86	105,84	110,38	109,05	113,79	129,21	149,91	6,86
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	69,10	69,35	69,64	69,88	71,87	71,83	73,28	75,07	77,61	80,49	77,65	80,59	83,55	1,62
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	69,70	71,64	72,40	72,30	72,39	70,77	70,57	70,74	70,74	71,09	76,63	78,00	80,06	1,19

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Trend Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kota Dumai tahun 2010-2022 menurut PDRB harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.14: Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai 2010-2022

Selanjutnya data Perkembangan PDRB per kapita juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat Perkembangan perekonomian wilayah dengan pendekatan Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kota dengan

pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya Provinsi dan membandingkan PDRB perkapita wilayah Kabupaten Kota dengan PDRB perkapita wilayah Provinsi. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan Tabel berikut, dihasilkan pengklasifikasian perkembangan perekonomian wilayah Kota Dumai berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dengan membandingkan antara perkembangan ekonomi wilayah dengan Provinsi Riau tahun 2010-2022.

Hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai pada tahun 2011, 2012 dan 2014 masuk dalam kategori **wilayah relative tertinggal**, sedangkan pada tahun 2013 masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat**, selanjutnya sejak tahun 2015-2022 Kota Dumai mengalami perkembangan perekonomian wilayah yang sangat pesat sehingga masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat maju dan cepat tumbuh**. Hal ini terjadi karena Kota Dumai memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2011-2022, jelasnya sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai
Tahun 2011-2022

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB HK (r)	PDRB Perkapita (Y)	
		Yi > Y	Yi < Y
1	ri > r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
2	ri < r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Tahun	Indikator				Kategori
	ri: Laju Pertumbuhan PDRB HK Kota Dumai	r: Laju Pertumbuhan PDRB HK Provinsi Riau	Yi: PDRB ADHK per kapita Kota Dumai	Y: PDRB ADHK per kapita Provinsi Riau	
2011	4,27	5,57	69,35	71,64	Wilayah relatif tertinggal
2012	3,66	3,76	69,64	72,40	Wilayah relatif tertinggal
2013	3,68	2,48	69,88	72,30	Wilayah Berkembang Cepat
2014	2,69	2,71	71,87	72,39	Wilayah relatif tertinggal
2015	2,03	0,22	71,83	70,77	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2016	4,14	2,18	73,28	70,57	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2017	4,46	2,66	75,07	70,74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2018	5,34	2,35	77,61	70,74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2019	5,60	2,81	80,49	71,09	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2020	-1,04	-1,13	77,65	76,63	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2021	5,98	3,36	80,59	78,00	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2022	6,36	4,55	83,55	80,06	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai dan Provinsi Riau 2011-2022

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai.

2.3.1.4 Pertumbuhan Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2017-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 sebesar 4,85% kemudian menurun di tahun 2018-2019, lalu pada tahun 2020 meningkat kemudian kembali turun pada tahun 2021. Namun di tahun 2022 inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai kembali meningkat lagi sebesar 6,32%. Berikut Tabel dibawah menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2017-2022.

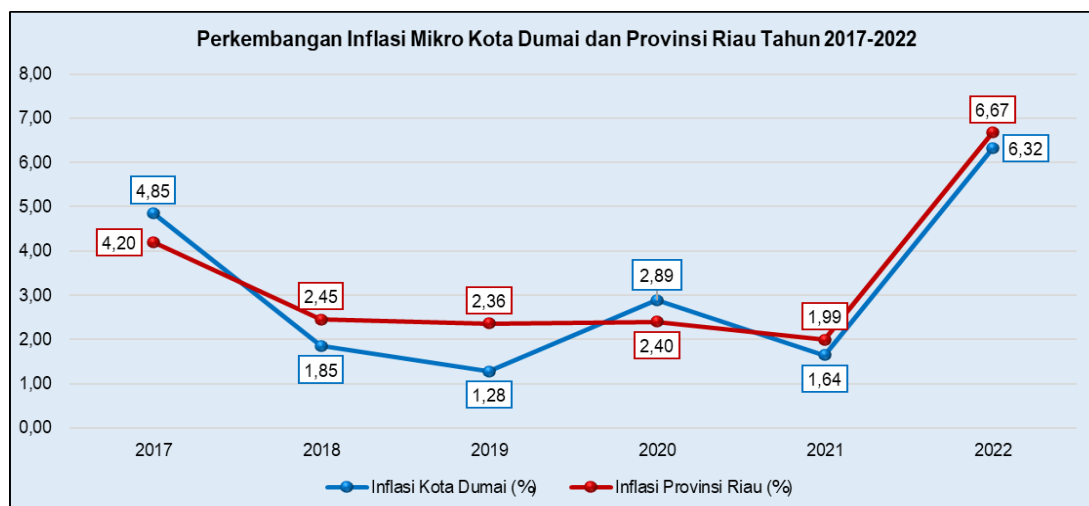
Tabel 2.23
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017-2022

Bulan	Tahun						Rata-Rata/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Januari	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,40	0,68	-318,85
Februari	1,12	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	-0,38	-106,93
Maret	-0,19	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,66	-405,55
April	-0,21	0,14	0,35	-0,19	0,24	0,74	-37,79
Mei	0,11	0,16	1,05	0,95	0,65	1,51	138,58
Juni	0,90	0,65	0,80	0,11	0,02	1,56	1505,45
Juli	0,05	-0,10	0,41	-0,26	0,22	0,57	-199,79
Agustus	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05	54,90
September	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	0,10	1,57	71,28
Oktober	0,08	0,50	0,05	0,44	0,46	-0,59	198,26
November	0,62	0,70	-0,12	0,37	0,36	0,17	-113,61
Desember	0,53	0,22	0,07	0,80	-0,13	0,88	4,60
Kota Dumai	4,85	1,85	1,28	2,89	1,64	6,32	55,05
Provinsi Riau	4,20	2,45	2,36	2,40	1,99	6,67	34,89

Sumber: BPS, Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, 2018-2022

Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2017-2022 seperti yang tersaji pada Gambar dibawah, terlihat bahwa inflasi tertinggi di Kota Dumai yaitu pada tahun 2022 sebesar 6,32% dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau dan inflasi

terendah tahun 2019 sebesar 1,28% dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Riau.



Gambar 2.15: Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, Tahun 2017-2022

Perkembangan inflasi tersebut menggambarkan suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun, berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10-30% setahun, (iii) inflasi berat: antara 30-100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Berdasarkan laju inflasi Kota Dumai tahun 2017-2022 dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi tahunan dibawah 10%.

Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2011-2022 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 5,81% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,44% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2011-2022 adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang hanya sebesar 2,74% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel berikut dengan rata-rata inflasi tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 4,16% per tahun.

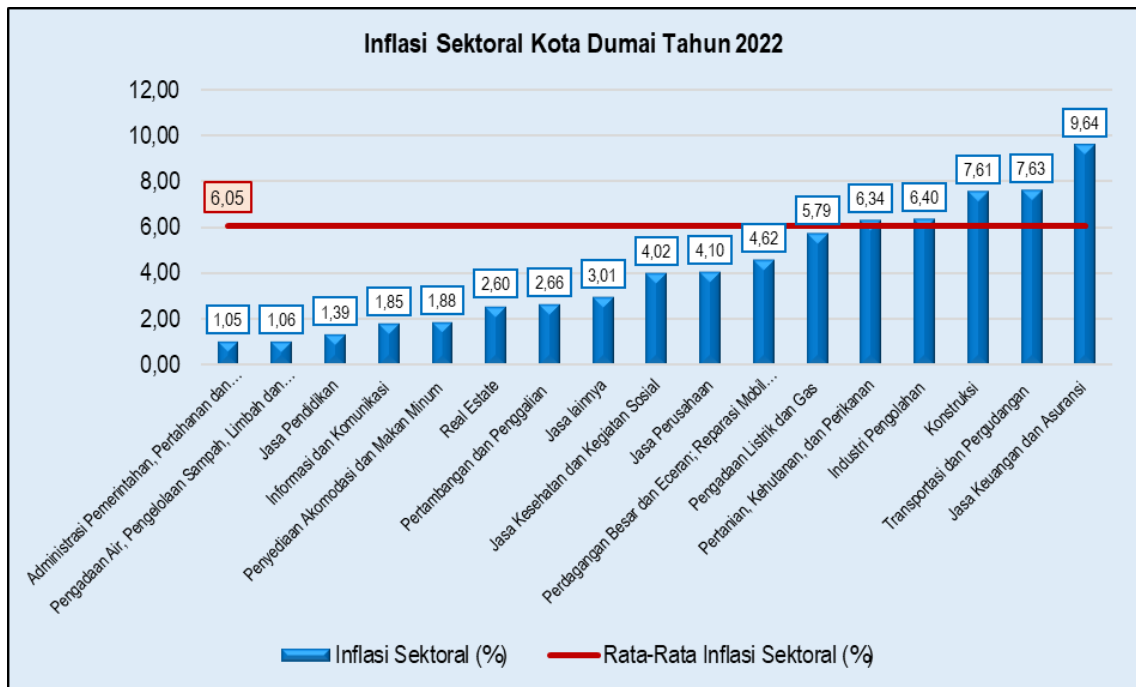
Tabel 2.24
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2022

No	Sektor	Tahun											Rata-Rata Inflasi/Tahun (%)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,58	4,41	4,54	9,61	7,80	7,57	3,62	1,00	0,56	3,77	6,55	6,34	5,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,84	2,08	2,68	15,78	10,42	5,41	0,84	6,79	4,37	2,43	2,00	2,66	4,86
C	Industri Pengolahan	-3,11	-3,89	12,49	7,89	5,28	5,38	4,68	4,49	4,34	1,29	4,71	6,40	4,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,78	-16,37	-10,80	36,19	40,52	15,09	9,37	0,49	5,38	-2,62	-0,49	5,79	5,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,81	3,46	-2,50	3,75	7,71	6,19	5,69	1,85	2,86	0,98	0,07	1,06	2,74
F	Konstruksi	9,29	1,00	6,18	5,04	9,98	8,72	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32	7,61	5,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	1,76	1,67	13,22	2,10	4,33	2,11	1,18	2,99	2,20	2,46	4,62	3,54
H	Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,05	4,46	7,55	8,89	3,61	1,64	2,09	2,89	5,30	3,83	7,63	4,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,77	-2,23	17,75	13,21	14,62	8,04	1,41	1,59	1,39	1,23	1,60	1,88	5,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	1,01	-5,06	6,41	7,51	4,38	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41	1,85	2,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	10,01	5,60	4,63	4,13	2,93	2,99	1,76	1,70	-0,39	5,09	9,64	4,48
L	Real Estate	7,56	3,78	2,99	9,02	7,10	4,41	2,83	2,90	0,38	-0,19	0,03	2,60	3,62
M,N	Jasa Perusahaan	5,19	10,31	4,41	5,36	7,99	5,07	0,52	1,09	4,44	0,98	0,27	4,10	4,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	8,57	2,82	3,77	3,99	3,08	2,03	2,50	1,01	2,64	0,40	1,05	2,76
P	Jasa Pendidikan	12,68	1,78	2,32	16,49	10,53	3,88	1,09	0,48	3,56	3,18	1,15	1,39	4,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	6,79	3,45	10,44	12,87	5,29	1,80	0,67	4,55	2,54	1,07	4,02	4,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,44	-1,03	3,47	9,98	12,30	6,45	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02	3,01	4,69
	Inflasi Kota Dumai	0,90	-0,65	8,03	8,38	5,58	5,49	3,88	3,48	3,49	1,52	3,80	6,05	4,16

Sumber: BPS, Data Dasar PDRB Kota Dumai Dalam Angka, 2012-2023

Sementara sektor yang mengalami inflasi dibawah rata-rata inflasi Kota Dumai tahun 2022 adalah sector Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Sedangkan sektor dengan inflasi diatas rata-rata inflasi Kota Dumai adalah sector Industri Pengolahan; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan.

Inflasi tahun 2022 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Untuk menjaga gejolak inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa. Inflasi sektoral 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



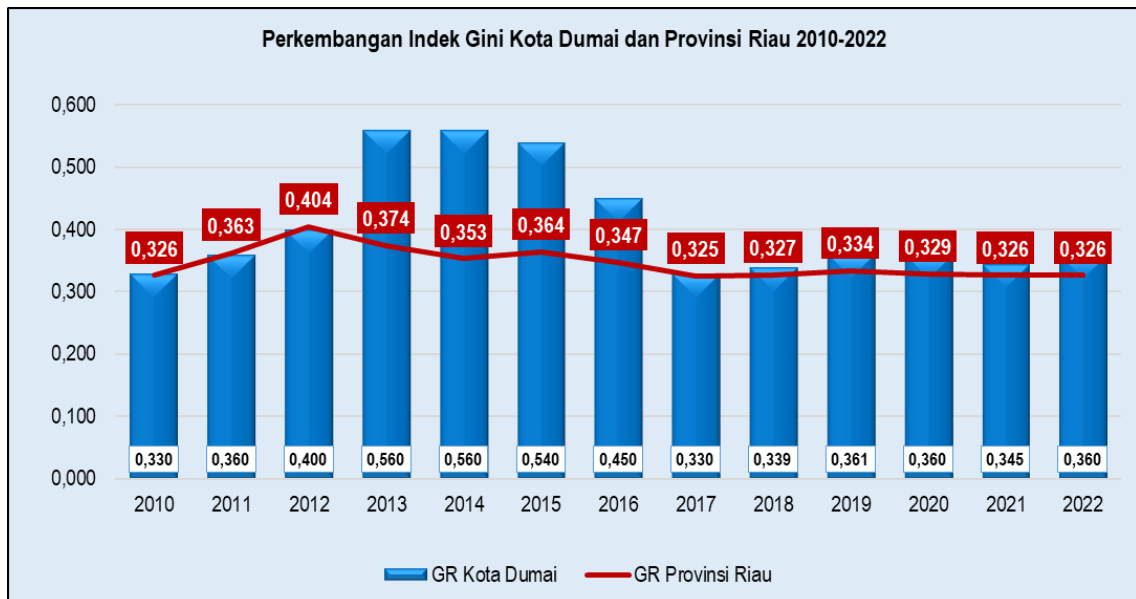
Gambar 2.16: Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai 2022

2.3.1.5 Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2010-2022, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang: $G > 0,5$ ketimpangan tinggi; $0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang; $G < 0,35$ ketimpangan ringan.



Gambar 2.17: Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-2022

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2010-2022, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Secara umum selama kurun waktu 2010-2022 tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Dumai semakin kecil seperti yang tersaji pada Gambar diatas.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.
- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 12,52% dari keseluruhan pengeluaran.

2.3.1.6 Perkembangan Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai karena adanya masih terdapatnya Gap pendapatan antara individu masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan

kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (P4) di Kota Dumai tahun 2010-2022 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel berikut .

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2022

No	Indikator Kemiskinan	Tahun												Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Pengurangan/ Pertambahan 2010 ke 2022	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	16,50	13,97	14,11	13,72	13,62	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00	-3,77	-6,50
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,45	5,27	5,24	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20	-5,31	-3,25
3	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31	0,40	0,36	-0,42	-0,71
4	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,06	7,06	-0,20
5	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan/Kapita)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182	5,45	255.207

Sumber: BPS, Provinsi Riau Dalam Angka, 2011-2023

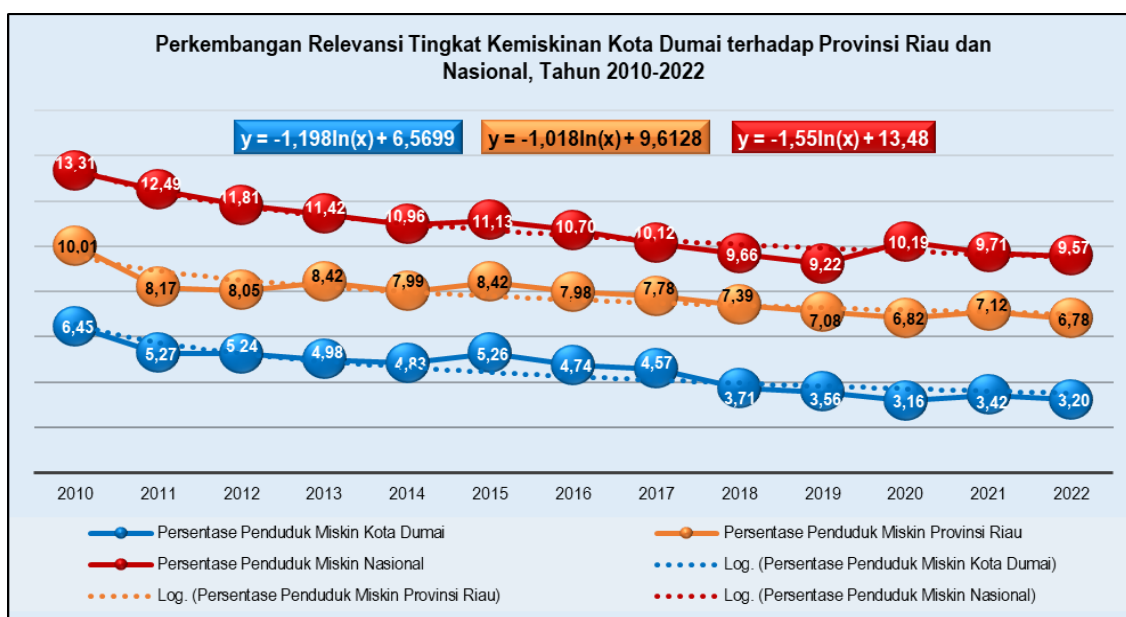
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 6,45%, menurun menjadi 3,20% pada tahun 2022. Selama periode 2010-2022, tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar -5,31% per tahun dengan pengurangan dari tahun 2010 ke 2022 sebesar -3,25%. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2022 sebesar 3,20% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 6,78% tahun 2022.

Jika dilihat dari trend penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai selama periode tersebut lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -1,198% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau sebesar -1,018%, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -1,55%, artinya penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai lebih cepat pengurangannya sebanyak berbanding Provinsi Riau, namun lebih lambat dari nasional, jelasnya lihat pada Gambar dibawah.

Namun jika diperhatikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Namun setelah tahun 2015 sudah dilakukan penyusunan SPKD sehingga program penanggulangan kemiskinan

lebih terarah. Namun demikian harus lebih focus dan terintegrasi dengan OPD terkait agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih optimal untuk mengurangi fluktuasi perkembangan indicator kemiskinan.

Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan pengurangan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan prioritas atau kantong kemiskinan di Kota Dumai. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus berjalan efektif dan efisien melalui kordinasi sektoral terutama pengembangan perekonomian masyarakat pada semua sektor dan sub sektor yang banyak digeluti atau sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tiga strategi utama yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.



Gambar 2.18: Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022

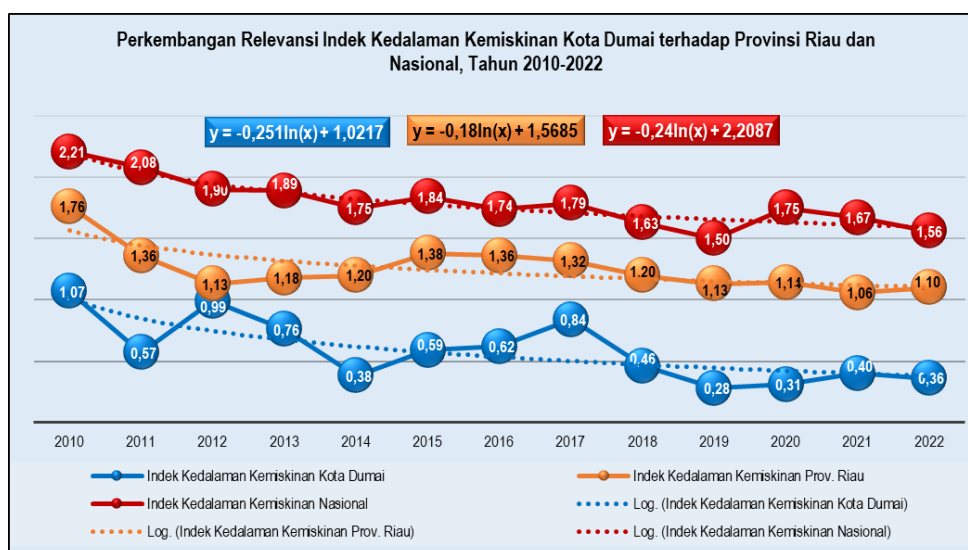
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Alat analisis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan maka dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional.

Nilai P1 sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan

kemiskinan per RTM. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai *poverty gap*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana penanggulangan kemiskinan bagi RTM.

Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*-P1), Indeks P1 Kota Dumai pada tahun 2010-2022 mengalami perkembangan pengurangan gap antara pendapatan dengan garis kemiskinan. Misalnya nilai indeks P1 pada tahun 2010 sebesar 1,07%, artinya RTM yang terdapat di Kota Dumai masih kekurangan pendapatan sebanyak 1,07% untuk memenuhi pengeluaran minimal garis kemiskinan. Namun pada tahun 2022 sudah mengalami pengurangan gap antara pendapatan RTM dengan pengeluaran minimal garis kemiskinan menjadi 0,36%. Jika dilihat indeks tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan dalam kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

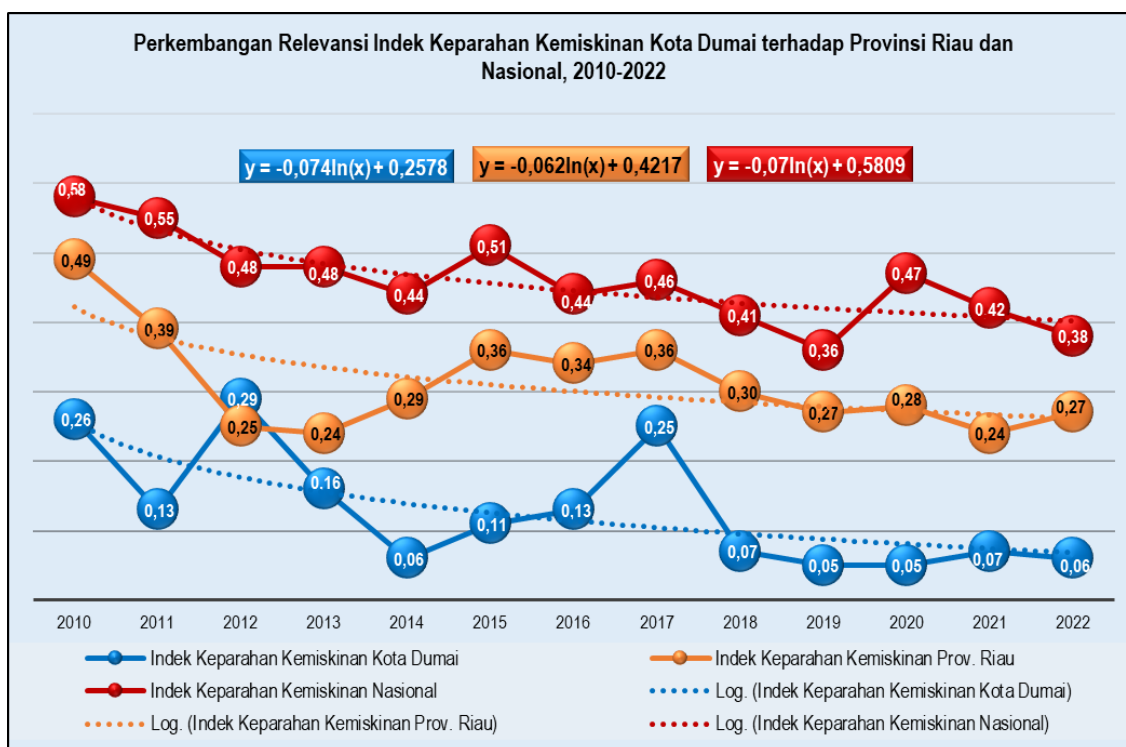
Pada Gambar dibawah terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Artinya wilayah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebih rendah di wilayah ini dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau. Namun Kota Dumai memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) penurunan yang lebih cepat dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -0,251% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar -0,180%, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -0,240%, jelasnya lihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.19: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022

Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Gap Index* (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Pada Gambar dibawah terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan Nasional.

Namun Kota Dumai memiliki percepatan penurunan Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih baik dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -0,074% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar -0,062% dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -0,070%. Namun demikian Kota Dumai harus mendapatkan perhatian secara serius dalam mengurangi keparahan kemiskinan karena perkembangannya mengalami fluktuasi atau variasi antara tahun cukup tinggi dibandingkan wilayah Provinsi Riau dan Nasional, jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.20: Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022

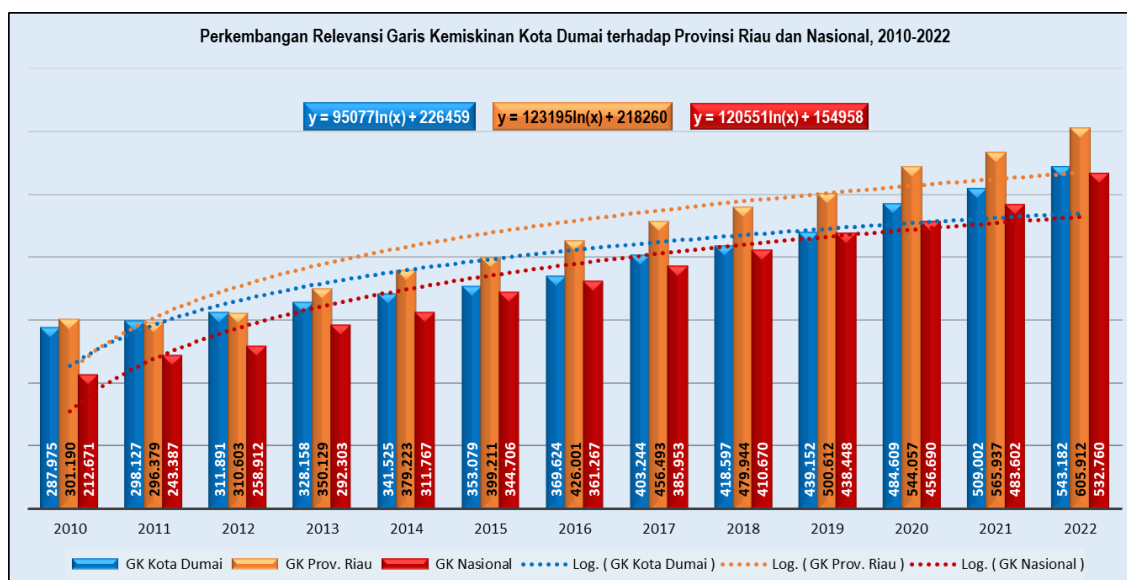
Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS, garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan

adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan sebagai dasar untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan lainnya jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Perkembangan garis kemiskinan Kota Dumai dari tahun 2010-2022 menunjukkan trend atau kecenderungan perlambatan dalam peningkatan, dimana pada tahun 2010 garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp. 287.975 per bulan per kapita dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 543.182 per bulan per kapita dengan peningkatan sebesar 5,45% per tahun lebih rendah dari rata-rata inflasi makro Kota Dumai yaitu sebesar 6,05% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan angka garis kemiskinan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga pangan dan non pangan tetapi juga dipengaruhi peningkatan jumlah dan jenis kebutuhan RTM.

Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan RT miskin atau upaya mengurangi beban pengeluaran RT akan mempercepat pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini dengan strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peningkatan aktifitas pembangunan ekonomi terutama pada lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk miskin seperti industri, sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian dan jasa lainnya yang memberikan kontribusi tertinggi pada sektor ekonomi Kota Dumai.

Trend peningkatan garis kemiskinan diwilayah ini terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp.95.077 sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau garis kemiskinan sebesar Rp. 123.195 dan koefisien persamaan regresi garis kemiskinan Nasional sebesar Rp. 120.551. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.21: Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2022

Kondisi penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir ini yang sudah mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan dukungan yang kuat dalam pembangunan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus didukung dalam pembangunan untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan seperti membantu mengurangi pengeluaran secara individu dan rumah tangga miskin melalui pemberian beasiswa atau gratis biaya pendidikan dan kesehatan serta bantuan pangan. Karena kelompok ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lambat dari sebelumnya.

Berkenaan dengan kebijakan penanganan Covid 19 seperti pembatasan yang ketat terhadap aktifitas sosial dan fisik akan berdampak pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah dan rentan miskin. Kondisi ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan seperti Pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja semua daerah. Hal ini akan memicu penambahan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai, 2010-2022 lihat Tabel berikut.

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Dumai Tahun 2010-2022

Indikator	Satuan	Tahun											Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26	0,66
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	13,32	1,11
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	10,15	0,68
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,93	69,95	70,02	70,04	70,05	70,25	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	71,25	0,16
Pengeluaran Riil Per Kapita	(Rp Juta/kapita)	9.593	10.162	10.499	10.735	10.870	11.058	11.531	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	12.249	2,10

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2011-2023

Salah satu aspek kesejahteraan sosial adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan masyarakat akan menggambarkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Dumai. Aspek ini digunakan untuk mengukur capaian pendidikan dari aspek angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi dan angka pendidikan yang ditamatkan.

Dalam kondisi wabah Covid 19 yang masih melanda seluruh negara didunia termasuk Kota Dumai dan belum adanya kepastian berakhirnya wabah Covid 19, diperkirakan akan terjadi perubahan capaian-capaian atas aspek pendidikan tersebut. Perubahan-perubahan ini terjadi atas pembatasan-pembatas aktivitas sosial masyarakat dan melambatnya perekonomian. Disamping itu dampak atas upaya penanganan Covid 19 yang salah satunya merumuskan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh akan berdampak pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan siswa yang tinggal didaerah yang jauh dari akses internet. Aspek pendidikan pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan dan sekolah individu ditengah-tengah masyarakat.

2.3.2.2 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat bisa membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2017-2022 menunjukkan tren yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 0,64% per tahun atau naik 98,45% pada tahun 2017 menjadi 99,32% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat penduduk yang masih buta huruf sebesar 8,87 selama periode 2017-2022 dengan kecenderungan penurunan dari 3.200 jiwa pada tahun 2017 turun menjadi 1.615 jiwa pada tahun 2022. Kondisi ini memerlukan perhatian terutama perlunya Pendidikan non formal untuk mengentaskan jumlah

penduduk buta huruf tersebut. Perkembangan jumlah penduduk melek huruf dan buta huruf dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf
Kota Dumai Tahun 2010-2022

No	Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	2,84
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	69,37	69,69	70,01	69,26	71,27	71,58	0,64
4	Persentase Melek Huruf	%	98,45	99,21	99,16	99,51	99,30	99,32	0,18
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	203.267	209.681	214.380	218.340	228.909	235.902	3,03
6	Persentase Buta Huruf	%	1,55	0,79	0,84	0,49	0,70	0,68	-8,87
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	3.200	1.670	1.816	1.075	1.614	1.615	-5,94

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Kota Dumai Tahun 2018-2023

2.3.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: (a) partisipasi sekolah; (b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; (c) ijazah tertinggi yang dimiliki; (d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Dumai selama kurun waktu 2010-2022 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 0,68% per tahun, namun memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dari Provinsi Riau dan Nasional, akan tetapi dari aspek kualifikasi pendidikan penduduk Kota Dumai SMA sudah berada pada level kelas satu di tahun 2022, sementara Provinsi Riau baru setara tamatan SMP dan nasional setara SMP kelas 2. Tingginya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Dumai merupakan aset berharga yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan. Rata-rata lama sekolah menjadi penting karena menjadi salah satu ukuran kemajuan pembangunan. Hal tersebut diperoleh dari pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung karena adanya lembaga pendidikan yang diharapkan relevan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal ilmiah jika terdapat lembaga tersebut di suatu wilayah.

Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Dumai merupakan kota industri, dimana tenaga yang terlibat didalamnya mayoritas tenaga yang memiliki keahlian dan

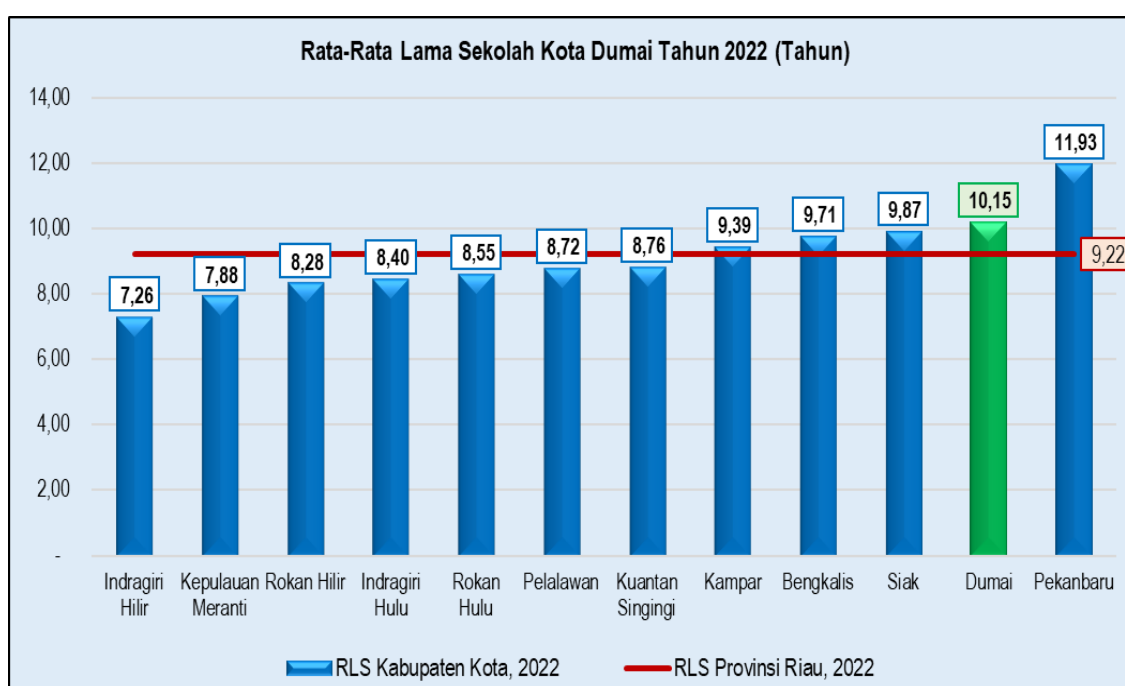
merupakan potensi pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus menjadi indicator kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kota Dumai. Perkembangan RLS penduduk Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2022

Wilayah	RLS Tahun													Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Dumai	9,36	9,42	9,48	9,54		9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	10,15	0,68
Provinsi Riau	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	9,22	0,93
Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	1,28

Sumber: BPS Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat, 2023

RLS Kota Dumai di tingkat Provinsi Riau, menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 10,15 tahun dan berada dibawah Kota Pekanbaru. RLS Kabupaten Kota Provinsi Riau tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.22: Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) selama tahun 2010-2022 di Kota Dumai memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,11% per tahun. Pencapaian angka HLS Kota Dumai dari tahun 2010 yaitu sebesar 11,67 tahun meningkat menjadi 13,32 tahun pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 1,65 tahun.

Jika dilihat angka tersebut HLS Kota Dumai telah menggambarkan pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh income per kapita

rumah tangga dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kota Dumai merupakan salah satu Kota yang memprioritas pendidikan sejak lama.

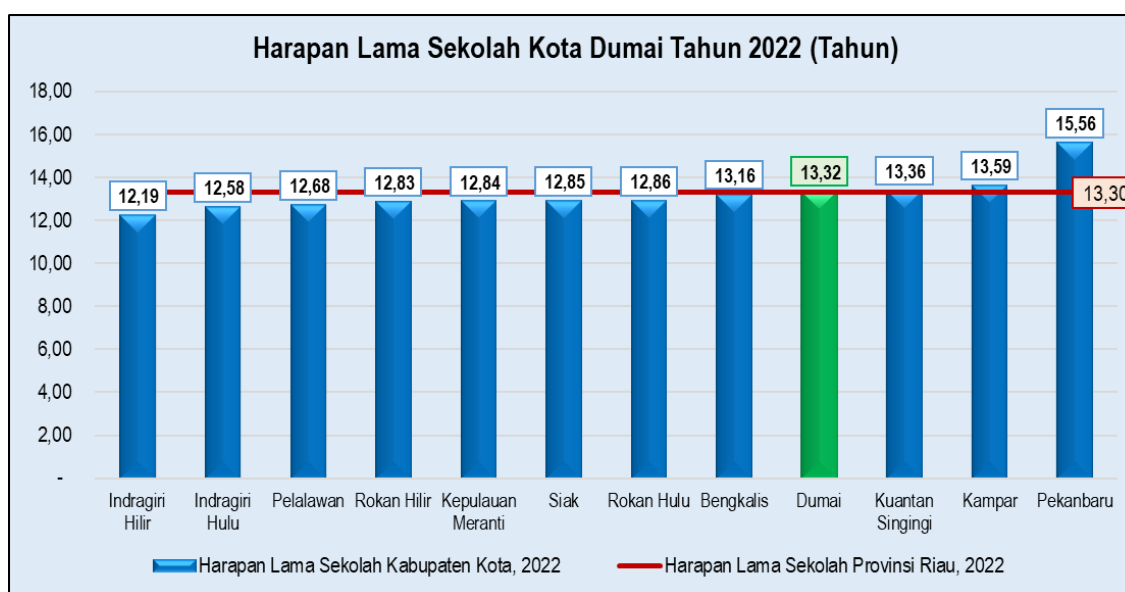
Oleh karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi penting pendidikan tinggi dan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah serta peningkatan martabat daerah melalui peningkatan daya saing daerah. Perkembangan HLS Kota Dumai 2010-2022, lihat Tabel berikut.

Tabel 2.29
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2010-2022

Wilayah	Tahun													Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Dumai	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	13,32	1,11
Provinsi Riau	11,76	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03	13,11	13,14	13,30	13,28	13,29	1,03
Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	1,25

Sumber: BPS Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat, 2023

Pada tahun 2022 angka HLS Kota Dumai sebesar 13,32 tahun lebih tinggi dari HLS Provinsi Riau sebesar 13,29 tahun dan HLS Nasional 13,10 tahun. Posisi HLS Kota Dumai dari 12 kabupaten kota berada di urutan ke 4 dibawah Kabupaten Kuansing, Dumai dan Kota Pekanbaru. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.23: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

2.3.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Dumai dari tahun 2017-2022 cenderung meningkat seperti yang tersaji pada Tabel di bawah.

Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Keadaan ini terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah bisa diminimalisir melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.30
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kota Dumai	Tahun	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	71,25	0,25
2	Provinsi Riau	Tahun	70,99	71,19	71,48	71,60	71,67	71,95	0,27
3	Indonesia	Tahun	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	0,22

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.3.2.6 Pengeluaran Ril Perkapita (PPP)

Pengeluaran ril per kapita penduduk Kota Dumai terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2022 dengan pertumbuhan 2,10% per tahun atau meningkat dari Rp 9.593 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 12.249 juta pada tahun 2022. Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Dumai karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita rill. Peningkatan pengeluaran per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB Kota Dumai.

2.3.2.7 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 2,84% per tahun dengan pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar 1,92% dengan angka partisipasi angkatan kerja tumbuh sebesar -0,88% per tahun selama periode 2017-2022.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan partisipasi Angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan penawaran jumlah penduduk usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka. Berikut disajikan data Tabel 2.31 mengenai perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2022.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	2,84
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,72	64,40	69,53	65,23	62,67	62,52	-0,88

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2018-2023 dan Data Olahan Tim

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lapangan usaha atau sektor perekonomian.

Tabel di bawah ini menjelaskan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2022. Upaya peningkatan partisipasi Angkatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada Industri padat karya dan industri padat modal. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang bergerak cepat, efisien, penggunaan teknologi tersedia dan dikuasai oleh tenaga kerja pada industri padat karya.

Perkembangan TPAK selama tahun 2017-2022 mengalami pertumbuhan 0,06% per tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah Angkatan kerja lebih rendah yaitu sebesar 1,92% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK selama periode 2017-2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	2,84
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Persentase TPAK	%	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	0,06

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2018-2023 dan Data Olahan Tim

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata TPAK selama periode 2017-2022 mengalami peningkatan sebesar 0,06% per tahun, walaupun dari tahun 2017-2022 terjadi penurunan yaitu turun dari 65,53% pada tahun 2017 menjadi

65,45% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka jumlah penduduk yang bekerja.

2.3.2.9 Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,92% per tahun. Namun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 123.554 orang pada tahun 2017 menjadi 140.509 orang pada tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah Angkatan angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut disajikan Tabel mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2022.

Tabel 2.33
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	2,84
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Jumlah Bekerja	Orang	123.554	127.891	140.600	134.581	135.381	140.509	2,71
Persentase Jumlah Penduduk Bekerja	%	91,06	93,96	93,53	91,81	93,71	94,62	0,78

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2018-2023 dan Data Olahan Tim

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam

salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan.

2.3.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 8,94% pada tahun 2017 menurun menjadi 5,38% pada tahun 2022 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -7,28% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Berikut disajikan Tabel mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Angkatan Kerja Kota Dumai dari Tahun 2017-2022.

Tabel 2.34
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	2,84
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Jumlah Menganggur	Orang	12.130	8.221	9.726	12.005	9.084	7.997	-5,36
TPT	%	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	5,38	-7,28

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2018-2023 dan Data Olahan Tim

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kota Dumai bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

2.3.2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2017-2022. Pada tahun 2017 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 245,58 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 320,67 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,54% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar Rp. 180,85 Juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 197,32 juta pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 1,81% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2017-2022. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 2,71% per tahun. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2017-2022 lihat Tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	27.962.260	30.342.840	33.076.210	36.147.140	36.313.700	39.946.110	45.056.390	8,31
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	21.391.570	22.344.840	23.538.470	24.856.890	24.597.990	26.068.270	27.725.880	4,45
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	17.280	123.554	127.891	140.600	134.581	135.381	140.509	2,71
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	238,42	245,58	258,63	257,09	269,83	295,06	320,67	5,54
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	182,40	180,85	184,05	176,79	182,77	192,55	197,32	1,81
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%		3,00	5,31	-0,59	4,95	9,35	8,68	5,12
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%		-0,85	1,77	-3,94	3,38	5,35	2,48	1,36

Sumber: BPS, Provinsi Riau, 2018-2023 dan Data Olahan Tim

2.3.2.12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga yang diharapkan adalah keluarga sejahtera, dimana keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materil yang layak, bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan.

Untuk menaikkan tahapan Keluarga Sejahtera dari Pra Sejahtera ke Sejahtera I dan Ke Sejahtera II dibutuhkan intervensi Pemerintah Daerah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kepala Keluarga ini agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan II di Kota Dumai Tahun 2017-2022, lihat tabel berikut.

Tabel 2.36
Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Desa	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pra Sejahtera	KK	2.871	2.871	6.369	-	3.803	-	
2	Sejahtera I	KK	4.503	4.503	30.371	-	-	-	
3	Sejahtera II	KK							
4	Jumlah	KK	7.374	7.374	36.740	0	3.803	0	

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.3.2.13 Index Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survey kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM Kota Dumai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		76,00	84,53	83,00	81,11	85,03	2,39
	Kategori		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	0,00

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan data dari tahun 2017-2022 dapat dilihat bahwa index kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2022 dengan memperoleh nilai 85,03 dengan kategori Baik dan naik dari 76,00 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Dumai dalam kategori baik.

2.3.2.14 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

PAD meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Kota Dumai sejak tahun 2017 terdapat rasio yang terkait dengan kemandirian fiskal terutama yang berhubungan dengan PAD terhadap total pendapatan mengalami kenaikan sebesar 12,67% per tahun selama periode 2017-2022.

Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah. Menurut kategori indek kemandirian fiskal (IKF), 0%-25% belum mandiri, 25%-50% menuju mandiri; 50%-75% mandiri dan >75% sangat mandiri. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa persentase pendapatan asli daerah yang di konversikan kepada jumlah pendapatan daerah dari tahun 2017 sebesar 22,40% kemudian naik menjadi 34,89% pada tahun 2022. Namun secara umum rasio tersebut mengalami

perkembangan yang sangat fluktuatif. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kota Dumai masuk dalam kategori menuju mandiri karena pendapatan asli daerah antara 25%-50% terhadap total pendapatan. Berikut disajikan perkembangan Rasio PAD terhadap pendapatan Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.38
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Total Pendapatan	Rp. Milyar	1.185,01	1.225,30	1.251,66	1.357,41	1.287,01	1.329,67	2,43
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp. Milyar	265,47	279,65	255,01	325,78	366,69	463,98	12,67
3	Rasio PAD/Pendapatan	%	22,40	22,82	20,37	24,00	28,49	34,89	10,03

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2023

2.3.2.15 Opini BPK

Opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti *kebenaran* atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Pemerintah daerah setiap tahun menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) berdasarkan data tahun 2017-2022 pemerintah Kota Dumai menunjukkan prestasi yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Berikut disajikan perkembangan Opini BPK Kota Dumai 2017-2022.

Tabel 2.39
Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.3.2.16 Pangan (PPH dan Rawan Pangan)

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat. Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat kronis dan yang bersifat sementara. Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan

kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan data 2017-2022 dapat dilihat bahwa rata-rata skor PPH Kota Dumai terjadinya perbaikan dari tahun 2017 yang hanya 80,48 dan kemudian meningkat menjadi 82,90 pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 0,60% atau naik sebanyak 2,42 point. Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kota Dumai yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui peningkatan ketersediaan, peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berikut disajikan skor PPH konsumsi pangan Kota Dumai 2017-2022.

Tabel 2.40
Perkembangan Skor PPH Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Skor PPH	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,90	0,60

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2023

Menurut IKP yang di hasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut of point* IKP merupakan hasil penjumlahan masing-masing perkalian antara bobot indicator individu dengan *cut off point* indicator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Terdapat 6 kelompok IKP wilayah Kota, yaitu kelompok 1 ($\leq 28,84$), kelompok 2 ($> 28,84-51,29$), kelompok 3 ($> 41,44-51,29$), kelompok 4 ($> 51,29-61,13$), kelompok 5 ($> 61,13-70,64$) dan kelompok 6 ($> 70,64$). Kelompok 1 adalah wilayah yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan wilayah kota yang memiliki ketahanan pangan yang paling baik. Pada tahun 2022 Kota Dumai sudah merupakan wilayah yang masuk kategori ketahanan pangan paling baik dengan indeks ketahanan pangan sebesar 72,63.

2.3.2.17 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertanian menjadi sector tertinggi ketiga dari tiga sector utama yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDRB) Kota Dumai. Perkembangan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku sector pertanian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,64% atau turun dari 5,95% pada tahun 2017 menjadi 5,44% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,51%.

Sementara perkembangan pertumbuhan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2022 tumbuh negatif sebesar 1,67% atau turun dari 5,33% pada tahun 2017 menjadi 4,88% tahun 2022 atau turun sebesar 0,45%. Walaupun tumbuh negatif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi regional tetap penting dan strategis karena kontribusinya yang sangat tinggi, sehingga telah merubah struktur ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor pertanian yang dominan tahun 2022.

Namun upaya peningkatan kontribusi sektor pertanian harus terus dilakukan dengan penerapan berbagai jenis teknologi secara optimal, peningkatan ketersediaan SDM pertanian berkualitas yang bisa berperan sebagai transformator agar memacu minat investor untuk mengembangkan sektor yang lebih terintegrasi dan modern melalui penerapan *Good Agricultural Practices*. Berikut disajikan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2017-2022.

Tabel 2.41
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.056,39	8,31
2	PDRB ADHK Kota Dumai	Rp. Milyar	22.344,84	23.538,47	24.856,89	24.597,99	26.068,27	27.725,88	4,45
3	PDRB ADHB Sektor Pertanian	Rp. Milyar	1.806,63	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76	6,35
4	PDRB ADHK Sektor Pertanian	Rp. Milyar	1.190,35	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31	2,61
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian	%	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	-1,64
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian	%	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	4,88	-1,67

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.3.2.18 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor tertinggi kedua dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kota Dumai. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan negative sebesar -4,24% atau turun dari 0,38% pada tahun 2017 menjadi 0,31% pada tahun 2022. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2022 tumbuh negative sebesar -4,22% atau turun dari 0,36% pada tahun 2017 menjadi 0,29% tahun 2022.

Selain tumbuh negatif, peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam pertumbuhan ekonomi regional juga telah berpengaruh terhadap kontribusi secara keseluruhan dalam struktur ekonomi. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin menurun dimana sehingga semakin berkurang peranannya terhadap dana bagi hasil

tambah untuk sumber pendapatan daerah dari dana transfer daerah. Selain itu struktur sektor ini berubah dari posisi kesepuluh tahun 2010 menjadi posisi keempatbelas tahun 2022.

Tabel 2.42
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.056,39	8,31
2	PDRB ADHK Kota Dumai	Rp. Milyar	22.344,84	23.538,47	24.856,89	24.597,99	26.068,27	27.725,88	4,45
3	PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	116,79	120,04	128,17	129,55	132,99	139,35	3,61
4	PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	79,73	76,74	78,51	77,47	77,97	79,58	-0,01
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	-4,24
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	0,36	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	-4,22

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.3.2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Menguat dan melemahnya posisi ekonomi akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa termasuk sektor perdagangan. Perdagangan menjadi sektor tertinggi pertama dari sektor jasa yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kota Dumai. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Perdagangan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan sebesar -3,96% atau turun dari 17,30% pada tahun 2017 menjadi 14,09% pada tahun 2022. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Perdagangan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2022 tumbuh sebesar -3,04% atau turun dari 17,75% pada tahun 2017 menjadi 15,16% tahun 2022 atau turun sebesar 2,59 point.

Dalam konteks itu, tantangan terbesar perekonomian Kota Dumai ke depan adalah perdagangan dan investasi. Pelemahan ekonomi ke negara-negara tujuan ekspor akan memperburuk kondisi ekonomi Kota Dumai. Namun demikian satu hal yang disyukuri adalah bahwa wilayah ini merupakan produsen hasil non migas terutama dari hasil pertanian perkebunan dan kehutanan dan sektor perdagangan hasil olahan produk perikanan budidaya.

Tabel 2.43
Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.056,39	8,31
2	PDRB ADHK Kota Dumai	Rp. Milyar	22.344,84	23.538,47	24.856,89	24.597,99	26.068,27	27.725,88	4,45
3	PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Rp. Milyar	5.250,80	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00	4,11
4	PDRB ADHK Sektor Perdagangan	Rp. Milyar	3.967,11	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23	1,36
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	-3,96
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan	%	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	15,16	-3,04

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.3.2.20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Industri pengolahan menjadi sektor tertinggi pertama dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kota Dumai. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Industri pengolahan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,46% atau naik dari 54,75% pada tahun 2017 menjadi 61,80% pada tahun 2022. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Industri pengolahan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2022 tumbuh sebesar 1,89% atau naik dari 56,63% pada tahun 2017 menjadi 62,18% tahun 2022. Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah sangat besar terutama berdasarkan harga konstan melebihi 25% pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor industri. Peningkatan produksi barang dan jasa juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Selain tumbuh positif, peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi regional juga semakin penting dan strategis. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat dimana sektor industri pengolahan menjadi semakin penting karena turut berperan pada terkendalinya peningkatan nilai tambah terhadap komoditas utama terutama dari sub sektor perkebunan dan kehutanan serta sektor perikanan.

Tabel 2.44
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.056,39	8,31
2	PDRB ADHK Kota Dumai	Rp. Milyar	22.344,84	23.538,47	24.856,89	24.597,99	26.068,27	27.725,88	4,45

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	16.611,66	18.660,48	20.867,98	1.772,85	24.294,17	27.843,51	10,94
4	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	12.654,79	13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,04	17.241,07	6,39
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	%	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	2,46
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	%	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	62,18	1,89

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

2.3.2.21 Pravalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada balita di Kota Dumai pada tahun 2022 diperoleh status gizi balita sebagai berikut: persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,27% (23 penderita), persentase balita dengan gizi kurang sebesar 1,19% (102 penderita). Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2022 dimana persentase balita dengan gizi buruk sebesar < 2% dan persentase balita dengan gizi kurang sebesar <5%, maka pencapaian status gizi balita masih lebih rendah dari target.

Meningkatnya jumlah kasus balita gizi buruk sebagai dampak pandemi COVID-19, Dimana kegiatan penimbangan balita di posyandu belum berjalan secara optimal sehingga pemantauan status gizi balita setiap bulannya belum optimal juga. Disamping itu, masih ada ibu-ibu yang tidak mau membawa balitanya ke posyandu ataupun ke fasilitas pelayanan Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan karena takut tertular COVID-19. Hal tersebut terlihat dari menurunnya Tingkat partisipasi Masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita ditimbang sebanyak 2.806 orang atau sebesar 12,65% dari 22.287 balita pada tahun 2021 menjadi 19.381 balita pada tahun 2022. Disamping itu, berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) salah satunya

melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk, maka banyak terjaring kasus balita dengan gizi buruk.

Terhadap 23 (dua puluh tiga) kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100ml atau 150g/hari dan biscuit selama 90 hari dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling serta penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya. Dari 23 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2022, tinggal sebanyak 10 balita yang masih berstatus gizi buruk karena balita tersebut juga menderita penyakit penyerta. Agar status gizi balita tersebut dapat ditingkatkan menjadi gizi baik, maka penyakit penyertanya harus disembuhkan terlebih dahulu.

Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 6 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2022 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih dibawah target. Dengan demikian, persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (Memuaskan). Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami fluktuasi. Terkait dengan perkembangan angka balita gizi buruk Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.738,00	7.886,00	8.029	8.168	8.352	8.538	1,99
BBLR	Bayi	167,00	166,00	151,00	121,00	71,00	102,00	-5,43
LBW	Bayi	167,00	166,00	151,00	121,00	71,00	102,00	-5,43
Gizi Buruk	Bayi	5,00	6,00	7,00	3,00	6,00	23,00	72,57

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Selama tahun 2017-2022, terlihat pada tahun 2017 angka balita gizi buruk dari tujuh Kecamatan hanya terdapat di lima Kecamatan yaitu Dumai Kota, Dumai Barat, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Medang Kampai masing-masing sebanyak 1 orang namun pada tahun 2022 jumlah balita gizi buruk meningkat yang terdapat di lima Kecamatan yaitu Dumai Selatan sebanyak 2 orang, Dumai Barat 7 orang, Bukit Kapur 2 orang, Sungai Sembilan 10 orang dan Medang Kampai 2 orang. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Angka Balita Gizi Buruk												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	Absolut	/100	
1	Dumai Kota	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-	2,00		-	-	-40,00
2	Dumai Timur	-	-	2,00	0,02	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	-	-	-20,00
3	Dumai Selatan	-	-	2,00	0,03	1,00	0,15	-	-	-	-	2,00		-30,00
4	Dumai Barat	1,00	0,02	-	-	3,00	0,06	-	-	-	-	7,00		-40,00
5	Bukit Kapur	1,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	2,00	0,11	3,00		2,00		23,33
6	Sungai Sembilan	1,00	0,03	-	-	1,00	0,02	-	-	1,00		10,00		140,00
7	Medang Kampai	1,00	0,07	1,00	0,06	-	-	-	-	-	-	2,00		-20,00
	Kota Dumai	5,00	0,01	6,00	0,02	7,00	0,02	3,00	0,01	6,00		23,00		72,57

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

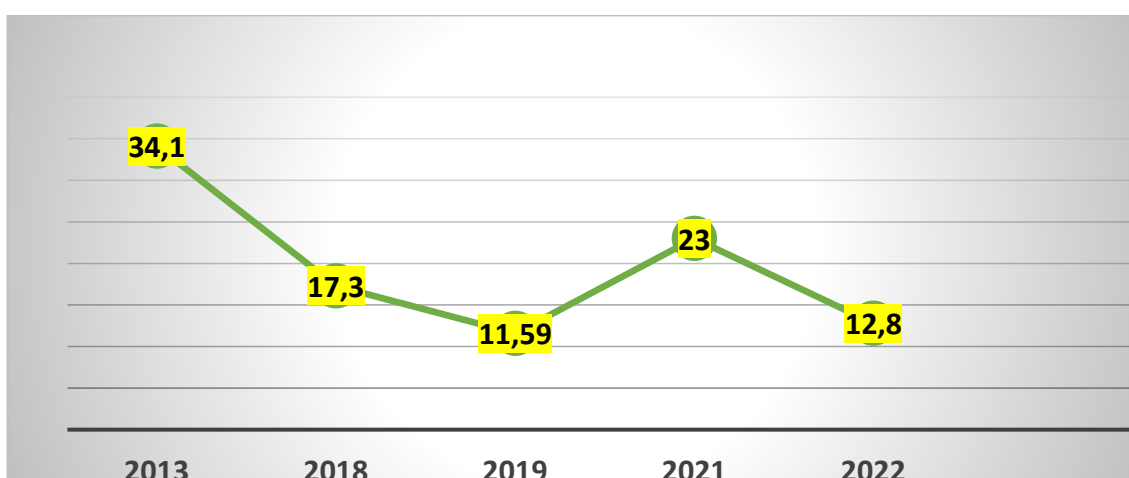
Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh

WHO. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, stunting juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Riskesmas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (stunting) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Berdasarkan data yang bersumber Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia trend prevalensi stunting di Kota Dumai berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Di Tahun 2022 angka prevalensi stunting 12,8% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 23%. Adapun capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat sebesar 14% dan target Provinsi Riau sebesar 18,86%. Adapun grafik capaian prevalensi stunting Kota Dumai Tahun 2013 sampai dengan Tahun dengan 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.24 Trend Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2013 - 2022
Sumber: RISKESDAS & SS

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta

peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.47
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD
Kota Dumai dan APBN tahun 2017-2022

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
APBD Kota Dumai	64.949	66.200	62.249	74.766	89.238	108.456	11,39
APBN	61.414	61.166	89.298	84.057	75.857	85.175	8,45
Jumlah	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	196.631	9,53

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Selama tahun 2017-2022 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dari APBD Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 11,39% per tahun dan dari APBN naik sebesar 8,45% per tahun.

Dengan kata lain penerima PBI dari APBD dan APBN naik dari 42,46% pada tahun 2017 menjadi 59,26% pada tahun 2022 dari jumlah penduduk Kota Dumai dan telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

2.3.3.1 Perkembangan Seni Budaya

Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai. Terkait penerapan budaya melayu yang agamis, tentunya harus dimulai dari pembinaan generasi penerus terutama implementasi Pendidikan budaya melayu serta implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan

yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan. Data implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.48
Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber Dana	Jumlah Sekolah	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
SD/MI	108	105,00	107,00	107,00	108,00	108,00	108,00	0,57
Persentase	0	103,96	101,90	100,00	100,93	100,00	100,00	-0,77
SMP/MTS	39	35	36	37	38	39	39	2,19
Persentase	0	102,94	102,86	102,78	102,70	102,63	100,00	-0,57

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Penerapan kurikulum budaya melayu Riau tingkat sekolah dasar baru diterapkan untuk kelas 4,5 dan 6, sedangkan untuk kelas 3 kebawah belum diajar kurikulum tersebut sebagai kurikulum muatan lokal. Dari kedua tabel di bawah dapat dilihat bahwa penerapan kurikulum muatan lokal budaya melayu Riau pada tahun 2022 di tingkat Sekolah Dasar sudah mencapai 100,00% dan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sudah mencapai 100,00% dan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan kurikulum muatan lokal pada Pendidikan dasar pada tahun 2022 adalah sebesar 108,00%.

Budaya melayu sangat melekat dengan Islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2022 adalah sebesar 95,83%. Data penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SD/MI Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Jumlah SD/MI	Tahun											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	105	91	86,67	92	87,62	92	87,62	102	97,14	108	97,14	102	94,44
Sholat Zuhur Berjamaah	105	50	47,62	51	48,57	51	48,57	54	51,43	54	51,43	102	94,44
Membaca Ayat Pendek/Hapalan Al-Quran	105	97	92,38	99	94,29	97	92,38	101	96,19	101	96,19	102	94,44
Berdoa setiap memulai pelajaran	105	101	96,19	102	97,14	102	97,14	104	99,05	104	99,05	108	100,00
Rata-Rata	105	84,75	80,71	86,00	81,90	85,50	81,43	90,25	85,95	90,25	85,95	103,50	95,83

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Sedangkan rata-rata pelaksanaan nilai-nilai agama diluar kurikulum wajib (sebagaimana disajikan pada Tabel 2.50) pada tingkat sekolah Pendidikan Menengah pada tahun 2017 sebesar 93,65% kemudian meningkat menjadi sebesar 93,85% pada tahun 2022. Komponen tersebut dalam kurikulum muatan lokal atau adalah

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya.

Tabel 2.50
Implementasi Nilai-nilai Agama pada Pendidikan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Jumlah SMP/MTs	Tahun											
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Membaca Yasin Bersama	35	33	94,68	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00	36	92,31
Sholat Zuhur Berjamaah	35	28	79,55	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00	36	92,31
Membaca Ayat Pendek/ Hapalan Al-Quran	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00	36	92,31
Berdoa setiap memulai pelajaran	35	35	100,37	35	100,00	35	100,00	35	100,00	35	100,00	39	100,00
Rata-Rata	35	32,78	93,65	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	36,60	93,85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2022.

Tabel 2.51
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2022

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2022	Realisasi sampai Tahun 2022	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	85	40	47,06
Jumlah Grup Kesenian	Buah	40	35	87,50
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya dari target 85 sanggar yang dibina hanya terealisasi 40 sanggar yang dibina. Untuk jumlah grup kesenian dari target 40 grup kesenian hanya terealisasi 35 grup. Sedangkan pembangunan 1 (satu) gedung kesenian belum terealisasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Riau, jumlah grup kesenian di Dumai menempati urutan paling bawah, sama halnya dengan Pelalawan. Rendahnya jumlah grup seni budaya Melayu, minimnya sarana/prasarana seni budaya, belum maksimalnya peranan Lembaga Adat Melayu, dan Pembelajaran senibudaya Melayu Riau di sekolah disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan

dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

Festival seni dan budaya diselenggarakan secara rutin di Kota Dumai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dimaksudkan untuk pelestarian seni dan budaya melayu serta penguatan karakter bangsa sehingga generasi muda dapat mengenali dan memahami kesenian dan kebudayaannya sendiri serta dapat meneruskannya ke generasi berikutnya antara lain: Festival Layang-layang, Lomba Gasing, Panggung Seni Rakyat, Lomba Pantuan dan Syair, Festival Kompang, Rebana dan Nasyid serta Lomba Masakan Kuliner.

Terdapat beragam jenis warisan budaya tak benda yang hidup dalam keseharian masyarakat melayu di Kota Dumai, antara lain pantun, gurindam, motif tenun, mantra-mantra semah, mendodoi anak, dialek melayu dumai serta warisan budaya tak benda lainnya seperti cerita rakyat yang telah turun temurun berkembang di masyarakat Kota Dumai.

Dalam masyarakat melayu di Kota Dumai, juga terdapat beberapa tradisi lisan yang berkembang dan disampaikan secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat. Adapun tradisi lisan dimaksud antara lain adalah cerita putri tujuh, misteri goa pelintung, panglima hitam, bujang manjo, buah bakau belukap jin qunai, asal mula lubuk gaung, panglima jambul, tuk kedondong.

2.3.3.2 Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau. Berikut disajikan data berdasarkan jumlah pembinaan cabang dan jumlah klub olahraga.

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabang dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	0,00	28,00	28,00	29,00	40,00	40,00	8,30
Jumlah yang Dibina	Cabang	0,00	32,00	33,00	34,00	32,00	33,00	0,68
Persentase Binaan	%	0,00	114,29	117,86	117,24	80,00	80,00	-5,83
Jumlah klub olahraga	Klub	0,00	100	112	112	120,00	120,00	3,83
Jumlah yang Dibina	Klub	0,00	100	112	112	120,00	120,00	3,83

Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Binaan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Dumai dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah TK dan sederajat berjumlah 79 sekolah kemudian bertambah menjadi 115 sekolah pada tahun 2022. Dengan semakin bertambahnya jumlah PAUD atau TK maka mengindikasikan bahwa penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun di Kota Dumai semakin meningkat. Pertambahan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah siswa dan guru dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -1,92% dan 3,61% dari tahun 2017-2022, jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	Unit	79	101	134	96	94	115	10,48
2	Jumlah Murid PAUD/TK sederajat	Orang	4.737	5.234	4.150	4.221	3.801	4.135	-1,93
3	Jumlah Guru PAUD/TK sederajat	Orang	413	426	433	428	458	492	3,61

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK

adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan -0,37% per tahun dan -1,00% per tahun. Pada tahun 2018 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalami penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	APK SD/MI	%	111,92	100	108,33	108,86	108,33	108,86	-0,37
2	APK SMP/MTs	%	95,6	78,89	89,16	88,66	89,16	88,66	-1,00

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.55
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	APM SD/MI/Paket A	%	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	98,86	-0,12
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	84,45	-0,73

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas, tren Perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2017-2022 fluktuatif dengan kecenderungan pertumbuhan negatif yaitu -0,12% per tahun untuk APM SD/MI atau turun dari 99,46% tahun 2017 meningkat menjadi 98,86% dan APM SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2017-2022. Secara umum nilai APM SMP/MTs tahun 2017 ke 2022 mengalami penurunan dari tahun 87,66% kemudian turun menjadi 84,45%.

Berfluktuatifnya APM ini juga dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin banyak jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain itu APS tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Paket A maupun SMP/MTs/Paket B. APS SD/MI/Paket A semula sebesar 99,46% pada tahun 2017 turun menjadi 98,86% pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar -0,12% per tahun. Demikian dengan APS SMP/MTs/Paket B, semula 95,23% pada tahun 2017 turun menjadi 93,99% pada tahun 2022 atau dengan pertumbuhan sebesar -0,25% per tahun. Berikut data APS Kota Dumai seperti yang disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)	
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	APS SD/MI/Paket A	%	99,46	100,00	99,85	99,61	99,53	98,86	-0,12
2	APS SMP/MTs/Paket B	%	95,23	95,88	97,05	97,15	97,26	93,99	-0,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai Tahun 2017-2022

Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,013%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah justru naik menjadi 2,180% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2017-2022 sebesar 278,17%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2017 angka putus sekolah adalah

sebesar 0,025%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 4,170%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2017, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka putus sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,013	0,09	0,052	0,096	0,422	2,180	278,17
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,025	0,025	0,098	0,086	0,393	4,170	319,56

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- b. Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
- c. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat

dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.
- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anakanak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
- f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2017-2022, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2017 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100,00% hingga tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2017 angka kelulusan 100,00% dan pada tahun 2022 angka kelulusan adalah sebesar 100,00%.

Tabel 2.58
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	0,00
2	Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	100	99,98	100	100	100	100	0,00

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2020 dan 2020 Angka Estimasi Tim.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2017-2022 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2022 angka melanjutkan adalah sebesar 94,52%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.

Tabel 2.59
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	94,52	72,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Rasio Siswa terhadap Ruang Kelas

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Dumai Dalam Angka, dari tahun 2017-2022 rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 105. Angka ini

menunjukkan ada sekitar 105 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 108 hal ini berarti terdapat sekitar 108 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2017-2022 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai 35 dan pada tahun 2022 naik menjadi 39 pada tahun 2022.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 33,54 siswa per kelas tahun 2017 menjadi 25,30 siswa per ruang kelas pada tahun 2022. Kondisi ini terjadi karena jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 38.035 bertambah menjadi 38.054 siswa pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 0,01% per tahun sementara ruang kelas mengalami penambahan sebesar 6,83% per tahun.

Dari Tabel 2.60 dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2017 yakni 1:33,54 artinya 1 ruang kelas menampung 34 siswa dan kemudian menjadi 1:25 tahun 2022. Jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 28 orang (1:28) sehingga Kota Dumai pada tahun 2022 tidak melebihi standart tersebut, selain itu perlu diingat bahwa Sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

Tabel 2.60
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kegiatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gedung SD	Unit	105	107	107	107	108	108	0,57
2	Gedung SMP	Unit	35	36	36	37	38	38	1,67
3	Jumlah Siswa SD	Orang	38.035	38.315	38.148	38.416	37.902	38.054	0,01
4	Jumlah RK SD	Orang	1.134	1.167	1.167	1.234	1.062	1.481	6,83
5	Rasio Siswa/RK SD	Indek	33,54	32,83	32,69	31,13	36,00	25,30	-4,28
6	Jumlah Siswa SMP	Orang	13.145	13.272	13.274	13.480	13.316	13.394	0,38
7	Jumlah RK SMP	Orang	404	439	446	454	354	517	7,21
8	Rasio Siswa/RK SMP	Indek	32,54	30,23	29,76	29,69	38,00	25,90	-2,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah siswa di tahun 2017 adalah sebanyak 13.145 siswa kemudian bertambah menjadi menjadi 13.394 siswa tahun 2022. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan dari 404 ruang pada tahun 2017 menjadi 517 ruang pada 2022. Pada Tabel di atas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:32,54 tahun 2017 menjadi 1:25,90 pada tahun 2022. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM.

Namun demikian rasio antara jumlah siswa per ruang kelas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik untuk jenjang SD maupun SMP tetap harus menjadi perhatian karena jumlah dan kualitas sekolahnya pun belum merata per Kecamatan di Kota Dumai. Minat sekolah penduduk usia sekolah di Kota Dumai masih tertuju pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah kota. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut lebih mudah untuk diakses. Disamping itu sarana dan prasarana pendukung di sekolah tersebut juga lebih lengkap dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.61
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Kondisi Ruang Kelas SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.134	1.167	1.167	1.234	1.302	1.481	5,58
Baik	Unit	437	476	462	260	599	1.377	44,51
Rusak Ringan	Unit	565	606	603	734	685	102	-12,66
Rusak Sedang	Unit	21	41	41	136	2	1	35,68
Rusak Berat	Unit	52	44	61	104	19	1	-16,54
Rusak Total	Unit	59	0	0	0	0	0	0,00
Baik	%	41,15	41,98	39,59	21,07	46,07	92,98	34,00
Tingkat Rusak Ringan	%	53,20	53,44	51,67	59,48	52,61	6,89	-17,24
Tingkat Rusak Sedang	%	1,98	3,62	3,51	11,02	0,15	0,07	28,34
Tingkat Rusak Berat	%	4,90	3,88	5,23	8,43	1,46	0,07	-20,53
Tingkat Rusak Berat	%	5,56	0	0	0	0	0	0,00

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2022

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Persentase kondisi ruang kelas SD dengan kondisi baik tahun selama tahun 2017-2022 tumbuh sebesar 44,51% per tahun. Pada tahun 2022 ruang kelas dalam kondisi

baik sebanyak 1.377 ruang kelas dari 1.481 ruang kelas atau sekitar 92,98%. Artinya semakin banyak ruang kelas dalam kondisi baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 38,54%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 92,98% pada tahun 2022. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi prioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2018-2020 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2022 dari menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2017-2022 berkisar antara 90,72% dengan tren perkembangan yang meningkat 106,56% per tahun atau ruang kelas dalam kondisi baik tahun 2017 sebanyak 81 kelas kemudian bertambah menjadi 469 ruang kelas tahun 2022. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan sebesar -15,72% per tahun atau turun dari 292 ruang kelas tahun 2017 menjadi 48 ruang kelas tahun 2022. Kondisi ruang kelas SMP dari tahun 2017 -2022 didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi baik sebesar 90,72% pada tahun 2022.

Oleh karena Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan di Kota Dumai karena dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar dan mengajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa di Kota Dumai. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung dalam hal penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana tersebut. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pendidikan. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana prasarana pendidikan akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.62
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Kondisi Ruang Kelas SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Ruang Kelas	Unit	404	439	446	454	468	517	5,12
Baik	Unit	81	143	162	40	187	469	106,56
Rusak Ringan	Unit	292	235	240	324	281	48	-15,72
Rusak Sedang	Unit	17	51	33	72	0	0	36,58
Rusak Berat	Unit	7	10	11	18	0	0	3,30
Rusak Total	Unit	7	0	0	0	0	0	-20,00
Baik	%	20,05	32,57	36,32	8,81	39,96	90,72	95,76
Tingkat Rusak Ringan	%	72,28	53,53	53,81	71,37	60,04	9,28	-18,64
Tingkat Rusak Sedang	%	4,21	11,62	7,4	15,86	0	0	30,80
Tingkat Rusak Berat	%	1,73	2,28	2,47	3,96	0	0	0,09
Tingkat Rusak Berat	%	2	0	0	0	0	0	-20,00

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2022

Rasio Guru/Siswa SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/siswa, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut.

Berdasarkan data *time series* dari Dumai Dalam Angka, pada tahun 2017-2022 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atau perbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 17,16 siswa per seorang guru menjadi siswa per seorang guru tahun 2022 atau turun sebesar 0,76% per tahun. 16,40, demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan sebesar 3,19% per tahun atau turun dari 17,72 siswa per seorang guru tahun 2017 menjadi 14,53 siswa per seorang guru tahun 2022.

Kondisi ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan penambahan guru lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan jumlah siswa setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2018 untuk jenjang Pendidikan SD, dimana jumlah siswa bertambah sementara jumlah mengalami pengurangan hanya 1.849 guru. Jelasnya lebih lanjut lihat Tabel berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Rasio Guru Terhadap Siswa SD-SMP	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Siswa SD	Orang	38.035	38.315	38.148	38.416	38.456	38.054	0,01
Jumlah Guru SD	Orang	2.217	1.849	2.093	2.219	2.213	2321	1,45
Rasio	Indek	17,16	20,72	18,23	17,31	17,38	16,40	-0,32
Jumlah Siswa SMP	Orang	13.145	13.272	13.274	13.480	13.780	13355	0,33
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881	820	938	932	919	4,83
Rasio	Indek	17,72	15,06	16,19	14,37	14,79	14,53	-3,51

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018-2023

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2017-2022 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2017-2022 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2017-2022 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran. Dari Tabel 2.65 tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. Di Kecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 17,82 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

Tabel 2.64
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Tahun Ajaran 2022/2023

No	Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Bukit Kapur	368	145	6.557	1.901	17,82	13,11
2	Medang Kampai	142	51	2.372	683	16,70	13,39
3	Sungai Sembilan	362	121	5.397	1.648	14,91	13,62
4	Dumai Barat	265	132	4.393	1.994	16,58	15,11
5	Dumai Selatan	401	202	6.520	3.064	16,26	15,17
6	Dumai Timur	607	180	9.925	2.697	16,35	14,98
7	Dumai Kota	176	88	2.890	1.368	16,42	15,55
Kota Dumai		2.321	919	38.054	13.355	16,40	14,53

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi

Jumlah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2017-2022 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan sebesar 4,64% per tahun. Sementara persentase guru SD bersertifikasi tumbuh -5,16%. Sementara persentase guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV tumbuh sebesar 2,41%, dan Sementara persentase guru SMP bersertifikasi tumbuh -0,25%. Turunnya persentase guru SMP yang bersertifikasi disebabkan oleh penambahan jumlah guru lebih tinggi sebesar 4,83% per tahun dibandingkan dengan penambahan jumlah guru bersertifikasi hanya -0,25% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Guru SD	Orang	2.217	1.849	2.093	2.219	2.213	2.321	1,45
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,5	90,2	90,7	92,6	84,75	97,96	4,64
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1.611	1.633	1.113	1.343	1.039	1.108	-5,16
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	54,65	51,9	53,2	60,52	46,96	47,74	-1,90
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881	820	938	932	919	4,83
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,80	90,30	91,80	95,40	90,88	99,55	2,41
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	445	434	436	449	445	439	-0,25
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	60	49,3	53,2	47,85	47,80	47,79	-4,02

Sumber: Data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2019 dan 2022 Angka Estimasi Tim.

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan, serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

Pendidikan Kesetaraan (SKB DAN PKBM)

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang kehadirannya dirasakan sangat penting dan strategis dalam kerangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan belajar masyarakat. Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Dumai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 8 kelas kemudian bertambah menjadi 10 pada tahun 2022. Sementara itu jumlah tenaga kependidikan terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 2017 sebanyak 55 tenaga kependidikan menjadi 77 tenaga kependidikan pada tahun 2022. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah berikut.

Tabel 2.66
Jumlah SKB dan PKBM, Jumlah Tenaga Kependidikan dan Jumlah Siswa
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH PTK	JUMLAH SISWA
1	2017	8	55	400
2	2018	8	55	400
3	2019	8	66	455
4	2020	8	70	480
5	2021	10	77	885
6	2022	10	77	1294

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023

2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sementara itu bidang kesehatan merupakan unsur lain yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum selain faktor kualitas pendidikan adalah faktor kualitas kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan ukuran dari kualitas kesehatan masyarakat. Indikator tersebut adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran, Angka Kematian Balita, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk.

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

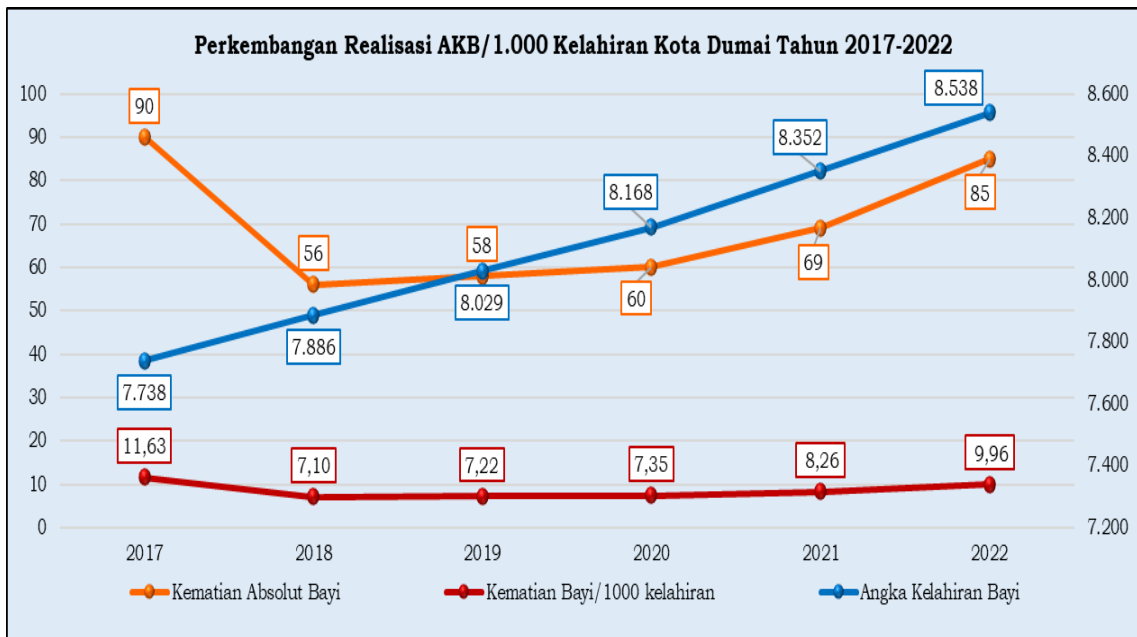
Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2017-2022 realisasi capaian Angka Kematian Bayi sebanyak 11,63 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2017 kemudian menurun menjadi 9,96 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2022. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8.538	1,99
2	Kematian Absolut Bayi	Bayi	90	56	58	60	69	85	1,49
3	Kematian Bayi/1000 kelahiran	Bayi	11,63	7,1	7,22	7,35	8,26	9,96	-0,51

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Perkembangan tren Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup di Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -0,51% per tahun, walaupun jumlah kelahiran bayi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 1,99% per tahun atau bertambah dari 7.738 bayi tahun 2017 menjadi 8.583 bayi tahun 2022. Perkembangan trend Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada Gambar berikut.



Gambar 2.25: Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Angka Kematian bayi per Kecamatan dari tahun 2017-2022 fluktuatif. Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur. Rata angka kematian bayi per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 12,15/1000 KH dan Kecamatan Bukit Kapur sebesar 10,63/1000 KH.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir.

Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Angka kematian bayi tahun 2017-2022 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.68
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/ Tahun
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	11,00	8,90	7	5,84	7,00	5,47	8,00	6,44	5	3,94	8	6,23	0,08
2	Dumai Timur	14,00	8,40	11	9,27	11,00	6,26	8,00	4,48	12	6,57	13	7,59	1,93
3	Dumai Selatan	17,00	12,19	7	2,98	7,00	5,12	10,00	7,19	15	10,55	22	14,19	16,14
4	Dumai Barat	16,00	14,53	7	2,72	7,00	6,24	10,00	8,76	9	7,73	16	14,57	10,88
5	Bukit Kapur	16,00	14,37	13	9,77	13,00	10,40	10,00	7,87	13	9,99	15	11,35	0,71
6	Sungai Sembilan	12,00	14,18	9	6,49	9,00	9,56	11,00	11,48	9	9,18	8	6,59	-6,41
7	Medang Kampai	3,00	9,68	4	21,92	4,00	10,75	3,00	7,94	6	15,50	3	7,09	11,67
	Kota Dumai	90,00	11,63	56,00	7,10	58,00	7,22	60,00	7,35	69,00	8,26	85,00	9,96	1,49

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi.

2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022, pada Tabel berikut.

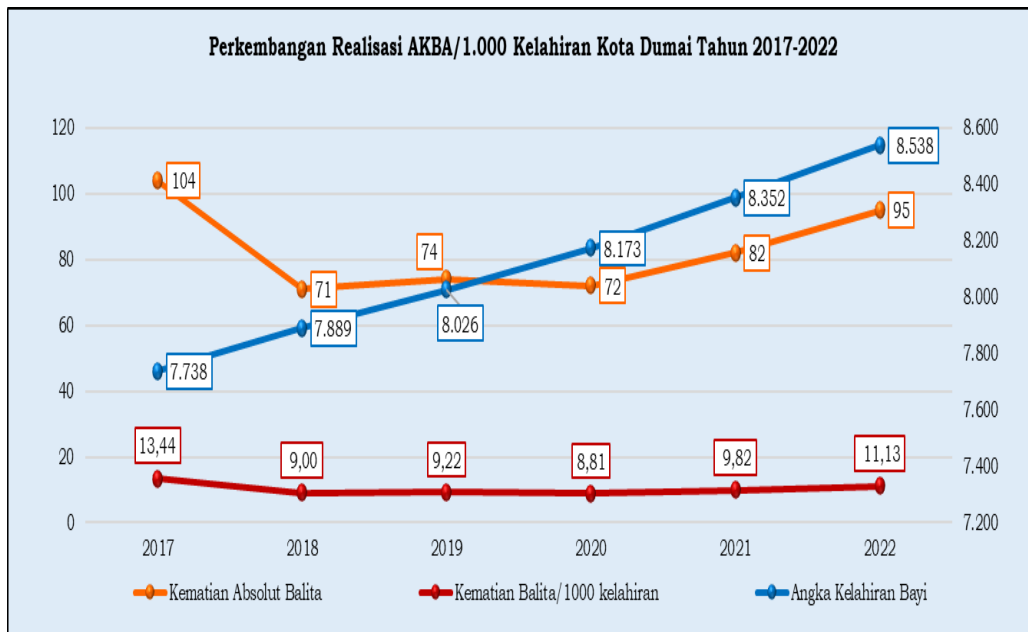
Tabel 2.69
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Kelahiran Bayi	Balita	7.738	7.889	8.026	8.173	8.352	8.538	1,99
2	Kematian Absolut Balita	Balita	104	71	74	72	82	95	-0,09
3	Kematian Balita/1000 kelahiran	Balita	13,44	9,00	9,22	8,81	9,82	11,13	-2,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 13,44/1000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 11,13/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2022. Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan

perbaikan dengan penurunan sebesar -2,05% per tahun, seiring dengan jumlah balita bertambah dengan pertumbuhan sebesar 1,99% per tahun atau berkurang dari 7.738 balita tahun 2017 menjadi 8.538 balita tahun 2022. Perkembangan trend Angka Kematian Balita 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada Gambar berikut.



Gambar 2.26: Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sementara itu Angka Kematian balita per Kecamatan di Kota Dumai dari selama tahun 2017-2022 fluktuatif. Angka kematian tertinggi setiap tahunnya terdapat di wilayah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur. Rata angka kematian balita per tahunnya di Kecamatan Medang Kampai sebesar 15,11/1000 KH dengan pertumbuhan 33,67% per tahun dan Kecamatan Bukit Kapur sebesar 13,00/1000 KH dengan pertumbuhan -1,17% per tahun. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2017-2022 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Angka Kematian Balita (/1000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	12,00	9,71	7	5,84	7,00	5,74	9,00	7,25	7	5,51	8	6,23	-4,21

No	Kecamatan	Angka Kematian Balita (/1000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
2	Dumai Timur	15,00	9,00	18	10,43	13,00	7,39	10,00	5,6	13	7,12	15	8,67	2,91
3	Dumai Selatan	19,00	13,62	4	2,98	7,00	5,12	12,00	8,62	18	12,66	22	14,19	27,94
4	Dumai Barat	16,00	14,53	6	5,45	14,00	12,49	12,00	10,52	10	8,58	20	17,99	27,98
5	Bukit Kapur	20,00	16,90	15	12,21	17,00	13,60	13,00	10,23	16	12,30	17	12,77	-1,17
6	Sungai Sembilan	18,00	21,28	9	9,73	11,00	11,69	13,00	13,57	12	12,24	9	8,79	-8,46
7	Medang Kampai	4,00	12,90	12	32,88	5,00	13,44	3,00	7,94	6	15,50	4	7,98	33,67
	Kota Dumai	104,00	13,44	71,00	9,00	74,00	9,22	72,00	8,81	82,00	9,82	95,00	11,13	-0,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklampsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk

memeriksa kesehatan. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi atau pre eklamsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

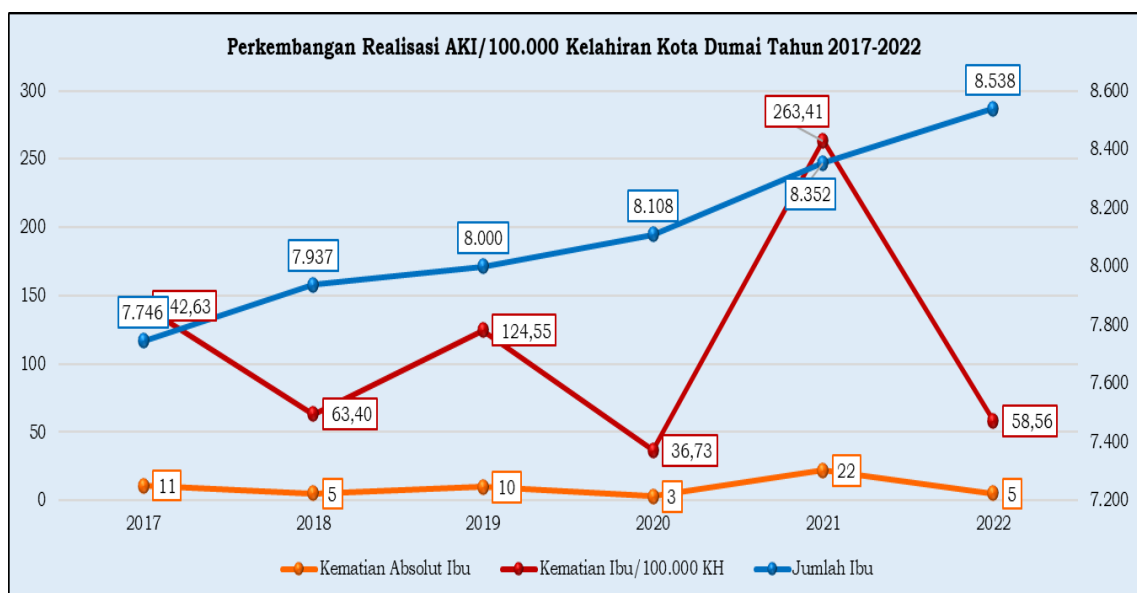
Tabel 2.71
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Ibu	Ibu	7.746	7.937	8.000	8.108	8.352	8.538	1,97
2	Kematian Absolut Ibu	Ibu	11	5	10	3	22	5	106,30
3	Kematian Ibu/100.000 KH	Ibu	142,63	63,40	124,55	36,73	263,41	58,56	101,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian ibu di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 142/100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 58/100.000 kelahiran hidup bayi di tahun 2022.

Perkembangan tren Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar -101,96% per tahun, seiring dengan jumlah ibu melahirkan bertambah dengan pertumbuhan sebesar 1,97% per tahun atau bertambah dari 7.746 ibu tahun 2017 menjadi 8.583 ibu tahun 2022. Perkembangan trend Angka Kematian ibu 100.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 pada Gambar berikut.



Gambar 2.27: Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Dari data angka kematian ibu menurut Kecamatan dari tujuh Kecamatan terdapat lima Kecamatan pada tahun 2022 yaitu Dumai Timur, Dumai Selatan,

Dumai Barat, Sungai Sembilan dan Medang Kampai, Kecamatan dengan rata-rata angka kematian ibu terbanyak terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 321,71 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.72
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu (/100.000 Kelahiran Hidup)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	
1	Dumai Kota	2,00	162,00	0	0	1,00	82,00	1,00	81	2	157,48	0	0,00	-20,00
2	Dumai Timur	1,00	60,00	1	58	4,00	228,00	-	0	5	273,67	1	54,20	24,00
3	Dumai Selatan	2,00	143,00	0	0	1,00	73,00	-	0	2	140,65	1	70,97	-50,00
4	Dumai Barat	3,00	272,00	1	91	1,00	89,00	-	0	3	257,51	1	85,69	-46,67
5	Bukit Kapur	2,00	169,00	2	163	-	-	1,00	79	6	461,18	0	0,00	60,00
6	Sungai Sembilan	1,00	118,00	0	0	2,00	213,00	-	0	0	0,00	1	219,78	-40,00
7	Medang Kampai	-	-	1	274	1,00	269,00	1,00	265	4	1033,59	1	88,65	45,00
	Kota Dumai	11,00	142,00	5,00	63,00	10,00	125,00	3,00	37,00	22,00	263,41	5,00	58,56	106,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

4) Angka Kematian Neo-Natal per 1.000 Kelahiran

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Keberhasilan Kota Dumai mengurangi Angka Kematian Neonatal karena adanya program alarm persalinan. Berikut data Angka Kematian Neonatal di Kota Dumai dalam Tabel berikut.

Tabel 2.73
Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	Orang	91,30	61,00	46,00	39,00	46,00	6,09	-28,36
2	Angka Relatif Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	%	9,13	6,10	4,60	3,90	4,60	0,609	-28,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

AKN Kota Dumai pada tahun 2017-2022 mengalami perkembangan fluktuatif yang cenderung menurun sejak tahun 2017 sebanyak 9,13% per 1.000 kelahiran kemudian berkurang menjadi 0,609% bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2022 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -28,36% per tahun. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menghindari kematian neo-natal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

5) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKB, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKB;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat

berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit.A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (*Golden Period*).

Jumlah posyandu dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan sebesar 0,20% per tahun, dari 196 posyandu pada tahun 2017 meningkat menjadi 198 pada tahun 2022. Sementara jumlah balita mengalami peningkatan dari 33.396 orang tahun 2017 menjadi 34.761 orang tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 2,17% per tahun. Kondisi ini telah menyebabkan peningkatan rasio pelayanan posyandu dengan cakupan pelayanan dari 1:170 pada tahun 2017 menjadi 1:175 pada tahun 2022. Walaupun demikian namun rasio tersebut masih melebihi dari standard yang ada yaitu 1:50 atau 1 posyandu dengan 50 balita. Dengan demikian mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan posyandu sejak tahun 2017-2022. Berikut disajikan data rasio posyandu per satuan balita pada Tabel berikut.

Tabel 2.74
Perkembangan Rasio Posyandu Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Posyandu	Unit	196	196	196	197	197	198	0,20
2	Jumlah Balita	Orang	33.396	34.063	41.381	34.068	28.972	34.761	2,17
3	Rasio posyandu per satuan balita	Indek	170,39	173,79	211,13	172,93	147,07	175,56	1,96

Sumber: Profil kesehatan Provinsi Riau, 2023

Hal ini terjadi karena kemampuan penyediaan fasilitas posyandu yang terbatas walaupun jumlah balita berkurang setiap tahunnya. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk bersama memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

6) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2017-2022 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 4 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi

dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 2.74

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2017 adalah sebesar 0,010 naik menjadi 0,012 pada tahun 2022. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2022, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,012 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.75
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	6,67
Jumlah penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Indek	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,012	4,35

Sumber: Dinas Kesehatan dan Kota Dumai Dalam Angka, 2020 diolah

7) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2022 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 162 dokter pada tahun 2017 menjadi 241 dokter pada tahun 2022.

Tabel 2.76
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2022

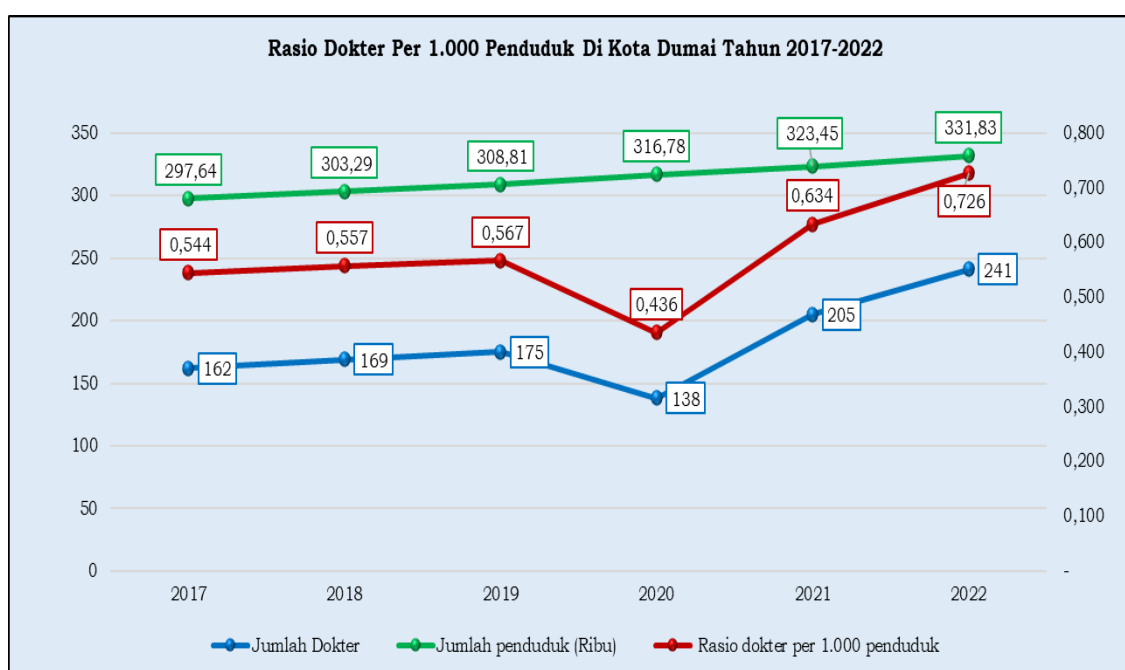
Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Dokter	Unit	162	169	175	138	205	241	10,57
Jumlah penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,11
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,544	0,557	0,567	0,436	0,634	0,726	-3,45

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2022 adalah sebesar 0,726 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,726 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 1.377 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu penambahan

jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, tidak dimbangi dengan pertambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.



Gambar 2.28: Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

8) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022, menunjukkan peningkatan dari 3,726 tahun 2017 menjadi 6,087 tahun 2022, lihat Tabel berikut

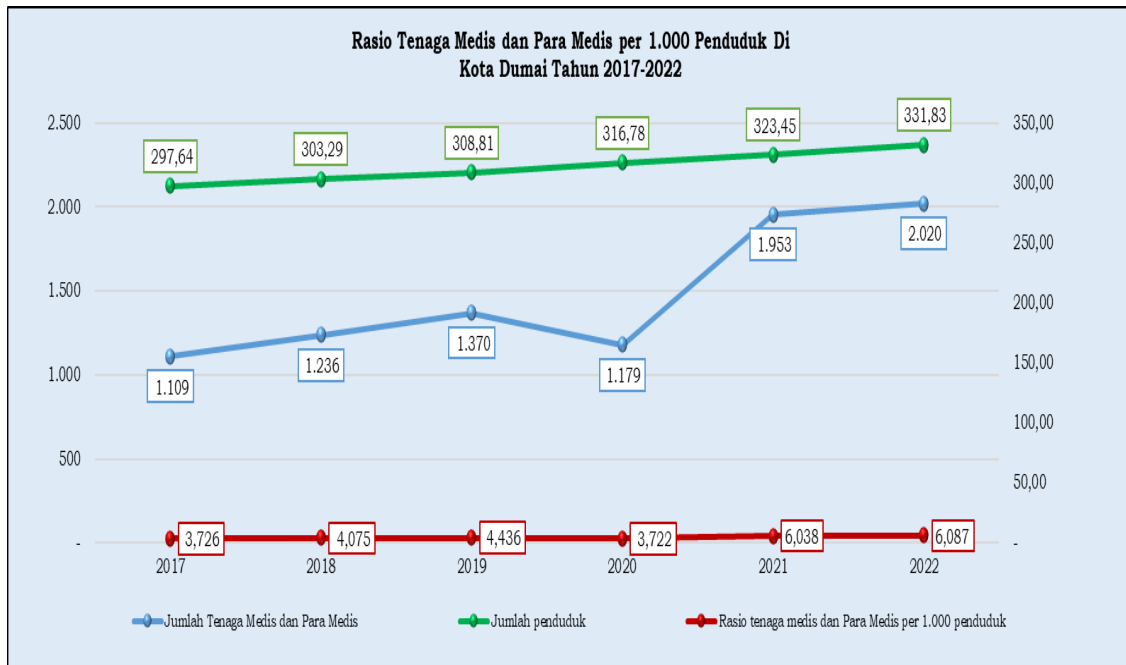
Tabel 2.77
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	1.109	1.236	1.370	1.179	1.953	2.020	15,49
Jumlah Tenaga Medis	Jiwa	162	169	175	191	353	354	4,63
Jumlah Tenaga Para Medis	Jiwa	947	1.067	1.195	1.041	1.748	1.779	2,28
Jumlah penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Indek	3,726	4,075	4,436	3,722	6,038	6,087	-0,35

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Jika dilihat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2017 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 268 jiwa penduduk kemudian mengalami perbaikan menjadi 164 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2022.

Perkembangan rasio layanan tenaga Kesehatan pada penduduk Kota Dumai tahun 2017-2022 lihat Gambar di bawah ini.



Gambar 2.29: Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2017 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.109 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 36 orang, dokter umum sebanyak 72 orang dan dokter gigi sebanyak 23 orang, namun pada tahun 2022 jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 53 orang dokter spesialis, 166 orang dokter umum dan 22 orang dokter gigi. Dengan demikian pada tahun 2022 rasio dokter spesialis sebesar 16 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 50 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 7 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.78
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2017-2022

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis							Pertumbuhan/Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Dokter Spesialis	30	36	32	39	49	46	53	9,10
Dokter Umum	87	72	80	100	89	138	166	20,09
Dokter Gigi	23	23	21	22	26	21	22	-0,04
Perawat	425	435	485	565	532	681	642	8,89
Bidan	314	331	336	536	415	592	651	18,22
Apoteker	41	38	21	65	63	178	205	71,88
Asisten Apoteker	17	19	37	-	-	-	-	-1,05
Gizi	25	25	25	29	31	35	41	10,59
Sanitasi	10	10	9	-	-	-	-	-22,00
Kesehatan Masyarakat	44	52	67	38,00	-	48	52	-1,22
Teknisi Medis	81	68	67	-	-	50	53	-19,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2019 dan Kota Dumai Angka 2023

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa seluruh Kecamatan di Kota Dumai tidak melebihi standar WHO yaitu 2.500 penduduk per seorang dokter, jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.79
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	Rasio Dokter dan Para Medis Terhadap Penduduk Tahun 2022							
		Jumlah Penduduk	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Rasio Dokter/Jumlah Penduduk	Rasio Para Media/Jumlah Penduduk
1	Bukit Kapur	54.734	34	50	91	15	9	1.610	332
2	Medang Kampai	18.512	14	22	26	6	2	1.322	331
3	Sungai Sembilan	45.298	22	41	69	6	1	2.059	387
4	Dumai Barat	46.198	27	31	80	10	5	1.711	367
5	Dumai Selatan	54.276	73	112	89	34	7	744	224
6	Dumai Timur	72.106	79	310	190	75	14	913	122
7	Dumai Kota	40.708	105	76	106	59	3	388	167
	Kota Dumai	331.832	354	642	651	205	41	937	216

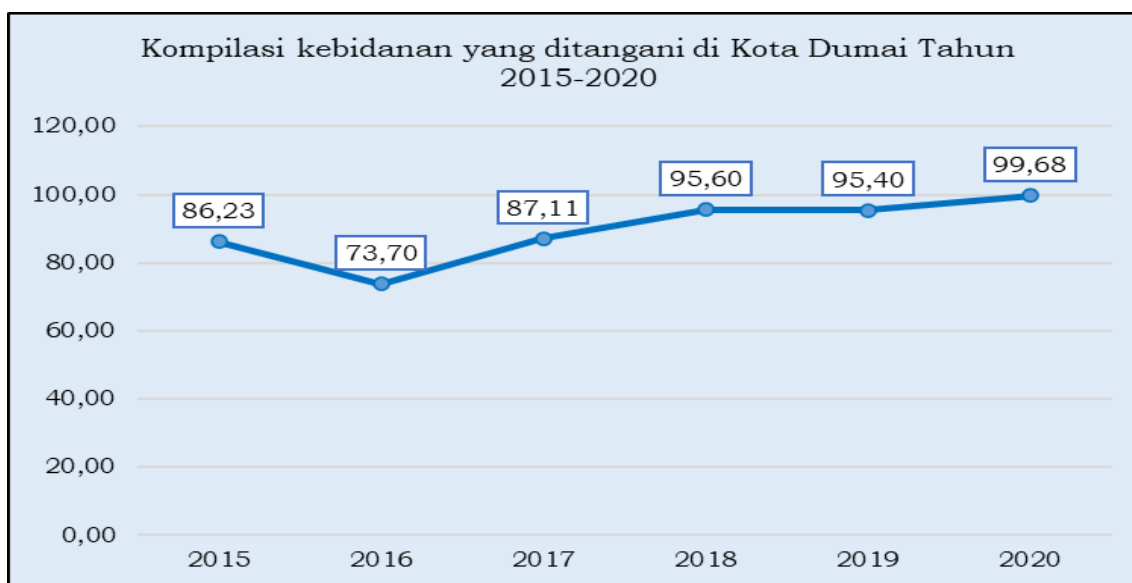
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2021 dan Kota Dumai Angka, 2023

9) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah

sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONEC dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif). Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,54% per tahun atau telah mencapai target indikator kinerja tahun 2020 dengan cakupan 99,68%.



Gambar 2.30: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2017-2022

10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2017-2022 cenderung menurun dengan pertumbuhan sebesar -0,56% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2.31: Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung menurun dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 90,34%.

Jika dibandingkan dengan target indikator Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 telah melebihi target nasional hanya sebesar 0,34%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang belum memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

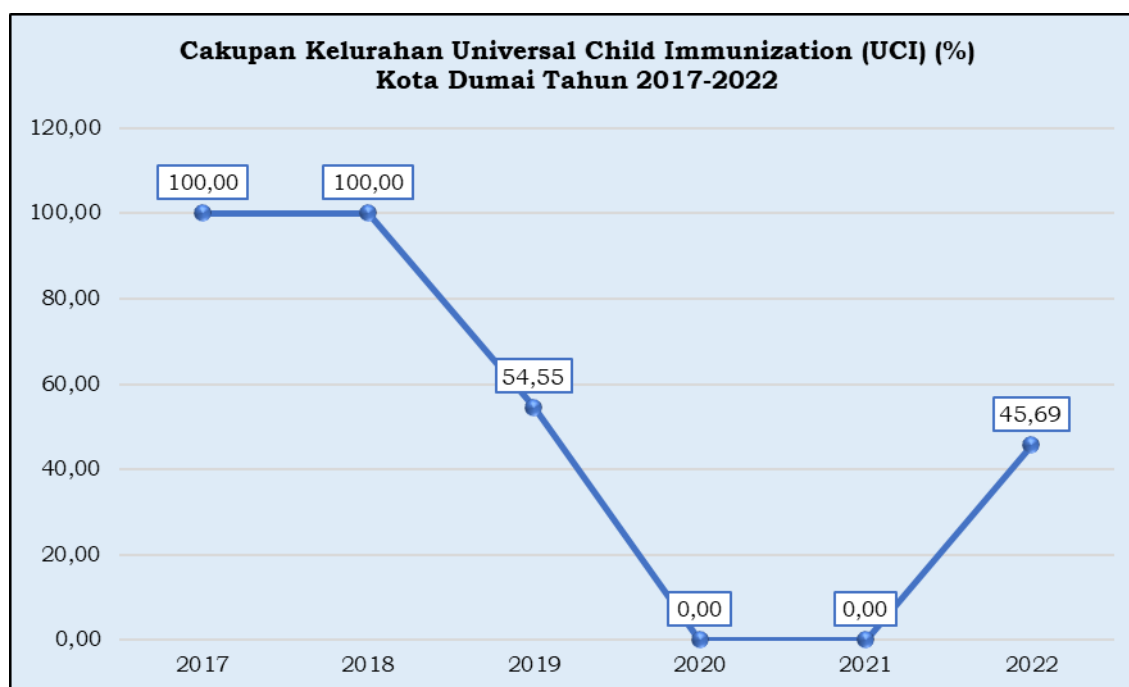
11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Untuk cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPTnHBHib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak ruibella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis Td. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2017-2022



Gambar 2.32: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Selama tahun 2017-2022, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2020-2021. Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19 tahun 2020, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Namun demikian, cakupan kelurahan UCI kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 45,69%. Angka ini masih jauh dari target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai, dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak/MR.

Tabel 2.80
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	5	100	-20,00
2	Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	3	60,3	-20,00
3	Dumai selatan	5	100	5	100	1	20	0	0	0	0	0	0	-36,00
4	Dumai Barat	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	2	50	-20,00
5	Bukit Kapur	5	100	5	100	3	60	0	0	0	0	3	42,86	-28,00
6	Sungai Sembilan	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	4	66,67	-20,00
7	Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	-20,00
	Kota Dumai	33	100	33	100	18	54,5	0	0	0	0	17	45,69	-29,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.81
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi
di Kota Dumai Tahun 2017–2022

No	Jenis Imunisasi	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	BCG	87,93	76,98	84,59	79,53	79,77	71,58	-3,70
2	Campak	68,34	66,94	64,58	54,55	50,22	44,52	-8,08
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	83,11	79,44	76,50	77,08	72,56	65,97	-4,46
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	87,15	82,78	83,68	80,24	78,67	53,14	-8,49
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	81,26	81,50	81,74	75,66	70,82	70,90	-2,63

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

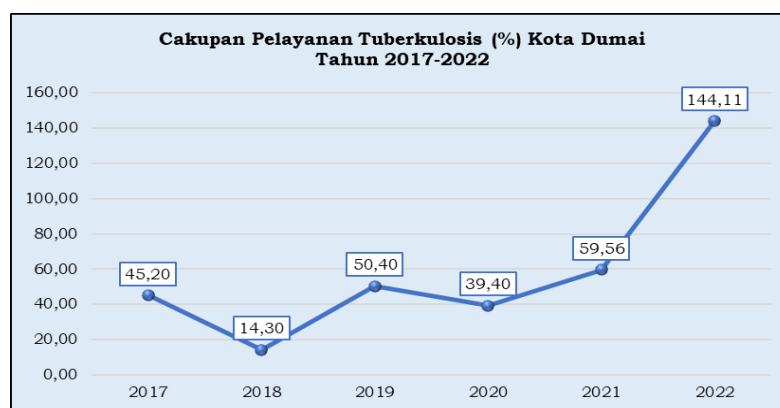
Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Untuk penanggulangan Tuberkulosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberkulosis, WHO telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2017-2022 sudah mulai membaik, karena sudah mencapai 100% pada tahun 2022. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Kota Dumai dari tahun 2017-2022.



Gambar 2.33: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2022 belum semua Kecamatan belum mencapai target, rata-rata pertahunnya hanya berkisar 144,11%. Cakupan terendah berada di Kecamatan Dumai Timur, rata-rata pertahunnya hanya 69,69 % dari target 100%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kedepan yang masih

cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.82
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	216,00	53,30	156,00	5,14	575,00	55,10	686,00	58,40	731	59,14	1.826	142,21	205,87
2	Dumai Timur	205,00	36,90	379,00	8,70	346,00	23,50	320,00	17,00	667	31,46	1.446	69,69	54,52
3	Dumai selatan	324,00	47,80	351,00	10,30	568,00	69,70	392,00	36,90	1.348,00	113,18	3.284	226,64	151,63
4	Dumai Barat	410,00	47,80	671,00	24,00	562,00	59,00	491,00	43,10	644	48,68	2.472	199,84	78,51
5	Bukit Kapur	226,00	31,10	348,00	11,20	340,00	55,50	473,00	62,30	596	59,42	1.272	124,1	89,61
6	Sungai Sembilan	309,00	162,00	335,00	14,30	312,00	63,00	202,00	41,70	339	85,1	699	104,64	68,52
7	Medang Kampai	94,00	18,00	166,00	17,80	149,00	56,40	101,00	36,70	226	61,08	606	192,38	92,44
	Kota Dumai	2.148,00	45,10	2.862,00	14,30	2.852,00	50,40	2.665,00	39,40	4.551	59,59	11.605	144,11	71,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

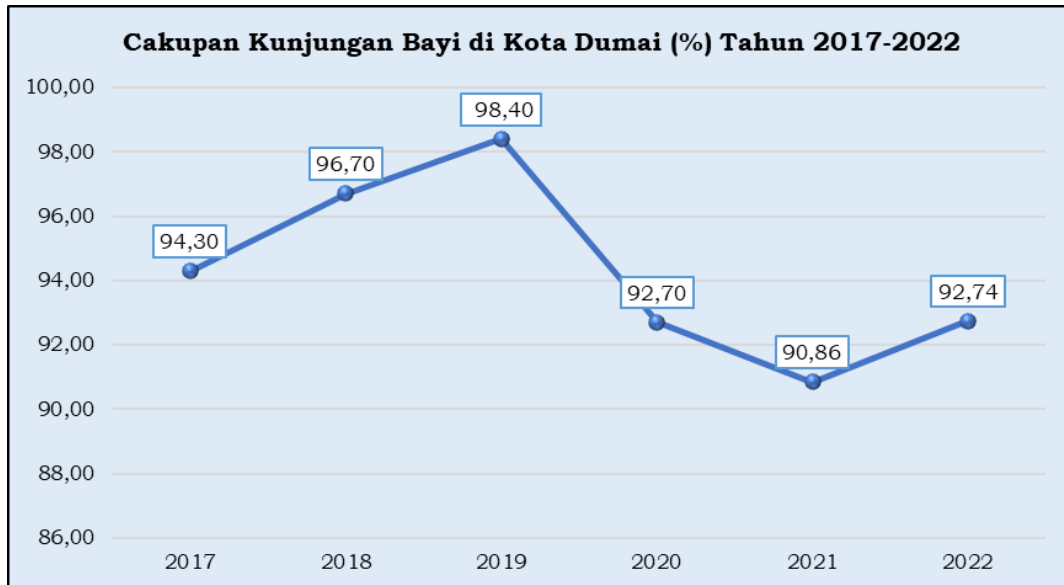
Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan standar kepada ibu bersalin di eilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Standar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2017-2022 fluktuatif, belum mencapai target 100%.

Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 94,30% dan pada tahun 2022 sebesar 92,74%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.34: Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pelayanan berdasarkan Kecamatan maka capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan Dumai Kota. Jika dilihat kedua Kecamatan tersebut menunjukkan angka yang melebihi seratus persen karena perkiraan jumlah absolut melebihi dari angka atau target. Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target secara keseluruhan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi ke pusat pelayanan kesehatan di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 hanya sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana sebelumnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan posyandu tidak berjalan. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar di atas dan per kecamatan Tabel berikut.

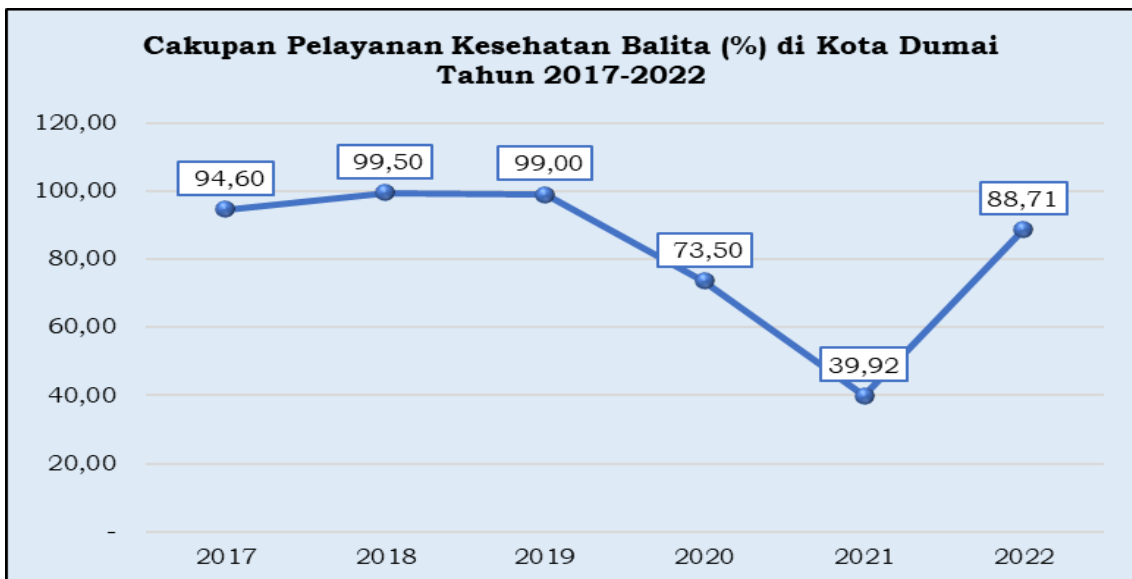
Tabel 2.83
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	1.225	99,10	1.188	99,20	1.220	100,00	1.050	84,50	1.276	100,47	1.146	101,96	1,16
2	Dumai Timur	1.647	98,80	1.709	99,00	1.756	99,90	1.805	101,00	1.779	97,37	1.920	104,07	1,10
3	Dumai selatan	1.377	98,70	1.339	99,70	1.348	98,60	1.341	96,40	1.377	96,84	1.363	96,74	-0,39
4	Dumai Barat	1.076	97,70	1.086	98,60	1.111	99,10	1.145	100,40	992	85,15	1.129	96,74	0,23
5	Bukit Kapur	978	82,70	1.040	84,70	1.155	92,40	1.021	80,30	1.048	80,55	1.162	82,41	0,21
6	Sungai Sembilan	727	85,90	908	98,20	940	99,90	814	85,00	755	77,04	744	65,96	-4,52
7	Medang Kampai	309	99,70	357	97,80	370	99,50	397	105,00	362	93,54	454	99,78	0,22
	Kota Dumai	7.339	94,80	7.627	96,70	7.900	98,40	7.573	92,70	7.589	90,86	7.918	92,74	-0,39

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.35: Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2022, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 88,71% (19.831 anak balita) dari 42.098 perkiraan jumlah anak balita. Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2022, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 99,59% dan terendah Kecamatan Sungai Sembilan hanya mencapai 61,85%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.84
Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	4.921	95,80	6.130	99,30	5.026	99,20	4.766	74,50	3.178	48,57	3.930	84,19	3,44
2	Dumai Timur	6.737	97,30	8.788	98,80	7.247	99,30	7.638	82,90	2.081	22,1	6.629	86,51	32,82
3	Dumai selatan	5.785	99,90	6.916	99,90	5.608	98,70	5.686	74,60	2.460	33,56	5.830	99,59	16,46
4	Dumai Barat	4.163	91,00	5.651	99,60	4.587	98,50	4.648	79,10	2.397	39,9	4.666	96,25	12,90
5	Bukit Kapur	4.676	95,20	6.310	99,80	5.111	98,50	3.465	52,90	3.401	50,74	5.654	96,53	9,63
6	Sungai Sembilan	2.959	84,20	4.761	99,90	3.910	99,90	3.004	60,80	2.798	55,42	2.897	61,85	3,31
7	Medang Kampai	1.174	91,20	1.882	100,00	1.529	99,20	1.720	88,30	868	43,55	1.854	98,04	23,62
	Kota Dumai	30.415	94,60	40.438	99,50	33.018	99,00	30.927	73,50	17.183	39,92	31.460	88,71	9,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

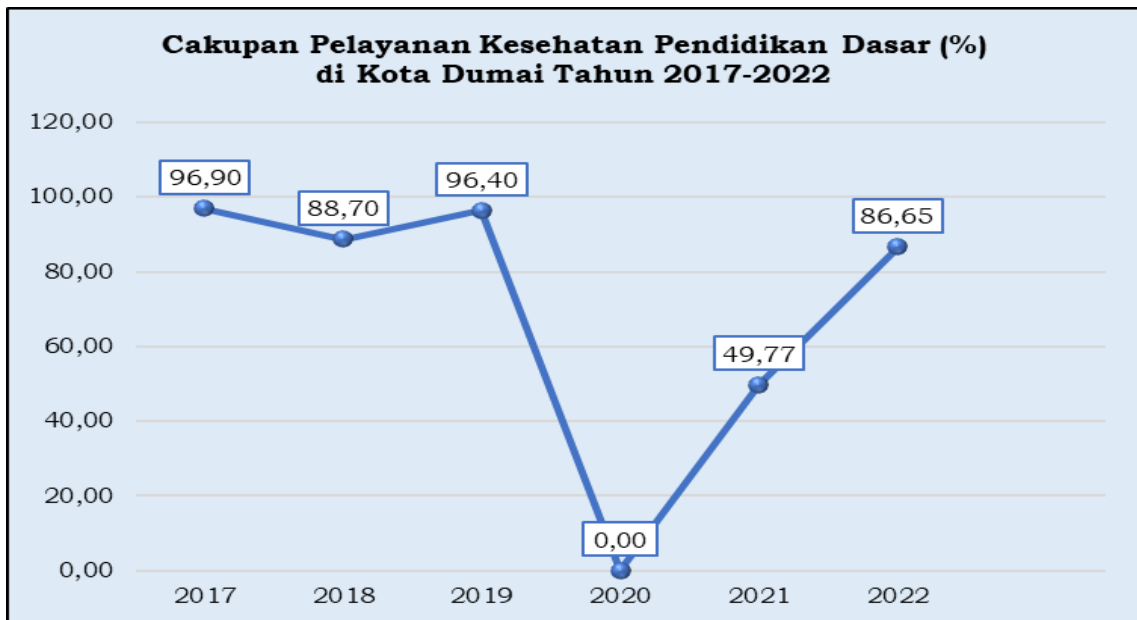
Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2017-2022 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, namun kembali meningkat menjadi 86,65% pada tahun 2022. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia

pendidikan dasar di Kota Dumai 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.36: Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik, namun pada tahun 2020 di 7 Kecamatan Kota Dumai cakupan 0% karena terjadinya pandemic COVID 19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.85
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	708	96,60	1.368	91,40	947	89,30	0,00	0,00	2.868	65,78	6.493	82,55	-16,44
2	Dumai Timur	1.734	100,00	2.116	92,60	2.080	97,70	0,00	0,00	5.047	55,88	10.721	83,02	6,55
3	Dumai selatan	962	93,80	2.481	95,30	2.461	98,10	0,00	0,00	4.320	64,12	8.885	90,07	32,55
4	Dumai Barat	660	95,50	1.325	96,10	1.388	97,10	0,00	0,00	2.639	39,65	7.561	92,53	38,40
5	Bukit Kapur	1.133	95,80	2.108	96,30	2.100	96,90	0,00	0,00	4.136	54,9	9.121	92,41	21,24
6	Sungai Sembilan	885	97,50	1.078	56,90	1.277	97,60	0,00	0,00	3.044	28,24	6.085	77,08	8,03
7	Medang Kampai	334	95,70	614	94,50	602	91,90	0,00	0,00	1.218	39,80	2.919	91,62	24,31
	Kota Dumai	6.416	96,90	11.090	88,70	10.855	96,40	0,00	0,00	23.272	49,77	51.785	86,65	18,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat, Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi, gangguan

keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2017-2022. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid 2019 terutama pada tahun 2020 hanya mencapai 43,00% dan kembali meningkat menjadi 85,94% pada tahun 2022. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.37: Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut *care giver*. Oleh karenanya, peran *care giver* menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan *care giver* termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para *care giver* itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.86
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2017 - 2022

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)												Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
1	Dumai Kota	2.085	95,70	2.012	95,30	2.114	98,40	973	44,50	1.608	71,91	1.874	94,69	-4,05
2	Dumai Timur	2.530	86,10	2.961	97,40	3.067	99,10	1.586	50,40	1.734	53,87	2.784	85,66	6,58
3	Dumai selatan	2.294	93,40	2.279	96,30	2.332	96,80	864	35,30	1.512	60,36	2.062	83,04	-4,98
4	Dumai Barat	1.852	95,50	1.837	94,70	1.869	94,70	878	43,70	1.265	61,59	1.827	88,86	-1,53
5	Bukit Kapur	1.935	92,90	2.053	95,00	2.067	93,90	974	43,50	1.865	81,37	2.081	83,81	-6,90
6	Sungai Sembilan	1.400	93,90	1.563	96,00	1.571	94,70	614	36,40	1.255	72,71	1.650	83,08	-3,46
7	Medang Kampai	494	90,60	640	99,50	595	90,8	302	45,30	580	85,17	646	80,55	-3,07
	Kota Dumai	12.590	92,40	13.345	96,10	13.615	96,30	6.191	43,00	9.819	66,74	12.924	85,94	-2,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik selama tahun 2017-2022, pada tahun 2022 di tujuh Kecamatan Kota Dumai cakupannya mencapai 85,94% dan capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota sebesar 94,69% dan terendah terdapat di Kecamatan Medang Kampai sebesar 80,55%. Rendahnya capaian secara umum disebabkan karena terjadinya pandemic COVID 19 pada tahun 2020. Oleh karena itu kedepan

yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderit gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang-undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, Pada tahun 2022 terdapat 193.681 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Dumai dari target 188.000 peserta. Dengan kata lain, pada tahun 2022 sekitar 103% penduduk kurang mampu atau miskin di Kota Dumai telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.87
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
APBD Kota Dumai	65.146	65.960	89.298	84.057	89.238	108.456	11,69
APBN	61.990	63.342	62.249	74.766	75.857	85.175	6,86

Sumber Dana	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	193.631	8,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

12) Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah

mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 12 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.88
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2022

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	1		
Dumai Barat	2. Dumai Barat	1		
	3. Purnama	1		
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur		1	17
	5. Bukit kayu Kapur	1		
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan		1	10
Medang Kampai	7. Medang Kampai		1	12
Dumai Kota	8. Dumai Kota	1		
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	1		
	10. Bukit Timah	1		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2022 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.89.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2022 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 3,31 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.88. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.89
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	316.782	10	3,16
2021	323.452	10	3,09
2022	331.832	10	3,01

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2023

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2022 sebanyak 12 unit yang tersebar di beberapa kecamatan. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.90
Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2022

Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
Dumai Barat	1. Parit Pisang Mas
Dumai Kota	2. Rimba Sekampung
Bukit Kapur	3. Gurun Panjang
	4. Simpang Murini
Sungai Sembilan	5. Suka Damai
	6. Basilam Baru
	7. Simpang Pulai
	8. Kampung Sejati
	9. Sungai Sepit
	10. Sungai Teras
	11. Bulu Hala
	12. Tianjung
Medang Kampai	13. Pelintung

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2017 sebanyak 13 puskesmas menjadi 12 puskesmas pada tahun 2022. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.91
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10	0,00
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	13	13	12	12	-1,54
Jumlah Seluruh Kelurahan	7	7	7	7	7	7	0,00
Rasio Puskesmas Pembantu	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

13) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam yaitu: puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana, kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki \pm 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.92
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2022

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A	Pengadaan IPL		

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021
B	Pengadaan IPL SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan sampah medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2022. Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk laboratorium Kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas A.

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100, permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2022 sebesar 151.547 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin. Namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkungannya lebih luas yang diperuntukkan untuk warga miskin di seluruh Indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

Tabel 2.93

Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2022

No	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	Sumur bor dalam rusak (berfungsi)
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Sungai Sembilan		2021	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Bukit Kapur		2022	
5.	Medang Kampai	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi karena pembangunan baru puskesmas
	Medang Kampai		2021	

No	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah genset
8.	Bukit Timah	2021	2019	Sumur bor sudah dipernaiki tahun 2022. Tanpa rumah genset
9.	Purnama	2021	2019	Tanpa rumah genset
10.	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah genset

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Dari 10 puskesmas hanya puskesmas Dumai Barat yang belum memiliki genset. Ada 4 puskesmas yang sudah memiliki genset tapi belum memiliki rumah genset yakni puskesmas Bumi Ayu, puskesmas Bukit Timah, puskesmas Purnama dan puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selain itu ada 2 puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni puskesmas Bumi Ayu dan puskesmas Bukit Kayu Kapur.

14) Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Penyakit Polio yang disebabkan oleh virus polio ini termasuk kedalam penyakit yang dapat dihilangkan atau dihentikan peredarannya dengan memberikan imunisasi polio. Upaya yang dilakukan Negara Indonesia untuk terbebas dari penyakit polio adalah Program Eradikasi Polio (ERAPO). Kegiatan yang termasuk kedalam program tersebut diantaranya imunisasi polio yang diberikan secara rutin, pelaksanaan imunisasi masal yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan pelaksanaan surveilans AFP. Pelaksanaan Surveilans AFP dilakukan untuk mencari adanya peredaran Virus Polio Liar (VPL). Hal tersebut dilaksanakan untuk pencapaian program eradikasi polio untuk menghentikan kasus polio. Selain itu surveilans AFP dilaksanakan untuk mendokumentasikan tidak adanya peredaran VPL atau VDPV dalam mempertahankan status Indonesia bebas polio (Gurnadi, Hartono. 2016).

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. b) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertent. Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Non Polio AFP rate di Kota Dumai tertangani sebesar 100% dari tahun 2017-2022, lihat Tabel berikut.

Tabel 2.94
Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jiwa	91.171	91.941	92.616	104.621	87.894	94.315	1,17
Jumlah Kasus AFP (Non Polio)	Kasus	0	2	4	1	4	4	65,00
Non Polio per 100.000 Penduduk	%	0,00	2,18	4,32	0,96	4,55	3,77	75,45

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2023

15) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2020 (2,03%), Tahun 2021 (0,17%) dan pada tahun 2022 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 547 kasus dengan prevalensi rate 0,16% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017 secara berurutan berjumlah 1000 jiwa, 540 jiwa dan 18.305 jiwa . pada tahun 2022 prevalensi HIV di Kota Dumai 0,16% dengan jumlah kasus HIV 547 penderita dari estimasi 204.974 penduduk yang beresiko.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2022 0,007 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 7 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2022 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 186 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 56,64/100.000. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 186 kasus dengan melakukan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka

kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2022 Kasus penemuan TB di Kota Dumai masih berkisar 3,16% yaitu ada 367 kasus dari 11.605 kasus yang harus ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2022 angka kesembuhan TB Paru sebesar 41,40% dari target 88%, dari 367 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 152 kasus

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2022 sebanyak 8.866 penderita atau IR IR 270/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2022 Hipertensi tercatat 33.349 Penderita (46,93%) dan Diabetes Melitus tercatat 3.540 Penderita (94,68%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2022, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan

sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2022 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,60%). *Screening*, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2022 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami *triple burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

16) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

17) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2022 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Jaya Mukti (15,39%) sudah melebihi angka batas rasional (8%).

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk, ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan

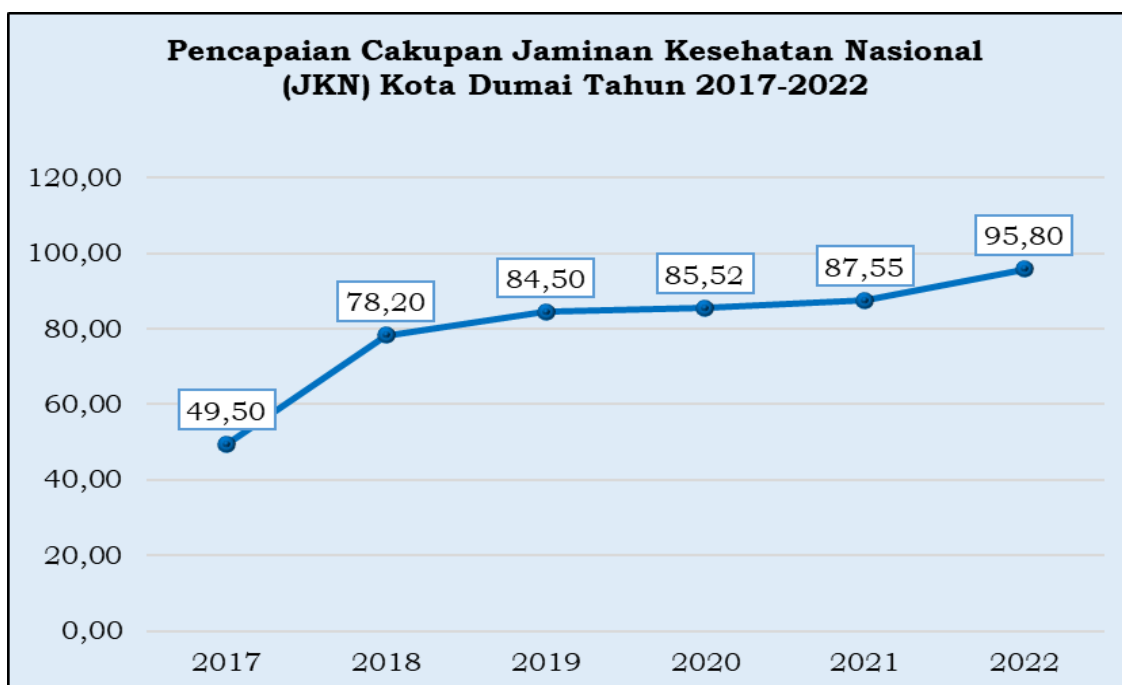
bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019, jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

18) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 85.175 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 108.456 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2022 yakni sebanyak 188.000 orang, maka telah terealisasi sebesar 103% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan, sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2022 adalah 331.832 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,20% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2022 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.



Gambar 2.38: Pencapaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2017 sampai dengan 2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 193.631 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 123.888 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 317.519 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 95,80%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 95%, maka angka tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2022 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (*Universal Health Coverage-UHC*). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

2.4.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat

pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

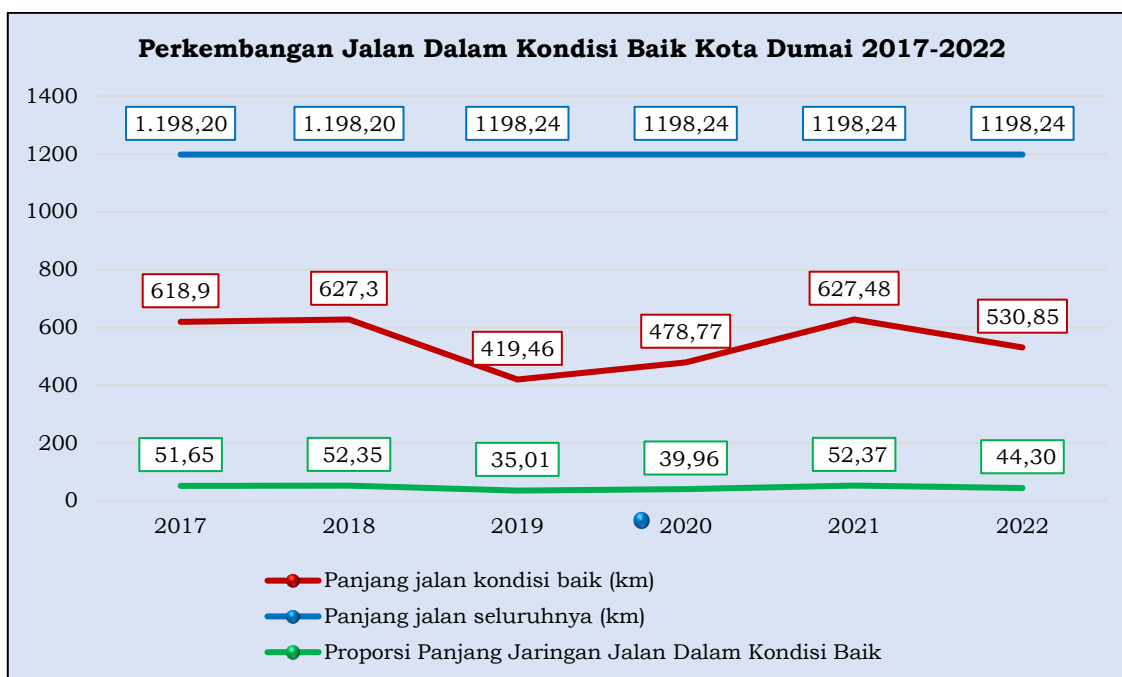
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sepanjang 618,90 km kemudian berkurang menjadi 530,85 km, jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.95
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						
	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan kondisi Rusak Berat (km)	km	150	154,09	580,36	154,09	152,16	350,09
Panjang jalan kondisi Rusak Ringan (km)	km	236,68	180,34	35,78	180,35	176,19	172,72
Panjang jalan kondisi Sedang (km)	km	424,89	242,86	161,80	242,86	242,49	145,04
Panjang jalan kondisi baik (km)	km	618,9	627,3	419,46	620,96	530,845	530,845
Panjang jalan seluruhnya (km)	km	1.198,20	1.198,20	1198,20	1198,20	1198,20	1198,20
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	51,65	52,35	35,01	51,82	44,30	56,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021, BPS Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2023

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan rata-rata penurunan sebesar -0,40% per tahun. Proporsi Panjang jalan yang baik pada tahun 2017 sebesar 51,65% kemudian turun menjadi 44,30% pada tahun 2022. Pada tahun 2019 turun menjadi 35,01%, kemudian naik kembali pada tahun 2020 menjadi 39,96%. Kembali mengalami peningkatan tahun 2021 menjadi 52,37% dan mengalami penurunan kembali 44,30%. Di tahun 2022 kondisinya terjadi penurunan persentase panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 44,30%. Berikut adalah Gambar yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.39: Perbandingan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dengan Panjang Jalan Seluruhnya (km) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kota Dumai Dalam Angka 2018, BPS Kota Dumai Tahun 2023

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel di bawah ini tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2021-2022. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 44,30% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik.

Tabel 2.96
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2022

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bukit Kapur	265,17	77,8	66,87	50,92	42,74	26,06	20,32	16,9	41,75
Dumai Barat	104,25	95,91	99,57	21,49	24,99	29,35	9,16	33,83	46,86
Dumai Kota	81,59	51,18	52,55	5,04	5,71	2,87	2,92	2,18	0,08
Dumai Selatan	88,67	100,02	102,01	11,43	11,24	9,71	8,06	11,27	11,12
Dumai Timur	56,32	96,28	107,42	26,36	19,49	9,77	9,44	10,08	5,96
Medang Kampai	252,83	142,86	56,2	88,11	12,54	39,83	40,64	21,07	182,48
Sungai Sembilan	349,41	63,43	46,23	39,14	28,33	58,6	81,73	56,83	61,85

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik menurun dari 52,37% di tahun 2021 menjadi 44,30% pada tahun 2022. Begitu pula sebaliknya, pada tahun 2022 terjadi pengurangan panjang ruas jalan, baik dalam kondisi sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Meskipun demikian, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 65%.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah

penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten dengan jumlah penduduk. Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Dumai selama periode 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.97
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Panjang jalan	Km	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	0,00
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Penduduk/Jalan	Jiwa/Km	248,40	253,11	257,72	264,37	269,94	276,93	2,20
Rasio Jalan/Penduduk	Km/Jiwa	0,0040	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036	-2,15

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas jalan oleh penduduk disuatu wilayah maka dilakukan perhitungan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Nilai rasio ini diartikan sebanyak panjang jalan yang terdapat dalam 1 km yang dapat digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas jalan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.96, menunjukkan bahwa setiap 1 km jalan di Kota Dumai pada tahun 2017-2022 dimanfaatkan oleh 298 orang/km kemudian berkurang menjadi 277 orang/km. Tahun 2022 rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk 0,0036 angka ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan jalan di Kota Dumai perlu terus diupayakan. Peningkatan angka rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat aksebilitas penduduk untuk pemanfaatan jalan semakin meningkat. Oleh karena itu upaya pembangunan, dan pemeliharaan jalan harus terus ditingkatkan dalam rangka menjamin aksebilitas penduduk dapat terpenuhi dalam rangka memobilisasi barang, jasa dan orang.

3) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan > 40 km/jam sebesar 44,80% pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 52,85% dengan persentase penurunan pertumbuhan sebesar -0,60% per tahun. Upaya peningkatan kondisi jalan baik harus terus dilakukan dalam rangka mempercepat dan memperlancar pergerakan barang dan jasa di wilayah ini dalam rangka mengurangi biaya logistik.

Tabel 2.98
Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan kabupaten	Km	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24
Jumlah Kendaraan	Unit	80.242	58.861	83.931	80.073	80.528	85.413
Rasio Panjang Jalan yang dilalui Roda empat	(Km/Unit)	1.198,24 : 80.242	1.198,24 : 58.861	1.198,24 : 83.931	1.198,24 : 80.073	1.198,24 : 80.528	1.198,24 : 85.413

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

4) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.99
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2011 – 2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,79	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Masjid	217	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Mushola	210	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Gereja Kristen	81	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Gereja Katolik	6	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Pura	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihara	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klenteng	10	73,53	73,53	73,53	73,53	73,53	73,53

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Hingga tahun 2022 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 1,83. Hal ini berarti dari setiap 1.000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

5) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang

digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat. Berikut Tabel yang menguraikan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai

Tabel 2.100
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak PDAM di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah rumah tangga pelanggan air minum layak PDAM	1.052	560	279	672	1.052	4.348	82,75
Jumlah rumah tangga	82.478	94.965	91.553	94.441	82.478	83.898	0,75
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%	1,28%	5,18%	83,72

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Dari Tabel 2.100 di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air minum layak PDAM di Kota Dumai tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan dari 1,28% pada tahun 2017 menjadi 5,18% di tahun 2022. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang menurun seperti yang tersaji pada Tabel 2.100.

Kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah Kota Dumai telah melakukan langkah-langkah komprehensif secara bertahap dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih rumah tangga terutama air minum layak selama periode 2017-2022.

Tabel 2.101
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Rumah Tangga	RT	69.241	70.556	71.840	73.305	75.234	77.181	2,20
Jumlah Rumah Tangga Mendapat Air Minum Layak	RT	55.074	61.200	63.147	66.488	68.004	72.589	5,72
Persentase Air Minum Bersih	%	79,54	86,74	87,90	90,70	90,39	94,05	3,46

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyediaan air minum layak di Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah RT yang dapat mengakses air minum layak sebesar 79,54% atau 55.074 RT tahun 2017 meningkat menjadi 94,05% atau 72.589 RT tahun 2022 dengan pertumbuhan 3,46% per tahun. Adapun sumber air

utama yang digunakan rumah tangga di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.102
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Air Kemasan/Isi Ulang	%	1,63	-	-	0,13	-	1,41	-40,00
Leding	%	0,49	2,49	1,22	5,09	5,76	0,55	119,42
Sumur Bor/Pompa	%	46,69	51,99	55,75	57,54	52,40	57,20	4,40
Sumur/Mata Air Terlindung	%	34,41	29,58	27,68	26,65	32,15	26,53	-4,20
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	%	7,68	8,2	9,23	4,71	4,6	5,17	-3,92
Lainnya	%	9,1	7,74	6,12	5,88	5,1	9,14	5,23

Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan sumber air utama di kota dumai berfluktuasi, penggunaan air kemasan/isi ulang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -40,00% selama tahun 2017-2022, untuk air leding mengalami peningkatan sebesar 119,20%, sumur bor/pompa mengalami pertumbuhan sebesar 4,40%, sumur/mata air terlindung dengan pertumbuhan -4,20% sedangkan sumber air sumur/mata air tak terlindung mengalami pertumbuhan sebesar -3,92% dan lainnya 5,23%.

6) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Masjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Di Kota Dumai terdapat 4 SPAM KPBU yang terdiri dari :

1. SPAM KPBU Kota Dumai (Kapasitas 450 lpd (Unsolicited))

Sumber Air Baku SPAM KPBU Kota Dumai berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA : 450 LPD dibagi 3 tahapan yaitu Tahap 1.a IPA paket baja 50 LPD telah selesai tahun 2019 dan telah beroperasi, Tahap 1.b IPA Beton 200 lpd telah selesai dibangun tahun 2022 dan telah beroperasi dan Tahap 2 IPA Beton 200 LPD direncanakan akan mulai dibangun pertengahan tahun 2024. SPAM KPBU Kota Dumai telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145.6/KPTS/M/2029 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

2. SPAM HFNF NUWSP (Kapasitas 50 lpd)

Sumber Air Baku SPAM HFNF NUWSP berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA terpasang 50 LPD dengan Teknologi membran Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) dan merupakan bantuan Bank Dunia melalui Program NUWSP (2021). SPAM HFNF NUWSP telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR

RI nomor 1145.6/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

3. SPAM Regional Durolis

Sumber Air Baku SPAM REGIONAL DUROLIS berasal dari : Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir. Kapasitas : IPA Tahap I 400 LPD Dimana Kota Dumai mendapat air curah sebesar 150 LPD di tahun 2022. SPAM Regional Durolis merupakan SPAM kewenangan Provinsi yang kelola oleh UPT Air Minum Provinsi Riau dengan wilayah pelayanan air minum di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis dengan total rencana pembangunan IPA sebesar 1.500 LPD yang dibagi dalam IV tahapan pembangunan (Tahap I IPA Kap. 400 LPD, tahap IPA Kap.II 400 LPD, Tahap III IPA Kap. 400 LPD dan Tahap IV IPA Kap. 300 LPD) dimana Tahap I IPA Kapasitas 400 LPD telah selesai dibangun di Tahun 2022 dan mulai beroperasi dengan target layanan air minum untuk Kota Dumai sebesar 12.000 SR akan tetapi kondisi eksisting saat ini air curah yang mengalir ke Kota Dumai hanya mampu sebesar 80 LPD dikarenakan adanya permasalahan pada jaringan pipa distribusi dari Offtake SPAM Melawai ke Offtake Reservoir Booster (RB) KM. 9 Mekar Sari Kota Dumai.

4. SPAM B TO B Wilayah Pelayanan Medang Kampai (Kapasitas 125 lpd)

Sumber Air Baku SPAM B TO B berasal dari Sungai Kemeli. Kapasitas : IPA membrane Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) Kapasitas 125 LPD progres saat ini masih dalam tahap konstruksi akhir. SPAM B TO B telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1058/KPTS/M/2023 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Kumeli Kota Dumai Provinsi Riau.

7) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1.000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Dalam rentang waktu tahun 2017-2022 jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.103
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota
Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan/ Tahun (%)
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS per Satuan Penduduk)	Unit TPS	15	15	20	21	21	22	8,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

8) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2022 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.104
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4,97	3,70	5,08	5,36	7,17	7,30	10,57
Persentase kepemilikan jamban cubluk	9,10	5,50	1,50	2,38	1,72	2,39	-8,48
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	85,05	90,40	94,93	94,64	92,83	95,49	2,39
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,88	0,50	-	-	-	-	-28,64

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0	0	1	1	0,00
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	93,75	92,39	94,65	95,38	97,03	91,44	10,57

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau, 2017-2022

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022, sudah mencapai 95,49% masyarakat yang memiliki tangki septik individual. Untuk pengolahan air limbah domestik sistem komunal, mengalami peningkatan di tahun 2022.

IPLT Kota Dumai dibangun pada tahun 2020 yang didanai dari APBN Tahun Anggaran 2020 Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau dengan Kapasitas 10 m³/hari. Infrastruktur terbangun berupa:

- 1) Unit instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdiri dari Solid Separation Chamber (SS), Equalisasi, Anaerob, Fakultatif, Maturasi.
- 2) Kantor
- 3) Gudang
- 4) Wokshop
- 5) Pagar Keliling
- 6) Pos Jaga

Dalam proses mendukung operasional IPLT Kota Dumai, di lengkapi dengan armada roda 4 berupa truk sedot lumpur tinja yang berjumlah 2 (dua) Unit dengan masing-masing kapasitas 3 m³ dan 2,5 m³.

Kota Dumai saat ini sedang dalam tahapan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sehingga pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat limbah domestic khususnya limbah tinja manusia. Berkenaan dengan operasionalisasi IPLT, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait kelembagaan, retribusi dan layanan lumpur tinja terjadwal. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada IPLT belum optimal.

Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah masih menunggu Penetapan Perda Air Limbah. Kemudian pada tahun 2024 sudah dianggarkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau untuk kegiatan Pendampingan Kelembagaan Air Limbah Domestik Kota Dumai.

9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun *private* telah memiliki total luas lebih dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Di Kota Dumai penetapan ruang terbuka hijau belum tertata secara administrasi baik dalam sistem tata ruang.

Tabel 2.105
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	5,94%	9,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023

19) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018-2022 izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diterbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB, tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan tahun 2022 sebanyak 88 PBG. Berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan, tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada bahwasannya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap.

20) Penataan Ruang

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja sasaran persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya pada tahun 2022 sebesar 56,87%. Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 59,99 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 59,99 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum

Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Pada Tahun 2020 pelaku usaha masih bisa mengurus perizinan secara offline ke PUPR, tahun 2022 advice planning sudah dihapuskan, digantikan dengan PKKPR dan KKPR, pelaku usaha disulitkan dengan sistem yg masih terbilang baru upgrade dari sistem oss rba yang lama, jadi proses perizinan berjalan lambat, karna advice planning tidak berlaku lagi dan semua perizinan harus online, pelaku usaha beradaptasi dengan sistem yg baru sehingga perizinan yg masuk ke PUPR tidak sebanyak saat advice planning berlaku. Pada tahun 2021 proses perizinan sudah beralih berbasis sistem yg terintegrasi dg RTR yang ada di Kota Dumai, dgn berlakunya proses peralihan tersebut maka adanya perubahan signifikan dr total tercapainya target perizinan yang ada di kota dumai dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem perizinan ini berbasis online yang gunanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses secara mandiri namun karna masih kurangnya pemahaman dan fasilitas yg di punyai oleh masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri menyebabkan tidak tercapainya target total perizinan. Sebenarnya perizinan bertambah dari tahun ke tahun, cuman pada tahun 2022 memang tidak sebanyak dan seluas tahun 2021, karna perbedaan mekanisme proses perizinan yg berubah, perizinan baru atau yg disebut dg OSS RBA updating dari sistem OSS sebelumnya yg terbilang baru sangat menyulitkan para pelaku usaha, karna sistem OSS RBA yg baru ini masih dalam tahap updating sampai akhir tahun 2022 kmaren, jadi proses perizinan berjalan tapi tidak selancar tahun-tahun sebelumnya

2.4.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria: kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan. Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2023, pada tahun 2022 persentase akses terhadap sanitasi layak Kota Dumai yaitu 89,96%, persentase akses terhadap sanitasi layak Kota Dumai yaitu 91,44% dan persentase kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita Kota Dumai yaitu 80,87%. Dengan menggunakan variable terkait, dapat dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2022 yaitu sebesar 87,42%.

Tabel 2.106
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (%)	76,60	74,20	78,61	82,31	90,00	87,42	2,80

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 77.181, jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data dimana jumlah Rumah layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 yaitu 19.855 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2022 yaitu 5,98. Berdasarkan data tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa terdapat rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu karena lebih banyak rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.107
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Rumah Tangga	69.241	70.556	71.480	73.670	75.236	77.181	2,20
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	17.559	16.918	18.945	19.349	19.469	19.855	2,61
Rasio Rumah Layak Huni	5,90	5,58	6,13	6,11	6,02	5,98	0,41

Sumber: BKKBN dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019, Tahun 2020 Ekstrapolasi Tim

2) Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2022 seluas 191,88 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 9.353 pada tahun yang tersaji pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	121,23	66,7	38,45	33,75	Tahap I : 0	191,88*	Tahap I (tuntas) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun

Indikator	Tahun						Sumber Data
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
							2021
					Tahap II : 216,73		Tahap II (sedang ditangani) : SK Walikota Dumai Nomor 663/1011/2022
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2.432	1.884	1.412	1.068	948	562	Olah data LKj-IP Dinas Perkimtan Tahun 2022
				9.724	9.739	9.353	Update data e-rtlh
Jumlah Perumahan Sudah Serah Terima Aset PSU Ke Pemerintah Kota Dumai (Perumahan)	n/a	n/a	n/a	1	1	2	Jumlah Perumahan Sudah Serah Terima Aset PSU Ke Pemerintah Kota Dumai (Perumahan)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

*Belum tertangani

3) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,60 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018.

Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung persentase lingkungan permukiman kumuh Kota Dumai tahun 2018 yaitu 0,03%. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2022 yaitu 191,88%. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.109

Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2022

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,41
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota, Sukajadi	22,19
Rimbis	Dumai Kota	Rimba Sekampung	12,98
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	9,88

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai, Simpang Tetap	34,59
		Darul Ihsan	
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi, Purnama	21,18
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari, Bukit Timah	19,5
Lubuk	Sungai	Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal	21,72
Penyembal	Sembilan		
Guntung Mundam	Medang Kampai	Guntung, Teluk Makmur,	42,43
Makmur		Mundam	
Total			191,88

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Keterangan: Lokasi Lingkungan dan Pemukiman Kumuh Perkotaan Tahap II Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor: 922 Tahun 2021.

Prasarana dan Sarana Utilitas

a. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.110
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	*)0,26	0,00	0,00	-30,02
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23	81	129	*)129	129	144	64,61
Jumlah Drainase Lingkungan Terbangun	n/a	16	29	*)33	33	39	22,64

*) Pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran akibat bencana Covid-19 di Indonesia
Sumber: Olah Data LKjIP Dinas Perkim Kota Dumai dan Bidang Kawasan Pemukiman

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota

Dumai diantaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 15 ruas jalan lingkungan dan 6 titik drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di Kawasan permukiman untuk dapat mengakses ke berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di Kota Dumai.

4) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahun 2017-2022

Tabel 2.111
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 Ruas Jalan	392 Ruas Jalan	412 Ruas Jalan	435 Ruas Jalan	445 Ruas Jalan	445 Ruas Jalan	3,84
Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi	35 Lokasi	33,93

Sumber: Olah Data LKjIP Dinas Perkim Kota Dumai dan Bidang Kawasan Pemukiman, 2023

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa di Kota Dumai, pada tahun 2022 terjadi peningkatan Pembangunan sarana PJU terhadap total Ruas Jalan yang dibangun sarana Penerangan Jalan Umum sebesar 445 ruas jalan atau sebanyak 35 lokasi di kota dumai.

2.4.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan

yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 3,23 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2017 menjadi 3,68 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2022. Hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin meningkat bersamaan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi kenaikan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

Tabel 2.112
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Polisi Pamong Praja	96	94	89	98	111	122	5,18
Jumlah penduduk per 10.000*	29,76	30,33	30,06	31,68	32,35	33,18	2,22
Rasio jumlah pamong praja	3,23	3,10	2,96	3,09	3,43	3,68	2,83

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023

2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 kali sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.113
Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	81	92	80	97,25	100	100	4,99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2022 terdapat 1.054 kegiatan penertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dimana 34,63% jenis kegiatan penertibannya adalah penertiban PKL, 25,81% adalah reklame spanduk dan sejenisnya, 9,96% karaoke, 9,01% pekat, 4,08% alat praga, 3,98 orang terlantar dan gila, 2,66% salon, 2,28% panti pijat, 1,61 bangunan liar, 1,23% hotel dan penginapan, 1,04% warnet, 0,85 IMB dan 0,57% adalah anak jalanan.

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2017 ada sebanyak 155 kasus dan pada

tahun 2022 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 1.164 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.114
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	155	156	166	178	238	1.164	87,14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2023

4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data kantor kesbanglinmas Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.590 orang dan tahun 2022 menjadi 1.599 orang. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.115
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.590	1.590	1.597	1.598	1.599	1.599	0,11

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, 2019. Data Tahun 2020 merupakan Ekstrapolasi Tim.

5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinir.

6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2017-2022 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.116
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	7	10	9	16	22	17	25,08

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2017-2022 berjumlah 1 (satu) kegiatan, kecuali pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang tanpa adanya kegiatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.117
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	-	-	-	-	0,00

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

8) Resiko Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman telah terjadi peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 20 kasus yang terbakar menjadi 44 kasus pada tahun 2022. Banyaknya kejadian kebakaran rumah penduduk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.118
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Permukiman di Kota Dumai Tahun 2017-2012

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	20 Kasus	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	44 Kasus	23,67
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan		365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	-23,31

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

9) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dengan Jumlah pelanggaran PERDA. Adapun realisasi Jumlah Pelanggaran PERDA pada tahun 2020 adalah sebesar 100% dapat diselesaikan. Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan non Perizinan di Kota Dumai dengan target pengawasan sebesar 100 Pengusaha terealisasi juga 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2021 sub kegiatan pengawasan

atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan target jumlah usaha yang memiliki izin lengkap di Kota Dumai dengan target 100 usaha dapat direalisasikan 100 usaha dengan Capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2022 target jumlah usaha yang memiliki izin lengkap di Kota Dumai dengan target 100 usaha dapat direalisasikan 100 usaha dengan Capaian kinerja 100%. Pertumbuhan jumlah PERDA selama tahun 2017-2022 sebesar 32,83% per tahun dengan persentase penegakan dengan pertumbuhan sebesar 4,72%.

Tabel 2.119
Persentase Penegakan PERDA di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Perda	6	3	12	5	8	1	32,83
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	4	3	11	5	8	1	36,92
Persentase Penegakan Perda (%)	75	80	90	100	100	100	4,72

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah.

2.4.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Peningkatan sarana sosial di Kota Dumai terus ditingkatkan melalui proses pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. Diharapkan melalui pembangunan sarana dan prasarana ini, diharapkan dapat memadukan penanganan berbagai aspek sosial serta dapat membantu masyarakat yang termarginalkan di Kota Dumai. Untuk jenis PD pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan pengemis di dalam panti. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Adapun kondisi aspek sosial di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel di bawah.

1) Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari 26 Kategori yang ada hanya 24 Kategori yang termasuk dalam data PPKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, panyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Adapun saat ini kategori yang memperoleh bantuan sosial yaitu keluarga fakir miskin yang berjumlah

sebanyak 24.702 KK tahun 2022. Pelaksanaan PPKS masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel di bawah.

2) Persentase PPKS yang Tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Berdasarkan Tabel berikut menunjukkan bahwa persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2017 sebesar 64,34% kemudian pada tahun 2022 sebesar 100,00%.

Tabel 2.120
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	Jiwa	4	4	0	0	0	0	0
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	Jiwa	12	12	12	10	0	48	75
3). Fakir Miskin	KK	15.882	17.998	18.794	21.008	41.419	47.346	44.772
4). Bayi Terlantar	Jiwa	334	307	307	307	307	0	0
5). Anak Terlantar	Jiwa	2292	2132	2132	25	5	7	16
6). Anak Berhadapan Hukum (Anak Nakal)	Jiwa	0	0	0	0	0	0	40
7). Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	0	0	0	0	0	0	135
8). Anak Korban Tindak Kekerasan (KTK)/Diperlakukan Salah	Jiwa	0	0	0	0	0	0	72
9). Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	595	571	571	423	303	1.210	1.652
10). Penyandang Cacat Jiwa	Jiwa	423	424	425	347	186	595	0
11). Penyandang Cacat Ganda	Jiwa	0	0	0	0	0	34	0
12). Tuna Susila	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0
13). Bekas Narapidana	Jiwa	0	0	0	0	0	4	0
14). Pengidap HIV/AIDS	Jiwa	0	0	0	0	0	15	500
15). Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	196	196	196	196	0	0	0
16). Korban Trafficking	Jiwa	0	0	0	0	0	0	1
17). Korban Bencana Alam	Jiwa	0	0	0	0	0	0	43
18). Korban Bencana Sosial	Jiwa	0	0	0	0	0	0	55
19). Korban Bencana Sosial	Jiwa	0	0	0	0	0	0	321
Jumlah Panti Asuhan		12	12	13	13	12	12	0
1). Panti Sosial Asuhan Anak	Buah	11	11	12	12	11	11	0
2). Panti Sosial Bina Remaja	Buah	0	0	0	0	0	0	0
3). Panti Sosial Tresna Werdha	Buah	1	1	1	1	1	1	0
Rumah singgah	Buah	1	1	1	1	1	1	0
Jumlah PPKS	Orang	19.738	21.644	83.012	80.299	43.247	49.206	0
1). PPKS Yang Tertangani	Orang	127	87	131	250	106	132	0
2). PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	19.738	21.644	79.016	78.682	41.419	47.346	0
3). PPKS Yang Diberikan Bantuan	KK	12.389	14.430	14.016	18.214	31.019	24.702	0
4). Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	62,77	66,67	73,81	94,07	70,75	52,17	0
5) Persentase PPKS yang tertangani	%	64,34	40,19	24,56	27,04	46,90	100,00	0
1). Karang Taruna	KT	33	33	33	33	33	33	33
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Orang	7	7	7	7	7	7	7
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	66	66	66	66	66	72	73
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	32	52	52	51	48	48	46
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	LKS	11	11	11	11	11	11	11
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	Orang	30	31	30	30	30	25	25
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8). Keluarga Pioner	Buah	0	0	0	0	0	0	1
9). Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	Buah	4	4	4	4	4	4	4
10). Penyuluh Sosial	Orang	11	11	11	11	11	11	11
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	Orang	0	0	0	0	0	0	0
12). Dunia Usaha	Buah	0	0	0	0	0	0	0

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan, prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja dan perbaikan upah. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.121
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	0,06
PHK	32	46	28	19	17	3	-24,08
Kasus PHK	32	26	17	19	17	3	-26,90
Orang Terkena PHK	75 Orang	46	28	49	24	4	-27,43
Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	PP 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, PP 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak juga sudah tidak berlaku lagi	-
Rata-rata Upah Minimum	2.655.372,50	2.886.655,44	3.118.453,87	3.383.834,29	3.383.834,29	3.414.160,86	-
L. Usaha Angkutan, Penggundangan dan Komunikasi	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981 tentang wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	-
L. Usaha Bangunan			sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Industri Pengolahan			sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan			sda	sda	sda	sda	-
Keuangan Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan			sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Listrik, Gas dan Air			sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dari Hotel			sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Pertambangan			sda	sda	sda	Berdasarkan UU No 7	-

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
dan Penggalian						Tahun 1981 tentang wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	
L. Usaha Pertanian. Perhutanan. Perburuhan dan Perikanan			sda	sda	sda	sda	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka 2023

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.122
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017- 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar	Orang	5.646	4.861	5.531	4.878	3.065	2.627	-12,68
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	1.210	2.112	1.524	5.474	129	320	71,26
3	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	21,43	43,45	27,55	112,22	4,20	12,6	95,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya

secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama, meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil. Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.123
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Laki-laki	8.288	4.869	5.513	6.961	6.412	5.696	-4,16
2	Perempuan	3.846	3.346	4.210	5.044	2.672	2.301	-5,66
	Jumlah	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997	-5,35

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan BPS Kota Dumai Tahun 2023

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan Kerja. Diperkirakan ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja diantaranya meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor- sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya (Muhyiddin, 2020)

4) Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.124
Keselamatan dan Perlindungan di Kota Dumai Tahun 2014- 2022

Indikator	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%0
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Keselamatan dan Perlindungan	151	165	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan dimana keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga data untuk tahun 2017-2022 tidak lagi menjadi urusan pemerintah Kota Dumai.

5) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.125
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	14	55	49	38	55	17	47,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

6) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2022 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah, menurut BPS Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 24.830 orang. Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu, tetapi harus diberikan secara profesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persaingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Persentase jumlah penduduk pekerja dengan lulusan S1 / S2 / S3 mengalami pertumbuhan sebesar 6,67% per tahun atau meningkat dari 496 orang tahun 2017 menjadi 632 orang tahun 2022 dengan rasio peningkatan dari 16,66% tahun 2017 menjadi 19,05% tahun 2022. Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1, S2 dan S3 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.126
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1/S2/S3 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Lulusan S1 / S2 / S3	496	564	736	811	844	632	6,67
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3 (%)	16,66	18,60	23,83	25,60	26,09	19,05	4,42

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Dengan berbagai latar belakang tersebut, tentu menjadi suatu potensi sumber daya manusia yang besar, yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna memajukan pembangunan daerah khususnya Kota Dumai kedepan. Lulusan perguruan tinggi merupakan salah satu sumber potensial untuk memberikan kontribusi, bukan hanya lapangan pekerjaan atau pendanaan, tetapi juga kontribusi pemikiran dan tenaga pengajar serta program magang atau pelatihan eksternal, terutama dilembaga pemerintah dan dunia usaha yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.127
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2022

Pendidikan tertinggi	2020					2021					2022				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Pengangguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	28.281	21,01	1.951	16,25	30.232	27.340	20,19	1.693	18,64	29.033	33.211	23,64	1.181	14,77	34.392
Sekolah Menengah Pertama	21.781	16,18	1.118	9,31	22.899	21.091	15,58	475	5,23	21.566	23.709	16,87	1.121	14,02	24.83
Sekolah Menengah Atas	34.754	25,82	3.291	27,41	38.045	34.120	25,20	2.109	23,22	36.229	41.144	29,28	1.823	22,8	42.967
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	24.715	18,36	3.104	25,86	27.819	26.599	19,65	2.722	29,96	29.321	23.931	17,03	2.504	31,31	26.435
Diploma I/II/III/Akademi	6.248	4,64	859	7,16	7.107	7.091	5,24	629	6,92	7.720	6.249	4,45	132	1,65	6.381
Universitas	18.802	13,97	1.682	14,01	20.484	19.140	14,14	1.456	16,03	20.596	12.265	8,73	1.236	15,46	13.501
Jumlah/Total	134.581	100,00	12.005	100,00	146.586	135.381	100	9.084	100	144.465	140.509	100,00	7.997	100,00	148.506

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023

Tabel 2.128
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	147	161	186	0	0	438	-14,99
2	Tenaga Kerja yang dilatih	16	58	48	0	0	278	29,05
3	Sajian data dimaksud diatas	10,88	36,02	25,81	0	0	63,33	20,54

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2023

2.4.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan PNS dan Non PNS serta di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Berdasarkan Tabel di bawah ini menunjukkan selama periode tahun 2017-2022 terjadinya peningkatan jumlah PNS perempuan di lembaga pemerintah dengan pertumbuhan 0,14%. Peningkatan ini juga sejalan dengan partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan dari 65,10% tahun 2017 menjadi 67,12% tahun 2022 dengan pertumbuhan 0,61% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah PNS secara keseluruhan sebesar -0,70% per tahun. Sementara di Lembaga DPRD turun sebesar -9,99% per tahun selama tahun 2017-2022. Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.129
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.094	4.008	4.087	3.946	3.936	3.950	-0,70
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	2.665	2.612	2.684	2.615	2.642	2.681	0,14
Partisipasi perempuan dilembaga swasta	%	65,10	65,17	65,67	66,27	67,12	67,12	0,61

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	13,33	13,33	13,33	6,67	6,67	6,67	-9,99

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 10.442 pada naik menjadi 51.223 pada tahun 2022. Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.130
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10.442	10.442	11.198	49.437	5.481	51.223	218,87

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

3) Cakupan Kekerasan Seksual

Adanya seks bebas dan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja menjadi salah satu isu strategis di daerah maupun di pusat akan memicu adanya kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2017 jumlah pelaku seks bebas bagi remaja di sebanyak 63 pelaku dan tahun 2022 menurun menjadi 23 pelaku. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebesar 320 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 56 pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.131
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi
Anak dan Remaja Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	Orang	63	26	14	9	4	23	55,77

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	Orang	320	38	19	15	3	56	305,50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

4) Pengarusutamaan Gender

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.132
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,97	90,82	90,86	90,66	90,72	90,74	0,17
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,49	59,90	56,78	52,97	52,54	52,58	-2,39
3	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	na	na	na	4,57	5,82	10,37	21,11
4	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,05	0,05	0,11	0,06	0,09	0,10	27,13
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,97	9,98	9,53	10,29	19,69	19,77	24,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indikator gender digunakan untuk mengetahui perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Keadilan gender merupakan kondisi adil yang diharapkan pada sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peluang sama pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmoni.

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya 0,10% yang dapat ditangani dari 19,77% rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Dumai. Dalam hal ini pemerintah harus sadar akan perannya sebagai fasilitator yaitu memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang mendukung proses penanganan korban kekerasan. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri, yaitu layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan korban ke lingkungannya.

Untuk itu statistik gender menjadi hal krusial untuk semakin di lengkap, sehingga bisa di lakukan analisa mendalam sebagai pijakan untuk pembuatan kebijakan yang tepat sasaran dan sudah pasti ber-responsive gender. Berikut beberapa indikator yang menggambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022, antara lain:

Tabel 2.133
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Dumai 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio KDRT	0,008	0,01	0,01	0,019	0,02	0,01	14,05
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	Na	4,4	6,07	100	100	100	317,08
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	Na	20	150	60	61	45	113,09
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	82,76	93,8	96,3	94,7	100	3,99
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	Na	31,03	91,42	-	-	-	38,92
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	18	-	-	-	0,00
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	Na	34,48	92	64,7	91,67	66,66	30,31
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Na	60,34	100	100	100	100	13,15
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	0	0,78	0	0	0	-20,00
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	96,55	82	100	100	100	1,38
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	101	91,50	97,48	99,50	100,68	97,80	-0,49
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	103	78,53	115,90	113,35	105,83	100,69	2,03
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	103	71,56	136,87	137,70	95,52	121,49	11,58
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	16,74	Na	Na	Na	Na	0,00
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	Na	97,52	99,55	99,42	99,62	99,62	0,43
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,08	45,00	0,08	88,3,0	91,50	89,71	11209,64
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	0	77,70	57,14	100	100	100	9,71
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	0	4,40	6,07	100	100	-	317,08
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	Na	29,40	61,80	97,29	100	100	34,08
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	40	100	100	100	100	100	30,00
Cakupan sekolah ramah anak (%)	3,50	5,70	37	37	59	75,50	139,88
Jumlah taman bermain ramah anak	2	1	1	2	2	3	20,00
Jumlah ruang bermain ramah anak	6	10	17	17	17	20	30,86
Cakupan kelurahan layak anak (%)	24	24	100	100	100	89	61,13
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	71	71	100	100	100	100	8,17
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	24	24	100	100	100	33	49,93
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	71	71	100	100	100	100	8,17
Jumlah kader kami berlian	20	140	200	250	300	340	140,24
Jumlah informasi layak anak (ILA)	28	30	34	34	34	45	10,57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, 2023

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Persentase ketersediaan pangan utama di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.134
Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	15,18	16,91	2,26	6,98	21,88	11,42	59,85

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan Riau Dalam Angka, 2022. Catatan Tahun 2019-2020 Hanya Menghitung Dari Jumlah Produksi Beras Lokal.

Persentase ketersediaan pangan utama turun hampir 50% pada tahun 2022, penurunan ini disebabkan oleh rendahnya produksi beras di Kota Dumai yang salah satunya disebabkan oleh banjir yang merupakan kejadian tahunan yang harus dihadapi oleh para petani. Disisi lain keterbatasan lahan pertanian untuk proses produksi menjadi kendala yang sangat mempengaruhi rendahnya ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Dumai. Lahan yang sempit membuat hasil produksi tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras di Kota Dumai.

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dgn produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Berdasarkan Tabel di bawah ini terlihat bahwa hanya ada 3 komoditi pangan (ubi kayu, buah-buahan dan daging ayam) yang ketersediaannya surplus, dengan kata lain kebutuhan pangan masyarakat Dumai terhadap komoditi tersebut dapat terpenuhi, bahkan ketiga komoditi tersebut berpotensi untuk diekspor ke daerah lain. Sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau, sagu, dan telur ketersediaannya harus sepenuhnya diimpor dari luar Dumai.

Tingginya ketergantungan impor pangan khususnya terhadap komoditi beras dikarenakan kebutuhan konsumsinya di tingkat masyarakat sangat tinggi. Hal ini terbukti dari besarnya konsumsi beras masyarakat Dumai (89,40 kg/kapita/tahun) yang melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg/kapita/tahun. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 104 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.135
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton)
Kota Dumai Tahun 2022

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	2.564,90	25.409,59	(22.844,69)	Defisit
2	Jagung	525,14	126,78	398,36	Surplus
3	Kedelai	-	1.600,08	(1.600,08)	Defisit
4	Kacang tanah	11,95	73,94	(61,99)	Defisit
5	Kacang Hijau	-	55,27	(55,27)	Defisit
6	Ubi jalar	-	398,25	(398,25)	Defisit
7	Ubi kayu	3.135,64	1.980,31	1.155,33	Surplus
8	Sagu	-	4,84	(4,84)	Defisit
9	Buah-buahan	24.377,40	8.657,74	15.719,66	Surplus
10	Sayuran	1.405,51	12.934,29	(11.528,78)	Defisit
11	Daging sapi	396,99	1.386,19	(989,20)	Defisit
12	Daging ayam	2.334,79	2.916,51	(581,72)	Defisit
13	Telur	55,10	3.020,24	(2.965,14)	Defisit
14	Ikan	1.402,99	8.912,26	(7.509,27)	Defisit

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, 2019 dan Provinsi Riau Dalam Angka, 2023.

Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain, masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.136
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Skor PPH Konsumsi	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,90	0,60

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2023

Disisi lain, rendahnya produksi pangan khususnya beras terjadi karena terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara untuk menambah luasan kawasan pertanian ini sangat sulit dikarenakan kebanyakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan kawasan hutan. Agar luas kawasan pertanian ini ke depannya tidak semakin berkurang, maka sebaiknya lahan pertanian yang ada ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi atau berkelanjutan.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka tidak dialih fungsikan ke sektor non pertanian. Jumlah alih fungsi lahan dari Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2017 berjumlah sebesar 2.774,30 seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.137
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai
Tahun 2017–2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Dari Pertanian menjadi non pertanian	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2023

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

- a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
- b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
- c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
- d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;
- e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat.

Konsumsi protein Kota Dumai tahun 2017-2022 memperlihatkan tren yang cenderung meningkat, namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, total konsumsi protein Kota Dumai sebesar 65,53 gram/kapita/hari berada diatas standar Widyakarya Pangan dan Gizi untuk konsumsi protein sebesar 52 gram/kapita/hari. Peningkatan pola konsumsi protein diatas standar konsumsi protein telah menjadi perhatian dan evaluasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Telah dilakukan dorongan peningkatan dengan melaksanakan sosialisasi di tengah masyarakat, agar meningkatkan konsumsi protein. dimana protein dari pangan hewani harus lebih ditingkatkan, seperti daging ruminansia, daging unggas, telur dan ikan, sehingga pada tahun 2022 peningkatan terealisasi, seperti dijabarkan pada tabel diatas. Untuk mendukung ini produksi untuk komoditas tersebut tetap harus lebih ditingkatkan sehingga konsumsi protein dapat kembali berada di atas standar anjuran.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan

perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana. tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka setiap Pemerintah Kota Dumai harus memiliki cadangan pangan.

2.4.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena didalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik.

Di Kota Dumai terdapat beberapa status tanah antara lain:

- a. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Cevron Fasific Indonesia
- b. Tanah Kawasan Hak Pakai PT. Pertamina
- c. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang merupakan asset Pemerintah Daerah
- d. Tanah Warga Masyarakat adalah tanah milik perseorangan
- e. Tanah – tanah perusahaan yang berstatus hak guna usaha yang bergerak di bidang HPH/HPHTI yaitu:
 1. PT. Suntara Gaja Pati di Sungai Sembilan
 2. PT Ruas Utama Jaya di Sungai Sembilan
 3. PT. Diamond Raya Timber di Sungai Sembilan
 4. PT. Arara Abadi Di Bukit Kapur

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Daerah Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka konflik tersebut perlu di fasilitasi Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik tanah masyarakat dengan tanah perusahaan yang selama ini di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai yaitu. yaitu:

1. PT. Suntara Gaja Pati Di Kecamatan Sungai Sembilan
2. PT Ruas Utama Jaya Di Kecamatan Sungai Sembilan
3. PT. Diamond Jaya Timbers Di Kecamatan Sungai Sembilan
4. PT. Pertamina Persero Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
5. PT. Pertamina Hulu Rokan Di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Selatan
6. PT. Arara Abadi di Kecamatan Bukit Kapur

Sedangkan konflik/permasalahan tanah lain yang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai adalah konflik/permasalahan tanah antara masyarakat dengan Tanah Aset Pemko Dumai. Adapun rekapitulasi permasalahan pertanahan yang sedang ditangani sampai dengan Tahun 2017 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.138
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
1.	Konflik maraknya penggunaan lahan oleh Pertamina di Area Bunga Tanjung	Polres Dumai telah melaksanakan mediasi dan membentuk tim khusus penanganan konflik dalam PT. Pertamina Dumai dan masyarakat di Area Bunga Tanjung Kec. Dumai selatan	Sudah ada Instruksi Walikota Dumai kepada DISPERKIMTAN Kota Dumai (bidang Pertanahan) agar menindaklanjuti permasalahan tersebut. Surat Masuk dari Kepolisian Daerah Riau Resort Dumai. Nomor: B/510/VI/DPS.2/2022, tanggal 24 Juni 2022
2.	Konflik warga RT.11 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan dengan PT. PHR	Polres Dumai telah membuat Infokus dan tim khusus terkait penanganan konflik warga RT. 11 Kel Mekar Sari Kec. Dumai Selatan dengan PT. PHR di Areal penanaman Jalur pipa.	Pada permasalahan ini masih dalam tahap pengumpulan informasi dan data. Surat Masuk dari Kepolisian Daerah Riau Pada Resort Dumai. Nomor: B/510/VI/DPS.2/2022, tanggal 24 Juni 2022
3.	Permohonan Mediasi kepada pihak DISPERKIMTAN Kota Dumai perihal permasalahan pertanahan antara Kelompok Tani Tropindo Tonggi kasih dengan Sahat Simbolon, Donal Simbolon, Firman Siagian dan Harjono Nainggolan serta Kelompok Tani Bagan Besar Jaya selaku orang yang masuk ke Wilayah lahan Tropindo Tonggi Kasih tanpa ijin.	DISPERKIMTAN Kota Dumai akan menyurati pihak Kecamatan Bukit Kapur, Lurah Bagan Besar, Lurah Bukit Nenas, Kecamatan Dumai Selatan, Lurah Mekar Sari pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Walikota Dumai.	Sebelum Surat Masuk dari LSM- FP2MR masuk ke Dinas Perkimtan pada tanggal 20 Juni 2022, Kelompok Tani meminta fasilitasi dan menyelesaikan permasalahan tanah di Areal yang di klaim oleh Kelompok Tani Tropindo Tonggi Kasih yang di pimpin oleh Bapak Asisten II, yang juga dihadiri oleh: Camat Bukit Kapur, Lurah Bagan Besar, Bidang Pertanahan (Disperkimtan Kota Dumai), Camat Dumai Selatan. Surat Masuk dari LSM - FP2MR Surat Masuk dari LSM FP2MR (Forum Perjuangan Pembangunan (Forum Perjuangan Pembangunan Masyarakat Riau). Masyarakat Riau). Nomor:014 LSM-FP2MR/DMI/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022
4.	Penguasaan tanah di dalam Areal Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai.	Perlunya Koordinasi ke pihak berwenang yang menangani permasalahan TWA.	Bidang pertanahan (Disperkimtan Kota Dumai) sudah melakukan Survei awal dan ketemu dengan tokoh masyarakat setempat pada tanggal 13 Juni 2022. Adanya laporan masyarakat untuk meminta penyelesaian masalah penguasaan tanah penguasaan tanah.
5.	Penyelesaian masalah tanah EX. Konsesi Chevron.	Pemerintah Kota Dumai sudah melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi / Pusat tapi saat ini masih belum ada solusi yang pasti	Maraknya laporan masyarakat di Areal tanah konsesi

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
6.	Permintaan informasi secara langsung mengenai pelayanan Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan terkait adanya pengurangan Luas tanah milik Sdri. Erniwiarti oleh pihak OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU.	Permintaan informasi secara langsung mengenai pelayanan Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan terkait adanya pengurangan Luas tanah milik Sdri. Erniwiarti oleh pihak OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU.	Terjadi pengurangan luas tanah milik Sdri. Erniwiarti pada sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 489/pkl/ Sesai akibat pelaksanaan SK-Walikota No.19 thn 2003 ttg GSB (Rooi) Jl. Di Wilayah Kota Dumai. Surat undangan masuk Nomor : 060/195/SETDA -ORG tanggal 22 November 2022.
7.	Surat Advokat & Konsultan Hukum Mastiwa, SH terkait konfirmasi dan balasan tertulis terkait pelayanan pengurusan Surat tanah di Kelurahan dan Kecamatan (di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai 9).	1. Adanya surat dari Camat Sungai Sembilan Nomor : 100/296/Kec-SS/PEM tanggal, 02 - November 2022, yang ditujukan kepada Advokat & Konsultan Hukum MASTIWA, SH & Associates serta tembusan juga disampaikan ke Disperkimtan. 2. Adanya Surat dan Kepala Disperkimtan Kota Dumai Nomor : 590 - 147 / Perkimtan - PN tgl, 16 November 2022, yang ditujukan kepada Advokat & Konsultan Hukum MASTIWA, SH & Associates serta tembusan juga disampaikan ke Camat Sungai 9 dan Lurah Bangsal Aceh.	Surat jawaban dari Disperkimtan yang ditujukan kepada Advokat Hukum Mastiwa sudah di terima beliau pada hari Jumat, tanggal 17 November 2022. Surat masuk yang ditujukan ke Camat Sungai Sembilan yang berasal dari Advokat & Konsultan Hukum Mastiwa, SH dengan Nomor 45/SP-Kom/A.A.M/X/2022, Perihal Konfirmasi dan Balasan tertulis.
8.	Konfirmasi tentang status keberatan pihak lain pada tanah yang akan di dirikan Rumah Sakit AWAL BROS Di Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Dumai.	Adanya pertemuan antara kedua belah pihak yakni pihak, Marihot Charly Sitorus dengan pihak Hairul Azwar sehingga menemukan titik terang, atau solusi yang baik yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN Dumai An, Rumah Sakit awal bros.	Adanya surat pernyataan dari Sdr. Hairul Azwar tanggal 03 November 2022 yang di tandatangani beliau di atas Materai, yang menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menerima batas - batas yang telah di tunjuk oleh Hotmasi Panggabean selaku kuasa dari Marihot Charly Sitorus/pemegang Hak Milik 92/Kel. Bintan, sehingga terkait surat penanguhan Surat Perubahan Sertifikat yang disampaikan Sdr. Hairul Azwar dengan surat No : 01 tanggal 03 Juni 2022 sudah terjawab dan sudah terselesaikan dengan surat Sdr. Hairul Azwar tanggal 03 November 2022. 1. Surat masuk dari BPN Kota Dumai kepada Sdr. Marihot Charly Sitorus yang tembusannya di sampaikan ke Walikota Dumai dengan Nomor Surat : MP.01.02/1073-14.72/X/2022, 24 Oktober 2022, Perihal Mohon Konfirmasi tentang

No	Objek Permasalahan	Hasil/Progres	Keterangan
			Status Keberatan dari Pihak Lain. 2. Surat masuk dari BPN kepada Lurah Bintang yang tembusannya di sampaikan ke Walikota Dumai dengan Nomor Surat : MP.01.02/1103-14.72/XI/2022, 2 November 2022, Perihal Konfirmasi Tentang Status Keberatan Pihak Lain

Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Tabel 2.139
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani

No	Lokasi	Luas Total (M ²)	Luas Lahan (M ²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilk	
				Kelompok	Orang/instansi
1	Kel.Gurun Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21
3	Kel.Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	2	2
4	Kel.Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11
5	Kel.Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2
Total		30.830.752	23.483.209		

Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

Penyelesaian kasus tanah negara Pemerintah Kota Dumai tahun 2022 dari sembilan kasus telah diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan persentase 22,22 % dan ini merupakan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai saat ini. Sedangkan permasalahan yang telah diselesaikan pada Tahun 2022 berikut adalah Tabel berikut.

Tabel 2.140
Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1.	Permasalahan tanah yang berada di areal Kelurahan bukit batrem yang diklaim oleh masyarakat telah digadaikan ke KSU Bona Mandiri yang terletak di jalan merdeka	Permasalahan telah selesai
2.	Permasalahan Tanah Hibah Haji Andi Firman kepada Pemko Dumai	Permasalahan telah selesai

Sumber: Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

2.4.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indek Kualitas Air

a. Kualitas Air Tanah

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.141
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2022

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter															
	pH				Kekeruhan (NTU)				Warna (PtCo)				Besi (mg/L)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	7,03	-	-	-	0,57	-	-	-	5	-	-	-	0,038	-	-	-
Air Sumur Kel. Dumai Barat	4,31	-	-	-	22,6	-	-	-	96	-	-	-	0,732	-	-	-
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	-	6,55	6,64	-	-	13	-	-	-	234	-	-	-	23.636	<0,06	-
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	-	6,72	6,85	-	-	-	2,2	-	-	-	3,1	-	-	-	3,1
Air Sumur Kec. Dumai Timur	-	-	-	6,79	-	-	-	2,4	-	-	-	3,3	-	-	-	1,04
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	0,038	-	-	-	<0,003	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter															
	pH				Kekeruhan (NTU)				Warna (PtCo)				Besi (mg/L)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kec. Dumai Barat																
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	-	23.636	<0,06		-	-	<0,00		-	0,4	-					
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	-	<0,06	<0,001	-	-	<0,001	0,48	-	-	-					
Air Sumur Kec. Dumai Timur				<0,001				0,46								

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur termasuk kategori air bersih sehingga dapat dapat dipergunakan untuk mandi, mencuci, sikat gigi, cuci dan sebagainya. Batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.142
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2022

Parameter	2019		2020		2021		2022	
	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-9
Kekeruhan	NTU	25	NTU	25	NTU	25	NTU	25
Warna	TCU	50	TCU	50	TCU	50	TCU	50
Besi	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1
Kadmium	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005
Nitrat	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10
KMNO4	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2019-2022 kualitas air hujan di Kota Dumai bersifat asam, hal ini disebabkan oleh kontaminasi atmosfer yang berasal dari tingginya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas pabrik maupun asap kendaraan.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di

wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir seperti yang tersaji pada Tabel di bawah.

Dari Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel.

Tabel 2.143
Perkembangan Hasil Pengujian Kualitas Air Laut di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Titik Pengujian	Hasil Pengujian Parameter											
	pH						TSS (mg/L)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Air Dermaga PT. Ivo Mas Tunggal	7,13	7,80	7,75	-	-		60	144	80	-	-	-
Air Dermaga PT. Sari Dumai Sejati	7,15	7,85	-	-	-		124	112	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pacific Indopalm Industries	7,51	7,81	-	-	-		134	108	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Inti Benua Perkasatama	7,67	7,85	7,87	-	-		98	116	102	-	-	-
Air Dermaga PT. Semen Padang	7,26	7,85	7,89	6,62	7,72		68	116	80	12	14	-
Air Dermaga PT. Meridan Sejati Surya Plantation	7,14	7,85	-	-	-		120	108	-	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai	7,49	7,87	7,86	-	-		114	104	80	-	-	-
Air Dermaga PT. Pelindo Cab. Dumai Ujung	7,58	-	-	6,96	7,85		20	-	-	12	13	-
Air Dermaga PT. CPI	7,68	7,88	7,85	-	7,48		26	108	80	-	12	-
Air Dermaga PT. Pertamina RU II Dumai	7,72	7,85	7,88	7,44	-		30	122	80	18	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel di bawah disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Tabel 2.144
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2022

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu 2021	Ambang Batas Baku Mutu 2022
BOD	mg/L	12	12
COD	mg/L	25	25
P	mg/L	0,2	0,2
pH		6 – 9	6 – 9
DO	mg/L	4	4
NO3	mg/L	10	10
Nitrit	mg/L	0,06	0,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

2) Indek Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 21°C -36°C seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah rata-rata suhu udara tahun 2017-2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2022 menjadi 27,11 °C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2022 setinggi 27,11°C dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.145
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Suhu rata-rata (°C)	28,09	27,43	27,30	27,11	27,30	27,11	-1,29

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Pada tahun 2022, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Mei yaitu setinggi 27,70°C. Sedangkan di tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 29,20°C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.146
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Bulan	Suhu Udara Rata-rata (°C)						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Januari	26,8	26,8	28	27,4	26,2	26,50	-0,18
Februari	28	27,8	27,8	27,5	27,1	26,50	-1,09
Maret	28	27,6	27,7	27,8	26,8	27,40	-0,41
April	27,6	27,9	26,7	26,6	26,7	27,20	-0,27
Mei	27,8	27	27,2	27,8	27,4	27,70	-0,06
Juni	28,2	28,3	27,4	27,1	27,3	26,20	-1,44
Juli	28,2	27,9	27,6	26,8	27,6	27,20	-0,70
Agustus	27,3	27,9	27,4	27,8	26,9	26,70	-0,42
September	29,6	27,4	27,4	26,3	26,7	26,70	-1,99
Oktober	27,5	27,1	26,8	27,2	27,2	26,50	-0,73
November	28,9	27,1	26,7	26,7	29,1	26,50	-1,53
Desember	29,2	26,4	26,9	26,3	26,4	26,10	-2,14
Rata-rata	28,09	27,43	27,3	27,11	27,12	26,77	-0,96

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.147
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2022

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO2	CO	NO2	O3	Pb	HC	NH3	H2S	TSP	Kebisingan
	g/N m3	g/Nm 3	g/N m3	g/N m3	g/N m3	g/N m3	ppm	ppm	g/N m3	dBA
Depan Pos Security PT. Semen	78,89	3182	69,03	42,58	0,083	24,09	0,03	0,002	138,3	-

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji									
	SO2 g/N m3	CO g/Nm 3	NO2 g/N m3	O3 g/N m3	Pb g/N m3	HC g/N m3	NH3 ppm	H2S ppm	TSP g/N m3	Kebisingan dBA
Padang										
Depan Pos Security PT. KLK	61,90	2301	66,08	27,12	0,086	25,93	0,03	0,002	125,4	-
Depan PT. Murini Sam Sam II	64,12	2713	67,28	31,56	0,089	26,97	0,03	0,002	128,9	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Hanya ada dua parameter yang mendekati ambang batas baku mutu yaitu TSP (ambang batas baku mutu debu total/TSP 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$). Tingginya nilai TSP berdampak terhadap gangguan pernapasan manusia, menurunkan jarak pandang dan menghalangi sinar matahari, serta berdampak terhadap kerusakan beberapa material.

3) Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Tabel 2.148
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase penanganan sampah (%)	50	53	56	60	60	64	5,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, yakni dari 50% di tahun 2017 meningkat menjadi 64% di tahun 2022.

4) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah Tabel mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.149
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)	4,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Selama periode 2017-2022 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 18 TPS persatuan penduduk di tahun 2017 meningkat menjadi 22 TPS di tahun 2022

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

2.4.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2017-2022 persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang ber-KTP sebesar 94,27%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,01%.

Tabel 2.150
Kepemilikan KTP Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kepemilikan KTP (%)	94,27	94,82	96,00	96,21	96,65	99,01	0,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

2) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.151
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.152
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	0,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

Melalui data kependudukan tersebut, Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*.

Tabel 2.153
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan

No.	Jenis Kerjasama	Tahun						Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pemanfaatan data kependudukan	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD	DPMPSTP Dinkes, Diskominfo
2.	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD	RSUD dan unit Disdik (sekolah)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2017-2022 naik dari 22,20% pada tahun 2017 menjadi 34,97% tahun 2022.

Tabel 2.154
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

No.	Rincian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	22,20	25,60	30,20	41,85	42,28	34,97	11,12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2020 *Tahun 2020 merupakan angka extrapolasi tim, 2023

2.4.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.155
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	100	0,20

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	44	44	1,46
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	196	197	197	198	-3,53
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	0,00
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	100	2,22
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	100	0,62

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

1) Persentase PKK Aktif

Selama kurun waktu 2017-2022 terdapat 44 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 100%. Tim penggerak PKK, harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*) atau lebih dikenal dengan perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2017-2022 sudah mencapai 100%.

3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Jumlah posyandu selama kurun waktu 2017-2022 adalah sebanyak 198 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%.

4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017 sampai saat ini adalah sebesar 97%.

2.4.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama periode 2017-2022 sebesar 2,59% per tahun akibat adanya penambahan jumlah penduduk dari 297.638 Jiwa tahun 2017 menjadi 331.832 jiwa pada tahun 2022. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,69% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,50% per tahun selama periode tahun 2017-2022

2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.156
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur 2022 (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	ASFR
15-19	16.429	144	9.62
20-24	11.957	1.414	125.95
25-29	11.412	2.056	245.27
30-34	11.265	1.750	184.11
35-39	12.142	1.010	79.64
40-44	10.973	187	20.69
45-49	12.061	19	1.58
Jumlah	86.239	6.580	666.85

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK, 2023

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS)

terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Jumlah peserta KB aktif dari tahun 2017-2022 terus mengalami fluktuasi peningkatan, namun di tahun 2022 jumlah pesertanya turun drastis sebanyak 9.569, peserta KB aktif tahun 2017 sebanyak 33.059 menjadi 23.490 pada tahun 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar -5,32%.

Tabel 2.157
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2012-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Cakupan peserta KB aktif	33.059	30.571	32.836	35.923	34.475	23.490	-5,32

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

4) Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada bulan desember tahun 2020 adalah 75,50% (35.923 orng peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 4.831 PUS (80,2%). Pada bulan desember tahun 2021 adalah 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 5.032 PUS (82,4%), pada bulan desember tahun tahun 2022 adalah 53,8% (23.490 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan sungai sembilan yaitu 3.990 PUS (61,7%).

Sedangkan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2020 adalah 11.652 PUS (24,5%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu di kecamatan dumai kota 18,1% dengan jumlah 1.212 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2021 adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus di intervensi yaitu di kecamatan dumai kota 16% dengan jumlah 1.069 PUS. Tahun 2022 cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 18.692 PUS (42,8%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu ada 2 kecamatan, kecamatan dumai timur dan kecamatan dumai barat. Dimana kecamatan dumai timur 33,5% dengan jumlah 3.141 PUS dan kecamatan dumai barat 33,5% dengan jumlah 2.098 PUS.

Tabel 2.158
Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan
Tahun 2020-2022

KECAMATAN	PUS			CPR						PUS BUKAN PESERTA KB						UNMET NEED						PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB					
				Peserta Aktif			%			Jumlah			%			Jumlah			%			Hamil dan IAS			%		
	PA / PUS X 100			PUS bukan Peserta KB/PUS x 100			Unmetneed/PUS x 100						Hamil dan IAS/PUS x 100														
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Dumai Kota	6.680	6.680	4.290	5.117	5.267	2.601	76,6	78,8	60,6	1.563	1.413	1.794	23,4	21,2	41,8	1.212	1.069	1.053	18,1	16	24,55	851	844	919	5,3	5,1	21,4
Dumai Timur	9.984	10.008	9.364	7.852	7.810	4.088	78,6	78	43,7	2.132	2.198	4.901	21,4	22	52,3	1.015	1.208	3.141	10,2	12,1	33,54	1.117	990	2.138	11,2	9,9	22,8
Dumai Barat	8.441	8.761	6.255	5.897	5.973	3.152	69,9	68,2	50,4	2.544	2.788	2.908	30,1	31,8	46,5	1.383	1.336	2.098	16,4	15,2	33,54	1.161	1.452	1.085	13,8	16,6	17,3
Dumai Selatan	6.027	6.104	6.277	4.831	5.032	3.602	80,2	82,4	57,4	1.196	1.072	2.401	19,8	17,6	38,3	625	507	1381	10,4	8,3	22,00	571	565	1.314	9,5	9,3	20,9
Bukit Kapur	3.493	3.797	8.245	2.705	3.024	4.414	77,4	79,6	53,5	788	773	3.452	22,6	20,4	41,9	547	531	2384	15,7	14	28,91	241	242	1.598	6,9	6,4	19,4
Medang Kumpai	6.272	6.079	2.741	4.886	4.242	1.643	77,9	69,8	59,9	1.386	1.837	969	22,1	30,2	35,4	623	912	456	9,9	15	16,64	763	925	720	12,2	15,2	26,3
Sungai Sembilan	6.678	6.825	6.468	4.635	4.784	3.990	69,4	70,1	61,7	2.043	2.041	2.267	30,6	29,9	35	893	789	1360	13,4	11,6	21,03	1.150	1.252	1.424	17,2	18,3	22
Kota Dumai	47.575	48.254	43.640	35.923	36.132	23.490	75,5	74,9	53,8	11.652	12.122	18.692	24,5	25,1	42,8	6.298	6.352	11.873	13,2	13,2	27,21	5.354	5.770	9.198	11,3	12	21,1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.159.

- Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
- Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
- Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
- Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.159
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Keluarga	82.478	82.478	54.982	89.573	70.537	-	-18,34
Keluarga Pra Sejahtera	2.871	2.871	6.369	6.369	3.803	-	-3,69
Keluarga Sejahtera I	4.503	4.503	30.371	30.071	-	-	94,89

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan PK, 2023

2.4.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah Tabel yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.160
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Terminal	Berangkat	102.670	-	-	-	5.680	7.474	-13,68
	Datang	105.532	-	-	-	4.906	5.925	-15,85
Pelabuhan	Berangkat	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750	3,60
	Datang	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490	54,95
Bandara	Berangkat	11.856	60.090	53.547	14.082	292	223	40,14

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Datang	10.354	58.470	54.748	14.957	260	22	39,17
Jumlah keberangkatan (Orang)		243.661	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447	-11,52
Jumlah Kedatangan (Orang)		218.472	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637	7,63
Jumlah keberangkatan (%)		52,73	52,56	52,47	49,37	84,28	64,82	8,24
Jumlah Kedatangan (%)		47,27	47,44	47,53	50,63	15,72	35,18	12,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2022 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase kedatangan 47,27% pada tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan dengan keberangkatan 52,73%. Demikian halnya pada tahun 2022.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel di bawah diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina Hulu Rokan yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.161
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	0,00
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	0,00
Bandara	1	1	1	1	1	1	0,00

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	0,00

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel dibawah berikut menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut:

Tabel 2.162
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0	0,00
Angkutan Kota (Oplet)	52	35	35	35	35	35	-6,54
Becak Motor	20	53	53	54	54	54	33,38
Angkutan Online	0	0	251	0	0	274	-20,00
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	9	0,00
Jumlah Kecelakaan	69	67	64	53	N/A	N/A	-4,91
Jumlah Pelanggaran	7.933	6.581	12.395	N/A	N/A	N/A	14,26

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2018-2023

4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.163
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.075	3.395	9.700	9.952	1.728	3.996	44,05

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.163. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau ada terdapat alasan yang lainnya.

5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang melakukan uji KIR. Berikut adalah Tabel 2.164 data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.164
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.171	9.274	9.456	9.708	10.500	9.369	0,63

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi penutupan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan alat pengujian yang belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.

6) Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum dan

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan-kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Lama pengujian kelayakan angkutan umum dan perkembangan biaya KIR di Kota Dumai sejak tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.165
Lama dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	30 Menit	1,43
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	82.500	82.500	40.000	40.000	10,93

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp 40.000,-. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp 82.500,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga 2020 dan tahun 2021-2022 turun kembali menjadi Rp. 40.000,

7) Pemasangan Rambu-Rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu: jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2017 terpasang rambu lalu lintas tiang tunggal sebanyak 892 unit dan tahun 2022 sebanyak 266 unit. Terkait formulasi perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu belum bisa ditampilkan dikarenakan belum terdapat dokumen perencanaan terkait jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.

Tabel 2.166
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Rambu-Rambu Lalin	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	892	15	88	340	1.422	266	182,33
2	Persentase Pertumbuhan pemasangan Rambu-rambu	%	167	-98	487	286	339	-21	-176,91

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2018-2023

8) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan (Transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada.

Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting. Aktifitas masyarakat yang terus meningkat menuntut peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Seiring meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kota Dumai, jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan produksi barang dan jasa yang harus diangkut melalui transportasi umum. Oleh karena itu peningkatan ketersediaan prasarana transportasi seperti; pertambahan panjang jalan, kapasitas jalan.

Tabel 2.167
Jumlah Orang atau Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ Unit	45.041.201	48.849.265	52.657.329	56.465.392	60.273.456	51.332.223	3,08
2	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Orang/ Unit	45.041.201	48.849.265	52.657.329	56.465.392	60.273.456		-13,95

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2018-2023

2.4.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan public kepada masyarakat. Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.168
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai
Tahun 2022

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	- Dapodik (Data Pokok Tenaga Kependidikan) - SIMDIK (Sistem Informasi Pendidikan) - BeeSMART (ujian try out online)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	- SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) - ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Perlatan Kesehatan) - SIPERMON (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi)	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal- Sistem Informasi Daerah Binaan	- SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optima) - SIDARBIN (Sistem Informasi Daerah Binaan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	- SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation)	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	- Sistem Informasi Perizinan (SiPERI) - SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secar Elektronik) - OSS (Online Single Submission)	DPMPPTSP Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	- E-Paddum (Elektronik Pendapatan Asli Dumai) - E-Billing (Elektronik Pajak Online untuk Hotel, Restoran, dan Hiburan - SIMPATDA (Sistem Informasi Majemen Pendapatan Daerah)	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	- cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	- Simda-BMD (Sistem Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	- www.lpse.dumaikota.go.id	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	- Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA) - E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	- www.dprd.dumaikota.go.id - www.jdih.dumaikota.go.id	- Setwan Kota Dumai - Bagian Hukum dan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	- Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) (Pasif)	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	- Integrated Libery Sistem (INLIS lite)	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran surat-menyerurat	- E-Office	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	- siak.depdagri.go.id	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
III Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	www.jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIMDA-Keuangan	BPKAD Kota Dumai
VI Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	- Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) - Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (simpeg.dumaikota.go.id)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.

2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi

aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.169
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2023

2.4.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan sebesar 2,68% per tahun atau naik dari 161 unit tahun 2018 menjadi 180 unit tahun 2022 dengan pertumbuhan persentase koperasi aktif rata-rata sebesar -4,51%, sesuai Tabel dibawah ini.

Tabel 2.170
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Koperasi	Unit	199,00	213,00	225,00	245,00	271,00	288,00	7,69
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	161,00	177,00	190,00	163,00	163,00	180,00	2,68
3	Persentase Koperasi Aktif	%	80,90	83,10	84,44	66,53	60,15	62,50	-4,51

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecenderungannya meningkat sampai dengan tahun 2022, walaupun persentase koperasi koperasi mengalami penurunan sebesar -4,51% per tahun.

Berdasarkan Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 14,52% per tahun atau bertambah dari 29 unit pada tahun 2017 menjadi 57 unit pada tahun 2022. Koperasi tersebut mempunyai peranan dalam sebagai berikut: Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan; Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan; Meningkatkan taraf hidup masyarakat; Turut mencerdaskan bangsa; Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik

perseorangan maupun warga masyarakat; Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.171
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bukit Kapur	Unit	12	13	14	13	12	12	0,24
2	Medang Kampai	Unit	9	10	11	9	8	11	5,86
3	Sungai Sembilan	Unit	29	35	39	44	50	57	14,52
4	Dumai Barat	Unit	14	14	15	17	14	14	0,57
5	Dumai selatan	Unit	26	28	28	23	17	17	-7,25
6	Dumai Timur	Unit	34	38	41	30	32	35	1,77
7	Dumai Kota	Unit	37	39	42	27	22	25	-5,50
Kota Dumai		Unit	147	161	177	191	166	163	180

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

2) Usaha Mikro dan Kecil

UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri membedakan usaha menjadi empat jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan. Perkembangan UMKM tahun 2017-2022 dengan pertumbuhan sebesar 0,21% per tahun.

Tabel 2.172
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	12.672	14.874	16.324	16.116	6.515	8.779	0,21

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Dumai, 2019 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020. Catatan 2020 Estimasi Tim.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2017-2022 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UKM yang ada maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1: 2.304. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.173
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	8	7	7	7	7	0,36

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM 2023

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2023. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2017 terdapat 12.497 UMKM, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 14.874 UMKM, kemudian pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni naik menjadi 8.779 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.174
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dumai Barat	2.402	2.657	2.837	591	891	1.196	4,64
2	Dumai Timur	2.738	3.051	3.231	679	957	1.279	2,59
3	Bukit Kapur	1.708	2.002	2.182	620	892	1.220	7,05
4	Medang Kampai	1.143	1.476	1.656	671	938	1.277	11,56
5	Dumai Selatan	989	1.317	1.497	680	953	1.269	13,11
6	Dumai Kota	2.178	2.521	2.701	690	962	1.308	4,76
7	Sungai Sembilan	1.514	1.850	2.030	682	922	1.230	6,82
	Jumlah	12.497	12.672	14.874	4.613	6.515	8.779	0,00

Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, 2023

2.4.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2017-2022, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.175
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 – 2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Perusahaan PMDN	64	77	91	98	235	246	38,13
Jumlah Perusahaan PMA	84	44	44	44	44	44	-9,52

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2023

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2017-2022. Nilai investasi PMA dan PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 4.39 triliun kemudian meningkat menjadi 12,55 triliun tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 53,63%. Berdasarkan data Dumai Dalam Angka Tahun 2023. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2022 sebesar Rp. 12,55 triliun.

Tabel 2.176
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PMA (Rp. Juta)	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	8.598.115,20	6.461.259,70	34,98
PMDN (Rp. Juta)	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	487.531,50	6.094.171,20	339,21
Jumlah	4.398.108,78	2.006.313,40	5.937.390,80	12.964.297,98	9.085.646,70	12.555.430,90	53,63

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2021 dan tahun 2022 berturut-turut sebanyak 1.653/0 orang dan 1734/2 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2021-2022 berturut-turut sebanyak 2.332/13 orang dan 6712/10 orang. Berdasarkan data tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2021 dan 2022 berturut-turut adalah 14,33 dan 8,34.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada Tabel 2.177. Pada tahun 2017-2022, Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA sebesar 34,98% dan PMDN mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 339,21%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.177
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PMA (Rp. Juta)	2.390.904,98	1.635.027,80	3.699.939,00	5.844.192,48	8.598.115,20	6.461.259,70	34,98
PMDN (Rp. Juta)	2.007.203,80	371.285,60	2.237.451,80	7.117.105,50	487.531,50	6.094.171,20	339,21

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

2.4.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Berkenaan dengan hal tersebut data jumlah pemuda di Kota Dumai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.178
Data Jumlah Pemuda Kota Dumai Tahun 2022

No	Kecamatan	15-19 TH	20-24 TH	25-29 TH	30-34 TH	Total Pemuda
1	Dumai Barat	3.654	3.287	3.965	3.534	14.980
2	Dumai Timur	5.838	6.264	6.151	5.648	23.899
3	Bukit Kapur	4.566	4.874	4.473	4.239	18.152
4	Sungai Sembilan	3.291	3.831	3.861	3.717	14.700
5	Medang Kampai	1.338	1.400	1.493	1.488	5.719
6	Dumai Kota	3.470	3.739	3.618	3.270	14.097
7	Dumai Selatan	4.223	4.652	4.825	4.341	18.041
Total		26.380	28.578	28.386	26.235	109.588

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat terlarang serta perilaku beresiko lainnya, pemuda didorong untuk melakukan kegiatan organisasi terkait peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik. Sehubungan hal tersebut jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 2.179
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah organisasi pemuda	55	47	47	47	47	55	0,50

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2022 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat, Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlit belum memadai.

Tabel 2.180
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	29	0,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2017 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2022 berjumlah 2 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.181
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	3	3	2	2	3,33

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kota Dumai pada tahun 2017 adalah sebanyak 984 orang.

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 adalah 3 kegiatan dan pada tahun 2022 berjumlah 4 kegiatan olahraga, data ini didapatkan dari Jumlah lapangan olahraga sampai tahun 2022 berjumlah 1 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.182
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah kegiatan olahraga	3	6	3	4	3	4	18,33

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan jumlah kegiatan olahraga pada tabel di atas, terkait pelatih, atlet berprestasi dan cabang olahraga yang dilakukan pembinaan dapat dilihat pada data bidang olahraga berikut ini:

Tabel 2.183
Data Bidang Olahraga Kota Dumai 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah cabor Olahraga yang dilakukan pembinaan	31	32	35	36	40	40
Jumlah seluruh cabor yang dilakukan pembinaan	31	32	35	36	40	40
Jumlah pelatih yang bersertifikasi	29	30	30	30	30	30
Jumlah seluruh pelatih	40	45	45	13	-	-
Jumlah atlet pelajar yang dibina	-	-	-	8	1	-
Jumlah seluruh atlet pelajar	-	-	-	-	-	-
Jumlah atlet yang berprestasi Tk. Nasional dan Internasional	10	43	-	77	-	6
Internasional dan Provinsi	-	-	-	-	-	-
Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan	1	1	-	14	-	2

Sumber: Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.4.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melalui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna komputer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku "Kota Dalam Angka" telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010-2022 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

3) Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku "PDRB Kota" telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2010-2022 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.184
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00
Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00

Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai, 2018-2023

2.4.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi informasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

2.4.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 menunjukkan angka yang konstan. Pada tahun 2017 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan, begitu juga pada tahun 2022 jumlah festival seni dan budaya masi berjumlah 5 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2017-2022 adalah panggung seni rakyat, festival lampu colok, festival layang dan gasing, festival masakan tradisional, dan malam resepsi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaraan fesitival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antuasisme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.185
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5	5	5	5	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Selama 5 tahun, sudah 153 karya seni di Kota Dumai yang berbasis Melayu diinventarisasi dan direvitalisasi. Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu, terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua
Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2019-2024).

3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

Dalam kaitannya dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan kebudayaan daerah kembali mendapat

perhatian dari pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa kebudayaan daerah yang ada di kota dan kabupaten menjadi dasar bagi perumusan kebudayaan daerah di tingkat provinsi dan selanjutnya menjadi dasar penting bagi perumusan strategi kebudayaan di tingkat nasional. Berkenaan hal tersebut, kebudayaan daerah di Kota Dumai perlu diformulasikan sedemikian rupa ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

PPKD Kota Dumai merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan daerah yang dihadapi Kota Dumai dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta rekomendasinya. Adapun Data Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 2.186
Data Objek Pemajuan Kebudayaan

No	Uraian	Kondisi Faktual		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
I	Manuskrip		✓	
II	Tradisi Lisan			
1	Putri Tujuh	✓		
2	Misteri Goa Pelintung	✓		
3	Panglima Hitam	✓		
4	Bujang Manjo	✓		
5	Buah Bakau Belukap Jin	✓		
6	Asal Mula Lubuk Gaung	✓		
III	Adat Istiadat			
1	Memintang	✓		
2	Mengantar Tanda	✓		
3	Mengantar Belanja	✓		
4	Menegakan Bangsal	✓		
5	Menggantung	✓		
6	Berandam	✓		
7	Berinai Curi	✓		
8	Akad Nikah	✓		
9	Tepuk Tepung Tawar Bearak Pengantin	✓		
11	Silat Pengantin	✓		
12	Pantun Pembuka	✓		
13	Duduk Bersanding	✓		
14	Makan Adab	✓		
15	Mandi Taman	✓		
16	Perkawinan Melayu	✓		
17	Perkawinan	✓		
18	Petang Megang	✓		
19	Semah Kampung		✓	
IV	Ritus			
1	Cukur rambut anak	✓		
2	Mengantar talam	✓		

3	Menujuh hari (Tahlilan)	✓		
4	Penanggalan Pusat	✓		
5	Perayaan	✓		
6	Semah Laut	✓		
V	Pengetahuan Tradisional			
A. Pengobatan Tradisional				
1	Tidak Napsu Makan		✓	
2	Mimisan		✓	
3	Masuk Angin		✓	
4	Sakit Kepala		✓	
5	Panas Dalam		✓	
6	Sariawan		✓	
7	Migren		✓	
8	Radang Tenggorokan		✓	
9	Tekanan Darah Rendah		✓	
10	Tekanan Darah Tinggi		✓	
13	Kencing Kurang Lancar		✓	
14	Asma (Sesak Napas)		✓	
15	Ambeyen		✓	
16	Sakit Pinggang		✓	
17	Asam Urat		✓	
18	Susah Buang Air Besar		✓	
19	Keputihan		✓	
20	Masuk Angin pada Anak		✓	
21	Muntah, Mual, Perut		✓	
22	Diare		✓	
23	Mata Merah		✓	
24	Cacangan		✓	
25	Cacar Air		✓	
26	Keseleo		✓	
27	Typus		✓	
28	Rematik		✓	
29	Rambut Rontok		✓	
30	Kolesterol		✓	
31	Bintik-bintik Hitam pada		✓	
32	Jerawat		✓	
33	Batuk		✓	
34	Batuk Seratus Hari		✓	
35	Batuk Berlendir		✓	
36	Pilek pada Anak		✓	
37	Luka Tergores		✓	
38	Luka Berdarah		✓	
39	Penurun Panas		✓	
40	Obat Bengkak		✓	
41	Menghentikan Perdarahan		✓	
42	Tergores Pisau		✓	
43	Obat Bau Badan		✓	
44	Agar Tumbuh Rambut.		✓	
45	Agar Warna Rambut lebih		✓	
46	Sakit Perut		✓	
B. Busana Tradisional				
47	Teluk balango	✓		
48	Cekak musang	✓		

49	Kebaya labuh	✓		
50	Gunting Cino	✓		
51	Baju Kurung	✓		
C. Jemput Semangat				
52	Membangkitkan semangat			
53	Cekak musang	✓		
54	Kebaya labuh	✓		
55	Gunting Cino	✓		
56	Baju Kurung	✓		
C. Makanan dan Minuman				
56	Kurma	✓		
57	Kepurun	✓		
58	Hasidah	✓		
59	Bolu Kemojo	✓		
60	Kue Bingko	✓		
61	Laksamana Mengamuk	✓		
62	Air Mata Pengantin	✓		
63	Kue Bangkit	✓		
VI	Teknologi Tradisional	✓		
VII	Seni			
	Seni Musik Tradisional			
	Akordion	✓		
	Rebana	✓		
	Bebano	✓		
	Kompang	✓		
	Gambus	✓		
	Marwas	✓		
	Gendang Panjang	✓		
	Karya Musik Tradisional			
	Budak Tanjung Palas	✓		
	Musik Lagu Putri Tujuh	✓		
	Musik Pesisir	✓		
	Musik Lagu Laila Canggung	✓		
	Seni Tari			
	Putri Tujuh	✓		
	Zapin Senarak	✓		
	Joget	✓		
	Mak Inang	✓		
	Tari Langgam	✓		
	Tari Olang- olang	✓		
	Tari Kreasi Daerah (Parit Hukum)	✓		
	Zapin Api	✓		
	Zapin Semarak		✓	
	Seni Teater			
	Syair	✓		
	Puisi	✓		
	Monolog	✓		
	Teater Bangsawan	✓		
	Pertunjukan Teater	✓		
VIII	Bahasa			

	Bahasa melayu	✓		
	Bahasa Indonesia	✓		
	Bahasa Inggris	✓		
	Bahasa minang	✓		
	Bahasa batak		✓	
	Bahasa bugis	✓		
IX	Permainan Rakyat			
	Lulu cina buta	✓		
	Bakiak/terompa	✓		
	Congklak	✓		
	Gasing	✓		
	Estatak	✓		
	Layang-layang	✓		
	Tarik tambang	✓		
	Tongkat Dingin	✓		
	Guli	✓		
	Patok Lele	✓		
	Gala Panjang	✓		
	Ban Senebu	✓		
	Senangkup	✓		
X	Olah Raga Tradisional			
	Pencak Silat	✓		

	Uraian	Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat/Tidak Utuh
XI	Cagar Budaya			
	Struktur			
	Makam Putri Tujuh	✓		
	Situs			
	Bekas Benteng			✓
	Makam Simpan (Komplek Chevron 1)	✓		
	Makam Datuk Tabrani			✓
	Makam H. Jalal			✓
	Komplek Makam Kerabat Tujuh	✓		
	Makam Pawang Lion	✓		
	Makam Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim	✓		
	Makam Panglima Delau dan Panglima Pandak			✓
	Makam Tuk Kedondong	✓		
	Makam Syech Umar	✓		
	Batu Beranak	✓		
	Telapak Hrimau Sakti			✓
	Bangunan			
	Pesanggrahan Putri Tujuh	✓		
	Makam Siti Laut	✓		
	Benda			
	Keris 1	✓		
	Keris 2	✓		
	Keris 3	✓		
	Keris 4	✓		
	Keris Kecil	✓		

	Mangkok 1	✓		
	Mangkok 2	✓		
	Kendi 1	✓		
	Kendi 2	✓		
	Meriam	✓		
	Tepak Sirih	✓		
	Cepu	✓		
	Payung Kecil	✓		
	Pedang Panjang	✓		
	Keris Tikam Bayang	✓		
	Keris Tahta Naga Siak	✓		

Sumber: Dokumen PPKD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.4.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi seringkali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan antara lain: birokrasi, anggaran, SDM, serta manajemen yang bagus, prosentase perimbangan jumlah koleksi, serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku, workshop, pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi diantaranya meliputi program edu-tourism, keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan, maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan, persentase perimbangan koleksi, tata ruang, lighting dan pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017 hingga tahun 2022 relatif mengalami pertambahan. Pada tahun 2017 jumlah perpustakaan adalah 15 perpustakaan dan pada tahun 2022 jumlah perpustakaan naik menjadi 243. Jumlah Perpustakaan di Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.187
Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Perpustakaan	15	15	15	90	266	243	137,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2) Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017-2022 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2017 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,50 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 7,32, namun terus terjadi penurunan karena penambahan jumlah penduduk. Berikut Tabel Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk.

Tabel 2.188
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Perpustakaan	15	15	15	90	266	243	137,38
Jumlah Penduduk per 10.000	29,76	30,33	30,06	31,98	32,84	33,18	2,23
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk	0,50	0,49	0,49	2,81	8,10	7,32	130,02

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, diolah

3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan perbandingan antara jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah penduduk per 10.000. Adapun perkembangan rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Dumai dari rentang waktu 2017-2022 terus mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.189
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2017-2022

No	Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	28.242	29.370	37.710	9.100	11.630	33.301	34,13
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	205	178	132	90	97	253	19,55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka 2018-2023

4) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2017-2022 sebanyak 54.202, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku ke perpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain ke perpustakaan kelurahan maupun ke perpustakaan rutan. Pada tahun 2017 jumlah buku 48.447 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 53.557 eksemplar. Kemudian pada tahun 2022 jumlah buku bertambah menjadi 54.202 eksemplar.

Tabel 2.190
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	48.447	51.097	53.557	53.557	54.202	54.202	2,30

2.4.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.191
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun						Pertumbuhan / Tahun(%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Dokumen Arsip	1.791	1.824	1.710	46	-	-	-20,34

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan Kota Dumai, yaitu Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, serta Energi dan Sumberdaya Mineral.

2.3.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan Laut

Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Kota Dumai memiliki beragam jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya dibandingkan dengan perikanan budidaya.

Tabel 2.192
Jumlah Produksi Perikanan, Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Konsumsi Ikan Perkapita	41,00	40,00	46,00	45,00	44,75	45,65	2,37
Produksi	342,36	265,31	329,78	293,78	311,77	382,69	3,95

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Perikanan Budidaya							
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	26,00	28,00	29,00	29,00	32,00	18,00	(4,43)
Cakupan Binaan Kelompok Pembudidayaan Ikan	25,00	38,00	31,00	34,00	37,00	31,00	7,17
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	945,2	1.832,65	1.426,74	978,52	710,57	1.020,30	11,31

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, 2023

Dari tahun ketahun, perkembangan produksi perikanan laut fluktuatif. Pada tahun 2017 produksi perikanan laut mencapai 563.050 Kg kemudian meningkat menjadi 855.703 kg tahun 2022. Produksinya mengalami kenaikan kemudian terjadi penurunan dan naik kembali hal ini dapat dicermati karena kenaikan karena tahun 2019 masih banyaknya armada penangkapan ikan dan alat tangkap yang masih baik, kemudian tahun berikutnya adanya pelarangan alat tambah berdasarkan undang-undang sementara alat tersebut menjadi alat tangkap yang cukup populer di kalangan masyarakat nelayan sehingga harus ada perubahan alat tangkap, kemudian adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang menjadi pengelolaannya di bawah provinsi. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2017-2022. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.193
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenis Ikan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tenggiri	69.811	7.728	404.013	36.372	68.620	82.477	1.011,37
2	Parang-parang	41.887	6.955	12.297	16.808	39.853	56.903	42,00
3	Senangin	0	8.500	12.537	11.283	59.808	87.120	102,65
4	Kakap hitam/putih	0	7.728	8.690	7.821	25.673	57.009	70,55
5	Gulama	0	0	2.223	2.001	14.296	11.546	117,04
7	Lomek	125.660	11.591	5.825	64.584	139.087	201.051	205,63
8	Biang	0	13.910	0	62.890	96.364	166.302	5,16
9	Pari	0	6.182	23.155	20.840	18.156	38.016	72,21
10	Bawal	52.498	7.728	3.364	3.028	10.635	4.307	8,00
11	Ikan lainnya	49.705	0	276.160	115.326	63.889	91.663	(31,87)
12	Udang lainnya	223.489	494.444	271.592	244.838	71.723	59.309	(4,34)
Jumlah		563.050	564.766	1.019.856	585.791	608.104	855.703	16,57

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

2) Produksi Perikanan Budidaya

Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai.

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam/tambak. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam dengan perkembangan produksi perikanan budidaya dari tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami naik-turun. Pada Tahun 2017 produksi perikanan budidaya mencapai 342.358 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2022 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 382.694 Kg. Berikut disajikan Tabel Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai.

Tabel 2.194
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017- 2022

No	Jenis Ikan	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-	0,00
2	Ikan Nila	2.534	2.750	345	9.660	1.766	17.230	683,00
3	Gurami	942	1.478	318	373	425	2.462	86,41
4	Lele	314.456	177.330	275.500	164.964	196.064	260.641	13,41
5	Patin	7.430	9.470	7.760	2.942	4.452	3.485	-6,50
6	Bawal	-	-	-	-	-	5	0,00
7	Bandeng	860	1.585	-	-	-	247	-20,00
8	Udang (Windu/Waname)	16.136	21.259	18.147	11.061	86.410	98.624	128,33
Jumlah		342.358	213.872	302.070	189.000	289.117	382.694	18,03

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

2.3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan

dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersebut terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.195
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2017-2022

Alam	Budaya	Buatan	Kuliner
• Bandar Bakau Hutan Mangrove	• Makam Pawing Lion	• Taman Bukit Gelanggang	• Dekranasda Kota Dumai
• Pantai Puak Teluk Makmur	• Batu Telapak Harimau Sakti		• Wisata Kuliner Ombak
• Pantai Purnama	• Makam Tuk Kedondong		• Oleh- oleh Khas Dumai
• Pantai Koneng Pelintung	• Makam Tuk Syech Umar		• Restoran dan Rumah Makan
	• Pesanggrahan Putri Tujuh		

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel 2.193. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2019 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 94.110 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 yaitu wisata domestik sebanyak 32.825 dan wisatawan mancanegara sebanyak 12.512. Sedangkan, tahun 2022 yaitu wisata domestik sebanyak 123.541 dan wisatawan mancanegara sebanyak 5.113. data-data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.196
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Wisatawan Domestik	32.825	33.572	81.202	39.325	39.325	123.541	61,35
Wisatawan Mancanegara	12.512	12.908	12.908	3.834	3.834	5.113	-6,75
Jumlah	45.337	46.480	94.110	43.159	43.159	28.654	49,79

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada>Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal.

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2017-2022 dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 produktivitas padi hanya 3,35 ton/ha kemudian tahun 2022 sebesar 3,50 ton/ha.

Tabel 2.197
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,33	3,35	3,35	3,47	3,47	3,50	1,01

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023

2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel di bawah ini. Dari tabel terlihat bahwa jenis tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan di Kota Dumai adalah kelapa sawit. Hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan kelapa sawit yang ada di Dumai.

Tabel 2.198
Luas, Prosuksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Luas Panen								
	Kelapa Sawit	Ha	38.079,00	38.350,00	38.569,00	38.665,50	38.755,00	38.805,00	0,38
	Karet	Ha	2.443,00	2.441,00	2.449,00	2.448,00	2.449,00	2.448,00	0,04
	Kelapa	Ha	1.539,00	1.514,00	1.495,00	1.481,50	1.476,00	1.473,00	-0,87
	Kakao	Ha	26,50	26,50	26,50	24,50	12,94	26,00	9,24
2	Produksi								
	Kelapa Sawit	Ton	79.326,36	82.121,05	82.248,17	82.544,47	83.283,38	84.292,00	1,23
	Karet	Ton	1.688,68	1.799,44	1.839,88	1.850,44	1.871,91	1.920,00	2,62
	Kelapa	Ton	862,03	877,28	874,15	876,98	882,12	877,00	0,35
	Kakao	Ton	9,65	10,07	11,39	11,66	24,50	14,00	17,42
3	Produktivitas								
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2,08	2,14	2,13	2,13	2,15	2,17	0,85
	Karet	Ton/ha	0,69	0,74	0,75	0,76	0,76	0,78	2,58
	Kelapa	Ton/ha	0,56	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	1,24
	Kakao	Ton/ha	0,36	0,38	0,43	0,48	1,89	0,54	50,89

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Selain kelapa sawit, areal perkebunan di Kota Dumai ditanami karet, kelapa, dan kakao. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3) Populasi dan Produksi Ternak

Perkembangan jumlah ternak di Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan pertumbuhan positif terdapat pada ternak unggas yaitu ayam kampung tumbuh sebesar 4,71% per tahun, ayam pedaging tumbuh 31.970,24% dan itik tumbuh 12,25% per tahun. Sementara ternak ruminansia ada yang mengalami pertumbuhan positif dan negative, untuk ternak ruminansia yang tumbuh negative yaitu ternak kambing/domba sebesar -14.79%.

Sedangkan ternak ruminansia yang tumbuh positif masing-masing yaitu 53,80% untuk ternak sapi dan 439,56% untuk ternak kerbau. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perkembangan jumlah ternak ruminansia lebih rendah dibandingkan dengan jumlah produksi ternak unggas melalui pemotongan dimana semua ternak unggas dan ruminansia mengalami pertumbuhan positif pemotongan. Jelasnya perkembangan jumlah dan produksi ternak ruminansia dan unggas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.199
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak
di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Populasi Ternak								
	Sapi Potong	Ekor	4.806,00	4.891,00	5.117,00	1.362,00	5.166,00	8.095,00	53,80
	Kerbau	Ekor	72,00	72,00	51,00	1,00	24,00	30,00	439,56
	Kambing/Domba	Ekor	6.748,00	13.070,00	4.264,00	-	4.652,00	4.641,00	-14,79
	Ayam Kampung	Ekor	23.347,00	30.716,00	16.941,00	17.260,00	17.742,00	23.444,00	4,71
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	191.082,00	573,00	916.492,00	1.714.000,00	2.034.000,00	2.013.000,00	31.970,24
	Itik	Ekor	7.316,00	8.822,00	2.733,00	2.818,00	3.000,00	6.004,00	12,25
2	Produksi Daging								
	Sapi Potong	Kg	2.684,00	4.891,00	3.026,00	1.362,00	3.382,00	3.111,00	25,88
	Kerbau	Kg	30,00	72,00	7,00	1,00	2,00	1,00	2,80
	Kambing/Domba	Kg	670,00	6.906,00	913,00	-	1.003,00	830,00	145,34
	Ayam Kampung	Ton	11,33	29,18	444,00	454,00	16.874,00	14,76	1.019,64
	Telur Ayam Kampung	Butir	114.130,00	290.125,00	166.957,00	170.103,00	519.141,00	763.396,00	73,18
	Ayam Ras Pedaging	Ton	960,12	444,35	1.100,00	2.056,00	1.938.000,00	2.319,60	18.848,31
	Itik	Ton	43,85	10,58	5.466,00	2.818,00	4.753,00	1,02	10.281,58
	Telur Itik	Kg	58.583,00	1.084.471,00	19.122,00	19.716,00	569.149,00	7.955,00	868,83

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI, standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak.

4) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia, karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini.

Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menitikberatkan pada pesan yang disampaikan. Jika pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dan diterapkan masyarakat desa dengan baik dan sukarela, berarti tugas penyuluhan telah terlaksana. Faktanya, kesuksesan tugas penyuluh tergantung pada kredibilitas penyuluh.

Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial. Pada peran penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi, penyuluh diharapkan mampu menyebarluaskan informasi berupa inovasi dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat petani desa secara maksimal. Peran penyuluhan sebagai proses penerangan memiliki makna penyuluh harus memberi penerangan atau kejelasan pada petani desa tentang hal-hal yang belum diketahui. Peran penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental petani yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan untuk usaha tani mereka. Penyuluhan sebagai proses pendidikan membuat masyarakat tani mampu berswadaya dalam upaya peningkatan produksi. Terakhir peran penyuluhan sebagai rekayasa sosial menciptakan perubahan perilaku dari petani desa, terutama peningkatan kesejahteraan. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.200
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 – 2022

No	Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	KJF Penyuluh	2	2		2	2	1	-10,00
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	5	5		6	6	6	4,00
3	PPL PNS	8	8		7	5*	9	7,79
4	PPL THL-TBPP	6	5		5	5	-	-23,33
5	PPL Kontrak	1	1		3	3	6	60,00
	Jumlah	21	21		23	21	22	1,12

*) Pada tahun 2021 akan ada Penyuluh PNS yang pensiun sebanyak 2 Orang

Di Kota Dumai Jumlah penyuluh pertanian semakin hari semakin sedikit. Idealnya setiap satu kelurahan dibawah oleh satu Penyuluh Pertanian. Sehingga untuk Kota Dumai dengan 34 Kelurahan harus memiliki 34 Orang penyuluh pertanian diluar Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian. Jika diliat dari tabel di atas maka untuk tahun 2022 jumlah penyuluh pertanian yang masih aktif berjumlah sebanyak 22 (duapuluh dua) orang yang terdiri dari Penyuluh

Pertanian PNS 9 Orang dan Penyuluh Pertanian Kontrak 6 Orang. Jumlah tersebut sangatlah kurang jika dibandingkan jumlah kelurahan yang ada di Kota Dumai sebanyak 34 kelurahan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia khususnya Penyuluh Pertanian masih sangat penting guna menunjang pengembangan pertanian di Kota Dumai. Kedepan disarankan agar dalam pengangkatan ASN dimohon untuk memasukan alokasi Penyuluh Pertanian dalam formasi tenaga ASN yang dibutuhkan atau jika dimungkinkan diusahakan adanya penambahan alokasi anggaran untuk rekrutmen penyuluh kontrak baru. Sehingga kebutuhan akan Penyuluh Pertanian yang ideal sesuai jumlah kelurahan yang ada dapat terpenuhi.

Produktivitas hasil pertanian juga dipengaruhi oleh sumber daya petani yang handal, tabel berikut menyajikan jumlah petani yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian.

Tabel 2.201
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai
Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				Belum Memiliki Kelas
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Bukit Kapur	140	113	16	1	0	10
2	Dumai Barat	42	35	5	0	0	2
3	Dumai Kota	11	11	0	0	0	0
4	Dumai Selatan	34	28	6	0	0	0
5	Dumai Timur	62	52	1	0	0	9
6	Medang Kampai	44	32	8	0	0	4
7	Sungai Sembilan	180	133	33	0	0	14
Total		513	404	69	1	0	39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023

Adapun jumlah sebanyak 513 kelompok tani yang tersebar di tujuh Kecamatan. Jumlah kelompok tani terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 180 dan paling sedikit di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 11, jelasnya dapat dilihat pada Tabel di atas yang merupakan Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok.

Adapun jumlah kelompok tani yang telah dibina sampai dengan tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2022 jumlah kelompok tani yang telah bina sejumlah 32,35% dari seluruh kelompok tani yang ada.

Jumlah kelompok tani yang telah diberi bantuan pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini pada Tahun 2022 jumlah kelompok tani yang diberi bantuan sebanyak 166 kelompok tani. Bantuan yang diberikan berupa sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.202
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina	33	88	140	173	197	166	49,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023

5) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penurunan dengan rata-rata sebesar -1,64% per tahun pada PDRB ADHB dan -1,67% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.203
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB-ADHB	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	-1,64
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB-ADHK	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	4,88	-1,67

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2017-2022 terjadinya penurunan kontribusi sektor tersebut sebesar -3,96% atau turun dari 17,30% tahun 2017 menjadi 14,09% tahun 2022 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK juga turun dari 17,75% tahun 2017 menjadi 15,16% tahun 2022. Berikut Tabel yang menjelaskan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022.

Tabel 2.204
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB-ADHB	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	-3,96
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB-ADHK	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	15,16	-3,04

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2017-2022. Nilai ekspor tahun 2017 mencapai USD 2.008.641,32 kemudian turun menjadi USD 17.142,58 juta tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar -9,07%. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.205
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	2.008.641,32	11.946,45	8.538,83	9.999,77	15.446,32	17.142,58	-9,07

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2017-2022, dimana pada tahun 2017 sebesar 54,75% kemudian naik menjadi 61,80% tahun 2022 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 2,46% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 56,63 tahun 2017 menjadi 62,18% tahun 2022.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam berikut ini.

Tabel 2.206
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan PDRB-ADHB	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	2,46
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan PDRB-ADHK	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	62,18	1,89

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2) Pertumbuhan Industri

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 1,47% pada tahun 2017 menjadi 1,61% pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,00% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.207
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Sektor	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Industri Pengolahan	%	1,47	3,05	2,32	3,86	1,43	1,61	20,00

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.208
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2022

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Tempat tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Stdi
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintang
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
3	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
4	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan dinding	Kel. Purnama
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	Kel. Mundam
7	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintang
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
10	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaianolah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintang
			Jas	Kel. Purnama
			Bajukaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
		Kel. Basilam Baru		

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13.	Kerajinan Rotan	2	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintang
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dll	
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetak	Kel. Telukbinjai
				Kl. Rimbaseskampng
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintang
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamphlet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		192		

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

2.3.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100.

Pengguna listrik rumah tangga di Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami kenaikan secara fluktuatif, pengguna listrik tahun 2017 sebesar 88,50% mengalami penurunan berturut-turut hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 pengguna listrik mulai bertambah dari 89,03%, hingga tahun 2022 sebesar 91,11% Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.209
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai 2017-2022

Sektor	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	%	96,61	96,94	100	100	100	99,99

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga

dikalikan dengan bilangan 100. Perkembangan rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai tahun 2017-2022 sebagaimana pada Tabel berikut

Tabel 2.210
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah pelanggan listrik pengguna listrik (%)	94.761	74.414	79.890	84.082	88.384	91.419	-0,06
Jumlah rumah tangga	83.863	89.558	91.553	94.441	81.375	83.291	0,14
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	113,00	83,09	87,26	89,03	92,07	91,11	0,66

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebanyak 113% kemudian menurun menjadi 91,11% pada tahun 2022. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Kemudian sektor lain pada sub urusan ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan sektor penggalian dalam PDRB kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor penggalian di Kota Dumai relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.211
Pertumbuhan Sektor Penggalian Kota Dumai 2017-2022

Sektor	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertambangan dan Penggalian	%	-12,80	-5,26	-2,78	2,86	-8,33	-6,06	-5,40

Sumber: Kota Dumai dalam Angka 2023

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup subkategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam, serta yang paling dominan dari lapangan usaha ini di Kota Dumai yaitu subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Peranan kategori ini dalam perekonomian Kota Dumai masih rendah dan stagnan.

2.4.4 Fokus Urusan Penunjang

2.4.4.1 Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2016-2021 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2018.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2.4.4.2 Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.212
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PAD	Rp. Milyar	265,47	279,65	291,62	377,55	366,69	463,98	12,55
Pajak Daerah	Rp. Milyar	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33	19,27
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	22,95	34,71	10,31	17,08	12,54	21,70	18,61
Retribusi Daerah	Rp. Milyar	35,86	30,68	31,1	32,67	23,90	32,21	-0,02
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	41,91	-14,45	1,37	5,05	(26,84)	34,77	-167,28
Penerimaan PBB	Rp. Milyar	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36	134,83	22,85
Persentase Peningkatan PBB	%	45,43	47,64	10,49	11,12	6,52	38,49	76,37
Belanja Daerah Kota Dumai	Rp. Milyar	1.203,26	1.142,38	1.311,59	1.424,70	1.314,29	1.490,42	4,81
Belanja Pendidikan	Rp. Milyar	370,73	228,48	231,70				
Persentase Belanja Pendidikan	%	32,46	25,86	20,33				
Belanja Kesehatan	Rp. Milyar	270,31	243,77					
Persentase Belanja Kesehatan	%	21,78	21,34					

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2022 senilai Rp. 463,98 milyar meningkat dari 265,47 milyar tahun 2017. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2022 berturut-turut adalah sebesar 226,33 milyar naik dari 94,99 milyar tahun 2017 selengkapnya tersaji pada Tabel 2.208. Berdasarkan Tabel 2.208 tersebut juga dapat dilihat perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2017 senilai Rp. 35,86 milyar menurun menjadi 32,21 milyar tahun 2022. Untuk penerimaan PBB, pada

tahun 2017 penerimaan PBB sebesar 50.42 juta Rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2022 yaitu sebesar 134.83 juta Rupiah.

Disisi lain, dari Tabel 2.209 di atas juga terlihat bahwa selama periode 2017-2022 lebih dari 29,42% belanja daerah Kota Dumai disalurkan untuk pemenuhan belanja pendidikan, tetapi perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2017 persentase belanja pendidikan sebesar 30,53% kemudian menurun menjadi 20,33% pada tahun 2022 Penurunan ini juga terjadi pada belanja kesehatan, tetapi penurunannya tidak signifikan, hanya sebesar 0,44% yaitu dari 270,31% pada tahun 2017 turun menjadi 21,34% di tahun 2022 Sumber BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

2.4.4.3 Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2017-2022 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.213
Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	12	2	1	5	4	6	59,33
- PIM II	-	2	5	-	-	2	10,00
- PIM III	-	15	11	-	-	34	-25,33
- PIM IV	-	-	20	-	-	0	-20,00

Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin dari tahun 2017 sampai 2022 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 12 orang. Kemudian jumlah ini menurun pada dua tahun tahun berikutnya menjadi 2 orang di tahun 2018 dan berkurang menjadi 1 orang ASN pada tahun 2019. Tahun 2020

kembali meningkat menjadi 5 orang dan menurun menjadi 4 orang di tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 orang. Dari data tersebut, pada umumnya jumlah pelanggaran disiplin ASN Kota Dumai mengalami penurunan walaupun terdapat trend peningkatan pada tahun berikutnya. Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme PNS Kota Dumai agar pelanggaran disiplin mengalami penurunan.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Pelatihan struktural tersebut terdiri atas kepemimpinan pratama, administrator dan pengawas. Berdasarkan tabel diatas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak dilaksanakan sebagaimana yang terlihat pada tahun 2017, 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, pelaksanaan pelatihan struktural hanya diperuntukkan bagi pimpinan tinggi pratama sebanyak 2 orang dan jabatan administrator sebanyak 15 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pimpinan tinggi pratama yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 5 orang, administrator 11 orang dan pengawas sebanyak 20 orang. Untuk tahun 2022, keikutsertaan pimpinan tinggi pratama sebanyak 2 orang dan administrator sebanyak 34 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa keikutsertaan pejabat struktural dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang sedang duduk pada saat ini. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pejabat struktural agar dapat meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional agar dicapainya kompetensi tertentu.

Selama periode 2017-2022 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah

mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu jenis Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) provinsi. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (pejabat eselon II) Kota Dumai tahun 2017-2022 mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, rotasi mutasi, pensiun dan meninggal dunia. Pada tabel terlihat bahwa masih terdapat kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama pada beberapa perangkat daerah tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 21 orang, tahun 2018 sebanyak 31 orang, tahun 2019 sebanyak 29 orang, tahun 2020 sebanyak 24 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang dan tahun 2022 sebanyak 32 orang. Proses seleksi perlu dilakukan dengan tujuan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong tersebut agar tidak mengganggu kinerja perangkat daerah. Selama periode 2017-2022 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II)
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Pejabat Eselon II	21	31	29	24	30	32	11,12

Sumber: BKPSDM Tahun 2021 dan Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauhmana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

A. Kualifikasi

Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

B. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

C. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

D. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuma disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.215
Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai Tahun 2022

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Tinggi Pratama	32	19.38	8.12	26.56	5	59.06
Jabatan Administrator	153	17.55	7.86	25.46	4.97	55.84
Jabatan Pengawas	347	15.16	4.64	25.01	4.98	49.79
Jabatan Fungsional Ahli Utama	5	17	15	26	5	63
Jabatan Fungsional Ahli Madya	447	15.11	16.66	25.53	4.99	62.29
Jabatan Fungsional Ahli Muda	986	15.37	14.23	25.09	5	59.69
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	268	14.74	17.63	24.85	5	62.22
Jabatan fungsional Penyelia	134	10.67	13.17	25.04	4.98	53.86
Jabatan Fungsional Mahir	104	10.19	9.81	25	4.97	49.97
Jabatan Fungsional Terampil	98	9.74	15.05	24.49	5	54.28
Jabatan Fungsional Pemula	0	0	0	0	0	0
Jabatan Pelaksana	1023	10.25	3.25	24.48	4.96	42.94
Jabatan Struktural	532	16.1	5.77	25.23	4.98	52.08
Jabatan Fungsional Pelaksana	2049	14.38	14.96	25.12	4.99	59.45
	1023	10.25	3.25	24.48	4.96	42.94
S3	3	25	23.33	26.67	5	80
S2	402	20	10.71	25.49	4.98	61.18
S1/D4/Sederajat	2226	15	12.07	24.97	4.99	57.03
D3/Sederajat	438	10	9.73	24.79	4.96	49.48
D1/D2/SMA/SMK/Sederajat	522	5	2.95	24.58	4.97	37.5
SD/SMP/Sederajat	13	1	0	25	4.77	30.77
Laki-Laki	1182	12.99	6.97	24.87	4.97	49.80

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Perempuan	2422	13.69	11.89	24.99	4.99	55.56
Keseluruhan	3604	13.46	10.28	24.95	4.98	53.67

Sumber: BKPSDM Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan **“sangat rendah”** karena memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2.4.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang binwas pemerintahan daerah, Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sejak tahun 2017-2022. Penunjang Urusan Bidang penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pembangunan kerja sama antar daerah yang di implemntasikan melalui beberapa kegiatan antara lain. Perkembangan kinerja indicator penelitian dan pengembangan selama tahun 2017-2022, kinerja masing masing indicator jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.216
Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)	
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2023

2.4.4.5 Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.117
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020	SAKIP 2021	SAKIP 2022	
Nilai	54,02	58,46	61,15	61,33	63,77	64,20	3,55
Predikat	CC	CC	B	B	B	B	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2017. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2017 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 69,15%, naik menjadi 86,09% pada tahun 2022. Sedangkan untuk indikator jumlah dokumen yang direview, capaiannya pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan LKPD) dan 3 dokumen (Rencana Kerja Anggaran, LKPD dan Laporan Kinerja).

Inspektorat Kota Dumai persentase yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100% adapun persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.218
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2017-2022

Uraian	Persentase Rekomendasi yang Selesai						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	69,15	67,44	68,03	72,48	83,72	86,09	4,66

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai, 2021, Data tahun 2020 Ekstrapolasi Tim

Berdasarkan data diatas bahwa OPD tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Dumai. Inspektorat

berharap Kepada OPD untuk bekerja sama menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.

2.4.4.6 Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupun garis batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menegaskan bahwa “Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan, yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan WaliKota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan WaliKota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2022 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614,489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten

Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242,098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri, bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan, sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas, namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.4.4.7 Sekretariat DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu DPRD juga memiliki tugas dan wewenang dalam Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Tabel 2.219
Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	.

No	Uraian	Satuan	Tahun						Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	.

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2018-2023

Dalam menjalankan fungsi penunjang Sekretariat DPRD melakukan kegiatan memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota DPRD, menyusun program-program kerja DPRD serta menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD seperti penyusunan jadwal kegiatan DPRD serta alat perangkat DPRD.

Jumlah Anggota DPRD yang menjalankan fungsi tersebut sebagaimana disajikan data jumlah anggota DPRD Kota Dumai menurut fraksi dan jumlah orang masing-masing fraksi pada Tabel berikut.

Tabel 2.220
Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	Orang	5	5	4	4	4	4	Bertambah
2	Fraksi Gerakan Indonesia Raya	Orang	4	4	3	3	3	3	Berkurang
3	Fraksi Amanat Nasional	Orang	4	4	3	3	3	3	Bertambah
4	Fraksi Golongan Karya	Orang	3	3	3	3	3	3	Tetap
5	Fraksi Nasional Demokrat	Orang	3	3	4	4	4	4	Bertambah
6	Fraksi Keadilan Sejahtera	Orang	3	3	4	4	4	4	Bertambah
7	Fraksi Demokrat	Orang	5	5	5	5	5	5	Tetap
8	Fraksi Persatuan Pembangunan	Orang	0	0	3	3	3	3	Bertambah
9	Fraksi Hanura	Orang	3	3	1	1	1	1	Berkurang

Sumber: BPS, Kota Dumai dalam Angka Tahun 2018-2023

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indikator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani, produktivitas total daerah, rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.218 yang memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2017-2022,

pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 35,90 juta/Kapita tahun 2017 meningkat menjadi Rp 43,67 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode ini, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,06% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2017-2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,92 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp 24,86 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,81% per tahun.

Tabel 2.221
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2018-2023 dan Olahan

2.5.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.639.665/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp.1.868.890/kapita/bulan tahun 2022 atau naik sebesar 2,82% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1.351.642/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 1.770.580/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,56% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,81% pada tahun 2017 menjadi 51,35% pada tahun 2022 atau turun sebesar -1,27% pertahun. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena pada tahun 2022 sebanyak 48,65% pengeluaran konsumsi RT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara tahun 2017 pengeluaran konsumsi pangan RT hanya 45,19% dari total pengeluaran RT setiap bulan.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp. 1.133.522/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 1.176.587/kapita/bulan tahun 2022 atau naik sebesar 0,87% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT

mengalami dengan peningkatan dari Rp. 859.775/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 895.227/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 0,86% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,87% pada tahun 2017 menjadi 56,79% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT seperti Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatan Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Kesehatan dan Pendidikan, Transportasi dan Komunikasi, Restoran dan Hotel dan Lainnya setiap bulan. Berikut Tabel Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.222
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan
Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	4.827,60	5.185,52	5.516,40	5.953,83	6.323,99	7.050,42	7,89
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	5.856,32	6.225,32	6.561,98	6.289,74	6.509,02	7.441,89	5,08
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	54,81	54,56	54,33	51,37	50,72	51,35	-1,27
Konsumsi RT	Rp. Juta/Kapita/Tahun	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.639.665	1.710.486	1.770.759	1.654.592	1.676.967	1.868.890	2,82
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.351.642	1.424.788	1.488.608	1.566.227	1.629.296	1.770.580	5,56
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	3.070,82	3.199,01	3.310,98	3.452,29	3.346,81	3.564,78	3,08
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	4.048,55	4.196,14	4.308,31	4.057,25	4.390,00	4.685,15	3,08
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56,87	56,74	56,55	54,02	56,74	56,79	0,02
Konsumsi RT	Rp. Juta/Kapita/Tahun	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	1.133.522	1.152.943	1.162.603	1.067.309	1.131.028	1.176.587	0,87
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/Bulan	859.775	878.969	893.413	908.293	862.263	895.227	0,86

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2018-2023 dan Olahan

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkan disamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

2.5.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani

di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Berdasarkan Tabel 2.220 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2017 sebesar 104,90 menjadi sebesar 152,93 pada tahun 2020, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani. Tabel disajikan NTP Kota Dumai selama tahun 2017-2022

Tabel 2.223
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun						Pertumbuhan / Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks yang diterima petani (It)	135,42	123,80	121,42	138,45	166,23	175,09	9,37
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	129,10	133,55	103,46	106,23	109,23	114,49	-3,05
3.	NTP	104,90	92,70	117,36	130,33	152,18	152,93	13,73

Sumber: BPS, Kota Dumai (Riau Dalam Angka Tahun 2018-2023 dan BRS, dan olahan 2023. Catatan, Estimasi Tim 2023

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.5.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.198,24 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut adalah Tabel yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.224
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Komponen	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2018	2019	2022	
Panjang Jalan (JK)	Km	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	0,00
Mobil Penumpang	Unit	13.301	9.517	14.680	14.796	14.768	17.405	8,85
Bus	Unit	116	66	101	98	101	137	9,13
Truk	Unit	6.199	4.277	6.572	6.343	6.366	6.636	4,75
Sepeda Motor	Unit	60.626	45.001	62.578	58.836	59.293	61.235	2,27
Jumlah	Unit	80.242	58.861	83.931	80.073	80.528	85.413	3,60
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/km	66,97	49,12	70,05	66,83	67,21	71,28	3,60

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2017-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 66,97 di tahun 2017 menjadi 71,28 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

2.5.2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun.

Dari Tabel 2.222 dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2022 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2022 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat). Persentase kedatangan hanya pada tahun 2017 dan 2022 jumlah kedatangan lebih sedikit dibandingkan dengan keberangkatan masing-masing (47,27% tahun 2017) lebih rendah dibandingkan dengan keberangkatan sebesar 52,73% pada tahun 2017 demikian halnya pada tahun 2022. Berikut adalah Tabel yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.225
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Terminal	Berangkat	102.670	-	-	-	5.680	7.474	6,32
	Datang	105.532	-	-	-	-	5.925	4,15

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun						Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
						4.906		
Pelabuhan	Berangkat	129.135	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750	3,60
	Datang	102.586	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490	54,59
Bandara	Berangkat	11.856	60.090	53.547	14.082	292	223	40,14
	Datang	10.354	58.470	54.748	14.957	260	222	54,56
Jumlah Keberangkatan (orang)		243.661	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447	-11,52
Jumlah Kedatangan (orang)		218.472	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637	7,63
Jumlah Keberangkatan (%)		52,73	52,56	52,47	49,37	84,28	64,82	8,24
Jumlah Kedatangan (%)		47,27	47,44	47,53	50,63	15,72	35,18	12,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Kota Dumai dalam Angka, tahun 2018-2022

2.5.2.3 Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai draf RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87Ha. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai.

2.5.2.4 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi. Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa dan Kakao.

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 0,51% per tahun atau naik dari 20,85% pada tahun 2017 menjadi 21,39% pada tahun 2022. Berikut disajikan Tabel data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.226
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	42.158	42.395	42.639	42.847	43.300	43.244	0,51
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	0,00
3	Rasio	%	20,85	20,97	21,09	21,19	21,41	21,39	0,51

Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2023

2.5.2.5 Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2039 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2017-2022

seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT. KID, Kawasan Lubuk Gaung, Permina dan Pertamina Hulu Rokan yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil. Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.227
Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	602,83	602,83	602,83	602,83	602,83	7.602,83	0,00
2	Luas Kawasan Industri produktif	Hektar	911,43	911,43	911,43	911,43	911,43	2.911,43	0,00
3	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	02.199	02.199	02.199	02.199	02.199	202.199	0,00
4	Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	0,00
5	Rasio Kawasan Industri produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	0,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2023

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7.602,83 hektar. Luas Kawasan peruntukan industry tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit, dan migas.

2.5.2.6 Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan. Berdasarkan pada Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe sebesar 8,31% per tahun atau naik dari 377 unit pada tahun 2017 bertambah menjadi 539 unit pada tahun 2022. Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya selama periode 2017-2022. Berikut perkembangan data jumlah jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.228
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	Unit	377	433	533	458	539	539	8,31

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

2.5.2.7 Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2022, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 31 unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Berikut tabel Banyaknya Hotel di Kota Dumai.

Tabel 2.229
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai

No.	Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Hotel Bintang dan Non Bintang	Unit	34	35	36	36	31	31	-1,14
2.	Jumlah Kamar	Unit	1.728	1.197	1.161	1.471	1.479	1.507	-0,92
3.	Jumlah Tempat Tidur	Unit	2.599	1.775	1.733	2.212	2.187	2.170	-1,67

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2018-2023

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 665 kasus. Kondisi tersebut semakin menurun hingga tahun 2022 menjadi 519 kasus. Peningkatan Jumlah kasus kriminalitas Kota Dumai salah satunya diakibatkan karena Kota Dumai merupakan kota perlintasan (transit) dan tujuan para pencari kerja didaerah atau provinsi sekitar Riau. Meskipun tingkat kriminalitas Kota Dumai cenderung menurun, namun tingkat penyelesaiannya rata-rata hingga tahun 2022 sebesar 86,90% dengan rata-rata pertumbuhan penyelesaian angka kriminalitas sebesar 3,14 per tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.230
Angka Kriminalitas di Kota Dumai 2017-2022

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Angka kriminalitas	Unit	665	650	594	515	515	519	-4,68
Diselesaikan	Unit	496	497	468	412	413	451	-1,63
% Diselesaikan	Unit	74,59	76,46	78,79	80,00	80,19	86,90	3,14

Sumber: Kota Dumai Angka, 2023

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi. Selain itu, kriminalitas dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua

ekuilibrium yang berbeda, yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah; dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al., 2005).

2.5.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Sedangkan jumlah unjuk rasa yang terdapat di Kota Dumai yang selama tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dari 3 kejadian tahun 2017 bertambah menjadi 22 kejadian tahun 2022. Demonstrasi terbanyak terkait dengan kasus lahan 1 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 16 kasus tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 40,18% per tahun. Selama periode 2017-2022 jumlah kasus terbanyak pada tahun 2022 yaitu 22 kasus. Perkembangan jumlah demonstrasi menurut masalah yang dimunculkan Kota Dumai selama tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.231
Jumlah Demonstrasi di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Masalah	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Lahan	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Agama	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Politik	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sumber Daya Alam	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Ketenagakerjaan	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Lainnya	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah Demonstrasi	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Dumai Tahun 2023

Kedepan perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas untuk mengurangi jumlah kasus tersebut menunjukkan semakin bertambah untuk menjaga keamanan. Para investor jika ingin berinvestasi di suatu daerah tidak akan hanya melihat pada satu faktor saja sebab ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih daerah tersebut seperti kemudahan dalam berusaha, infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik tetapi termasuk kondisi keamanan

2.5.3.3 Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 5 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.232
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pendaftaran Penanaman Modal	5 hari
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	5 hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	5 hari
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 hari
5	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	5 hari
6	Izin Lokasi	5 hari
7	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	5 hari
8	Izin Klinik	5 hari
9	Izin Klinik Gigi	5 hari
10	Izin Penyelenggaraan Optical	5 hari
11	Izin Apotik	5 hari
12	Izin Toko Obat	5 hari
13	Izin Laboratorium	5 hari
14	Izin Rumah Bersalin	5 hari
15	Izin Praktek Terapi Wicara	5 hari
16	Izin Praktek Fisioterapis	5 hari
17	Izin Praktek Bidan	5 hari
18	Izin Dokter Spesialis	5 hari
19	Izin Dokter Umum	5 hari
20	Izin Dokter Gigi	5 hari
21	Izin Praktek Perawat Gigi	5 hari
22	Izin Refraksionis Opician	5 hari
23	Izin Pengobatan Tradisional	5 hari
24	Izin Depot Air Isi Ulang	5 hari
25	Izin Operasional Rumah Sakit	5 hari
26	Izin Praktek Perawat Mandiri	5 hari
27	Izin Praktek Tukang Gigi	5 hari
28	Izin Praktek Apoteker	5 hari
29	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 hari
30	Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum	5 hari
31	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
32	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
33	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	5 hari
34	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	5 hari
35	Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
37	Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
38	Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	5 hari
39	Izin Masuk Kota	5 hari
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 hari
41	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 hari
42	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
43	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
44	Izin Usaha Industri (IUI)	5 hari
45	Izin Usaha Toko Modern	5 hari
46	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5 hari
47	Izin Usaha Perkebunan	5 hari
48	Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallow	5 hari
49	Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	5 hari
50	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	5 hari
51	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5 hari
52	Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	5 hari
53	Izin Penggunaan Tower Crane	5 hari
54	Izin Penggunaan Bejana Tekan	5 hari
55	Izin Penggunaan Instalasi Listrik	5 hari
56	Izin Penggunaan Motor Diesel	5 hari
57	Izin Penggunaan Penyalur Petir	5 hari
58	Izin Lingkungan (AMDAL)	5 hari
59	Izin Lingkungan (UKP-UPL)	5 hari
60	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL)	5 hari

No	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
61	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	5 hari
62	Izin Pembuangan Air Limbah	5 hari
63	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	5 hari
64	Izin Turap	5 hari
65	Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	5 hari
66	Izin Usaha Peternakan	5 hari
67	Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	5 hari
68	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	5 hari
69	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 hari
70	Izin Penggunaan Racun Api	5 hari
71	Izin Reklame/Spanduk	5 hari
72	Izin Warnet	5 hari
73	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5 hari
74	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	5 hari

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dari Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.233
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenis Izin	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	591	-	-	-	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	795	711	2	1	41	-	767,94
4	TDP PO	-	-	-	-	-	-	-
5	TDP CV	-	-	-	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	-	-	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	1	2	20,00
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	-	-	1	-	1	-	-
14	Izin Lokasi	-	-	21	25	15	-	-4,19
15	Izin Lingkungan	-	-	9	6	9	5	-5,56
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	235	309	208	131	88	-14,21
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-	-
18	Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-	-
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesialis- okter Gigi Spesialis	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	30	17	45	43	23,39
22	Izin Penyelenggaraan Optical	1	1	6	1	3	15	203,33
23	Izin Apotik	13	6	13	9	13	16	19,91
24	Izin Toko Obat	11	9	10	3	5	13	29,92
25	Izin Praktek Laboratorium	1	-	-	-	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	8	-	-	-	-	-
27	Izin Klinik	-	-	7	12	2	3	7,62
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	1	-	-	3	-
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	1	-
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	2	-	5	6	4,00
32	Izin Praktek Bidan	57	36	18	60	91	326	91,28
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-	-	-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	-	-	-	-	-	-
37	Izin Racun Api	262	154	-	-	-	-	-8,24
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	104	73	43	39	-16,04
39	Izin Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman Beralkohol Gol B dan C	-	-	5	1	1	5	64,00
41	Izin Reklame	26	60	42	16	-	-	7,77

No	Jenis Izin	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis		-	-	-	-	-	-
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	143	-	25	19	29	55	23,66
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	110	63	90	123	7,36
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	-	-	-
46	Izin Panti Pijat	1	1	3	3	-	-	40,00
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	166	211	140	168	31	-	-13,62
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-	-
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPSPF)	-	-	4	4	3	-	-5,00
51	Izin Pengambilan Air	-	-	-	-	-	-	-
52	Izin Galian C Tanah Timbun	-	-	-	-	-	-	-
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-
54	Sertifikat Laik Operasi	-	-	-	-	-	-	-
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	27	20	-	-	-	-	-5,19
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	7	10	3	-	-5,43
57	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	-	-
58	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	-	-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	9	-	-	-	-
61	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	-	-
62	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	22	9	50	79,29
63	Izin Karoke	-	-	-	-	-	27	-
64	Izin Salon	6	4	-	-	-	15	-6,67
65	Izin Permainan	3	2	5	1	-	-	7,33
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	17	28	-	-	-	-	12,94
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	890	764	-	-	-	-	-2,83
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	1	2	-	-	-	-	20,00
69	Izin Klinik Rawat Jalan	4	-	-	-	-	-	-
70	Izin Dokter Gigi	13	18	-	-	-	-	7,69
71	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	22	22	8	29	39,77
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	5	2	-	-	-12,00
73	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	1	-	-	18	-
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	4	91	96	171	451,72
75	Izin Perawat	2	-	-	-	-	-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	1	-	-	-	-	-	-
77	Izin Pengobatan Tradisional	1	-	2	1	-	-	-10,00
78	Izin Depot Air Isi Ulang	3	4	1	3	1	36	718,33
79	izin Praktek Tukang Gigi	10	-	15	-	-	16	-
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	5	-	-	-	-	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	12	25	21	26	21	1870	1.780,33
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	6	9	2	-	-	-	-5,56
83	Izin Pembuangan Air Limbah	4	-	-	-	-	-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	211	283	-	-	-	-	6,82
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	85	51	43	14	-	-24,63
86	Pendaftaran Penanaman Modal	-	24	-	-	-	-	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	7	49	57	34	115,20
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	-	47	59	51	2	-16,82
89	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		3273	2705	1217	1120	819	3011	32,09

2.5.3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.5.4.1 Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.5.4.2 Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 496 orang, pada tahun 2022 bertambah menjadi menjadi 632 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.234
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah lulusan S1/S2/S3	496	564	736	811	844	632	0,17
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	0,00
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	0,17	0,19	0,24	0,26	0,26	0,19	487,87

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, Diolah, 2023

2.5.4.3 Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan.

Tabel 2.235
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Umur Produktif	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772	2,46
2	Umur Belum Produktif	91.171	91.941	92.616	92.060	92.929	94.315	0,68
3	Umur Tidak Produktif	8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	13.745	10,69
4	Persentase Umur Produktif	66,57	66,77	66,95	67,32	67,39	67,44	0,26
5	Rasio Ketergantungan	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29	-0,78
6	Jumlah Penduduk	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 50,21% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,21% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua. Sedangkan pada tahun 2022 rasio ketergantungan hanya 48,29%. Berdasarkan Tabel 2.231 tersebut dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,78% per tahun. Walaupun demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

2.5.4.4 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini

menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Berikut Tabel rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2017 sebesar 91,06% dan kemudian meningkat menjadi 94,62% dengan pertumbuhan sebesar 0,79% per tahun. Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.236
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	2,20
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	1,92
Jumlah Bekerja	Orang	123.554	127.891	140.600	134.581	135.381	140.509	2,71
Persentase Penduduk Bekerja	%	91,06	93,96	93,53	91,81	93,71	94,62	0,79

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Perkembangan trend positif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat, bangun keterampilan dan pengetahuan, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat. Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.237
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Dumai
Tahun 2017-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	4,46%	5,34%	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%		
1.1.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,46%	5,34%	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%		
1.1.1.3	PDRB per kapita	101,95	109,06	117,05	114,63	123,5	135,78		
1.1.1.4	Laju inflasi	4,85	1,85	1,28	2,89	1,64	6,32		
1.1.1.5	Indeks Gini	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,36		
1.1.1.6	Persentase Penduduk Miskin	4,57%	3,71%	3,56%	3,16%	3,42%	3,20%		
1.2	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	74,06	74,64	74,4	74,75	75,26		
1.2.2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,97	12,98	13,1	13,12	13,31	13,32		
1.2.3	Angka rata-rata lama sekolah	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	10,15		
1.2.4	Angka Usia Harapan Hidup	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	71,25		
1.2.5	Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	12.249		
1.2.6	Angka melek huruf	98,45%	99,21%	99,16%	99,51%	99,30%	99,32%		
1.2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	65,72%	64,40%	69,53%	65,23%	62,67%	62,52%		
1.2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53%	64,17%	69,28%	67,15%	64,91%	65,45%		
1.2.9	Jumlah Penduduk Bekerja	91,06%	93,96%	95,53%	91,81%	93,71%	94,62%		
1.2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%		
1.2.11	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	3,00%	5,31%	-0,59%	4,95%	9,35%	8,68%		
1.2.12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II	7.374	7.374	36.740	36.740	3.803	0		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.2.13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,54	76,00	84,53	83,00	81,11	85,03		
1.2.14	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	22,40%	22,82%	20,37%	24,00%	28,49%	34,89%		
1.2.15	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
1.2.16	Pangan (PPH dan Rawan Pangan)	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,90		
1.2.17	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK	5,33%	5,20%	5,02%	5,28%	5,18%	4,88%		
1.2.18	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK	0,36%	0,33%	0,32%	0,31%	0,30%	0,29%		
1.2.19	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK	17,75%	17,18%	16,73%	15,17%	15,60%	15,16%		
1.2.20	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK	56,63%	57,80%	58,66%	61,06%	61,40%	62,18%		
1.2.21	Angka Balita Gizi Buruk	5,00	6,00	7,00	3,00	6,00	23,00		
1.2.22	Perkembangan Penerima PBI APBD-APBN	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	196.631		
1.3	Seni Budaya dan Olahraga								
1.3.1	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan SD	103,96%	101,90%	100,00%	100,93%	100,00%	100,00%		
1.3.2	Implementasi Budaya Melayu Riau dalam Kurikulum Pendidikan SMP	102,94%	102,86%	102,78%	102,70%	102,63%	100,00%		
1.3.3	Rata - Rata Nilai Agama pada Pendidikan SD/MI	80,71%	81,90%	81,43%	85,95%	85,95%	95,83%		
1.3.4	Rata - Rata Nilai-nilai Agama pada SMP	93,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,85%		
1.3.5	Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	0,00	28,00	28,00	29,00	40,00	40,00		
1.3.6	Jumlah cabang olahraga yang dibina	0,00	32,00	33,00	34,00	32,00	33,00		
2	PELAYANAN UMUM								
2.1	Pelayanan Urusan Wajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	79,00	101,00	134,00	96,00	94,00	115,00		
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	111,92	100,00	108,33	108,86	108,33	108,86		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	95,60	78,89	89,16	88,66	89,16	88,66		
2.1.1.4	APM SD/MI/Paket A	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	98,86		
2.1.1.5	APM SMP/MTs/Paket B	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	84,45		
2.1.1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,46	100	99,85	99,61	99,53	98,86		
2.1.1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	95,23	95,88	97,05	97,15	97,26	93,99		
2.1.1.8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,013	0,09	0,052	0,096	0,422	2,18		
2.1.1.9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,025	0,025	0,098	0,086	0,393	4,17		
2.1.1.10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.1.11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.1.1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	94,52		
2.1.1.13	Rasio Siswa/RK SD	33,54	32,83	32,69	31,13	36,00	25,30		
2.1.1.14	Rasio Siswa/RK SMP	32,54	30,23	29,76	29,69	38,00	25,90		
2.1.1.15	Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	437,00	476,00	462,00	260,00	599,00	1377,00		
2.1.1.16	Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	81,00	143,00	162,00	40,00	187,00	469,00		
2.1.1.17	Rasio Guru/Murid SD	17,16	20,72	18,23	17,31	17,38	16,4		
2.1.1.18	Rasio Guru/Murid SMP	17,72	15,06	16,19	14,37	14,79	14,53		
2.1.1.19	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	79,50	90,20	90,70	92,60	84,75	97,96		
2.1.1.20	Persentase Guru SD Sertifikasi	54,65	51,90	53,20	60,53	46,96	47,74		
2.1.1.21	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,80	90,30	91,80	95,40	90,88	99,55		
2.1.1.22	Persentase Guru SMP Sertifikasi	60,00	49,30	53,20	47,85	47,80	47,79		
2.1.2	Kesehatan								
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	11,63	7,10	7,22	7,35	8,26	9,96		
2.1.2.2	Angka Kematian Balita	13,44	9,00	9,22	8,81	9,82	11,13		
2.1.2.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	142,00	63,00	125,00	37,00	263,41	58,56		
2.1.2.4	Angka Kematian Neo-Natal per 1.000 Kelahiran	9,13	6,10	4,60	3,90	4,60	6,09		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1.2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	170,39	173,79	211,13	172,93	147,07	175,56		
2.1.2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
2.1.2.7	Rasio dokter per satuan penduduk	0,54	0,56	0,57	0,44	0,63	0,73		
2.1.2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3,73	4,08	4,44	3,72	6,04	6,09		
2.1.2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	87,11	95,60	95,40	99,68	100,00	54,83		
2.1.2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,20	97,28	93,30	96,26	92,57	90,34		
2.1.2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	54,55	0,00	0,00	45,69		
2.1.2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	45,10	14,30	50,40	39,40	59,56	144,11		
2.1.2.13	Cakupan kunjungan bayi	94,30	96,70	94,40	92,70	90,86	92,74		
2.1.2.14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	94,60	99,50	99,00	73,50	39,92	88,71		
2.1.2.15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	96,90	88,70	96,40	0,00	49,77	86,65		
2.1.2.16	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	92,40	96,10	96,30	43,00	66,74	85,94		
2.1.2.17	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	3,36	3,30	3,24	3,16	3,09	3,01		
2.1.2.18	Rasio puskesmas pembantu	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86		
2.1.2.19	Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	0,00	2,18	4,32	0,96	4,55	0,00		
2.1.2.20	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	49,50	78,20	84,50	85,52	87,55	95,80		
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	51,65	52,35	35,01	39,96	52,37	44,30		
2.1.3.2	Rasio Panjang Jalan/Penduduk	0,004	0,004	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036		
2.1.3.3	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	52,35	51,81	35,01	38,73	52,37	44,30		
2.1.3.4	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,79	1,89	1,92	1,87	1,83	1,83		
2.1.3.5	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%	1,28%	5,18%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1.3.6	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	15 TPS	15 TPS	20 TPS	21 TPS	21 TPS	22 TPS		
2.1.3.7	Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4,97	3,70	5,08	5,36	7,17	7,30		
2.1.3.8	Persentase kepemilikan jamban cubluk	9,10	5,50	1,50	2,38	1,72	2,39		
2.1.3.9	Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	85,05	90,40	94,93	94,64	92,83	95,49		
2.1.3.10	Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,88	0,50	-	-	-	-		
2.1.3.11	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
2.1.3.12	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	93,75	92,39	94,65	95,38	97,03	91,44		
2.1.3.13	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	5,94%		
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
2.1.4.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	76,60	74,20	78,61	82,31	90,00	87,42		
2.1.4.2	Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	17.559	16.918	18.945	19.349	19.469	19.855		
2.1.4.3	Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	121,23	66,7	38,45	33,75	Tahap I : 0	191,88		
2.1.4.4	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2432	1884	1412	1068	948	562		
2.1.4.5	Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	0,26	0,00	0,00		
2.1.4.6	Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23,00	81,00	129,00	129,00	129,00	144,00		
2.1.4.7	Jumlah Drainase Ligkungan Terbangun	n/a	16,00	29,00	33,00	33,00	39,00		
2.1.4.8	Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 Ruas	392 Ruas	412 Ruas	435 Ruas	445 Ruas	445 Ruas		
2.1.4.9	Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi	35 Lokasi		
2.1.4.10	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	88,50	83,09	87,26	89,03	92,07	91,11		
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
2.1.5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,87	3,10	2,96	1,52	3,43	3,68		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
2.1.5.2	Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP	81,00	92,00	80,00	97,25	100,00	100,00		
2.1.5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	155,00	156,00	166,00	178,00	238,00	1164,00		
2.1.5.4	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1590,00	1590,00	1597,00	1598,00	1599,00	1599,00		
2.1.5.5	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	7,00	10,00	9,00	16,00	22,00	17,00		
2.1.5.6	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg	-	-	-	-	-		
2.1.5.5	Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	20 Kasus	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	44 Kasus		
2.1.5.6	Persentase Penegakan Perda	75%	80%	90%	100%	100%	100%		
2.1.6	Sosial								
2.1.6.1	Jumlah Panti Asuhan	12,00	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00		
2.1.6.2	Rumah Singgah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
2.1.6.3	Jumlah PPKS	19.738	21.644	83.012	80.299	43.247	49.206		
3	PELAYANAN DASAR								
3.1	Urusan Pemerintahan								
3.1.1	Ketenagakerjaan								
3.1.1.1	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	21,43	43,45	27,55	112,22	4,20	12,6		
3.1.1.2	Jumlah Pengangguran Terbuka	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997		
3.1.1.3	Keselamatan dan Perlindungan	-	-	-	-	-	-		
3.1.1.4	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	14,00	55,00	36,00	38,00	55,00	17,00		
3.1.1.5	Persentase Pekerja Lulusan S1 / S2 / S3	16,66%	18,60%	23,83%	25,60%	26,09%	19,05%		
3.1.1.6	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih	10,88%	36,02%	25,81%	0%	0%	63,33%		
3.1.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
3.1.2.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.665	2.612	2.684	2.615	2.642	2.681		
3.1.2.2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%)	65,10	65,17	65,67	66,27	67,12	67,12		
3.1.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	13,33	13,33	13,33	6,67	6,67	6,67		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.1.2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	10.442	10.442	11.198	49.437	5.481	51.223		
3.1.2.5	Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja	63,00	26,00	14,00	9,00	4,00	23,00		
3.1.2.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,97	90,82	90,86	90,66	90,72	90,74		
3.1.2.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,49	59,90	56,78	52,97	52,54	52,58		
3.1.2.8	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	0,05	0,05	0,11	0,06	0,09	0,10		
3.1.2.9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,97	9,98	9,53	10,29	19,69	19,77		
3.1.3	Ketahanan Pangan								
3.1.3.1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama*	15,18	16,91	2,26	6,98	21,88	11,42		
3.1.3.2	Skor PPH Konsumsi	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,90		
3.1.3.3	Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
3.1.4	Lingkungan Hidup								
3.1.4.1	Perkembangan Suhu Rata-rata	28,09	27,43	27,30	27,11	27,12	26,77		
3.1.4.2	Persentase penanganan sampah	50,00	53,00	56,00	60,00	60,00	64,00		
3.1.4.3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)		
3.1.5	Kependudukan dan catatan Sipil								
3.1.5.1	Kepemilikan KTP	94,27	94,82	96,00	96,21	96,65	99,01		
3.1.5.2	Ketersediaan database kependudukan skala Nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3.1.5.3	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
3.1.5.4	Pemanfaatan data kependudukan	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD		
3.1.5.5	Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 OPD		
3.1.5.6	Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	22,20	25,60	30,20	41,85	42,28	34,97		
3.1.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.1.6.1	Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00		
3.1.6.2	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.1.6.3	Persentase Posyandu Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.1.6.4	Persentase LSM yang Dibina	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		
3.1.6.5	Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	100,00		
3.1.7	Keluarga Berencana								
3.1.7.1	Cakupan peserta KB aktif	33.059,00	30.571,00	32.836,00	35.923,00	34.475,00	23.490,00		
3.1.7.2	Jumlah Keluarga	82.478,00	82.478,00	54.982,00	89.573,00	70.537,00	0,00		
3.1.7.3	Keluarga Pra Sejahtera	2.871,00	2.871,00	6.369,00	6.369,00	3.803,00	0,00		
3.1.7.4	Keluarga Sejahtera I	4.503,00	4.503,00	30.371,00	30.071,00	0,00	0,00		
3.1.8	Perhubungan								
3.1.8.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal								
	BERANGKAT	102.670,00	-	-	-	5.680,00	7.474,00		
	DATANG	105.532,00	-	-	-	4.906,00	5.925,00		
3.1.8.2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Pelabuhan								
	BERANGKAT	129.135,00	119.796,00	134.526,00	24.587,00	46.886,00	48.750,00		
	DATANG	102.586,00	103.876,00	115.611,00	24.691,00	4.693,00	24.490,00		
3.1.8.3	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal Bandara								
	BERANGKAT	11.856,00	60.090,00	53.547,00	14.082,00	292,00	223,00		
	DATANG	10.354,00	58.470,00	54.748,00	14.957,00	260,00	22,00		
3.1.8.4	Pelabuhan Penumpang	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
3.1.8.5	Pelabuhan Ro-Ro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.1.8.6	Bandara	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3.1.8.7	Terminal Penumpang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.1.8.8	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.075,00	3.395,00	9.700,00	9.952,00	1.728,00	3.996,00		
3.1.8.9	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.171,00	9.274,00	9.456,00	9.708,00	10.500,00	9.369,00		
3.1.8.10	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	30 Menit		
3.1.8.11	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000,00	40.000,00	82.500,00	82.500,00	40.000,00	40.000,00		
3.1.8.12	Pemasangan Rambu - Rambu Jalan	892,00	15,00	88,00	340,00	1.422,00	266,00		
3.1.8.13	Persentase Pertumbuhan Pemasangan Rambu - Rambu	167,00	-98,00	487,00	286,00	339,00	-21,00		
3.1.9	Komunikasi dan Informatika								
3.1.9.1	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3.1.10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
3.1.10.1	Jumlah Koperasi	199,00	213,00	225,00	245,00	271,00	288,00		
3.1.10.2	Jumlah Koperasi Aktif	161,00	177,00	190,00	163,00	163,00	180,00		
3.1.10.3	Persentase Koperasi Aktif	80,90	83,10	84,44	66,53	60,15	62,50		
3.1.10.4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	12.672	14.874	16.324	16.116	6.515	8.779		
3.1.10.5	Jumlah Pendamping UKM	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
3.1.11	Penanaman Modal								
3.1.11.1	Jumlah Perusahaan PMDN	64,00	24,00	91,00	98,00	235,00	246,00		
3.1.11.2	Jumlah Perusahaan PMA	84,00	4,00	44,00	44,00	44,00	44,00		
3.1.11.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Juta)	2.390,98	1.635,80	3.699,00	5.844,48	8.598.115,20	6.461.259,70		
3.1.11.4	Nilai Investasi PMA (Rp. Juta)	2.007,80	371,6	2.237,80	7.117,50	487.531,50	6.094.171,20		
3.1.11.5	Persentase Nilai Realisasi PMDN (Rp. Juta)	2.390,98	1.635,80	3.699,00	5.844,48	8.598.115,20	6.461.259,70		
3.1.11.6	Persentase Nilai Realisasi PMA (Rp. Juta)	2.007,80	371,6	2.237,80	7.117,50	487.531,50	6.094.171,20		
3.1.12	Kepemudaan dan Olahraga								
3.1.12.1	Jumlah organisasi pemuda	55,00	47,00	47,00	47,00	47,00	55,00		
3.1.12.2	Jumlah organisasi olahraga	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00		
3.1.12.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00		
3.1.12.4	Jumlah kegiatan olahraga	3,00	6,00	3,00	4,00	3,00	4,00		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
3.1.13	Statistik								
3.1.13.1	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3.1.13.2	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3.1.14	Kebudayaan								
3.1.14.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.1.14.2	Buku "PDRB Kota"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3.1.15	Perpustakaan								
3.1.15.1	Jumlah perpustakaan	15,00	15,00	15,00	90,00	266,00	243,00		
3.1.15.2	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,50	0,49	0,49	2,81	8,10	7,32		
3.1.15.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	28242,00	29370,00	37710,00	9100,00	11630,00	33301,00		
3.1.15.4	Jumlah Anggota Perpustakaan	205,00	178,00	132,00	90,00	97,00	253,00		
3.1.15.5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	48447,00	51097,00	53557,00	53557,00	54202,00	54202,00		
3.1.16	Kearsipan								
3.1.16.1	Dokumen Arsip yang Tersimpan	1.791,00	1.824,00	1.710,00	46,00	-	-		
4	URUSAN PEMERINTAH								
4.1	PILIHAN								
4.1.1	Kelautan dan Perikanan								
4.1.1.1	Angka Konsumsi Ikan Perkapita	41,00	40,00	46,00	45,00	44,75	45,65		
4.1.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	342,36	265,31	329,78	293,78	311,77	382,69		
4.1.1.3	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	26,00	28,00	29,00	29,00	32,00	18,00		
4.1.1.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	945,20	1832,65	1426,74	978,52	710,57	1020,30		
4.1.1.5	Produksi Perikanan Laut (Kg)	563050,00	564766,00	1019856,00	858791,00	608104,00	855703,00		
4.1.2	Pariwisata								
4.1.2.1	Kunjungan Wisatawan (orang)	45.337,00	46.480,00	94.110,00	43.159,00	43.159,00	28.654,00		
4.1.3	Pertanian								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
4.1.3.1	Rasio produktivitas padi (Ton/Ha)	3,33	3,35	3,35	3,47	3,47	3,50		
4.1.3.2	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian	21,00	21,00	23,00	23,00	21,00	22,00		
4.1.3.3	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	33,00	88,00	140,00	173,00	197,00	166,00		
4.1.3.4	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB - ADHB (%)	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44		
4.1.3.5	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan PDRB - ADHK (%)	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	4,88		
4.1.4	Perdagangan								
4.1.4.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB-ADHB (%)	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09		
4.1.4.2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor PDRB-ADHK (%)	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	15,16		
4.1.4.3	Net Ekspor Barang dan Jasa	2.008.641,32	11.946,45	8.538,83	9.999,77	15.446,32	17.142,58		
4.1.5	Perindustrian								
4.1.5.1	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB - ADHB	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80		
4.1.5.2	Kontribusi sektor industri pengolahan PDRB - ADHK	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	62,18		
4.1.5.3	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	1,46	3,05	2,32	3,86	1,43	1,61		
4.1.6	Energi dan SDM								
4.1.6.1	Pertambangan dan Penggalian	-12,80	-5,26	-2,78	2,86	-8,33	-6,06		
5	URUSAN PENUNJANG								
5.1	Penunjang								
5.1	Keuangan Daerah								
5.1.1	PAD (Rp. Milyar)	265,47	279,65	291.,62	377,55	366,69	463,98		
5.1.2	Pajak Daerah (Rp. Milyar)	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33		
5.1.3	Retribusi Daerah (Rp. Milyar)	35,86	30,68	31,1	32,67	23,9	32,21		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
5.1.4	Penerimaan PBB (Rp. Milyar)	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36	134,83		
5.1.5	Belanja Daerah Kota Dumai (Rp. Milyar)	1.203,26	1.142,38	1.311,59	1.424,70	1.314,29	1.490,42		
5.1.2	Kepegawaian dan Diklat								
5.1.2.1	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	12,00	2,00	1,00	5,00	4,00	6,00		
5.1.2.2	PIM II	-	2,00	5,00	-	-	2,00		
5.1.2.3	PIM III	-	15,00	11,00	-	-	34,00		
5.1.2.4	PIM IV	-	-	20,00	-	-	0,00		
5.1.2.5	Jumlah Pejabat Eselon II	21,00	31,00	29,00	24,00	30,00	32,00		
5.1.2.6	Indeks Profesionalisme ASN	-	25,92	43,18	-	-	53,67		
5.1.3	Penelitian dan Pengembangan								
5.1.3.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	-	-	-		
5.1.4	Pengawasan								
5.1.4.1	Predikat SAKIP Kota Dumai	CC	CC	B	B	B	B		
5.1.4.2	Nilai SAKIP Kota Dumai	54,02	58,46	61,15	61,33	63,77	64,20		
5.1.4.3	Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	69,15	67,44	68,03	72,48	83,72	86,09		
5.1.5	Sekretariat Daerah								
5.1.5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak	Ada	Ada	-	-	-		
5.1.5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	-	-	-		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja						Standar	Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
5.1.5.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasi	Terintegrasi	Terintegrasi	-	-	-		
5.1.5.4	Jumlah Anggota DPRD	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
6	DAYA SAING								
6.1	DAYA SAING DAERAH								
6.1.1	Kemampuan Ekonomi Daerah								
6.1.1	Konsumsi RT perkapita PDRB - ADHB (Rp Juta)	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67		
6.1.2	Konsumsi RT perkapita PDRB - ADHK (Rp Juta)	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86		
6.1.3	Pengeluaran Konsumsi RT PDRB - ADHB (Rp Milyar)	10683,92	11410,84	12078,38	12243,57	12833,01	14492,31		
6.1.4	Pengeluaran Konsumsi RT PDRB - ADHK (Rp Milyar)	7119,37	7395,15	7619,07	7510,02	7736,81	8249,93		
6.1.5	NTP	104,90	92,70	117,36	130,33	152,18	152,93		
6.1.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
6.1.2.1	Rasio Panjang Jalan Per Jmlah Kendaraan	66,97	49,12	70,05	66,83	67,21	71,28		
6.1.2.2	Rasio Luas Wilayah Produktif	20,85	20,97	21,09	21,19	21,41	21,39		
6.1.2.3	Rasio Kawasan Industri produktif (%)	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29		
6.1.2.4	Restoran/Rumah Makan/Warung/Kafe	377,00	433,00	533,00	458,00	539,00	539,00		
6.1.2.5	Jumlah Penginapan/Hotel	34,00	35,00	36,00	36,00	31,00	31,00		
6.1.3	Iklm Berinvestasi								
6.1.3.1	Angka kriminalitas	665,00	650,00	594,00	515,00	515,00	519,00		
6.1.4	Sumber Daya Manusia								
6.1.4.1	Persentase Lulusan S1/S2/S3	0,17%	0,19%	0,24%	0,26%	0,26%	0,19%		
6.1.4.2	Rasio penduduk yang bekerja	91,06	93,96	93,53	91,81	93,71	94,62		
6.1.4.3	Rasio Ketergantungan	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29		

Sumber : data olahan, LKJIP 2017 sd 2022



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

3

Gambaran umum keuangan daerah untuk memberikan gambaran perkiraan indikatif baik pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan untuk melaksanakan urusan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Adapun aspek-aspek yang dianalisa adalah kinerja masa lalu dan proyek selama tahun rencana yang terdiri dari: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap Kapasitas keuangan daerah yang pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Selain analisa diatas, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah terkait dengan upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam melakukan analisa pengelolaan keuangan daerah untuk 5 (lima) kedepan. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah kota Dumai dalam merencanakan pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan hal tersebut sehingga sumberdaya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Kota Dumai ke depan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2018-2022)

Sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020/2021 sampai saat ini Pengelolaan keuangan daerah kota Dumai telah mempedomani kedua peraturan perundang-undangan tersebut disamping peraturan lainnya yang menjadi paket regulasi keuangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai merupakan manifestasi dari hasil musyawarah yang sekaligus merupakan harapan dari masyarakat Kota Dumai. Sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional maupun Provinsi Riau, maka upaya-upaya peningkatan perekonomian Kota Dumai diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tersebut, diwujudkan melalui usaha mengembangkan sektor jasa, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertanian agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun selama tahun perencanaan pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik dan akuntabel dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar dalam percepatan pembangunan daerah terutama teknologi informasi. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. (PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan).

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah dengan menganut prinsip (1). Tidak memberatkan masyarakat (2). Potensial yang lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan, (3). Tidak merusak lingkungan (4). Mudah diterapkan/ diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5). Penyesuaian pendapatan baik

mengenai tarif dan materinya. Dibawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kota Dumai dari tahun 2018-2022

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Bagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan penerimaan daerah lainnya yang sah.

Selanjutnya penjelasan masing-masing komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum realisasi pendapatan selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari Rp.1.225.296.406.098,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.370.173.351.941,86 pada tahun 2022 atau naik dengan pertumbuhan sebesar 3,26% per tahun.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai
Tahun 2018-2022

Kode	URAIAN	Realisasi					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.225.296.406.098,00	1.326.357.465.591,00	1.465.674.372.306,00	1.287.005.084.625,14	1.370.173.351.941,86	3,26
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	279.654.914.441,64	291.620.030.784,75	378.738.044.467,72	366.696.884.199,75	463.978.646.794,86	14,38
4.1.0	Pajak Daerah	127.964.097.216,00	141.149.748.921,00	165.259.957.085,00	185.979.625.987,00	226.332.093.315,36	15,41
4.1.0	Retribusi Daerah	30.677.523.061,00	31.101.350.827,00	32.672.832.980,00	23.776.863.396,46	32.206.368.295,17	3,66
4.1.0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.189.648.098,00	2.342.756.372,00	1.242.457.348,00	1.415.125.255,00	1.079.761.191,00	-12,44
4.1.0	Lain-lain PAD yang Sah	118.823.646.066,64	17.026.174.663,75	179.562.797.053,72	155.525.269.561,29	204.360.423.993,33	221,74
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	909.581.771.656,23	996.647.505.227,78	1.046.035.527.839,61	879.612.437.425,39	906.194.705.147,00	0,41
4.2.0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.190.491.050,00	877.596.885.781,00	917.175.087.631,00	763.025.612.681,00	778.721.000.729,00	-0,48
4.2.01	Dana Perimbangan	810.190.491.050,00	877.596.885.781,00	917.175.087.631,00	731.422.367.681,00	758.360.104.729,00	-0,94
4.2.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	216.671.128.595,00	205.314.397.663,00	243.996.573.029,00	145.468.956.587,00	167.642.355.626,00	-2,88
4.2.01	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000,00	457.514.401.000,00	424.090.440.000,00	429.427.931.000,00	427.742.257.138,00	0,16
4.2.01	Dana Transfer Khusus-Dana	166.331.273.455,00	193.300.558.118,00	203.368.509.602,00	92.602.935.776,00	61.389.147.488,00	-16,69

Kode	URAIAN	Realisasi					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Alokasi Khusus (DAK) Fisik						
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	21.467.529.000,00	45.719.565.000,00	31.603.245.000,00	20.360.896.000,00	11,63
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.391.280.606,23	119.050.619.446,78	128.860.440.208,61	116.586.824.744,39	127.473.704.418,00	6,96
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	86.741.473.606,23	111.798.200.446,78	88.124.940.208,61	108.598.824.744,39	119.057.454.418,00	10,14
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	12.649.807.000,00	7.252.419.000,00	40.735.500.000,00	7.988.000.000,00	8.416.250.000,00	86,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.119.440.000,00	76.179.859.158,00	81.801.600.000,00	40.695.763.000,00	-	-34,31
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.119.440.000,00	76.179.859.158,00	81.801.600.000,00	40.695.763.000,00	-	-34,31
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	36.059.720.000,00	38.089.929.579,00	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	-	-21,87
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	36.059.720.000,00	38.089.929.579,00	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	-	-21,87

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Dumai, 2023

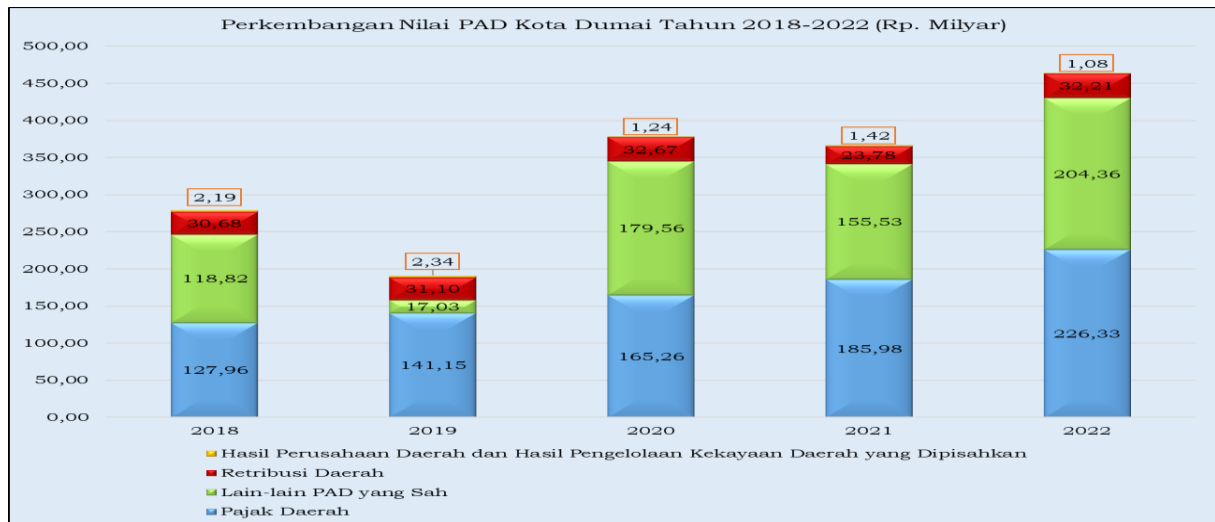
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan PAD adalah:

- Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
- Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD.
- Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pelayanan.
- Menentukan ulang hitungan besaran basis pajak sesuai dengan peruntukan wilayah

Kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD selama tahun 2018-2022. Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai pada tahun 2018 senilai Rp. 279.654.914.441,64 dan kemudian meningkat menjadi senilai Rp. 463.978.646.794,86 pada tahun 2022 atau bertambah senilai Rp. 184.323.732.353,22 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,34% per tahun selama periode 2018-2022. Meningkatnya kinerja Pendapatan Asli Daerah dalam struktur pendapatan daerah Kota Dumai diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam periode yang sama tahun 2018-2022 struktur PAD yang memberikan kontribusi tertinggi secara berurutan antara lain Pajak daerah rata-rata sebesar 54,20%, retribusi daerah dengan rata-rata sebesar 9,57%, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,54% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 35,69%.



Gambar 3.1: Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Dumai, 2023

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi masing-masing struktur PAD selama tahun 2018-2022 menunjukkan terdapat satu sector yang mengalami pertumbuhan positif Lain-lain PAD yang Sah sebesar 9,45% tahun. Namun pajak daerah mengalami penurunan kontribusi sebesar -4,31% per tahun. Retribusi daerah mengalami penurunan kontribusi -6,69% per tahun. Walaupun kontribusi tersebut mengalami penurunan namun secara nominal mengalami peningkatan nilai penerimaan. Penurunan kontribusi retribusi daerah tidak terlepas dari penurunan percepatan penerimaan pada struktur PAD tersebut dibandingkan dengan struktur PAD lainnya sehingga kontribusinya semakin menurun walaupun secara nominal terus mengalami peningkatan. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut strukturnya di Kota Dumai tahun anggaran 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 di atas.

a. Realisasi PAD

Salah satu indikator kinerja optimalisasi penerimaan daerah adalah peningkatan PAD. Target dan realisasi PAD Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dari realisasi PAD melebihi target sekitar dengan rata-rata sebesar 6,04% selama periode tersebut, kecuali pada tahun 2021 hanya tercapai 97,93% namun masih dalam kategori sangat tinggi. Realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 114,00% dan terendah terjadi pada tahun 2021 hanya 97,93%. Perkembangan target dan realisasi PAD kota Dumai tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi PAD Kota Dumai Tahun 2018-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian Kinerja PAD (%)
2018	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00
2019	283.564.474.752,00	291.620.030.784,75	102,84

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian Kinerja PAD (%)
2020	335.378.618.821,49	378.738.044.467,72	112,93
2021	374.465.303.311,00	366.696.884.199,75	97,93
2022	452.558.659.245,00	463.978.646.794,86	102,52
Rata-rata capaian kinerja PAD			106,04

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Dumai Tahun 2023

Selama periode mengindikasikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah masih berpeluang untuk ditingkatkan jika melihat perkembangan realisasi selama tahun 2018-2022 dengan tetap memperhatikan obyek dan subyek pajak dan retribusi, peningkatan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan.

b. Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan

Kontribusi realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jika dilihat pada tahun 2018 kontribusi PAD terhadap pendapatan sebesar 22,82% dan kemudian mengalami penurunan tahun 2019 menjadi sebesar 21,99%. Walaupun terjadi penurunan kontribusi tahun tersebut, namun secara nominal PAD dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,28% atau meningkat dari Rp. 279,65 milyar menjadi Rp. 291,62 milyar atau naik senilai Rp. 11,96 milyar. Oleh karena itu penurunan kontribusi PAD pada tahun 2019 disebabkan karena peningkatan pendapatan dari dana transfer/dana perimbangan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 8,25% atau naik dari Rp. 1.225 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 1.326,35 milyar tahun 2019 atau bertambah senilai Rp. 101,06 milyar. Namun demikian terjadi sebaliknya pada tahun 2021 dimana kontribusi PAD sebesar 28,49% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 hanya 25,84%. Tetapi secara nominal PAD tahun 2021 mengalami penurunan yang hanya senilai Rp. 366,69 milyar dibandingkan tahun 2020 senilai Rp. 378,73 milyar atau menurun sebesar -3,18%, namun penurunan pendapatan lebih tinggi yaitu sebesar -12,19%. atau secara nominal berkurang menjadi Rp. 1.287,00 milyar tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 senilai Rp. 1.465,67 milyar. Berikut disajikan rasio atau kontribusi realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2018-2022, jelasnya lihat Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2018	1.225.296.406.098,00	279.654.914.441,64	22,82
2019	1.326.357.465.591,00	291.620.030.784,75	21,99
2020	1.465.674.372.306,00	378.738.044.467,72	25,84
2021	1.287.005.084.625,14	366.696.884.199,75	28,49
2022	1.370.173.351.941,86	463.978.646.794,86	33,86
Rata-rata Kontribusi PAD			26,60

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 26,60%. Hal ini

menunjukkan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang berasal dari pusat masih dominan dalam APBD Kota Dumai selama periode 2018-2022.

c. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

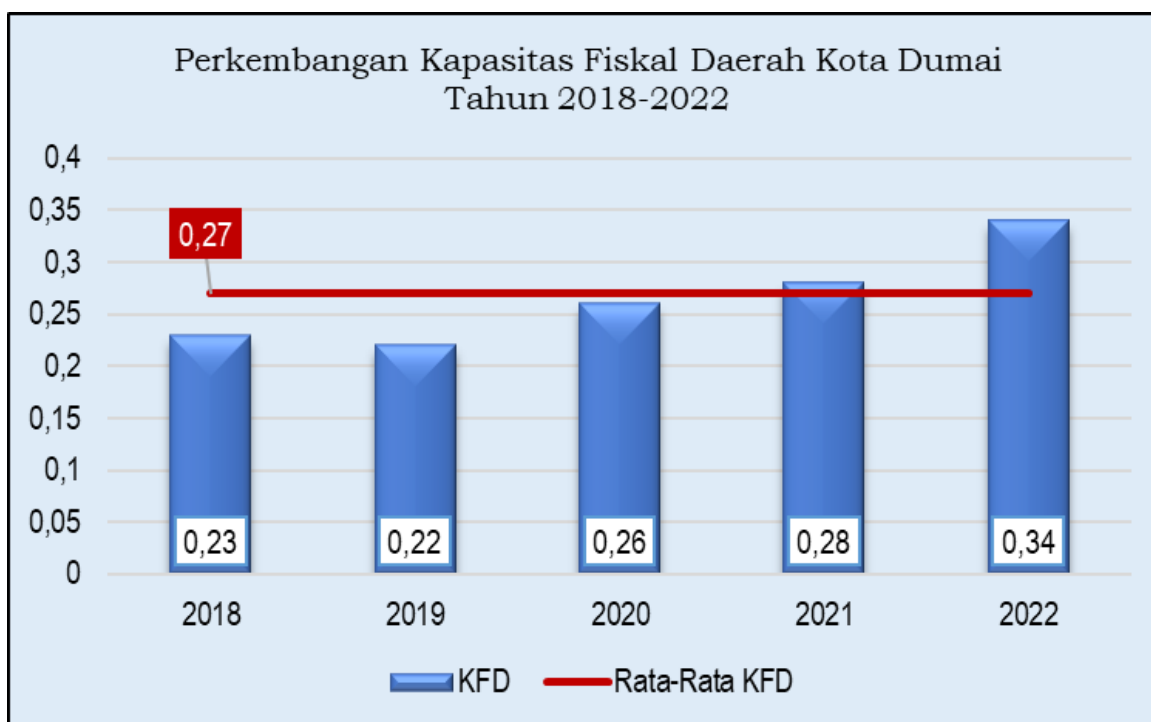
Nilai Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mempunyai range antara 0-1, jika KFD mendekati 1 maka kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian semakin baik yang menggambarkan bahwa tingkat dependency terhadap pusat dan provinsi semakin berkurang (Muta'ali, 2015). Jika dilihat nilai kapasitas fiskal daerah kota Dumai dari tahun 2018-2022, maka dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi (rasio tingkat kemandirian masih rendah). Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan rendahnya rasio kemandirian daerah, maka partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah juga masih rendah dan kemungkinan potensi Pendapatan Asli Daerah belum maksimal dimanfaatkan. Adapun Kapasitas Fiskal Kota Dumai dari Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Pertumbuhan (%)	Realisasi PAD	Pertumbuhan (%)	KFD
2018	1.225.296.406.098,00	-	279.654.914.441,64	-	0,23
2019	1.326.357.465.591,00	8,25	291.620.030.784,75	4,28	0,22
2020	1.465.674.372.306,00	10,50	378.738.044.467,72	29,87	0,26
2021	1.287.005.084.625,14	(12,19)	366.696.884.199,75	(3,18)	0,28
2022	1.370.173.351.941,86	6,46	463.978.646.794,86	26,53	0,34
Rata-rata KFD					0,27

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

Namun jika diperhatikan tren rasio kemandirian keuangan daerah tersebut selama tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 47,83% per tahun atau naik dari 23,00% tahun 2018 menjadi 34,00% tahun 2022 dengan rata-rata KFD sebesar 27,00% selama periode 2018-2022. Berikut Gambar 3.2 perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2018-2022.



Gambar 3.2: Perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2018-2022

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan dana insentif daerah (DID) untuk proses penyelenggaraan pemerintah di daerah serta Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun dana perimbangan tersebut meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Bagi Hasil Pajak Propinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah.

Kebijakan umum untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanakan intensifikasi pemungutan PBB,
- b. Peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- c. Mendorong peningkatan penerimaan dari provinsi meliputi PKB/BBNKB, PBBKB, dan pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah.

Selama tahun 2018-2022 sumber pendapatan daerah terbesar bagi Kota Dumai berasal dari pendapatan transfer yang yang berkisar antara Rp. 810,19 milyar tahun 2018 naik menjadi Rp. 906,19 milyar tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,94% per tahun. Pendapatan transfer tersebut yang terbesar berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan tahun 2018 diterima senilai Rp. 752,04 milyar dan meningkat menjadi senilai Rp. 758,36 milyar tahun 2022.

Dalam periode tahun 2018-2022 struktur pendapatan dana perimbangan yang memberikan kontribusi tertinggi secara berurutan antara lain Dana Alokasi Umum

(DAU) sebesar 56,03%, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 18,31%; Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 21,23%.

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi struktur pendapatan dana perimbangan selama tahun 2018-2022 menunjukkan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) mengalami peningkatan kontribusi sebesar 3,50% per tahun; Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan peningkatan kontribusi dengan pertumbuhan sebesar 0,61% per tahun. Peningkatan kontribusi Hasil Bagi Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlepas fluktuasi dari peningkatan percepatan penerimaan pada struktur dana perimbangan tersebut dibandingkan dengan struktur dana perimbangan lainnya.

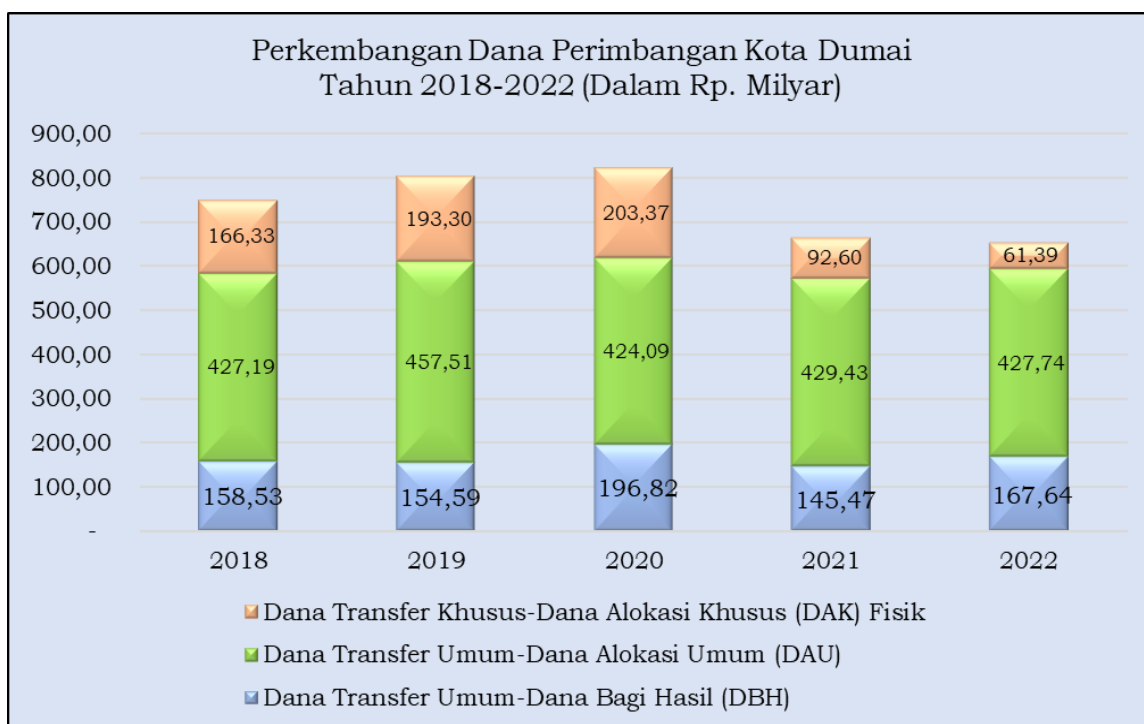
Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) mengalami penurunan nilai dari Rp. 58,14 milyar tahun 2018 menurun menjadi Rp. 20,36 milyar tahun 2022. Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 -2022

Kode	URAIAN	Realisasi					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	810.190.491.050	877.596.885.781	917.175.087.631	879.612.437.425,39	906.194.705.147,00	2,94
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.190.491.050	877.596.885.781	917.175.087.631	763.025.612.681,00	778.721.000.729,00	-0,48
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	752.045.437.894	805.408.528.128	824.274.216.631	731.422.367.681,00	758.360.104.729,00	0,46
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	158.526.075.439	154.593.569.010	196.815.267.029	145.468.956.587,00	167.642.355.626,00	3,50
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.188.089.000	457.514.401.000	424.090.440.000	429.427.931.000,00	427.742.257.138,00	0,16
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	166.331.273.455	193.300.558.118	203.368.509.602	92.602.935.776,00	61.389.147.488,00	-16,69
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	58.145.053.156	50.720.828.653	47.181.306.000	31.603.245.000,00	20.360.896.000,00	-22,08
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	116.586.824.744,39	127.473.704.418,00	9,34
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	108.598.824.744,39	119.057.454.418,00	9,63
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	-	-	-	7.988.000.000,00	8.416.250.000,00	5,36

Sumber: BAPENDA & BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

Adapun gambaran setiap komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3: Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Kota Dumai tahun 2018-2022.

Realisasi Dana Perimbangan terhadap Realisasi Pendapatan daerah dari tahun 2018-2022 mengalami perkembangan secara fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar 61,38% kemudian turun menjadi 55,35% tahun 2022 dengan rata-rata sebesar 58,10%. Sedangkan pendapatan transfer dengan rata-rata 65,87%. Perkembangan rasio dana perimbangan terhadap realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6
Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer (Pusat+Antar Daerah)	Dana Perimbangan	Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap PD (%)	Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap PD (%)
2018	1.225.296.406.098,00	810.190.491.050,00	752.045.437.894,00	66,12	61,38
2019	1.326.357.465.591,00	877.596.885.781,00	805.408.528.128,00	66,17	60,72
2020	1.465.674.372.306,00	917.175.087.631,00	824.274.216.631,00	62,58	56,24
2021	1.287.005.084.625,14	879.612.437.425,39	731.422.367.681,00	68,35	56,83
2022	1.370.173.351.941,86	906.194.705.147,00	758.360.104.729,00	66,14	55,35
Rata-rata Kontribusi				65,87	58,10

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2019-2023

Berdasarkan data Tabel 3.6 Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Dumai, selama tahun 2018-2022 rata-rata kontribusi dana perimbangan sebesar 58,10% dari total realisasi pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemda Kota Dumai terhadap Pemerintah pusat dalam sektor keuangan masih sangat dominan namun dalam kurun waktu 2018-2022 sudah menunjukkan mulai berkurang dari 61,38% tahun 2018 menjadi 55,35% tahun 2022.

Sementara itu tingkat Kemandirian Fiskal Daerah (KFD) Kota Dumai terhadap pusat yang dihitung melalui perbandingan antara kemampuan keuangan daerah atau Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Daerah yang berasal dari pusat atau Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Dana Perimbangan Kota Dumai 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Dana Perimbangan (DP) (Rp)	KFDP ₁ = Ketergantungan fiskal daerah pusat
2018	1.225.296.406.098,00	752.045.437.894,00	0,39
2019	1.326.357.465.591,00	805.408.528.128,00	0,39
2020	1.465.674.372.306,00	824.274.216.631,00	0,44
2021	1.287.005.084.625,14	731.422.367.681,00	0,43
2022	1.370.173.351.941,86	758.360.104.729,00	0,45
Rata-rata KFDPi			0,42

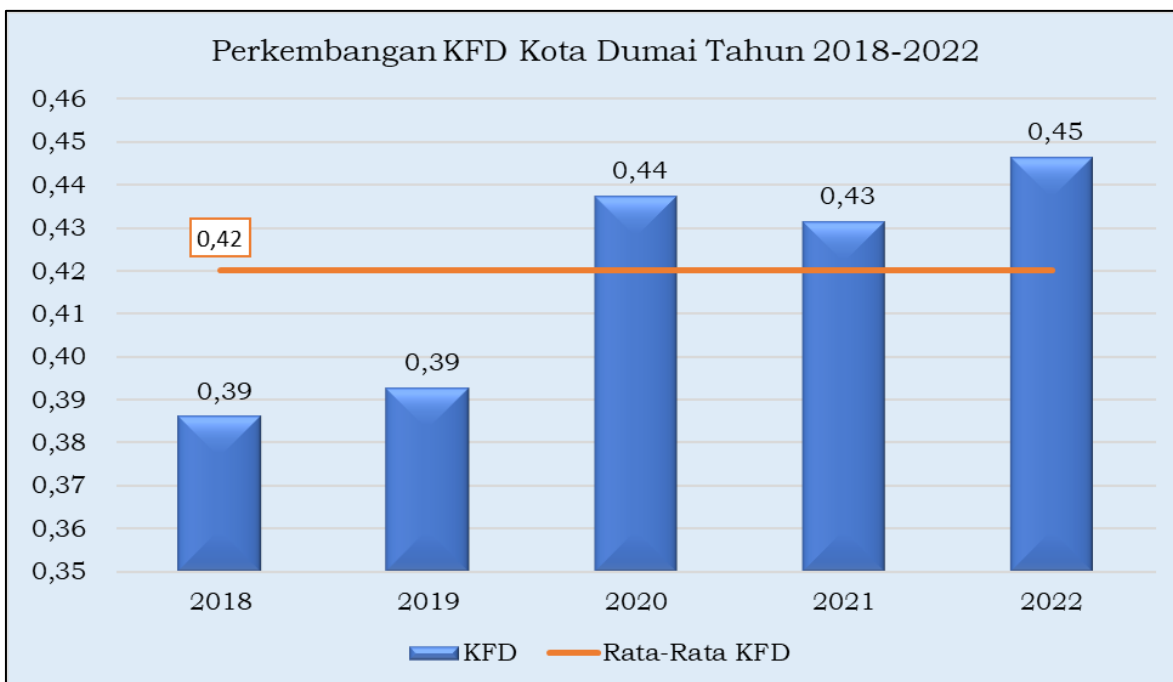
Menurut Muta'ali (2015), besaran nilai ketergantungan fiskal pusat-daerah mempunyai *range* antara 0-1. Jika nilai tersebut mendekati 1 maka tingkat kemandirian suatu daerah sangat tinggi dan sebaliknya. Muta'ali menambahkan bahwa klasifikasi ketergantungan fiskal daerah-pusat terbagi kedalam 4 kategori yaitu sebagai berikut:

1. < 0,25 = Sangat tidak mandiri
2. 0,25-0,50 = Tidak mandiri
3. 0,51-0,75 = Mandiri
4. > 0,75 = Sangat mandiri.

Jika dilihat dari analisa Ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, maka dapat diartikan bahwa dalam rentang waktu 2018-2022 maka tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pusat masih tinggi namun secara perlahan tren tingkat KFD kota Dumai terhadap pusat mulai membaik meskipun masih masuk kategori tidak mandiri (0,25-0,50).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola hubungan antara pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah pusat dalam hubungan keuangan daerah masih bersifat instruktif (Pemerintah Kota Dumai belum mampu melaksanakan otonomi sepenuhnya) atau Peranan Pemerintah Pusat masih dominan dalam keuangan daerah Kota Dumai (Paul hersey dan Kenneth blanchard dalam Nataluddin, 2001 dalam Muta'ali, 2015).

Jika dilihat nilai KFD kota Dumai dari tahun 2018-2022, maka dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi (rasio tingkat kemandirian masih rendah), namun secara perlahan terjadi perbaikan terhadap KFD dimana tahun 2018 sebesar 0,39 kemudian meningkat menjadi 0,45 tahun 2022. Berikut Gambar 3.4 perkembangan KFDPi Kota Dumai tahun 2018-2022.



Gambar 3.4: Perkembangan KFD Kota Dumai tahun 2018-2022

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya, jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 3.8
Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2018 -2022

Kode	URAIAN	Realisasi					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.119.440.000,00	76.179.859.158,00	81.801.600.000,00	40.695.763.000,00	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.119.440.000,00	76.179.859.158,00	81.801.600.000,00	40.695.763.000,00	-	-
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	36.059.720.000,00	38.089.929.579,00	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	-	-

Kode	URAIAN	Realisasi					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	36.059.720.000,00	38.089.929.579,00	40.900.800.000,00	40.695.763.000,00	-	-

Sumber: BAPENDA & BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas pencapaian hasil pembangunan suatu daerah. Secara umum belanja/klasifikasi belanja dalam APBD Kota Dumai terdiri belanja Operasi dan belanja modal. Dalam kurun waktu 2018-2022 realisasi belanja daerah kota Dumai cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan adalah sebesar 8,36% per tahun.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan operasional rutin dan mempertahankan layanan-layanan publik serta berbagai program yang telah dijalankan. Belanja operasi ini mencakup berbagai biaya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama tahun 2018-2022, peningkatan belanja operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,53% per tahun. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, jelasnya lihat Tabel 3.11.

Secara umum belanja daerah mencakup belanja yang bertujuan untuk membiayai belanja operasi pemerintah daerah dan belanja pembangunan daerah. Tujuan penganggaran belanja operasi adalah untuk menjamin agar fungsi pemerintah daerah tetap berjalan dalam menjalankan pemerintahan daerah. Sedangkan belanja pembangunan daerah atau belanja modal bertujuan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah oleh aparat pemerintah daerah, maka dialokasikan belanja aparat dalam bentuk belanja pegawai. Tabel 3.9 disajikan realisasi belanja pegawai kota Dumai selama tahun 2018-2022.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Dumai
Tahun 2018-2022

Belanja	Sat	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Belanja Daerah	Rp. Miliar	1.112,40	1.311,56	1.423,23	1.314,29	1.507,04	8,36
Belanja Operasi	Rp. Miliar	935,93	1.043,55	1.061,63	1.105,41	1.246,58	7,53
Belanja Pegawai	Rp. Miliar	465,15	502,62	516,33	587,86	649,33	8,77
Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	%	84,14	79,57	74,59	84,11	82,72	-0,15
Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah	%	41,81	38,32	36,28	44,73	43,09	1,48
Rasio Belanja Pegawai	%	49,70	48,16	48,64	53,18	52,09	1,30

Belanja	Sat	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
terhadap Belanja Operasi							

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2023

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengakuisisi aset tetap atau berkelanjutan yang akan digunakan dalam jangka panjang. Aset-aset ini termasuk infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya.

Tujuan belanja modal adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan aset-aset ini guna meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2018-2022 belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,13% per tahun, lihat Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

Selanjutnya jika diperhatikan dilihat rasio belanja operasi dan belanja modal menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio belanja modal dari 15,69% tahun 2018 naik menjadi 17,27% tahun 2022. Pada Tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa perbandingan komposisi (persentase) belanja operasi dan belanja modal pemerintah kota Dumai pada struktur belanja daerah menggambarkan bahwa penggunaan anggaran untuk kepentingan operasi pemerintah kota lebih besar daripada anggaran untuk kepentingan publik, walaupun mengalami penurunan dari 84,31% tahun 2018 menjadi 82,73% tahun 2022, jelasnya lihat table berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2018-2022

Belanja	Sat	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
Belanja Operasi	Rp. Miliar	935,93	1.043,55	1.061,63	1.105,41	1.246,58	7,53
Belanja Modal	Rp. Miliar	174,22	265,82	244,71	199,82	260,20	14,13
Rasio Belanja Operasi	%	84,31	79,70	81,27	84,69	82,73	-0,40
Rasio Belanja Modal	%	15,69	20,30	18,73	15,31	17,27	4,04

Sumber: BPKAD Kota Dumai Tahun 2019-2023

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Tak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dana yang dialokasikan untuk menghadapi situasi atau kejadian yang tidak dapat diprediksi atau yang muncul tiba-tiba selama tahun anggaran. Ini adalah bentuk alokasi dana yang fleksibel yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak atau peristiwa tak terduga yang mungkin timbul sepanjang tahun.

Penting untuk memiliki dana belanja tak terduga dalam APBD sebagai bentuk perlindungan terhadap peristiwa yang tidak terduga dan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan finansial untuk merespons dengan cepat dan efisien terhadap situasi-situasi yang mendesak. Belanja tak terduga harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dan keputusan mengenai alokasi dana ini biasanya melibatkan proses persetujuan dan pengawasan yang cermat. Belanja tak terduga hanya terjadi selama tahun 2020-2022, lihat Tabel 3.11.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer hanya terjadi pada tahun 2018-2019. Belanja transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mentransfer dana kepada pihak lain, seperti instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau entitas non-pemerintah. Transaksi transfer ini biasanya digunakan untuk mendukung program-program atau proyek-proyek yang ada di tingkat yang lebih tinggi atau untuk memberikan dukungan finansial kepada pihak lain. Perkembangan realisasi belanja daerah kota Dumai dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Belanja					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
B	BELANJA DAERAH	1.112.399.051.890,74	1.311.558.856.077,06	1.423.234.916.633,85	1.314.289.659.257,23	1.507.041.615.158,67	8,36
1	BELANJA OPERASI	935.929.550.628,74	1.043.548.927.563,71	1.061.632.401.624,52	1.105.414.852.748,84	1.246.579.389.430,03	7,53
	Belanja Pegawai	465.147.119.027,00	502.619.658.039,00	516.330.812.752,00	587.860.841.072,00	649.325.852.373,00	8,77
	Belanja Barang dan Jasa	459.683.831.601,74	518.127.056.724,71	505.749.913.372,52	481.698.811.775,84	559.998.434.987,95	5,46
	Belanja Bunga	-	-	-	-	1.060.377.070,00	
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah	11.098.600.000,00	20.282.212.800,00	35.706.875.500,00	35.855.199.901,00	23.282.916.899,08	31,04
	Belanja Bantuan Sosial	-	2.520.000.000,00	3.844.800.000,00	0,00	12.911.808.100,00	-15,81
2	BELANJA MODAL	174.224.234.182,00	265.822.240.193,35	244.706.629.874,33	199.818.329.751,39	260.201.936.711,64	14,13
	Belanja Tanah	-	86.060.000,00	417.533.120,94	17.000.000,00	3.534.281.800,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	24.348.949.518,00	76.546.362.070,00	79.237.744.886,87	84.487.469.177,00	91.334.440.997,63	58,15
	Belanja Gedung dan Bangunan	58.284.644.837,00	79.439.008.955,60	70.743.218.181,13	52.685.031.521,31	87.322.813.477,02	16,39
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.697.002.491,00	98.961.576.364,75	78.745.131.364,39	56.397.085.845,08	73.340.485.070,99	0,59
	Belanja Asset Tetap Lainnya	9.893.637.336,00	10.789.232.803,00	15.563.002.321,00	6.231.743.208,00	4.669.915.366,00	-7,93

No	Uraian	Realisasi Belanja					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
3	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	116.895.885.135,00	9.056.476.757,00	260.289.017,00	-94,69
	Belanja Tak Terduga	-	-	116.895.885.135,00	9.056.476.757,00	260.289.017,00	-94,69
4	BELANJA TRANSFER	2.245.267.080,00	2.187.688.320,00	-	-	-	-51,28
	Transfer /Bagi Hasil Ke Desa	-	-	-	-	-	
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	
	Transfer/Bantuan Keuangan	2.245.267.080,00	2.187.688.320,00	-	-	-	-51,28
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.245.267.080,00	2.187.688.320,00	-	-	-	-51,28
C	Surplus/Defisit Anggaran	112.897.354.207,26	14.798.609.513,94	42.439.455.672,15	-27.284.574.632,09	-136.868.263.216,81	84,31

Sumber: BPKAD Kota Dumai 2019-2023

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah Kota Dumai bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Selain itu, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pembangunan Kota Dumai dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besarnya realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan besarnya nilai defisit rill yang terwujud.

Selama rentang waktu tahun 2018-2022 realisasi pendapatan daerah Kota Dumai berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tersebut adalah 8,43%. Sedangkan realisasi belanja daerah dalam rentang waktu tersebut justru mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 6,74%.

Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp.1.225.296.406.098,00 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.1.370.173.351.941,86. Jika diperhatikan lebih lanjut, realisasi pendapatan daerah Kota Dumai pada tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 3,26% sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar

8,36%. Peningkatan belanja daerah ini terutama terjadi pada tahun 2021 dan 2022 sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada tahun 2021-2022 tersebut masing-masing (Rp.27.284.574.632,09) dan (Rp.136.868.263.216,81). Defisit anggaran anggaran tahun 2021 senilai Rp. Rp.27.284.574.632,09 ditutupi dengan pembiayaan melalui SILPA tahun sebelumnya tahun 2020 senilai Rp.196.883.747.294,84. Demikian halnya dengan defisit anggaran anggaran tahun 2022 senilai Rp. Rp.136.868.263.216,81 ditutupi dengan pembiayaan melalui SILPA tahun sebelumnya tahun 2021 senilai Rp.168.196.735.341,25. Lebih lanjut surplus dan defisit anggaran dan komponen penutup defisit riil dapat dilihat pada Tabel 3.11 serta pembiayaan baik penerimaan dan pengeluaran serta SILPA dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pembiayaan						
A	Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	23.470.008.005,09	136.367.362.212,22	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	168.196.735.341,25	126,72
2	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060.540.965,89	
6	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00	0	
7	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	23.470.008.005,09	136.396.562.212,22	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	262.260.776.307,14	138,78

B	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00	
6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	-	18.000.000.000,00	
C	Pembiayaan Netto	23.470.008.005,09	136.396.562.212,22	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	244.260.776.307,14	136,48
D	Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan	136.367.362.212,35	154.444.291.622,69	195.481.309.973,34	168.196.735.341,25	107.392.513.090,33	-2,41

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada pasal 320 disebutkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah Neraca daerah. Laporan Neraca terdiri dari akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan analisis rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai aset Pemerintah Kota Dumai berfluktuasi namun menunjukkan tren kenaikan dengan rata pertumbuhan 3,16% atau meningkat dari Rp. 2.785,06 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 3.107,53 milyar tahun 2022. Aset ini dalam bentuk aset lancar, aset tetap, aset lainnya maupun yang diinvestasikan dalam jangka panjang. Selama kurun 2018-2022, Aset Lancar Pemerintah Kota Dumai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,14% atau naik dari Rp. 236,74 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 241,21 milyar tahun 2022. Sedangkan aset tetap mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,73% atau naik Rp. 2.411,26 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 2.769,49 milyar tahun 2022. Namun sebaliknya kondisi asset dalam bentuk investasi jangka panjang yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,59% atau berkurang dari Rp. 84,20 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 51,09 milyar tahun 2022.

Adapun rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah kota Dumai selama kurun waktu 2018-2022 adalah sebesar 36,49% atau naik dari Rp. 48,52 milyar tahun 2018 menjadi Rp. Rp. 119,08 milyar tahun 2022. Kewajiban tersebut terdiri kewajiban jangka pendek yang tumbuh secara fluktuatif sebesar 19,97% per tahun dengan kecenderungan penurunan atau turun Rp. 48,52 milyar tahun 2018 menjadi Rp. 43,02 milyar tahun 2022. Sedangkan kewajiban jangka pangka Panjang tumbuh sebesar 16,52% atau senilai Rp. 76,06 milyar yang hanya terjadi pada tahun 2022. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Dumai memiliki rata-rata pertumbuhan 3,16%, jelasnya lihat Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Neraca Daerah Kota Dumai Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun					Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	116.017.573.189,01	153.585.951.099,83	180.523.375.691,57	141.438.187.794,38	99.365.595.756,32	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	175.694.586,00	-	334.000,00	60.277.437,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	3.519.591,00	-	6.754,00	-	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	20.258.261.206,21	5.415.648.628,11	14.858.775.821,60	26.691.058.326,87	7.902.462.768,01	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya	-	2.989.731.486,75	-	-	-	-
Kas di Bendahara BOS	88.167.317,00	2.256.076.734,00	111.096.469,33	68.938.982,00	115.792.949,51	-
Kas Lainnya	-	-	-	168.578.067,00	295.262.912,00	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	105.076.619.482,30	102.426.444.913,45	109.841.111.109,45	119.990.864.839,45	123.461.182.102,15	-
Piutang Retribusi	-	2.051.960.589,09	1.995.132.229,09	1.906.918.879,09	1.938.872.529,09	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	423.109.183,64	418.563.386,64	71.374.492.248,15	29.085.651.138,52	-
Piutang Dana Bagi Hasil	-	107.306.833.919,00	-	-	-	-
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-
Piutang Transfer - DBH Provinsi	-	-	-	9.656.723.625,00	29.390.520.807,00	-
Piutang Lainnya	36.468.870.699,41	57.872.619.200,64	30.563.991.102,55	291.428.679,64	-	-
Penyisihan Piutang	(56.183.505.320,84)	(64.591.628.350,11)	(69.718.264.795,67)	(90.643.237.451,68)	(83.863.366.847,86)	-
Persediaan	14.877.142.210,08	16.956.020.769,29	29.624.460.779,82	50.892.554.145,49	33.459.430.232,56	-
Beban Dibayar Dimuka	132.185.800,84	389.407.163,00	156.888.851,49	114.500.000,00	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	236.738.834.175,01	387.257.869.922,69	298.375.137.399,87	331.951.342.135,39	241.211.681.784,30	6,14
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	8.917.780.000,00	8.888.580.000,00	8.888.580.000,00	8.623.980.000,00	8.620.480.000,00	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(8.657.780.000,00)	(8.655.580.000,00)	(8.655.580.000,00)	(8.390.980.000,00)	(8.620.480.000,00)	-
Jumlah Investasi Non Permanen	260.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000,00	233.000.000,00	-	-
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	83.944.398.346,11	80.657.970.988,62	71.113.217.241,69	57.769.848.837,39	51.088.523.186,33	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	83.944.398.346,11	80.657.970.988,62	71.113.217.241,69	57.769.848.837,39	51.088.523.186,33	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	84.204.398.346,11	80.890.970.988,62	71.346.217.241,69	58.002.848.837,39	51.088.523.186,33	(11,59)
ASET TETAP						
Tanah	574.877.948.917,11	852.659.530.644,06	653.472.484.715,03	661.486.214.865,96	663.869.747.203,42	-
Peralatan dan Mesin	550.163.057.868,88	626.327.338.378,34	699.978.979.229,79	776.533.030.032,11	847.100.176.538,41	-
Gedung dan Bangunan	804.630.710.921,33	860.771.539.966,28	936.675.745.669,98	1.014.947.165.081,88	1.081.480.906.107,57	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.142.448.007.445,24	2.242.983.512.119,52	2.331.528.624.882,91	2.390.039.096.680,91	2.457.323.337.875,90	-
Aset Tetap Lainnya	31.685.503.907,87	40.679.358.228,74	50.807.956.455,74	56.223.639.963,74	59.805.527.274,44	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	212.826.622.471,92	206.253.821.953,34	211.542.081.250,59	217.661.117.431,33	259.619.088.807,87	-

Uraian	Tahun					Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Akumulasi Penyusutan	(1.905.369.343.685,15)	(2.084.675.529.683,31)	(2.263.702.156.187,90)	(2.437.848.269.174,51)	(2.599.700.211.378,08)	-
JUMLAH ASET TETAP	2.411.262.507.847,20	2.744.999.571.606,97	2.620.303.716.016,14	2.679.041.994.881,42	2.769.498.572.429,53	3,73
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	4.517.732.500,00	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		846.288.500,00	846.288.500,00	846.288.500,00	1.073.670.980,27	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	17.232.681.084,08	17.232.681.084,08	8.683.960.421,47	16.325.594.848,86	9.030.597.849,07	-
Aset Tidak Berwujud	3.006.367.767,50	6.214.677.438,09	6.435.043.468,09	6.964.930.368,09	7.430.279.868,09	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(4.489.546.974,05)	(5.392.197.955,60)	(5.871.337.443,09)	23.258.105.780,09	-
Aset Lain-lain	24.920.209.173,09	46.746.955.810,96	20.784.237.194,01	16.550.872.161,10	(6.341.856.161,84)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(21.886.103.710,77)	(15.757.905.497,43)	(14.217.295.851,08)	(21.177.088.977,29)	-
Dana CD Pertamina	3.173.821.310,00	3.249.119.897,00	-	-	32.420.424.598,00	-
JUMLAH ASET LAINNYA	52.850.811.834,67	47.983.372.045,31	15.668.726.130,54	20.668.352.583,88	45.763.433.936,39	-
JUMLAH ASET	2.785.056.552.202,99	3.261.131.784.563,59	3.005.693.796.788,24	3.089.664.538.438,08	3.107.562.211.336,55	3,16
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	159.091,00	90.909,00	11.944.763,33	1.783.762,00	26.497.308,51	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	-	-	-	168.578.067,00	295.284.900,00	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	283.333.334,00	209.583.334,00	11.459.946.072,33	1.049.253.734,31	1.386.340.133,35	-
Utang Beban	46.760.612.541,98	45.488.444.550,00	35.097.760.585,00	110.527.089.088,00	41.310.011.511,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.479.831.915,00	13.805.305.815,00	1.621.963.908,00	3.380.372.298,00	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.523.936.881,98	59.503.424.608,00	48.191.615.328,66	115.127.076.949,31	43.018.133.852,86	19,97
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	76.060.540.965,89	-
Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	76.060.540.965,89	-
JUMLAH KEWAJIBAN	48.523.936.881,98	59.503.424.608,00	48.191.615.328,66	115.127.076.949,31	119.078.674.818,75	36,49
EKUITAS	2.736.532.615.318,00	3.201.628.359.955,59	2.957.502.181.459,58	2.974.537.461.488,77	2.988.483.536.517,80	-
EKUITAS	2.736.532.615.318,00	3.201.628.359.955,59	2.957.502.181.459,58	2.974.537.461.488,77	2.988.483.536.517,80	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.785.056.552.199,98	3.261.131.784.563,59	3.005.693.796.788,24	3.089.664.538.438,08	3.107.562.211.336,55	3,16

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2023

Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Dumai berfluktuatif memiliki kecenderungan yang meningkat, dimana pada tahun 2018 rasio lancar (*current ratio*) sebesar 4,879 dan pada tahun naik menjadi 5,607 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih sangat baik karena melebihi nilai standart antara 1,50-3,00.

Demikian juga rasio quick yang menggambarkan kemampuan aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek memiliki kecenderungan meningkat. Quick ratio keuangan pemerintah Kota Dumai tahun 2018 sebesar 4,556 kemudian menjadi sebesar 5,180 tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sangat baik karena memiliki asset lancar selain persediaan untuk melunasi kewajiban lancarnya sebesar 5,180. Tabel 3.14 Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2018-2022.

Tabel 3.14
Ratio Keuangan Kota Dumai Tahun 2018-2022

Indikator Keuangan	Tahun					Rata-Rata Perumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Rasio Likuiditas						
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	4,879	6,508	6,191	2,883	5,607	17,39
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	4,556	4,302	6,025	2,271	5,180	25,07
Rasio Solvabilitas						
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,017	0,018	0,016	0,037	0,038	31,96
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,018	0,019	0,016	0,039	0,040	33,24

Sumber: BPKAD Kota Dumai 2021,data diolah

Tabel 3.14 juga menggambarkan Kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Hal ini dapat dilihat dari ratio solvabilitas. Indikator ini dapat tercemin dari ratio total hutang terhadap total aset dan ratio total hutang terhadap total modal. Kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya masih sangat baik. Rasio total hutang terhadap total aset tergolong sangat kecil, demikian juga ratio hutang terhadap modal tergolong kecil yaitu dibawah 3. Namun demikian, trendnya terus meningkat. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan hutang pemerintah Kota Dumai tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total aset maupun modal. Pada tahun 2018 ratio total hutang terhadap total asset Pemerintah Kota Dumai sebesar 0,017 dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 0,038. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada ratio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Dumai, dimana pada tahun 2018 sebesar 0,018 dan naik menjadi sebesar 0,040 pada tahun 2022.

Mencermati hasil analisis keuangan Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa bahwa rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Dumai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama kurun waktu 2018-2022 menunjukkan trend yang semakin meningkat. Kenyataan ini dapat dilihat dari

current rasio yang senantiasa semakin meningkat dari 4,789 pada tahun 2018 naik secara tajam menjadi 5,607 pada tahun 2022. Besaran current ratio 5,607 pada tahun 2022 ini berarti bahwa Rp 1 kewajiban dijamin dengan Rp. 5,607 pada asset lancar. Tidak jauh berbeda dengan current ratio pada Rasio likuiditas yaitu quick ratio juga menunjukkan trend peningkatan dari 4,556 pada tahun 2018 naik menjadi 5,180 pada tahun 2022. Besaran rasio cepat 5,180 tahun 2022 berarti Rp 119.078.674.818,75 kewajiban dijamin dengan Rp. 241.211.681.784,30 asset lancar termasuk persediaan. Kedua rasio likuiditas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Kota Dumai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya cukup baik.

Selanjutnya rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya selama kurun waktu 2018-2022 juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dilihat rasio solvabilitas yang ditunjukkan dari rasio total hutang terhadap total asset dari 1,70% pada tahun 2018 kemudian naik menjadi 3,80% pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022, dari Rp 119.078.674.818,75 hutang dijamin dengan total asset senilai Rp 3.107.562.211.336,55.

Rasio solvabilitas lainnya yaitu rasio hutang terhadap total modal (ekuitas) juga mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih kurang sama dengan rasio hutang dengan total asset. Dari informasi rasio solvabilitas yang diuraikan diatas, memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai sangat baik. Keadaan ini memungkinkan bagi Pemerintah Kota Dumai apabila berkeinginan membuat kebijakan peminjaman uang dalam rangka mempercepat proses pembangunan.

3.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2026

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pemerintah Daerah memerlukan Pendanaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Untuk mengelola dana dengan baik, maka diperlukan sistem keuangan yang baik pula. agar rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (penerimaan dan pengeluaran) tertib, sah, hemat, berdaya guna, serta berhasil guna.

Penganggaran atau Penetapan Target hendaknya dikaitkan dengan potensi – potensi yang nyata dan dapat direalisasikan, sehingga dapat diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan.

3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan segala Penerimaan Daerah yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah, yang selanjutnya digunakan untuk Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah adalah:

1. Melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi di Bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
3. Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah
4. Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
5. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap PAD;
6. Menjalankan penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
7. Meningkatkan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik dan secara efektif dan efisien
8. Melakukan koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD
9. Meningkatkan kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah.
10. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD.
11. Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain
12. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana transfer
13. Melakukan penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah
14. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah secara sistematis dan memantau feedback dari kegiatan tersebut.
15. Melakukan kajian ulang efektifitas penerapan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah berjalan
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pajak dan retribusi daerah serta pelayanan.

17. Melakukan penyederhanaan dan modernisasi sistem Pajak dan retribusi daerah (secara online dengan membuat aplikasi secara real time) serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat.
18. Melakukan updating Basis Data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah
19. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan Retribusi daerah.
20. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di bidang Pendapatan.

Dari gambaran proyeksi lima tahun berjalan dapat diperkirakan pendapatan empat tahun kedepan (2023 – 2026) pada Tabel 3.15. Berdasarkan Tabel 3.15 dijelaskan bahwa pendapatan kota Dumai diperkirakan mengalami peningkatan selama 5 tahun kedepan yaitu mulai tahun 2023-2026. Perkiraan peningkatan ini terjadi akibat adanya kecenderungan Peningkatan Pendapatan Daerah dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan target ini juga dipicu oleh pembangunan infrastruktur penunjang seperti dioperasionalkannya jalan Tol Pekanbaru Dumai, beroperasionalnya pelabuhan ro-ro Dumai Melaka, ditetapkannya RTRW Kota Dumai serta adanya kebijakan pemangkasan dan penyederhaan birokrasi di daerah oleh pemerintah pusat.

Tabel 3.15
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2026 Kota Dumai

Kode	URAIAN	Realisasi	Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025	2026
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.329.666.042.817,44	2.027.712.611.612,00	2.523.807.787.795,73	2.648.900.360.119,21	2.593.103.350.763,36
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	463.982.146.810,44	587.104.026.354,00	814.165.751.503,00	887.374.039.078,15	890.242.741.032,06
4.1.01.	Pajak Daerah	226.335.041.654,36	344.012.723.810,00	528.914.623.604,00	582.970.053.990,82	583.140.157.810,69
4.1.02.	Retribusi Daerah	32.206.368.295,17	58.521.865.000,00	81.239.182.612,00	89.541.881.733,15	90.032.048.774,86
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.079.761.191,00	7.598.930.665,00	12.258.472.372,00	13.511.296.495,60	14.283.472.371,70
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	204.360.975.669,91	176.970.506.879,00	191.753.472.915	201.350.806.858,58	202.787.062.074,80
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	865.683.896.007,00	1.440.608.585.258	1.709.642.036.293	1.761.526.321.041,00	1.702.860.609.731,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	738.210.191.589,00	1.217.500.958.397,00	1.508.227.970.277,00	1.577.330.102.976,00	1.499.756.887.118,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.473.704.418,00	223.107.626.861,00	201.414.066.016,00	184.196.218.064,67	203.103.722.613,56
TOTAL PENDAPATAN		1.329.666.042.817,44	2.027.712.611.612,00	2.523.807.787.795,73	2.648.900.360.119,21	2.593.103.350.763,36

Berdasarkan Tabel 3.15 tersebut dapat dilihat bahwa struktur pendapatan kota Dumai dari tahun 2023-2026 diperkirakan masih akan didominasi oleh pendapatan transfer terutama dari Dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk proses penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selama tahun 2023-2026 diperkirakan pendapatan transfer memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Dumai lebih dari 66% dan kontribusinya diperkirakan menurun selama 4 tahun kedepan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Dumai terhadap Pemerintah pusat dan Provinsi khususnya dalam sektor keuangan masih sangat dominan.

Namun terdapat beberapa komponen pendapatan yang diperkirakan mengalami penurunan. Perkiraan penurunan pendapatan dari dana bagi hasil minyak bumi dan gas merupakan imbas dari krisis harga minyak mentah dunia yang sangat rendah dalam dua tahun terakhir yang berimbas pada kabupaten/kota yang ketergantungan fiskalnya sangat besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini sesuai dengan analisa ketergantungan fiskal kota Dumai yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan analisa ketergantungan fiskal dan kondisi harga minyak dunia yang cenderung turun, maka Perkiraan pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil migas diperkirakan mengalami penurunan (bagi hasil bukan pajak). Dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil pajak juga diperkirakan cenderung menurun selama 5 tahun kedepan.

Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan salah satu Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan pendapatan pajak yang dipungut langsung oleh provinsi sedangkan daerah kabupaten/kota mendapatkan persentase bagi hasil dari pendapatan pajak tersebut, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan dan DBH Pajak Rokok.

Sedangkan perkiraan kenaikan pendapatan dari komponen Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya merupakan efek *derivatif* dari peningkatan pendapatan daerah provinsi Riau yang diperkirakan akan meningkat.

Tabel 3.16
Kontribusi Realisasi PAD Kota Dumai Tahun 2022 dan Proyeksi
Tahun 2023-2026

Kode	URAIAN	Realisasi	Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025	2026
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.329.666.042.817,44	2.027.712.611.612,00	2.523.807.787.795,73	2.648.900.360.119,21	2.593.103.350.763,36
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	463.982.146.810,44	587.104.026.354,00	814.165.751.503,00	887.374.039.078,15	890.242.741.032,06
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	865.683.896.007,00	1.440.608.585.258,00	1.709.642.036.292,73	1.761.526.321.041,06	1.702.860.609.731,30
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-

Kode	URAIAN	Realisasi	Proyeksi			
		2022	2023	2024	2025	2026
	KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34,89%	28,95%	32,26%	33,88%	34,02%
	KONTRIBUSI PENDAPATAN TRANSFER	65,11%	71,05%	67,74%	66,12%	65,98%
	KONTRIBUSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
TOTAL		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*).

Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam hal kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat pula membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya secara serius untuk mengelola belanja daerah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Penentuan alokasi anggaran belanja sejalan dengan prioritas pembangunan sebagai langkah berkelanjutan dalam upaya pencapaian dengan visi Kota Dumai;

- b. Penerapan alokasi belanja berbasis output/outcomes.
- c. Penerapan standar harga dan biaya dilakukan secara optimal agar terjadi efisiensi anggaran.
- d. Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta honorarium kegiatan dengan menerapkan asas efisiensi dan ekonomis serta efektif dalam pengertian seluruh program kerja dapat dituntaskan tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan unit kerja dan masyarakat.
- e. Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan-kegiatan ditujukan untuk operasional rutin kegiatan, menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menambah atau mengganti inventaris yang sudah tidak layak pakai.
- f. Belanja Modal diarahkan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, serta pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat menambah aset bagi Pemerintah Kota Dumai.
- g. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana alam, bencana sosial dan penanganan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- h. Bantuan Keuangan disalurkan kepada kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan dan tepat sasaran, termasuk didalamnya *block grant* yang penggunaannya didasarkan atas permintaan masyarakat pada kelurahan sehingga terjadi sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Dumai dengan masyarakat melalui kelurahan.
- i. Perbaiki penghasilan Pegawai Non-PNS dengan menambah penghasilan sesuai UMR.

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2026

No	Uraian	Realisasi Belanja	Proyeksi Belanja			
		2022	2023	2024	2025	2026
B	BELANJA DAERAH	1.490.475.312.524,00	2.027.712.611.612	2.616.807.787.796	2.735.900.360.119	2.664.103.350.763
1	BELANJA OPERASI	1.233.209.292.170,03	1.511.764.542.533	1.900.857.196.406	1.987.891.949.814	1.935.489.526.925
2	BELANJA MODAL	257.005.731.336,64	515.915.960.853	684.176.470.134	716.276.614.807	696.713.740.254
3	BELANJA TAK TERDUGA	260.289.017,00	32.108.226	31.774.121.255	31.731.795.498	31.900.083.584
C	Surplus/Defisit Anggaran	-160.809.269.703,23	-62.417.609.614			

Sumber: BPKAD Kota Dumai 2019-2023

3.2.1.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berikut Tabel 3.18 Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah dan Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2022-2026 dan Tabel 3.18 dan 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai.

Tabel 3.18
Perkiraan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Uraian	Perkiraan				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	1.437.083.638.246,44	2.027.712.611.612,00	2.616.807.787.795,73	2.735.900.360.119,21	2.664.103.350.763,36
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	107.417.595.429	0	93.000.000.000	87.000.000.000	71.000.000.000
Total penerimaan	1.329.666.042.817,44	2.027.712.611.612,00	2.523.807.787.795,73	2.648.900.360.119,21	2.593.103.350.763,36
Dikurangi:					
Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	668.386.229.443	751.233.610.763	820.642.336.339	820.770.108.035,76	799.231.005.229,01
Kapasitas riil kemampuan keuangan	768.697.408.803,44	1.276.479.000.849,00	1.796.165.451.457,01	1.915.130.252.083,45	1.864.872.345.534,35

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Dumai

Uraian	Perkiraan				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	768.697.408.803,44	1.276.479.000.849,00	1.796.165.451.457,01	1.915.130.252.083,45	1.864.872.345.534,35
Prioritas I	461.218.445.282	765.887.400.509	1.077.699.270.874	1.149.078.151.250	1.118.923.407.321
Prioritas II	307.478.963.521	510.591.600.340	718.466.180.583	766.052.100.833	745.948.938.214

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yg pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maknanya bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kota Dumai perlu diambil langkah-langkah:

- a. Pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik (*public oriented*) melalui program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat
- b. Jelasnya misi pengelolaan keuangan daerah guna mengemban kinerja pencapaian kearah tujuan strategis daerah, juga kejelasan dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran sehingga transparan dan akuntabel
- c. Melakukan pembinaan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat daerah.
- d. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada upaya memperbesar dinamika perekonomian daerah dan kesertaan masyarakat.
- e. Memperkecil derajat ketergantungan pendapatan daerah pada kucuran sumber dana perimbangan yang tidak konsisten, dengan memperbesar kemandirian keuangan daerah melalui upaya optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
- f. Memperingan beban APBD dengan memperbesar kontribusi APBD provinsi, APBN, dan CSR dalam mendanai pelaksanaan mandat pemerintahan.
- g. Menggesa seluruh OPD untuk lebih aktif mensinergikan program dan kegiatan dengan berbagai sumber pendanaan.
- h. Rumusan indikator capaian kinerja pada tataran output dan outcome harus didasari pada persoalan yang akan diselesaikan dan berkelanjutan.
- i. Membangun kerjasama antar wilayah Kabupaten Hinterland dalam mengoptimal potensi daerah.

Jika dilihat dari kerangka pendanaan tersebut maka setiap tahun terjadi defisit anggaran yang meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2026. Alternatif untuk menutupi defisit ini adalah dengan memanfaatkan SILPA. Kondisi defisit dalam anggaran dapat saja menyisakan dana pada akhir tahun dalam bentuk SILPA karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang ditargetnya di bawah potensi riil, informasi tentang penerimaan daerah dari Pemerintah

diperoleh setelah penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah APBD-P ditetapkan. Sedangkan ketidaktercapaian target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (*output* kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “dibawa” ke tahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kecenderungan OPD yang bersifat *budget maximizer* dalam artian mengusulkan kebutuhan anggaran target belanja dalam nilai maksimal. Pengaruh dari sifat budget maximizer ini adalah terjadinya sisa anggaran baik ketika output kegiatan sudah tercapai atau belum. Ketika output anggaran tercapai, maka sisa anggaran sering disebut sebagai hasil dari efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bersifat bebas untuk digunakan bagi kegiatan lain pada tahun anggaran berikutnya (*free cash flow*).

Adapun alternatif lain dalam mengatasi defisit anggaran sampai tahun 2026 adalah dengan mengoptimalkan pendapatan dari komponen dana perimbangan pusat dan dari dana yang bersumber Pemerintah Provinsi Riau.

3.2.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun Pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA; Pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjamandaerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam rangka mendanai program-program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Dumai merencanakan melakukan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain. Berikut Tabel 3.20 Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022-2026.

Tabel 3.20
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan	Proyeksi Pembiayaan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2022	2023	2024	2025	
	Pembiayaan						
A	Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	107.417.595.429	0	93.000.000.000	87.000.000.000	71.000.000.000	(22,56)
2	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	94.060.540.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Penerimaan Piutang Daerah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	262.260.776.307,14	0	93.000.000.000	87.000.000.000	71.000.000.000	(26,56)
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	45.000.000,00	32.000.000.000	0,00	0,00	
6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.000.000.000,00	45.000.000,00	32.000.000.000	0,00	0,00	
C	Pembiayaan Netto		0				(26,03)
D	Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan	107.417.595.429	0,00	93.000.000.000	87.000.000.000	81.000.000.000	

Sumber: BPKAD Kota Dumai, 2023



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

4

Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Perubahan RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negative terhadap masyarakat dan daerah.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kota Dumai adalah:

1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah dan masih terbatasnya pemenuhan infrastruktur dasar sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari indeks kesehatan masih dibawah rata-rata provinsi Riau hingga tahun 2022. Kondisi tersebut juga berakibat pada lambat perkembangan indikator makro. Hal ini dapat dilihat dari percepatan perkembangan indikator makro masih lebih lambat dibandingkan dengan provinsi Riau dan Nasional.
2. Tingginya dependency ratio tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok umur produktif.

3. Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.2.1 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya pertumbuhan jumlah murid PAUD/TK sederajat sebesar -1,93%.
- b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar -0,37% dan APK SMP/MTs turun sebesar -1,00%.
- c. Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI menurun sebesar -0,12% dan SMP/MTs turun sebesar -0,73%.
- d. Pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI menurun sebesar -0,12% diikuti dengan menurunnya APS SMP/MTs sebesar -0,25%.
- e. Terjadi peningkatan Angka Putus Sekolah mengalami pada jenjang SD/MI sebesar 278,17% dan SMP/MTs sebesar 319,56%
- f. Menurunnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI sebesar -4,28% dan SMP/MTs sebesar -2,55%
- g. Perkembangan rasio guru terhadap murid SD/MI menurun sebesar -0,32% dan SMP/MTs turun -3,51
- h. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD dan SMP.
- i. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- j. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 47,74% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,79% tahun 2022.
- k. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Persentase angka kematian bayi meningkat sebesar 9,96% dan angka kematian balita meningkat menjadi 11,13% tahun 2022 terutama di Kecamatan Dumai Selatan.
- b. Rasio dokter per 1.000 penduduk menurun sebesar -3,45% dan rasio tenaga medis turun sebesar -0,35% tahun 2022.
- c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2017-2022 cenderung menurun dengan pertumbuhan sebesar -0,56% per tahun
- d. Cakupan Universal Child Immunization (UCI) masih jauh dari target UCI yang diharapkan yakni sebesar 45,69% tahun 2022.
- e. Menurunnya persentase pertumbuhan balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi.
- f. Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir menurun di Kecamatan Dumai Selatan -0,39% dan Sungai Sembilan -4,52%.
- g. Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurun di Kecamatan Dumai Kota sebesar -16,44%.
- h. Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurun di Kota Dumai sebesar -2,98%.
- i. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
- j. Bangunan puskesmas pembantu dan poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak.
- k. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- l. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- m. Adanya *triple burden* penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi

beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID 19.

- n. Masih terdapat jumlah kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2017-2022.
- o. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
- p. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
- q. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
- r. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2022 akibat Pandemi Covid 19.
- s. Belum optimalnya intervensi penanganan air limbah domestik (stimulan jamban).

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Panjang jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 44,30% dan yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan (46,23%).
- b. Menurunnya pertumbuhan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kota Dumai sebesar -2,15% dan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) sebesar -0,60%.
- c. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan di Kota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan).
- d. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah.
- f. Terjadi penurunan persentase dalam penggunaan sumber air utama kemasan/isi ulang -40,00%, sumur/mata air terlindung -4,20% dan tak terlindung -3,29%.
- g. Perkembangan penyediaan sanitasi rumah tangga untuk pengolahan air limbah domestik sistem komunal, mengalami penurunan -28,64%.

- h. Belum optimalnya pelayanan sambungan rumah air minum layak yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer.
- i. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata.
- j. Masih rendahnya kualitas air baku di Kota Dumai.
- k. Kerentanan resiko genangan banjir tinggi.
- l. Terbatasnya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- m. Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kaidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan *better space better living*.
- n. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
- o. Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di Kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 12,58% dari jumlah RT .
- b. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru.
- c. Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan menurun sebesar -30,02%.
- d. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman
- e. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kegiatan pembinaan politik daerah Kota Dumai.
- b. Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah.
- d. Meningkatnya kejadian kebakaran rumah penduduk di Kota Dumai sebesar 23,67%.
- e. Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan

6) Urusan Pemerintahan Bidang sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat PPKS yang belum tertangani dengan baik atau yang disebabkan aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka.
- b. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
- c. Meningkatnya keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK.
- d. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- e. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- g. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif.
- h. Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas.
- i. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai 5,38% dibanding Provinsi Riau 4,37% tahun 2022.
- b. Pencari kerja yang mendaftar mengalami penurunan sebesar -12,68%.
- c. Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja sangat rendah dengan pertumbuhan 0,00% selama tahun 2017-2022.
- d. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hal tersebut dilihat dari menurunnya rasio lulusan S1, S2 dan S3 hanya 19,50% terhadap jumlah Angkatan kerja.
- e. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang dilatih mengalami penurunan sebesar -14,99%.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai perempuan di lembaga pemerintah turun sebesar -0,70% dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami penurunan dari 13,33% tahun 2017 menjadi 6,67% tahun 2022.
- b. Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja meningkat sebesar 55,77% dan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja naik menjadi 305% di tahun 2022.
- c. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar -2,39%.
- d. Masih adanya KDRT yang terjadi terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2022 sebesar 19,77% naik dibandingkan tahun 2021 hanya 19,69%.
- e. Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulihan.
- f. Masih rendahnya perangkat daerah terhadap yang responsive gender dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,88%.
- g. Belum semua sekolah yang ada ramah anak di Kota Dumai
- h. Minimnya taman dan ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya penurunan rasio produksi terhadap pemenuhan konsumsi terutama pangan utama sebesar 52,19% tahun 2022.
- b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Tingginya ketergantungan impor pangan akibat dari rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan.
- d. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas akibat belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.
- e. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
- f. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
- h. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pertanahan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya konflik lahan atau pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- b. Perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua dokumen lingkungan hidup tersedia sesuai regulai pemerintah
- b. Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam. Demikian halnya kualitas air laut dan air sungai yang menurun.
- c. Masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk) atau masih terdapat 4,16% yang belum tertangani dengan baik
- d. Pengawasan limbah B3 yang masih terbatas dan kondisi ini berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup
- e. Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat
- f. Belum semua sekolah berbudaya lingkungan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 0,99% penduduk yang wajib KTP belum memiliki KTP.
- b. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- c. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan *responsive gender*.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas pengembangan PKK, pelayanan Posyandu dan Pembinaan Masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagian kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah.
- e. Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.
- g. Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,59%.
- b. Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sector
- c. Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif sebesar -5,32%
- d. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya terminal Type C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan.
- b. Persentase pertumbuhan pemasangan rambu-rambu turun sebesar -176,91%.
- c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun turun sebesar -18,95%.
- d. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota

- e. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai
- f. Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat DiKota Dumai
- g. Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran
- h. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi
- i. Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan
- j. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai
- k. Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan
- l. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.
- b. Informasi pada Web site Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya
- c. Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
- d. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- e. Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
- f. Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurus khusus Infrastruktur. Keamanan Informasi. Aplikasi. Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK. Tata Kelola & Manajemen TIK. Integrasi Data. Pengolahan dan Penyajian Data. Komunikasi Publik. dan Service Desk semua layanan TIK.
- g. Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik) yang menjadi pendukung informasi.
- h. Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik
- i. Kurang dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 37,50% pada tahun 2022 koperasi yang belum aktif sehingga menyebabkan masih rendahnya kontribusi koperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Terbatasnya jumlah pendamping UMKM dan masih sulitnya permodalan bagi UMKM menyebabkan penurunan persentase pertumbuhan UMKM sebesar 0,21%.
- c. Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA Kota Dumai sebesar -9,52%.
- b. Rendah kualitas infrastruktur pendukung peningkatan daya saing investasi.
- c. Kurangnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait.
- d. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi.
- e. Menurunnya jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Dumai.
- f. Belum optimalnya kontribusi investasi terhadap peningkatan PDRB.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kegiatan kepemudaan di Kota Dumai.
- b. Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.
- c. Belum terdapatnya pembinaan olahraga secara sistematis sehingga berakibat pada rendah prestasi olahraga.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- b. Kurang tersedianya dan updatenya data sektoral untuk menunjang data perencanaan pembangunan.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.
- b. Terbatasnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- b. Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
- d. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.
- e. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
- f. Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.
- g. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
- h. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya.
- i. Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel) untuk promosi pariwisata Kota Dumai.
- j. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana.
- b. Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas.
- c. Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.
- d. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.
- e. Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan.
- f. Belum berkembangnya layanan perpustakaan berbasis IT (*Ebook*) sehingga jumlah kunjungan perpustakaan hanya berbasis *offline*

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- b. Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan.
- c. Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis.

4.1.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya cakupan binaan kelompok nelayan selama tahun 2017-2022 sebesar -4,43%
- b. Menurunnya produksi perikanan laut pada jenis ikan lainnya dan udang.
- c. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi patin dan bandeng.
- d. Permasalahan kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.
- e. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
- f. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan.
- g. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum.
- h. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
- i. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan.
- j. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.
- k. Keterampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara.
- b. Belum terhitungnya kontribusi pendapatan pariwisata pada PAD Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan.
- b. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.
- c. Menurunnya luas panen kelapa selama tahun 2017-2022 sebesar -0,87%.
- d. Jumlah populasi ternak kambing/domba selama tahun 2017-2022 menurun sebesar -14,79%
- e. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan rendahnya kompetensi penyuluh pertanian terutama terkait pembinaan kelembagaan petani. Jumlah KJF Penyuluh dan PPL THL-TBPP menurun
- f. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sektor perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal terutama perdagangan produk UMKM dan IKM
- b. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB sebesar -3,96% dan PDRB ADHK sebesar -3,04 selama tahun 2017-2022.
- c. Menurunnya ekspor bersih barang dan jasa sebesar -9,07% selama tahun 2017-2022

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM.
- b. Masih rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang hanya tumbuh sebesar 1,49% per tahun selama tahun 2010-2020.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya pertumbuhan sector penggalan selama tahun 2017-2022 sebesar -5,40%.
- b. Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai menjadi 91,11% tahun 2022 dari 113,00% tahun 2017.

4.1.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Government*) belum optimal.
- b. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini.
- c. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
- d. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan.
- e. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- f. Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
- g. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
- h. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*.
- i. Kurangnya pemahaman penyedia jasa kontruksi tentang regulasi jasa kontruksi.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan.
- c. Masih belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi untuk proses penyusunan dokumen perencanaan.
- e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah.
- f. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah.
- g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.
- h. Belum terlaksananya bidang kelitbangan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
- e. Jumlah retribusi daerah selama tahun 2017-2022 menurun sebesar - 0,02%.
- f. Menurunnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah
- b. Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal.
- c. Belum terpetanya dengan baik terhadap kebutuhan pegawai masih belum mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- b. Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti masih dibawah 100%.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal.
- d. Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatan- kegiatan provinsi di Kota Dumai

4.1.2.2 Aspek Daya Saing

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut fokus di Kota Dumai sebagai berikut.

4.1.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Rendah peningkatan volume konsumsi perkapita berdasarkan harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai konsumsi Rumah Tangga.
- 2) Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari rasio konsumsi perkapita non pangan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan yang mengalami penurunan dari tahun 2017-2022.
- 3) Rendahnya NTP, maka diperlukan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.

4.1.2.2.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

- 1) Terjadinya peningkatan rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan transportasi.
- 2) Jumlah keberangkatan melalui terminal, Pelabuhan dan bandara menurun selama tahun 2017-2022 sebesar -11,52%.
- 3) Rendahnya peningkatan rasio luas wilayah produktif. Artinya terdapat wilayah peruntukan penggunaan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga kondisi ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Luas wilayah industri yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya, hal tersebut dapat dilihat dari luas peruntukan kawasan industri yang belum dimanfaatkan.

- 5) Menurunnya perkembangan jumlah hotel dari tahun 2017-2022 sebesar - 1,14%.

4.1.2.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi

- 1) Masih terdapatnya Angka kriminalitas yang belum terselesaikan. Tentunya kondisi ini kurang menunjang untuk mengundang investor untuk melakukan investasi di wilayah ini. Namun upaya lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti kesetersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya di wilayah peruntukan kawasan industri.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan perizinan terutama pelayanan perizinan secara online.

4.1.2.2.4 Fokus Sumberdaya Manusia

- 1) Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Dumai. Kondisi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja masih mengalami kendala dalam kualitas SDM. Oleh karena itu program jangka pendek yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya secara optimal dengan melaksanakan magang dan pelatihan.
- 2) Masih tingginya Rasio ketergantungan hingga tahun 2022 masih mencapai 48,29% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Dengan rasio ketergantungan yang tinggi menyebabkan penduduk usia produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang lebih tinggi. Maka beban pembiayaan jaminan sosial yang harus ditanggung akan terus meningkat.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, international, kebijakan nasional dan provinsi. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
6. Janji politik dalam penyampaian Visi dan Misi serta Program Unggulan Walikota Terpilih yang perlu diwujudkan selama proses pemilukada Kota Dumai Tahun 2020.

4.2.1 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Penelaahan KLHS dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam RPJMD, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program yang menimbulkan dampak dan atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 5 pilar dan 17 tujuan dari aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015. Lebih jauh dijelaskan didalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa KLHS dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif

yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai, maka dirumsukan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan daerah sebagai berikut:

1. Kerawanan bencana (Karhutla, Banjir, Abrasi, Rob, dan lain-lain)
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. Penyediaan air bersih dan sanitasi
4. Sarana dan prasarana belum memadai
5. Kerawanan sosial
6. Akses Pendidikan dan kesehatan belum optimal

Kota Dumai dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD 2021 - 2026 memiliki kewenangan 211 indikator dari total 222 indikator yang menjadi kewenangan untuk kota, hal tersebut dikarenakan beberapa indikator merupakan indikator khusus dan indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Dumai. Secara umum Kota Dumai sudah cukup baik dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana jika dilihat dari persentase capaian TPB untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target memiliki porsi terbanyak sebesar 53% (112 indikator) dari 211 indikator yang menjadi kewenangan Kota Dumai. Tantangan yang dihadapi Kota Dumai kedepan adalah indikator yang memiliki capaian sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yang memiliki persentase sebanyak 26 % (55 indikator) yang diharapkan indikator tersebut dapat mencapai target nasional pada tahun-tahun mendatang, serta 41 indikator (20%) tidak ada data.

4.2.2 Isu Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, dijelaskan bahwa isu strategis penataan ruang Kota Dumai dikelompokkan kedalam 2 aspek

yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Adapun penjabaran kedua aspek tersebut adaah sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Degradasi dan alih fungsi hutan
 - 1) Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha dan masyarakat.
- b. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan
 - 1) Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang.
- c. Kualitas dan cadangan air baku
 - 1) Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.
- d. Potensi banjir di dataran rendah
 - 1) Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk.
- e. Kualitas udara
 - 1) Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aspek sosial
 - 1) Tingginya arus migrasi dari berbagai wilayah hinterland dan provinsi tetangga sebagai konsekuensi wilayah bandar dan pusat kegiatan industri dan perdagangan.
 - 2) Belum optimal pengelolaan keragaman etnis sehingga menimbulkan kerentanan terhadap letupan konflik horisontal antar etnis dengan keragaman berjumlah 16 suku.
 - 3) Beban psikologi sebagian besar masyarakat Dumai akibat ancaman ledakan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota dan

kemungkinan terjadi ledakan pada unit refinery pengolahan BBM dengan radius 25 km Pemerataan pembangunan

- 4) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berkaitan langsung dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Oleh karena itu, Kota Dumai menjadi tempat penyeberangan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sebagai kota yang berhubungan langsung dengan luar negeri, maka kapal-kapal luar negeri pada saatnya nanti akan hilir-mudik di perairan Kota Dumai.
- 5) Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat koleksi distribusi produksi antardaerah. Barang-barang produksi pertanian industri hulu harus dikirim dalam bentuk bahan mentah dan/atau terolah, sedangkan Kota Dumai masih belum mempunyai terminal khusus untuk menampungnya.
- 6) Beberapa tahun kedepan diperkirakan kawasan tengah Kota Dumai akan menjadi kawasan padat sehingga dirasakan perlu mencari kawasan khusus untuk pengembangan industri karena salah satu potensi pengembangan ekonomi yang dimiliki Kota Dumai adalah di bidang industri. Selain penyediaan lahan juga perlu disediakan prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mempermudah proses produksi sampai distribusi hasil industri nantinya.
- 7) Kota Dumai direncanakan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan dunia perdagangan internasional, sedangkan prasarana dan sarana pendukungnya masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.
- 8) Jaringan transportasi darat Kota Dumai sudah tidak memadai. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Dumai dengan kota-kota lainnya di tingkat regional masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lagi baik kualitas maupun fungsi jalannya, daya tampung dan daya dukungnya, yang nantinya akan sangat berguna dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri serta pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
- 9) Pemanfaatan limbah dari adanya pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Pekanbaru – Duri – Dumai untuk mempercepat pergerakan penumpang dan barang dari dan ke Dumai melalui sistem transportasi darat bebas hambatan.
- 10) Selain itu, volume kendaraan sudah mencapai batas jenuh daya tampung (kapasitas) jalan. Dalam sistem transportasi nasional, saat ini pemerintah Kota Dumai berencana menghidupkan kembali jalur

kereta api Pekan Baru – Duri – Dumai – Rantau Prapat untuk angkutan barang/ kargo.

- 11) Terjadinya penumpukan barang di pelabuhan Kota Dumai karena kapal yang tersedia hanya kapal biasa yang tidak dapat mengangkut dalam jumlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan kapal berukuran besar (RORO) yang mampu membawa kontainer sekaligus juga menyesuaikan kapasitas dermaganya.
 - 12) Bandara Pinang Kampai sebagai pusat penyebaran tersier yang merupakan satu-satunya bandara di Kota Dumai adalah milik PT. Pertamina yang tidak dapat dipakai umum sehingga dapat menghambat kelancaran dalam berhubungan dengan dunia internasional. Bandara internasional yang terdekat adalah Hang Nadim di Batam dan Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.
 - 13) Pengembangan pembangunan Pelabuhan berskala internasional penunjang kegiatan transportasi laut.
 - 14) Pembangunan Roro Dumai-Melaka untuk menunjang aktifitas Perdagangan dan jasa antar negara.
 - 15) Peningkatan dan percepatan akses Dumai Rupat dalam rangka menunjang pengembangan sector pariwisata Rupat.
- b. Aspek ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat
- 1) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Lubuk Gaung dan Pelintung serta pengembangan kawasan industri lainnya.
 - 2) Peningkatan dan percepatan keterlibatan IKM dalam Kawasan industri yang sudah berjalan saat ini.
 - 3) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Dumai sedangkan untuk saat mendatang dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk mampu mendukung perkembangan Kota Dumai yang sangat pesat yang salah satunya akan direncanakan sebagai pusat jasa dan perdagangan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.
 - 4) Peningkatan produktivitas tanaman baik pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan masyarakat kota terutama adanya peluang terhadap pangsa bagi pekerja sector industri yang terus mengalami peningkatan.

4.2.3 Isu Pembangunan Daerah Dengan Kabupaten Tetangga

Salah satu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah informasi yang berkenaan dengan RPJMD daerah yang berbatasan langsung. Berdasarkan

hasil diskusi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Dumai yang diwakili oleh Bappeda Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hilir yang pada saat bersamaan juga sedang menyusun rancangan teknokratik RPJMD, didapat kesimpulan bahwa isu pembangunan daerah dengan kabupaten yang berbatasan langsung adalah sebagai berikut:

a. Isu pembangunan daerah dengan Kabupaten Bengkalis

1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Kota Dumai dengan daerah perbatasan Kabupaten Bengkalis
2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Dumai-Sepahat
3. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
4. Konektivitas Antar Pulau (Ro-Ro)
5. Penetapan batas wilayah
6. Kebakaran hutan dan lahan
7. Pencemaran lingkungan
8. Pengembangan pemukiman
9. Kapasitas eksisting jalan tidak sesuai dengan tonase kendaraan yang akan melewati Ro-Ro
10. Peningkatan sarana dan prasarana Ro-Ro
11. Manajemen antrian barang dan orang yang akan masuk ke kapal di Ro-Ro

2) Bidang Sosial dan Budaya

1. Kerjasama Even Olahraga Dan Pariwisata
2. Hutang Klaim BPJS Bengkalis Ke RSUD Kota Dumai
3. Ketersediaan Kamar / Ruang Perawatan Di RSUD Kota Dumai Untuk Pasien Rujukan
4. Hutang Jampersal (Jaminan Persalinan) Di RSUD Kota Dumai
5. Zonasi Sekolah Di Daerah Perbatasan
6. Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkoba

3) Bidang Ekonomi

1. Pengembangan PPI Kota Dumai menjadi sarana prasarana pelabuhan perikanan menjadi pusat pengembangan perikanan tangkap di wilayah pesisir Provinsi Riau
2. Peningkatan kapasitas dan jadwal roro dumai-rupat terkait distribusi bahan pokok, sawit serta mendukung pariwisata
3. Promosi dan pengembangan daerah wisata di Rupat
4. Rupat sebagai sentra pertanian (sawah) dan peternakan

5. Pembudidayaan udang vaname dan pengembangang perikanan di Rupert
 6. Kerja sama regional kedua daerah
- b. Isu pembangunan daerah dengan Kabupaten Rokan Hilir
- 1) Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
 1. Perbedaan Konfigurasi Pola ruang Dumai dengan Rohil didaerah perbatasan
 2. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dumai-rohil (Ib. Gaung-Sinaboi)
 3. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
 4. Kebakaran hutan dan lahan
 - 2) Bidang Sosial dan Budaya
 1. Penguatan Kerjasama Sekolah Kejuruan (Perikanan)
 2. Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Kabupaten Rokan Hilir Dan Kota Dumai
 - 3) Bidang Ekonomi
 1. Peningkatan industri hilir perikanan laut
 2. Banyaknya alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan kelapa sawit. Perlunya peraturan yang lebih jelas terkait sanksi ini.
 3. Rohil sebagai penyangga ketahanan pangan Kota Dumai
 4. Perdagangan lintas batas negara

4.2.4 Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Dumai ditetapkan telah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional dimana diarahkan sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri dan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni kota utama kawasan perbatasan. Adapun lokasi prioritas perbatasan negara yang berada di Kota Dumai adalah Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai sembilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 Tahun 2018, Kawasan Industri Kota Dumai ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Selain Kawasan Industri Dumai, Jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol-Sp. Sigambal-Rantau Prapat juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis nasional

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada lampiran II dijelaskan bahwa pada proyek Prioritas Strategis (*major Project*) RPJMN 2020-2024, dimana Kota Dumai menjadi bagian dari:

1. Jalan tol trans Sumatera Aceh-Lampung, Kota Dumai termasuk bagian dari jalan tol Pekanbaru-Medan (Rantau Parapat-Sp.Sigambal-Dumai dan Dumai-Kandins-Pekanbaru) dimana manfaat pembangunan jalan tol trans sumatera adalah:
 - 1) untuk menurunkan waktu tempuh lampung-aceh dari 48 jam menjadi 30 jam.
 - 2) menjadi *enabler* bagi pengembangan kawasan industri Dumai dan pariwisata di Sumatera.
 - 3) dan menghubungkan koridor timur dan barat Sumatera.
2. Pada Pembangunan dan pengembangan kilang minyak (Kilang RDMP), dimana manfaat proyek ini adalah untuk:
 - 1) Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9juta barrel per hari ditahun 2026.
 - 2) Memperbaiki neraca perdagangan disektor migas

Selain infrastruktur minyak bumi, pada matrik Pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang Pada lampiran III RPJMN tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Kota Dumai menjadi bagian dari pengurangan risiko krisis kesehatan nasional dimana indikatornya adalah peningkatan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko kesehatan.

Sedangka pada arah pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang tertuang dalam lampiran IV RPJMN tahun 2020-2024, Kota Dumai ditetapkan sebagai bagian dari koridor pertumbuhan untuk wilayah Sumatera. Selain hal tersebut, pada matrik pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kota Dumai juga termasuk daerah untuk proyek prioritas pengembangan kota besar, kota sedang dan kota kecil di provinsi riau. Adapun proyek prioritas dimaksud adalah:

1. Jalan tol trans sumatera.
2. SPALD-S skala kota (Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT).
3. Sistem Pengelolaan Persampahan skala kota (TPA)

4.2.5 Isu Strategis Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (RPJM Provinsi Riau 2019-2024)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan pembangunan Provinsi Riau di Kota Dumai, antara lain:

1. Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Dumai-Bukit Kayu Kapur 24 km pada tahun 2017 me[lalui SK Gubernur Riau nomor Kpts.584/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017.

2. Dumai sebagai pelabuhan utama di tatanan kepelabuhanan Provinsi Riau
3. Kota Dumai juga ditetapkan sebagai salah satu daerah Pengembangan Kawasan Pengembangan Perikanan Terpadu berbasis masyarakat.
4. Pantai Puak – Dumai termasuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Budidaya tambak dan laut di Kota Dumai sesuai dengan RZWP3K
6. Pemulihan kawasan Restorasi Mangrove dan pengamanan pantai
7. Adaptasi kebijakan baru, Kota Dumai perlu memperkuat data profil penduduk yang terdampak covid-19
8. Pendataan labour skill/ tenaga kerja yang menunjang pengembangan sektor industri
9. Konsep pengembangan industri Kota Dumai termasuk membangun kawasan industri Selinsing
10. Peningkatan Kualitas jaringan jalan Provinsi Di Dumai
11. Penguatan kerjasama SPAM Regional DUROLIS
12. Konektivitas Antar Pulau (Ro-Ro)
13. Penetapan batas wilayah (dengan Bengkalis)
14. Kebakaran hutan dan lahan
15. Pencemaran lingkungan
16. Pengembangan pemukiman
17. Pengembangan kepariwisataan fokus pada destinasi pariwisata yang eksis/sudah ada embrionya
18. Penyelesaian tapal batas wilayah administrasi kabupaten/kota
19. Penyediaan data dan prognosis lulusan smp untuk sinkronisasi data angka putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK
20. Peningkatan kualitas data profil kependudukan untukantisipasi kejadian luar biasa seperti covid-19, pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
21. Pengembangan umum sebagai etalase promosi di rest area jalan tol Dumai-Pekanbaru
22. Analisa dampak fungsional tol Pekanbaru – Dumai dan ksn (kawasan strategis nasional) rupa terhadap akomodasi/perhotelan untuk menunjang pariwisata di Kota Dumai
23. Peningkatan belanja Urusan Pemerintahan Bidang pemerintah daerah yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal (SPM)

4.2.6 Isu-Isu Strategis Kota Dumai

Berdasarkan telaahan permasalahan setiap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang daerah maupun telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dan dokumen rencana pembangunan nasional serta provinsi, serta hasil diskusi dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir sebagai kabupaten tetangga maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan Kota Dumai tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Peningkatan Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5

5.1 Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

Adapun Visi RPJMN adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)*”.

Mengacu pada kedua Visi tersebut di atas dan memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

5.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis

lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja.

Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatkan kesadaran akan kualitas

lingkungan hidup di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan Investasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.

5.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kota Dumai. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani Yang Hijau”** di wujudkan melalui Visi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi Menjadikan **Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).**

Tabel 5.1 berikut menyajikan keselarasan dan konsistensi serta hubungan antara misi pada RPJPD Kota Dumai dengan misi RPJMD. Untuk memastikan terwujudnya visi tersebut maka perlunya keselarasan dan konsistensi antara misi RPJPD tahun 2005-2025 dengan misi RPJMD 2021-2026 sebagai bagian dari perencanaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keselarasan dan konsistensi hubungan antara misi RPJPD Kota Dumai dengan misi RPJMD Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Keselarasan Misi RPJPD 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Dumai
Tahun 2021-2026

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
Misi 1:	Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Misi 1:	Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
Misi 2:	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu	Misi 2:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi RPJPD Tahun 2005-2025		Misi RPJMD Tahun 2021-2026	
Misi 3:	Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Misi 3:	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
Misi 5:	Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.		
Misi 4:	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.	Misi 4:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik

5.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai dengan Misi RPJMD Provinsi Riau

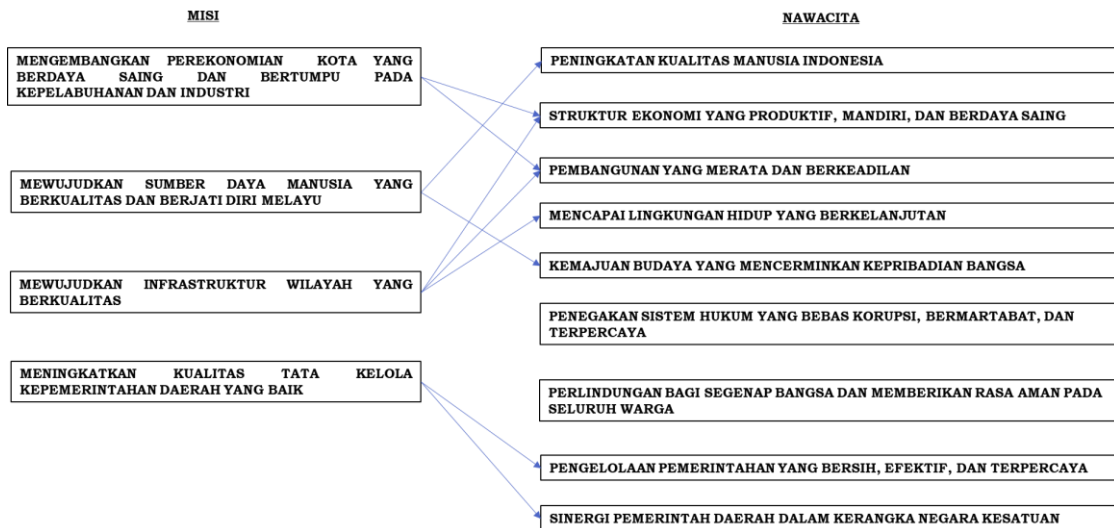
Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan dan bersinergi, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJMD Kota Dumai Tahun 201-2026 dengan misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Keselarasn Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 dengan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026	Misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
	Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas	Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Gambar berikut menyajikan keselarasan misi pembangunan daerah dengan Nawacita RPJMN tahun 2020-2024 dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional

Gambar 5.1. Keselarasan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan Nawacita RPJMN Tahun 2020-2024



5.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB dan ADHK) dan PDRB ADHB-ADHK perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan.
 - c) Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks ketahanan pangan daerah.

2. Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan dengan indicator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan
3. Mewujudkan infrastruktuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, dan cakupan pelayanan persampahan.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Inovasi Daerah.

Disamping visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas, Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga melaksanakan amanat presiden republik Indonesia (yang bersifat mandatory) yaitu Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Instruksi presiden nomor 4 Tahun 2022

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022						Kondisi Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu											
Misi 1	Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri										
	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,36	6,36	4,19-4,90	4,36-5,07	4,72-5,43	5,08-6,01	5,08-6,01
	Sasaran	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	27,73	27,73	28,81-29,08	30,25-30,45	31,78-32,00	33,50-33,79	33,50-33,79
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	45,06	45,06	49,07-51,45	52,42-53,37	56,28-57,53	60,16-60,98	60,16-60,98
			PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	83,55	83,55	87,61-88,42	90,83-91,45	94,30-94,94	98,24-99,11	98,24-99,11
			PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	135,78	135,78	149,20-156,42	157,42-160,27	166,98-170,68	176,34-178,84	176,34-178,84
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,32	0,32	0,35-0,34	0,314-0,340	0,340-0,32	0,33-0,310	0,33-0,310
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,38	5,38	5,38-5,92	4,89-5,27	5,20-4,70	5,10-4,60	5,10-4,60
			Tingkat Kemiskinan	%	3,20	3,20	3,49 – 3,20	2,93-3,07	2,93-3,06	2,93-3,05	2,93-3,05
	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,63	72,63	-	73,66	75,12	76,40	76,40
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,90	82,90	84,58	-	-	-	-
			Ketersediaan Pangan Utama	%	36,03	36,03	37,7	-	-	-	-
Misi 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu										

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan	Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,26	75,26	75,50-75,73	75,72-75,95	75,93-76,16	76,15-76,42	76,15-76,42
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,788	0,788	0,789-0,790	0,790-0,791	0,790-0,791	0,791-0,792	0,791-0,792
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,708	0,708	0,711-0,714	0,714-0,717	0,717-0,720	0,720-0,724	0,720-0,724
	Sasaran	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,763	0,763	0,767-0,771	0,769-0,773	0,772-0,776	0,775-0,779	0,775-0,779
	Sasaran	Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Penerapan 4 Jenis Budaya Melayu	%	50	50	50				
			Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	%	-	-	-	92,35	94,90	97,45	97,45
Misi 3	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas										
	Tujuan	Mewujudkan Infrastruktuktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Persentase Infrastruktuktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	50,21	50,21	56,90	60,23	66,38	70,49	70,49
	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	46,09	46,09	56,54	64,72	74,29	83,58	83,58
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Aturan	%	47,53	47,53	48,46	50,26	52,94	56,49	56,49
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61,34	61,34	61,55	61,76	62,1	62,1	62,1
			Cakupan pelayanan persampahan	%	57	57	65,7	65,7	71,4	71,4	71,4
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	GgCO2-e	7195,43	7195,43	-	-	-	-	-

Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani	%	75	75	-	-	-	-	-
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik										
	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	B	B
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,03	85,03	85,44	85,65	85,87	86,10	86,10
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,83	2,85	3	3,1	3,3	3,3
			Indeks Inovasi Daerah	skor	41,03	41,03	42,38	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00
Target Pembangunan Nasional											
	Percepatan Penurunan Stunting		Angka Prevalensi stunting	%	12,80	12,80	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
	percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem		Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,20	0,20	0,20	0	0	0	0

Kemudian untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan agenda pembangunan daerah (prioritas pembangunan) yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :

1. Pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel berikut menggambarkan keselarasan antara agenda pembangunan (prioritas pembangunan) dengan agenda pembangunan nasional (Prioritas pembangunan nasional) pada RPJMN Tahun 2020-2024:

Tabel 5.4
keselarasan antara agenda pembangunan (prioritas pembangunan) daerah RPJMD Tahun 2021-2024 dengan agenda pembangunan nasional (Prioritas pembangunan nasional) pada RPJMN Tahun 2020-2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagai Pendukung Aktivitas Industri dan Kepelabuhan	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan berkelanjutan	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) :
		Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB			Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional
		PDRB Perkapita ADHK			Intensitas energi primer (harga konstan 2010)
		PDRB Perkapita ADHB			Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan
					Penurunan intensitas energi final (harga konstan 2010)
					Kapasitas terpasang pembangkit EBT
					Produksi gas bumi
					Pemanfaatan biofuel untuk domestik
					Domestic Market Obligation (DMO) Batubara
					Alokasi pemanfaatan gas domestik
					TKDN Sektor pembangkit EBT a. Surya (%) b. Bioenergi (%) c. Panas Bumi (%)
					Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi :
					Luas minimal kawasan berfungsi lindung
					Kawasan hutan produksi
					Peningkatan persentase

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					irigasi premium
					Pembangunan jaringan irigasi baru
					Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri
					Pembangunan bendungan multiguna
				Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi :
					Rasio kewirausahaan nasional
					Kontribusi UMKM terhadap PDB
					Kontribusi koperasi terhadap PDB
					Proporsi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan
					Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal
					Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan
					Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM
					Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi
					Nilai penyaluran KUR
					Jumlah koperasi modern yang dikembangkan
					Pertumbuhan wirausaha
					Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi
					Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Kontribusi usaha sosial
					Penumbuhan start-up
					Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi :
					Pertumbuhan PDB industri pengolahan
					Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
					Kontribusi PDB industri pengolahan
					Kontribusi PDB industri pengolahan non migas
					Pertumbuhan PDB pertanian
					Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
					Pertumbuhan PDB Perkebunan
					Peningkatan Produksi Kakao
					Peningkatan Produksi Kopi
					Peningkatan Produksi Kelapa Sawit
					Pertumbuhan PDB Hortikultura
					Peningkatan Produksi Buah-buahan
					Peningkatan Produksi Sayuran
					Peningkatan Produksi Florikultura
					Kontribusi PDB kemaritiman
					Pertumbuhan PDB perikanan
					Produksi kayu terutama dari hutan produksi
					Kontribusi PDB pariwisata
					Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas
					Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					kawasan hutan prioritas
					Destinasi wisata global geopark (global geopark
					Destinasi wisata bahari
					Nilai tambah ekonomi kreatif
					Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan
					Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan
					Revitalisasi ruang kreatif
					Kontribusi ekonomi digital
					Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi
					Nilai transaksi e-commerce
					Penyediaan lapangan kerja per tahun
					Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
					Jumlah tenaga kerja industri pengolahan
					Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
					Jumlah tenaga kerja pariwisata
					Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
					Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran
					Pertumbuhan investasi (PMTB)
					Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					a. jumlah prosedur b. waktu (hari)
					Nilai realisasi PMA dan PMDN
					Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN
					Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan
					Kontribusi realisasi investasi luar Jawa
					Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
					Belanja modal (Capex) BUMN
					Profitabilitas BUMN
					Pembentukan holding BUMN
					Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri
					Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi (KI)
					Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan
					Fasilitas percepatan pembangunan smelter di luar Jawa
					Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik: industri halal
					Jumlah Daerah Tertib Ukur
					Indeks persepsi persaingan usaha
					Persentase SNI bidang industri yang diterapkan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) :
					Neraca perdagangan
					Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa
					Pertumbuhan ekspor nonmigas
					Ekspor hasil pertanian (FOB)
					Ekspor hasil perikanan
					Pertumbuhan ekspor industri pengolahan
					Nilai ekspor produk industri pengolahan
					Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi
					Rasio ekspor jasa terhadap PDB
					Nilai devisa pariwisata
					Jumlah wisatawan mancanegara
					Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)
					Nilai ekspor ekonomi kreatif
					Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
					Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku
					Jumlah perjalanan wisatawan nusantara
					Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi
					Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia
					Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional
					. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
					PTA/FTA/CEPA yang disepakati
					Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi :
					Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB
					Rasio M2/PDB
					Jumlah ATM per 100.000 penduduk
					Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk
					Skema pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis HKI
					Biaya logistik terhadap PDB
					Skor logistic performance index
					Tingkat Inflasi
					Inflasi pangan bergejolak
					Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK
					Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index
					Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau
					Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index
					Rasio perpajakan terhadap PDB
					Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara
					Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat
					Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system)
					Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif
					Ketersediaan data statistik e-commerce
					Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah			Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan :
					Skor Pola Pangan Harapan
					Angka Kecukupan Energi (AKE)
					Angka Kecukupan Protein (AKP)
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)
					Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)
					Konsumsi ikan
					Konsumsi daging
					Konsumsi protein asal ternak
					Konsumsi sayur dan buah
					Presentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Luas lahan produksi beras biofortifikasi
					Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi
					Persentase pangsa pangan organik
					Penggunaan benih bersertifikat
					Ketersediaan beras
					Ketersediaan protein hewani
					Produksi jagung
					Produksi daging
					Produksi umbi-umbian
					Teknologi yang diterapkan oleh petani
					Nilai tambah per tenaga kerja pertanian
					Nilai tukar petani
					Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
					Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
					Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia
					Global food security index
					Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan :
					Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan WPP
					Model percontohan penguatan tata kelola WPP
					Luas kawasan konservasi laut/perairan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir
					Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000 (km2)
					Produksi ikan
					Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
					Produksi rumput laut
					Produksi garam
					Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil
					Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan
					Kawasan klaster sentra produksi perikanan budidaya unggulan
					Nilai tukar nelayan
					Nilai tukar pembudidaya ikan
					Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.	Pengembangan Kawasan Strategis :
		Tingkat Pengangguran Terbuka			Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
		Tingkat Kemiskinan			Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) - Kawasan Industri (KI) - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
					Pengembangan Sektor Unggulan :
					Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - Kelapa Sawit - Kelapa - Kakao - Kopi - Karet - Tebu - Lada, Pala, dan Cengkeh - Perikanan Budidaya (ikan dan rumput laut) - Perikanan Tangkap
					Pengembangan Kawasan Perkotaan :
					Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan
					Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan
					Jumlah wilayah metropolitan Jawa yang ditingkatkan kualitasnya
					Luas area pembangunan Ibu Kota Negara
					Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
					Pembangunan kota baru
					Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Transmigrasi :
					Perkembangan status pembangunan desa - Desa Mandiri - Desa Berkembang - Desa Tertinggal
					Penurunan angka kemiskinan desa
					Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status - Bumdes Berkembang - Bumdes Maju
					Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status - Bumdes Bersama Berkembang - Bumdes Bersama Maju
					Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya
					Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN
					Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)
					Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
					Rata-rata IPM di daerah tertinggal
					Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN)
					Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi
					Kelembagaan dan Keuangan Daerah :

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat
					Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas
					Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
					Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi
					Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik
					Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah
					Persentase capaian penerapan SPM di daerah
					Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
					Jumlah daerah dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) kategori baik (Provinsi)
					Jumlah pelaksanaan kebijakan (regulasi) pada daerah otonomi khusus dan daerah istimewa
					Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 (Nomor Lembar Peta/NLP)
					Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)
					RDTR Perbatasan Negara

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)
					Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik
					Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
					Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya Melayu	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan			- Persentase cakupan kepemilikan NIK - Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun - Persentase kepemilikan akta kematian - Persentase kepemilikan buku nikah - Persentase kepemilikan akta perceraian - Penyebab kematian
	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran			Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
					Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program program enanggulangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					kemiskinan
					Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
				Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial: - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
					Cakupan penerima bantuan sosial non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan Melalui Program Sembako c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA
					Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah (juta penduduk)
					Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas
					Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan melihat, membaca dan mendengar

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Cakupan kepesertaan JKN
					Cakupan kepesertaan BPJS TK a. Pekerja formal b. Pekerja informal
					Jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
					Persentase instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif
					Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas
					Indeks keberfungsian sosial lanjut usia
					Indeks keberfungsian sosial anak
					Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA
					Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
					Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial
					Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar
					Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif
				Terpenuhinya layanan dasar	Angka Kematian Ibu (AKI)
					Angka Kematian Bayi (AKB)
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
					Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita
					Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
					Insidensi Tuberkulosis
					Eliminasi malaria
					Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
					Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun
					Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan
					Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
					Persentase rumah sakit terakreditasi
					Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
					Persentase puskesmas tanpa dokter
					Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
					Persentase obat memenuhi syarat
					Persentase makanan memenuhi syarat
					Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Harapan Lama Sekolah
					Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) c. SD/MI/ sederajat d. SMP/MTs/ sederajat e. SMA/SMK/MA/sederajat
					Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT)
					Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini
					Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi
					Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains
					Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%): a. Membaca b. Matematika c. Sains
					Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%): a. Literasi b. Numerasi
				Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
					Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun
					Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					sepanjang hidupnya
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
					Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir
					Indeks Pembangunan Pemuda
				Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)
					Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha
					Luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat
					Luas bidang tanah yang didistribusi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif)
					Luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif)
					Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
					Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan
					Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri
				Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
					Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					menengah dan tinggi
					Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
					Jumlah lulusan pelatihan vokasi
					Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
					Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University a. Top 200 b. Top 300 c. Top 500
					Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional a. Jumlah Publikasi (Artikel) Internasional b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional
					Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi
					Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
					Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina
					Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha
					Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas KI (Domestik)
					Pemberian paten (Domestik)
					Persentase SDM Iptek

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Berkualifikasi S3
					Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan
					Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)
					Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan
					Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh: a. Berbasis Perguruan Tinggi b. Berbasis Non Perguruan Tinggi
					Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan
					Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana
					Persentase anggaran litbang terhadap PDB
					Budaya dan prestasi olahraga: a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir b. Peringkat Asian Games c. Peringkat Asian Para Games d. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games e. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Tersedianya Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan (SP3) a. Standar nasional pendampingan pembangunan b. Penyetaraan jenjang kualifikasi pendampingan pembangunan c. Skema sertifikasi kompetensi pendampingan pembangunan
					Tersedianya kebijakan pendukung penguatan pendampingan pembangunan a. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan b. Basis Data dan Sistem Informasi Pendampingan Pembangunan
	Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan Ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	- Indeks Capihan Revolusi Mental - Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila
				Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan
				Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat
				Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama
				Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	- Indeks Pembangunan Keluarga - Median usia kawin pertama perempuan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
				Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengantahuan, inovatif, dan kreatif	Nilai Budaya Literasi
Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Dasar dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Aturan			Rasio KPR terhadap PDB
					Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman
					Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
					Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
					Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional
					Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja
					Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka
					Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan
					Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter
					Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif)

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010
					Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan
					Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri
					Pembangunan bendungan multiguna
					Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi
					Penurunan resiko bencana dengan resiko bencana tinggi
				Meningkatnya konektivitas wilayah	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau
					Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi
					Panjang jalan baru yang terbangun
					Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota
					Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)
					Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2
					Rute pelayaran yang paling terhubung (loop)
					Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar
					Jumlah rute subsidi tol laut
					Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun
					Jumlah bandara baru yang

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					dibangun
					Jumlah rute jembatan udara
				Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan
					Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang
				Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga (kumulatif)
					Jumlah Kapasitas Kilang Minyak (kumulatif)
					Kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita nasional
					Rasio Elektrifikasi
				Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar
					Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar
					Populasi yang terlayani penyiaran digital
					Fasilitasi start up unicorn baru
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Cakupan pelayanan persampahan			Indeks Kualitas Air (IKA)
					Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)
				1.1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
				Alam dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan
					Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional
					Luas kawasan konservasi yang dikelola
					Luas Kawasan Konservasi Perairan
					Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun
					Akurasi informasi meteorologi
					Akurasi informasi klimatologi
				1.2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional
					Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline
					Jumlah limbah B3 yang terkelola
				1.3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan
					Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan
					Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya
				1.4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
					Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman
					Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
				2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana
					Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim
					Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat
				2.1. Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN
					Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi
				2.2. Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir
					Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air
					Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian
					Persentase potensi penurunan kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					kesehatan
				3. Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi
					Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan
					Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah
					Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU
					Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan
				3.1. Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional
					Intensitas Energi Primer
					Penurunan Intensitas Energi Final
				3.2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut
					Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional
					Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
				3.3. Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional
					Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill
					Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R
					Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
				3.4. Pengembangan Industri Hijau	Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH
					Jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri
					Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan
				3.5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai
Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		1.1. Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia
		Indeks Manajemen Resiko			Indeks Kerawanan Pemilu
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah
		Indeks Layanan SPBE			Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional
				1.2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri
					Jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular
					Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST

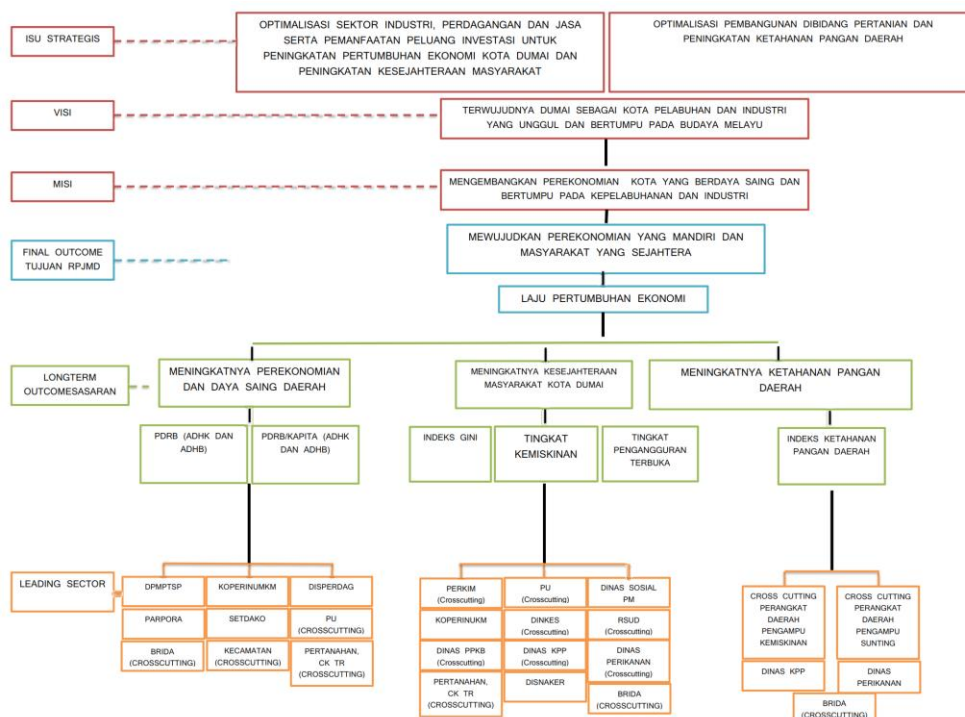
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional
					Indeks Citra Indonesia di dunia Internasional
					Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral
			1.3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap		Indeks Pembangunan Hukum
					Persentase judicial review yang dikabulkan
					Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak
					Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan
					Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit
					Persentase pelaku residivis
					Indeks Perilaku Anti Korupsi
					Indeks Akses terhadap Keadilan
			1.4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik* a. Kementerian/Lembaga b. Provinsi c. Kabupaten/Kota
					Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik a. Kementerian b. LPNK c. Provinsi d. Kabupaten/Kota
					Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik a. Kementerian/Lembaga b. Provinsi c. Kabupaten/Kota
					Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP a. Kementerian/Lembaga b. Provinsi c. Kabupaten d. Kota
					Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B: 1. Kementerian/Lembaga 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota
				1.5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index
					Global Terrorism Index
					Proporsi orang yang merasa aman berjalan Sendirian
					Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional
					Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)
					Indeks Risiko Terorisme (target)
					Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara
					Angka Kejadian Konflik
					Angka Korban Pengungsi Internal
					.Terpenuhinya Minimum Essential Force (MEF)
					Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista
					Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN	INDIKATOR
					Laut
					.Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika
					Tingkat Kriminalitas
					Pelayanan Publik Polri yang Prima
					Skor Global Cyber Security Index

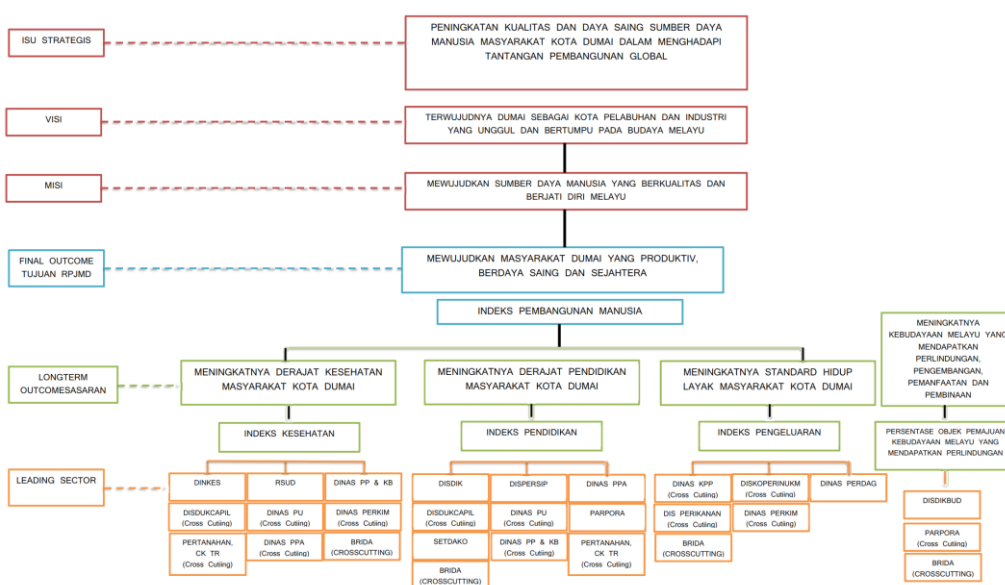
Selanjutnya untuk mencapai target misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.’

Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 1



Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiati diri Melayu” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

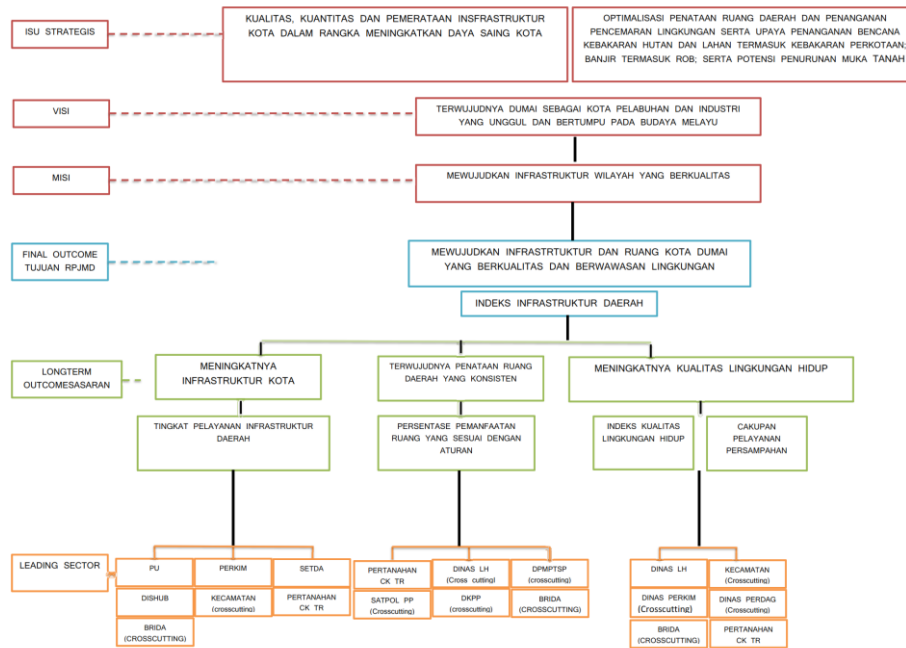
Gambar 5.3 Pemetaan Kinerja Misi 2



Untuk mencapai target misi “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka

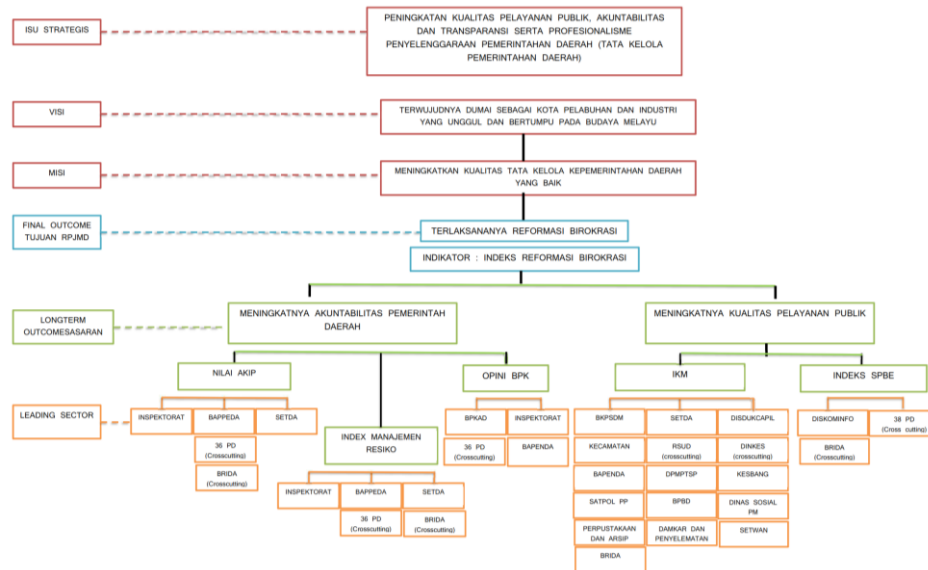
pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut.

Gambar 5.4 Pemetaan Kinerja Misi 3



Untuk mencapai target misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam kerangka pendekatan perencanaan *tematik, holistik, integrated, spasial* yang dapat dilihat dalam gambar pemetaan kinerja berikut

Gambar 5.5 Pemetaan Kinerja Misi 4





**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6

6.1 Strategi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan asaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri dengan strategi:

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
- 4) Peningkatan perlindungan sosial
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
- 6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.

2. Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu dengan strategi:

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan

3. Misi: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas dengan strategi:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari

4. Misi: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik dengan strategi:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT
- 4) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
- 5) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kota Dumai 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri		
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
		1.1.2 Peningkatan daya saing daerah dan iklim berusaha
		1.1.3 Peningkatan produktivitas masyarakat
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial
		1.2.2 Peningkatan peluang kerja bagi masyarakat
	1.3 Terjaminnya ketersediaan pangan daerah	1.3.1 Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu		
1. Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas
	1.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas
	1.3 Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat
	1.4 Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	1.4.1 Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas		
1. Mewujudkan infrastruktural dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatnya infrastruktur Kota	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		1.1.4 Peningkatan kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi
		sanitasi perumahan dan pemukiman
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
		1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Pemanfaatan tata ruang secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
	1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik		
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
		1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT
		1.2.2 Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
		1.2.3 Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Adapun kebijakan umum dalam pembangunan Kota Dumai Lima Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.

2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jika diurai kebijakan umum pembangunan kota Dumai selama lima tahun diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Tahap Penataan	Tahap Pengembangan	Tahap Penguatan	Tahap Pemantapan	Tahap Pematangan
Menata berbagai sistem, sumber daya sarana dan dan prasarana pendukung untuk mengembangkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana , potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Memperkuat instrumen pendukung yang kondusif bagi untuk memantapkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Bertumpu Pada pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Melakukan pemantapan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
Fokus Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Janji 3 semester pertama ▪ Pencapaian target rpjmd tahun 2022 ▪ Penataan ekonomi dan reformasi sosial 	Fokus Pembangunan pada pencapaian Target RPJMD Tahun 2023	Fokus Pembangunan pada Pencapaian target RPJMD Tahun 2024	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2025	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2026

Sedangkan Berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah diuraikan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Dumai maka skala prioritas masing-masing tahapan pembangunan

jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi skala prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.3.

Tahapan Kebijakan Tahap IV (2021-2026) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Berkembangnya Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus 2. Memantapkan kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
	Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil-hasil industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tingkat nasional dan internasional 2. Memperkuat daya saing produk industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan 4. Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan serta peningkatan nilai tambah produk 5. Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
	Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai 2. Peningkatan kualitas pelayanan investasi 3. Terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Kota Dumai yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya
	Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industrial yang memadai 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke 4 (2021-2026)	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang 2. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 3. Mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah 4. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas 5. Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Terwujudnya masyarakat Dumai Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat 2. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat 3. Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 4. Terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera
	Terwujudnya jati diri masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi, dan program-program pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung perilaku yang berbudi pekerti luhur 2. Meningkatkan etos kerja pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama
	Terwujudnya pemajuan yang budaya Melayu di tengah masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasikan filosofi Budaya Melayu menjadi roh pembangunan masyarakat. 2. Meningkatkan cipta, rasa, dan karsa budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu
Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan ke-4 (2021 – 2025)	Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Terpenuhinya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terpenuhinya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan cakupan energi dan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kota Dumai 2. Mewujudkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Mengoptimalkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Terwujudnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Terwujudnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 3. Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		4. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	1. Mengoptimalkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang menjangkau permukiman penduduk
Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yangenuhi lima syarat profesionalisme 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program program <i>recruitment</i>, pembekalan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang mendorong motivasi dan dedikasi pegawai di semua jenjang 3. Mewujudkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 4. Mewujudkan SDM aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas 5. Mewujudkan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>
	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Melaksanakan akses masyarakat pada sistem informasi manajemen daerah 3. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan ke-4 (2021-2026)	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari (Pemanfaatan Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ruang secara bijaksana 2. Memanfaatkan sumberdaya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari 4. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 5. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan
	Terwujudnya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan (Kelembagaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan. 2. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan 3. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan 5. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pembinaan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya tata ruang yang	1. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Tata Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan pranata pembangunan yang lebih rinci 3. Meningkatkan perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk mengelola lingkungan pembangunan berkelanjutan 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup

Arah Kebijakan umum di atas dijabarkan ke dalam arah kebijakan setiap misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan dan akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tabel berikut ini:

1. Misi: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

- 1) Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
- 2) Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
- 3) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
- 4) Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan investasi
- 6) Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
- 8) Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
- 9) Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
- 10) Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
- 11) Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
- 12) Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
- 13) Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
- 14) Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk

2. Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- 2) Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis

- 3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
- 5) Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
- 6) Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
- 7) Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
- 8) Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompentensi sesuai potensi dan daya saing daerah
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
- 10) Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
- 11) Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
- 12) Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
- 13) Menjamin distribusi bahan pokok
- 14) Meningkatkan Pendapatan masyarakat

3. Misi: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

- 1) Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa
- 2) Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
- 3) Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
- 4) Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
- 5) Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
- 6) Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
- 7) Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan
- 8) Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
- 9) Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari

- 11) Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 12) Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya

4. Misi: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

- 1) Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
- 2) Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
- 3) Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
- 4) Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuh 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi-komitmen, kebanggaan)
- 5) Meningkatkan pengelolaan asset daerah
- 6) Optimalisasi pendapatan daerah
- 7) Optimalisasi BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
- 8) Meningkatkan akses masyarakat pada Sistem Informasi manajemen daerah
- 9) Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
- 10) Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
- 11) Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

Tabel 6.4

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri			
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1 Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1.1 Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2 Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		1.1.2 Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1 Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3 Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		1.1.3 Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
			1.1.3.2 Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.3.3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan perlindungan sosial	1.1.1.1 Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			1.2.1.2 Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		1.2.2 Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			1.2.2.2 Meningkatkan Penyaluran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			1.2.2.3 Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	1.3 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1 Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	1.3.1.1 Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			1.3.1.2 Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
1. Mewujudkan masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1.1.1 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.1.1.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			1.1.1.2 Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis
			1.1.1.3 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			1.1.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			1.1.1.5 Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	1.2 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.2.1.1 Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			1.2.1.2 Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
			1.2.1.3 Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.4 Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompentensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.5 Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	1.3 Meningkatkan standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1 Peningkatan daya Beli Masyarakat	1.3.1.1 Menjamin distribusi bahan pokok
			1.3.1.2 Meningkatkan Pendapatan masyarakat
	1.4. Meningkatkan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan	1.4.1 Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan	1.4.1.1 Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	pemerintahan	1.4.1.2 Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat 1.4.1.3 Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
1.Mewujudkan infrastruktural dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1 Meningkatkan infrastrukturnya Kota	1.1.1 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1.1.1.1 Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		1.1.2 Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	1.1.2.1 Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		1.1.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1 Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman
			1.1.3.2 Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		1.1.4 Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	1.1.4.1 Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		1.1.5 Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	1.1.5.1 Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	1.1.6 Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	1.1.6.1 Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)	
	1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1 Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1.2.1.1 Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			1.2.1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			1.2.1.3 Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1.3 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1.3.1 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	1.3.1.1 Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			1.3.1.2 Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1 Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1.1.1 Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			1.1.1.2 Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			1.1.1.3 Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.1.4 Mewujudkan tata laksana aparaturnya daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan)
		1.1.2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1 Meningkatkan pengelolaan aset daerah
			1.1.2.2 Mengoptimalkan pendapatan daerah
			1.1.2.3 Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
	1.1.2.4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		
	1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1 Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	1.2.1.1 Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			1.2.1.2 Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		1.3.2 Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	1.3.2.1 Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
			1.3.3 Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana

6.3 Program Pembangunan Daerah Kota Dumai 2021-2026

Dalam rangka melaksanakan strategi dan arah kebijakan daerah, maka program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Tabel 6.5
Standard Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Urusan Pemerintahan	Program Pembangunan
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts)	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Urusan Pemerintahan	Program Pembangunan
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 -18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan Balita	Persentase Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif,	Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	Persentase Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Urusan Pemerintahan	Program Pembangunan
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlayani Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
16	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
18	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
19	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Urusan Pemerintahan	Program Pembangunan
20	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana
21	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana
22	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Penanggulangan Bencana
23	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
24	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti	Persentase Anak Telantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
27	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase Warga Negara/ Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
28	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan	100%	Setiap Tahun	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Urusan Pemerintahan	Program Pembangunan
		Sosial				

Disamping pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Pemerintah Kota Dumai juga melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan penurunan stunting daerah yang merupakan bagian dari target pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Adapun percepatan penurunan stunting di kota Dumai adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor. Adapun Program pembangunan dan Perangkat daerah pada pemerintah Kota Dumai yang bersifat indikatif yang mengampu pelaksanaan percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6
Indikasi Program Pembangunan dan Perangkat Daerah Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai

Program	Perangkat daerah
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan
Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Program pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program pemenuhan hak anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemudian dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tabel berikut menyajikan program dan perangkat daerah yang bersifat indikatif yang melaksanakan target nasional dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 6.7
Indikasi Program Pembangunan dan Perangkat Daerah Pelaksana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kota Dumai

Program	Perangkat daerah
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pertanahan dan Penataan ruang
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pertanahan dan Penataan ruang
Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan
Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan
Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah dan target pembangunan nasional, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas kepala daerah Kota Dumai yang bersifat indikatif diantaranya:

Tabel 6.8
Program Prioritas Kepala Daerah

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN		
1	Gratis Biaya Pelayanan Emergency	RSUD
2	Gratis Biaya Pelayanan Kelas Iii Dengan Ktp Dan Biaya Ambulance Untuk Rujukan Ke Pekanbaru	RSUD
3	Ambulance 24 Jam Di Tingkat Kecamatan	DINKES
4	Membantu Premi Peserta Bpjs Kesehatan Yang Menunggak	DINKES
5	Memberikan Kemudahan Layanan Di Puskesmas Dan RSUD Kota Dumai	DINKES-RSUD
Bidang Pendidikan		
1	Beasiswa Penuh Bagi Siswa/I Kurang Mampu Dan Berprestasi Untuk Jenjang S-1 50 Orang	SETDA

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2	Peningkatan Frekuensi Pelatihan Guru Sd Dan Smp	DIKBUD
3	Bebas Buta Aksara Alquran Siswa Sd-Smp Dan Pembinaan Rohani Pelajar Non Muslim	DIKBUD
Bidang Pemerintahan		
1	Memangkas Pelayanan Birokrasi Agar Lebih Mudah, Cepat Dan Transparan	SETDA
2	Meningkatkan Integritas Asn Pada Opd Pelayanan	OPD PELAYANAN
3	Pemutihan Ktp Bagi Warga Sudah Berdomisili Didumai Lebih Dari 5 Tahun	DUKCAPIL
4	Menyediakan Data Akurat Masyarakat Miskin Untuk Memudahkan Penyaluran Subsidi	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bidang Pariwisata		
1	Wisata Bukit Gelanggang	DINAS KOPAR
2	Wisata Kuliner Jalan Ombak; Dock, Janur Kuning, Jalan Dan Kelakap Tujuh	DINAS KOPAR-DINAS PEKERJAAN UMUM-DISHUB
3	Wisata Religi Suluk Basilam Baru	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG -DINAS PEKERJAAN UMUM -SETDA-DISHUB
4	Wisata Pantai Puak	DINAS PARPORA-DINAS PEKERJAAN UMUM
Bidang Tenaga Kerja		
1	Menambah Jenis Pelatihan Sesuai Kebutuhan Industri Dan Pelabuhan Dikota Dumai Dengan Memfungsikan 4 Rumah Terampil Di Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai Dan Bukit Kapur	DISNAKER
2	Mengutamakan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Oleh Perusahaan Yang Beroperasi Di Kota Dumai	DISNAKER
3	Mengembangkan Dan Memperbanyak Usaha Yang Menyerap Banyaktenaga Kerja	DISNAKER
Bidang Infrastruktur		
1	Pemerataan Pembangunan Jalan Sampai Tingkat Kelurahan	DINAS PEKERJAAN UMUM-PERKIM-KECAMATAN
2	Percepatan Penyediaan Air Bersih	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3	Percepatan Pembangunan Akses Jalan Dari Kecamatan Bukit Kapur-Kecamatan Medang Kampai Dan Kecamatan Bukit Kapur-Sungai Sembilan	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Membangun Sarpras Olahraga Kecamatan	DINAS KOPAR
5	Pembangunan Islamic Center Dan Mal Pelayanan Publik	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
6	Pemerataan Pembangunan Jalan Sampai Tingkat Kelurahan	DINAS PEKERJAAN UMUM-PERKIM-KECAMATAN
Bidang Sosial Ekonomi		
1	Pengembangan Potensi Pemuda Melalui Pelatihan Sesuai Dengan Kompetensi Dan Kebutuhan Dunia Usaha	DINAS KOPAR -DISNAKER
2	Peningkatan Bantuan Untuk Rumah Ibadah Seluruh Agama	SETDA
3	Bantuan Modal Usaha Untuk Umkm Rintisan Pemasaran Dengan E-Commerce	DISPERINKOPUKM-SETDA
4	Bantuan Teknologi Modern Untuk Petani, Peternak Dan Nelayan	DKPP-DINAS PERIKANAN

Tabel. 6.9
Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Dumai

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU																
MISI 1	MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG BERDAYA SAING DAN BERTUMPU PADA KEPELABUHANAN DAN INDUSTRI															
	TUJUAN	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	6,36%	6,36%		4,19%-4,90%		4,36%-5,07%		4,72%-5,43%		5,08%-6,01%	5,08%-6,01%		
	SASARAN	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	Rp. Triliun 27,73	Rp. Triliun 27,73		Rp. Triliun 28,81- Rp. Triliun 29,08		Rp. Triliun 30,25- Rp. Triliun 30,45		Rp. Triliun 31,78- Rp. Triliun 32,00		Rp. Triliun 33,50- Rp. Triliun 33,79	Rp. Triliun 33,50- Rp. Triliun 33,79		
			NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	Rp. Triliun 45,06	Rp. Triliun 45,06		Rp. Triliun 49,07- Rp. Triliun 51,45		Rp. Triliun 52,42- Rp. Triliun 53,37		Rp. Triliun 56,28- Rp. Triliun 57,53		Rp. Triliun 60,16- Rp. Triliun 60,98	Rp. Triliun 60,16- Rp. Triliun 60,98		
			PDRB PERKAPITA ADHK	Rp. Juta. 83,55	Rp. Juta 83,55		Rp. Juta 87,61 – Rp. Juta 88,42		Rp. Juta. 90,83 –Rp. Juta. 91,45		Rp. Juta.94,30 – Rp. Juta 94,94		Rp. Juta 98,24 -Rp. Juta 99,11	Rp. Juta. 98,24 - Rp. Juta 99,11		
			PDRB PERKAPITA ADHB	Rp. Juta. 135,78	Rp. Juta 135,78		Rp. Juta 149,20-Rp. Juta 156,42		Rp. Juta 157,42-Rp. Juta 160,27		Rp. Juta 166,98-Rp. Juta 170,68		Rp. Juta 176,34-Rp. Juta 178,84	Rp. Juta 176,34-Rp. Juta 178,84		
3.31.02	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAI KANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	-	-	-	75%	30.000.000	85%	2.571.000.000	78%	1.881.100.000,00	80%	1.931.100.000,00	80%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03	2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU	-	-	-	-	-	25%	286.000.000	30%	254.100.000,00	35%	304.100.000,00	35%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					3.31.04	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSRI DI KAB/KOTA YG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASANINDUSTRI DI KAB/KOTA	-	-	-	-	65%	286.500.000		
2.18.02	4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK INVESTASI	36,6%	36,6%	220.945.200	40,26%	255.000.000	44,29%	1.400.000.000	48,71%	1.355.873.959	53,59%	1.355.873.959	53,59%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI	10%	10%	21.269.800	10%	38.279.150	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	50%	
2.18.05	6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	100%	100%	282.407.598	100%	499.968.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	
3.26.02	7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGERA	70%	70%	6.228.112.476	75%	8.173.438.700	80%	11.211.174.050	85%	10.891.600.000	90%	10.941.600.000	90%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
3.26.03	8	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	70%	70%	40.000.000	75%	2.050.424.873	80%	1.263.211.200	85%	1.341.099.136	90%	1.341.099.136	90%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					3.26.04	9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	45%	1.749.600.000		
3.26.05	10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70%	70%	270.628.550	75%	554.751.370	80%	1.081.512.000	85%	1.144.864.000	90%	927.913.600	90%	
3.30.02	11	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA	2,12%	2,12%	21.204.764	0,17%	20.000.000	5%	55.000.000	5%	60.000.000	5%	60.000.000	5%	
3.30.03	12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN	100%	100%	4.256.922.710	60,67%	3.717.504.543	73,31%	1.428.000.000	100%	1.965.000.000	100%	1.965.000.000	100%	
3.30.05	13	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE VOLUME EKSPOR	0,52%	0,52%	42.388.580	0%	0	1,5%	158.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	
3.30.06	14	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT UTPP YANG DITERA/TERA ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/PENYULUHAN	1,91%	1,91%	87.524.000	1,02%	165.000.000	8,73%	432.099.961	16,67%	860.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	
3.30.07	15	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	14%	181.683.631	14%	193.194.570	14%	193.194.570	14%	
4.01.02	16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN	100%	100%	14.107.731.834	100%	30.323.132.240	100%	68.005.000.000	100%	75.539.446.000	100%	82.419.446.000	100%	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
								KESEJAHTERAAN RAKYAT								
4.01.03	17	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100%	3.159.326.364	100%	6.035.882.866	100%	3.955.000.000	100%	4.000.000.000	100%	5.440.000.000	100%	
	SASARAN	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS GINI	0,32 POIN	0,32 POIN		0,35-0,34 POIN		0,314-0,340 POIN		0,34-0,32 POIN		0,33-0,31 POIN		0,33-0,31 POIN	
			TINGKAT KEMISKINAN	3,20%	3,20%		3,49% - 3,20%		2,93%-3,07%		2,93%-3,06%		2,93%-3,05%		2,93%-3,05%	
			TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,38%	5,38%		5,38%-5,92%		4,89%-5,27%		5,20%-4,70%		5,10%-4,60%		5,10%-4,60%	
1.06.02	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN	100%	100%	242.556.708	100%	551.164.140	100%	1.160.000.000	100%	1.490.000.000	100%	1.665.000.000	100%	
1.06.03	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/KELURAHAN ASAL	100%	100%	4.486.000	100%	2.100.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1.06.04	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI LUAR PANTI SOSIAL	100%	100%	790.537.687	100%	3.523.998.700	100%		
1.06.05	4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	100%	126.531.488	100%	1.932.982.000	100%	15.500.000.000	100%	15.675.000.000	100%	15.735.000.000	100%	
2.13.04	5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	9.870.000	100%	93.568.000	-	-	-	-	-	-	100%	
			PERSENTASE KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHNYA	-	-	-	-	-	100%	450.000.000	90%	550.000.000	100%	650.000.000		
2.13.05	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	497.635.191	100%	1.539.632.000	-	-	-	-	-	-	100%	
			PERSENTASE LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKTIF	-	-	-	-	-	100%	1.700.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000		
2.07.02	7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN	-	-	-	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	DINAS TENAGA KERJA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			RTKD													
2.07.03	8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN	10%	10%	531.437. 398	10%	626.569. 300	10%	560.000. 000	10%	4.047.770. 000	10%	4.520.000. 000	10%	
2.07.04	9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	25%	25%	715.266. 459	30%	240.000. 000	35%	790.000. 000	40%	3.875.000. 000	45%	3.875.000. 000	45%	
2.07.05	10	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN	80%	80%	119.985. 500	85%	503.480. 400	90%	3.955. 600.000	95%	1.595.000. 000	95%	1.595.000. 000	95%	
2.17.03	11	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	PERSENTASE Pemeriksaan DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOT A	30%	30%	96.505. 440	35,5%	185.128. 000	35%	770.000. 000	40%	947.000. 000,00	40%	947.000. 000,00	40%	
2.17.04	12	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOT A	-	-	-	-	-	11,13%	643.500. 000	13,13%	757.850. 000,00	15,13%	736.850. 000,00	15,13%	
2.17.05	13	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH	-	-	-	-	-	23,55%	544.500. 000	25,55%	598.950. 000,00	25,55%	598.950. 000,00	25,55%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
			KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2.17.06	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	35,5%	100.000.000	38%	385.000.000	40%	423.500.000	37,50%	383.200.000	37,50%		
2.17.07	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA	10%	10%	1.601.056.940	15%	2.073.834.100	20%	2.764.200.000	25%	2.438.900.000	30%	2.988.900.000	30%		
2.17.08	16	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	-	-	-	4%	130.410.000	5%	385.000.000	7%	523.500.000	10%	2.073.500.000	10%		
	SASARAN	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH	INDEKS KETAHANAN PANGAN DAERAH	72,63 INDEKS	72,63 INDEKS				73,66 INDEKS			75,12 INDEKS		76,40 INDEKS		76,40 INDEKS	
			SKOR POLA PANGAN HARAP	82,9 SKOR	82,90 SKOR				84,58 SKOR			0		0		0	
			KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	36,03%	36,03%				37,7%			-		-		-	
2.09.03	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8,50%	8,50%	2.591.820.369	8,96%	2.515.297.480	9,64%	3.562.688.600	10,33%	3.170.000.000	10,91%	3.060.000.000	10,91%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.09.04	2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PENGEMBANGAN TANAMAN PEKARANGAN PADA DAERAH STUNTING	9,38%	9,38%	103.431.200	12,50%	204.185.860	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PENYEDIAAN PETA KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100%
2.09.05	3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	13,33%	13,33%	99.999.800	13,33%	134.570.300	13,33%	250.000.000	13,34%	250.000.000	13,34%	250.000.000	13,34%	
3.27.02	4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN	9,09%	9,09%	1.283.190.499	9,09%	3.496.525.840	9,50	3.200.000.000	9,91	3.540.000.000	10,33%	3.740.000.000	10,33%	
3.27.03	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	12,66%	12,66%	1.403.331.600	12,66%	1.712.104.900	12,66%	1.865.000.000	12,66%	2.100.000.000	12,66%	2.160.000.000	12,66%	
3.27.04	6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	3,39%	3,39%	721.873.666	2,89%	1.417.298.666	2,38%	1.150.000.000	1,87%	1.100.000.000	1,36%	1.300.000.000	1,36%	
3.27.05	7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10,00%	10,00%	640.522.900	10%	781.159.800	10%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	
3.27.07	8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN	11,23%	11,23%	427.308.826	11,58%	1.617.765.520	11,93%	1.450.071.369	12,27%	1.377.590.333	12,61%	1.602.590.333	12,61%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3.25.03	9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN KELOMPOK NELAYAN TERBINA	69,23%	69,23%	1.090.129.500	76,92%	213.726.500	84,62%	2.070.000.000	92,31%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	DINAS PERIKANAN
3.25.04	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA	70%	70%	1.343.828.176	77,5%	1.743.552.298	85%	4.150.400.000	92,5%	4.650.000.000	100%	5.000.000.000	100%	
3.25.05	11	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN	-	-	-	-	-	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	
3.25.06	12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI	100%	100%	74.994.650	100%	74.999.300	100%	1.580.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.900.000.000	100%	
		PROGRAM YANG MENGAMPU CROSSCUTTING KEMISKINAN														
		PROGRAM YANG MENGAMPU CROSSCUTTING STUNTING														
MISI 2	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU															
	TUJUAN	MEWUJUDKAN MASYARAKAT DUMAI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,26 INDEKS	75,26 INDEKS		75,50 INDEKS - 75,73 INDEKS		75,72 INDEKS - 75,95 INDEKS		75,93 INDEKS - 76,16 INDEKS		76,15 INDEKS - 76,42 INDEKS		76,15 INDEKS - 76,42 INDEKS	
	SASARAN	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS KESEHATAN	0,788 INDEKS	0,788 INDEKS		0,789 INDEKS - 0,790 INDEKS		0,790 INDEKS - 0,791 INDEKS		0,790 INDEKS - 0,791 INDEKS		0,791 INDEKS - 0,792 INDEKS		0,791 INDEKS - 0,792 INDEKS	
1.02.02	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80%	80%	61.179.113.724	82%	75.298.856.561	84%	85.633.255.531	86%	96.222.060.289	86%	99.596.924.615	86%	DINAS KESEHATAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			(DINAS KESEHATAN)													
1.02.03	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR (DINAS KESEHATAN)	82%	82%	70.350. 000	83%	864.829. 200	84%	8.330. 100.000	85%	8.737.330. 000	85%	9.164.396. 500	85%	
1.02.04	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN	49%	49%	903.894. 982,00	79%	964.820. 492	80%	1.516. 870.513	82%	1.665.707. 565,00	85%	1.829.378. 321	85%	
1.02.05	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA	4,68 per 1000 balita	4,68 per 1000 balita	263.680. 000	4,68 per 1000 balita	1.716.066. 700	4,68 per 1000 balita	1.595. 000.000	4,68 per 1000 balita	1.615.000. 000	4,68 per 1000 balita	1.635.000. 000	4,68 per 1000 balita	
1.02.02	5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	85,7%	85,7%	57.129. 499.969	87%	76.454. 289.840	-	-	-	-	-	-	-	
			PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	-	-	-	-	-	89%	113.321. 212.371	91%	93.525. 100.000	93%	93.731. 571.585	93%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			MASYARAKAT (RSUD)													
1.02.03	6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR (RSUD)	88%	88%	7.944.174. 786	90%	2.449.518. 585	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	-	92%	4.250.00 0. 000	94%	2.242.250 .000	96%	2.250.000. 000	96%	
2.14.02	7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK	40%	40%	296.468. 022	50%	453.720. 000	60%	931.800. 000	70%	970.800. 000	80%	970.800. 000	80%	
			PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB	50%	50%		51%		52%		53%		54%		54%	
2.14.03	8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,56%	2,56%	2.737.936. 298	2,54%	2.600.479. 830	2,52%	2.234. 853.000	2,50%	2.274.926. 677	2,48%	2.274.926. 677	2,48%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			ASFR 15-19	14,00%	14,00%		12,67%		11,30%		10,00%		9,80%	9,80%		
			UKP	22 USIA	22 USIA		22 USIA		22 USIA		22 USIA		22 USIA	22 USIA		
2.14.04	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA	75%	75%	829.799.912	78%	1.721.020.100	80%	1.125.741.511	82%	1.135.423.185	85%	1.135.423.185	85%	
	SASARAN	MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS PENDIDIKAN	0,708 INDEKS	0,708 INDEKS		0,711 INDEKS-0,714 INDEKS		0,714 INDEKS - 0,717INDEKS		0,717 INDEKS-0,720 INDEKS		0,720 INDEKS - 0,724 INDEKS	0,720 INDEKS - 0,724 INDEKS		
1.01.02	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN	100%	100%	70.798.474.313	100%	137.566.953.347	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE TERPENUHINYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN SELURUH JENJANG	-	-	-	-	-	100%	172.247.237.117	100%	169.271.988.491	100%	170.458.439.650	100%	
1.01.03	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL	-	-	-	-	-	100%	1.285.306.687	100%	1.272.535.400	100%	1.272.535.400	100%	
1.01.04	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG MEMILIKI KUALITAS	-	-	-	-	-	100%	138.603.600	100%	400.000.000	100%	200.000.000	100%	
1.01.05	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE LEMBAGA YANG TELAH MEMILIKI IZIN	-	-	-	-	-	100%	400.000.000	100%	700.000.000	100%	500.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.08.02	6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI (%)	10%	10%	271.037.500	15%	263.253.700	20%	650.000.000	25%	662.500.000	30%	662.500.000	30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN (%)	20%	20%	368.537.950	30%	185.546.000	40%	554.527.000	50%	480.000.000	60%	480.000.000	60%	
2.08.04	8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	70%	-	-	80%	5.999.300	-	-	-	-	-	-	80%	
			MENURUNNYA JUMLAH USIA PERKAWINAN ANAK						90%	197.782.600	60%	316.000.000	55%	316.000.000	55%	
2.08.05	9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (%)	30%	30%	16.570.900	35%	40.524.980	40%	201.000.000	45%	203.000.000	50%	203.000.000	50%	
2.08.06	10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (%)	70%	70%	49.630.000	75%	188.990.200	80%	661.000.000	85%	672.000.000	90%	672.000.000	90%	
2.08.07	11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (%)	40%	40%	184.199.475	50%	467.453.580	60%	587.473.000	70%	508.000.000	80%	508.000.000	80%	
2.19.02	12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	70%	70%	914.865.791	75%	1.903.308.010	80%	1.550.000.000	85%	1.710.000.000	90%	1.850.000.000	90%	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
2.19.03	13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI	70%	70%	1.586.502.298	75%	6.688.993.819	80%	2.641.896.000	85%	2.853.247.680	90%	2.718.122.625	90%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.23.02	14	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	381.586.540	40% (10 PERPUSTAKAAN)	498.036.800	-	-	-	-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TELAH DIBINA SESUAI NSP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	-	-	-	-	60%	1.336.600.000	80%	1.336.600.000	100%	1.336.600.000	100%		
2.23.03	15	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/SIALIHMEDESIAN (DIGITALISASI) / TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	88,06%	88,06%	17.398.124	40%	15.000.000	60%	200.000.000	80%	320.000.000	100%	320.000.000		100%
	SASARAN	MENINGKATNYA STANDARD HIDUP LAYAK MASYARAKAT KOTA DUMAI	INDEKS PENGELUARAN	0,763 INDEKS	0,763 INDEKS		0,767 INDEKS - 0,771 INDEKS		0,769 INDEKS - 0,773 INDEKS		0,772 INDEKS - 0,776 INDEKS		0,775 INDEKS - 0,779 INDEKS		0,775 INDEKS - 0,779 INDEKS	
3.30.04	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN	9,33%	9,33%	25.669.000	26,04%	75.000.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	DINAS PERDAGANGAN
	SASARAN	MENINGKATNYA KEBUDAYAAN MELAYU YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	50%	50%		50%									
			PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN						92,35%		94,90%		97,45%		97,45%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					2.22.02	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN	95%	95%	1.006.475.868	95%	4.046.881.637	-		
			PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	95%	4.435.380.864	95%	5.608.125.184	95%	5.624.061.590	95%		
2.22.03	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PARTISIPASI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL	-	-	-	-	95%	320.805.793	95%	250.000.000	95%	250.000.000	95%		
2.22.04	3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DIBINA	-	-	-	-	-	-	50%	400.000.000	100%	400.000.000	100%		
2.22.05	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN	-	-	-	80%	49.930.727	42,86%	200.000.000	71,43%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	
MISI 3 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS																
	TUJUAN	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS	50,21	50,21		56,90%		60,23%		66,38%		70,49%		70,49%	
	SASARAN	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KOTA	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH	46,09%	46,09%		56,54%		64,72%		70,46%		83,58%		83,58%	
1.03.03	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN	3%	3%	12.189.923.272	7,33%	12.735.500.000	11,79%	38.250.000.000	16,63%	43.780.000.000	21,25%	45.100.000.000	21,25%	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)											TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		MINUM														
1.03.05	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI	100%	100%	4.756.300.000	100%	693.578.000	100%	4.297.900.000	100%	7.926.400.000	100%	7.754.900.000	100%	
1.03.08	3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10%	10%	54.127.605.284	5%	81.819.509.161	5%	80.163.338.917	5%	108.000.000.000	5%	56.000.000.000	5%	
1.03.09	4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	216.402.000	100%	400.000.000	100%	4.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	
1.03.02	6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	14,60%	14,60%	40.951.375.932	39,92%	59.790.542.360	51,91%	106.500.000.000	62,98%	113.500.000.000	75,14%	110.500.000.000	75,14%	
1.03.06	7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2%	2%	11.983.417.779	2%	35.653.104.760	4%	35.000.000.000	4%	48.000.000.000	4%	48.000.000.000	16%	
1.03.07	8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	100%	2.663.379.200	-	-	-	-	-	-	100%	
1.03.10	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)	-	-	-	-	-	61,41%	17.996.141.202	63,92%	17.996.141.202	66,42%	17.996.141.202	66,42%	
			PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	56,41%	56,41%	57.781.224.804	58,91%	228.866.388.103	61,41%	143.700.000.000	63,92%	147.900.000.000	66,42%	147.900.000.000	66,42%	
1.03.11	10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15%	15%	43.284.800	15%	201.520.000	15%	1.725.000.000	65%	4.100.000.000	85%	3.800.000.000	85%	

DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1.04.02	11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100%	100%	98.570.994	100%	377.400.000	100%		
1.04.03	12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	11,47%	11,47%	17.874.662.679	33,60%	910.050.000	55,73%	21.835.539.830	77,87%	22.801.158.017	100%	21.282.029.420	100%	
1.04.04	13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	6,83%	6,83%	2.500.555.677	18,52%	4.920.940.000	45,50%	10.000.000.000	73,02%	10.200.000.000	100%	10.000.000.000	100%	
1.04.05	14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	60,71%	60,71%	4.007.538.891	60,71%	2.559.200.000	71,43%	15.747.337.440	78,57%	16.190.984.230	100%	15.785.026.080	100%	
1.04.06	15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN	-	-	-	40%	30.000.000	60%	500.000.000	80%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
		PERMUKIMAN														
2.10.04	16	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	40%	325.021.600	-	-	-	-	-	-	40%	
2.10.10	17	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	20%	20%	99.384.000	40%	169.978.400	-	-	-	-	-	-	40%	
2.15.02	18	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK	95%	95%	27.873.181.235	95%	46.712.912.299	95%	85.344.392.225	95%	84.260.290.225	95%	67.648.614.244	95%	
2.15.03	19	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA	-	-	-	20%	150.000.000	20%	300.000.000	20%	150.000.000	20%	8.000.000.000	20%	
2.15.05	20	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PRESENTASE PENYEDIAAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR PERKERETAPIAN YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	
	SASARAN	TERWUJUDNYA PENATAAN RUANG DAERAH YANG KONSISTEN	PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG YANG SESUAI DENGAN ATURAN	47,53%	47,53%		48,46%		50,26%		52,94%		56,49%		56,49%	
1.03.12	1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG	47,53%	47,53%	1.087.618.187	48,46%	3.023.138.193	50,26%	2.288.000.000	52,94%	10.000.000.000	56,49%	10.000.000.000	56,49%	
2.10.04	2.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	-	-	-	-	-	60%	786.500.000	80%	865.150.000	100%	951.665.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
		GARAPAN	GARAPAN													
2.10.10	3.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	-	60%	1.270.500.000	80%	1.397.550.000	100%	1.537.305.000	100%		
	SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	61,34 INDEKS	61,34 INDEKS		61,55 INDEKS	61,76 INDEKS		62,1 INDEKS		62,1 INDEKS		62,1 INDEKS		
			CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	57%	57%		65,7%	65,7%		71,4%		71,4%		71,4%		
			PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	7195,43 GgCO2-e	7195,43 GgCO2-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	75%	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.11.02	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	65%	-	-	75%	1.792.888.500	80%	1.527.500.000	85%	1.327.500.000	85%	1.877.500.000	85%	
2.11.03	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	70%	70%	238.209.640	75%	1.262.451.930	80%	4.247.500.000	85%	4.382.500.000	85%	4.382.500.000	85%	
2.11.04	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	70%	70%	7.934.973.613	70%	12.117.701.188	72%	8.500.000.000	75%	10.000.000.000	80%	10.000.000.000	80%	
2.11.05	4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	-	-	-	70%	28.701.700	72%	271.325.000	75%	286.745.627	80%	286.745.627	80%	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					2.11.06	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	73%	133.380.000	75%	1.100.000.000		
2.11.08	6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70%	70%	73%	149.435.087	75%	800.000.000	80%	800.000.000	85%	800.000.000	85%		
2.11.09	7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70%	70%	75%	65.479.536	75%	250.000.000	80%	300.000.000	85%	300.000.000	85%		
2.11.10	8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT	70%	70%	75%	55.463.061	75%	650.000.000	80%	650.000.000	85%	650.000.000	85%		
2.11.11	9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI	57%	57%	65,7%	7.763.486.854	65,7%	17.940.000.000	71,4%	17.940.000.000	71,4%	17.940.000.000	71,4%		
1.03.04	10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100%	100%	100%	5.264.370.000	100%	1.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2.10.10	11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	-	60%	1.270.500.000	80%	1.397.550.000	100%	1.537.305.000	100%		
MISI 4	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK															

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	TUJUAN	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	INDEKS		INDEKS B		INDEKS B		INDEKS B		INDEKS B	INDEKS B		
	SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SETIAP TAHUN,	OPINI WTP	OPINI WTP		OPINI WTP		OPINI WTP		OPINI WTP		OPINI WTP	OPINI WTP		
			NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	INDEKS B	INDEKS B		INDEKS B		INDEKS B		INDEKS B		INDEKS B	INDEKS B		
			INDEKS MANAJEMEN RESIKO	2 INDEKS	2 INDEKS		2 INDEKS		3 INDEKS		3 INDEKS		3 INDEKS	3 INDEKS		
04.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH	100%	100%	46.264.134.022	100%	62.216.151.818	100%	55.436.600.000	100%	60.545.277.449	100%	59.803.950.410	100%	SEKRETARIAT DAERAH
5.01.02	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	100%	100%	665.074.553	100%	1.311.363.300	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
5.01.03	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASI	100%	100%	1.332.068.192	100%	1.781.192.210	100%	3.285.000.000	100%	3.285.000.000	100%	3.285.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			KAN													
			PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
05.05.02	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	20%	20%	134.286.700	25%	289.800.263	-	-	-	-	-	-		
5.02.02	5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	100%	9.499.481.113	100%	13.914.775.126	100%	50.149.966.984	100%	50.149.966.984	100%	25.149.966.984	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	100%	100%	1.777.750.306	100%	2.470.997.400	100%	13.440.000.000	100%	13.440.000.000	100%	13.440.000.000	100%	
5.02.04	7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA	100%	100%	4.989.951.918	100%	7.132.856.912	100%	6.708.044.688	100%	7.021.500.823	100%	7.396.097.653	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6.01.02	8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	100%	1.280.996.500	100%	1.983.183.100	100%	4.477.859.582	100%	4.525.000.000	100%	4.525.000.000	100%	INSPEKTORAT
6.01.03	9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	100%	626.660.200	100%	1.028.782.600	100%	2.700.000.000	100%	2.800.000.000	100%	2.800.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
	SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85,03 INDEKS	85,03 INDEKS	85,44 INDEKS	85,65 INDEKS	85,87 INDEKS	86,10 INDEKS	86,10 INDEKS						
1.05.03	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	78,21%	78,21%	2.085.311.175	78,21%	4.939.955.790	100%	5.347.275.235	100%	5.478.400.000	100%	5.465.500.000	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	85%	85%	2.732.400.000	85%	871.338.188	-	-	-	-	-	85%		
1.05.04	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	-	-	-	-	-	85%	3.133.000.000	90%	3.133.000.000	90%	3.133.000.000	90%	
1.05.02	4	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	462.427.904	100%	1.071.399.800	100%	2.722.480.000	100%	2.573.820.000	100%	2.318.820.000	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06.06	5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI	100%	100%	357.401.870	100%	238.280.000	100%	827.277.000	100%	1.075.000.000	100%	1.125.000.000	100%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.07	6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	100%	100%	207.736.988	100%	17.458.900	100%	100.000.000	100%	175.000.000	100%	250.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2.12.02	7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	85%	237.541.200	87%	777.000.000	88%	847.000.000	90%	847.000.000	90%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	-	-	-	85%	99.356.000,00	87%	387.000.000,00	88%	407.000.000,00	90%	387.000.000,00	90%	
2.12.04	9	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	-	-	-	69%	79.622.900,00	81%	415.000.000,00	94%	462.463.811,00	100%	439.463.811,00	100%	
2.12.05	10	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	-	-	-	67%	20.000.000	67%	80.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	
2.24.02	11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	65,2%	65,2%	180.424.402	38%	230.013.000	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PD YANG MENERAPKAN PENGELOLAHAN ARSIP SESUAI KAJIDAH KEARSIPAN	-	-	-	-	-	58%	973.000.000	77%	830.000.000	100%	805.000.000	100%	
2.24.03	12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOTA DUMAI	-	-	-	-	-	60%	347.720.000	80%	493.198.000	100%	518.198.000	100%	
5.03.02	13	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	97,27%	97,27%	1.553.024.902	94,48%	2.006.492.743	99,55%	2.843.509.120	99,65%	2.843.509.120	99,75%	2.843.509.120	99,75%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
			SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK													
5.04.02	14	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	3,70%	3,70%	761.321.500	5%	1.637.265.100	6%	4.171.472.898	7%	4.474.929.373	8%	4.502.429.373	8%	
4.02.02	15	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	95%	95%	8.932.354.057	95%	13.648.478.765	95%	29.258.601.500	95%	26.360.883.800	95%	29.169.280.820	95%	SEKRETARIAT DPRD
7.01.02	16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	56.692.492	100%	217.902.500	100%	497.951.176	100%	640.000.000	100%	560.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.03	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	755.644.388	100%	1.118.997.800	100%	4.720.000.000	100%	4.840.000.000	100%	4.150.409.014	100%	
7.01.04	18	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	81.503.000	100%	101.000.000	100%	500.000.000	100%	612.894.294	100%	600.000.000	100%	
7.01.05	19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	100%	100%	38.830.900	100%	20.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
								KECAMATAN DUMAI BARAT								
7.01.02	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	14.540.200	100%	143.512.700	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR
7.01.03	21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	824.657.525	100%	1.398.119.300	100%	6.040.000.000	100%	6.040.000.000	100%	6.040.000.000	100%	
7.01.04	22	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	96.350.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	
7.01.05	23	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	18.340.660	-	-	100%	165.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	
7.01.02	24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	24.390.407	100%	319.979.500	100%	525.000.000	100%	575.000.000	100%	595.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					7.01.03	25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	1.483.228.889	100%	2.088.349.693	100%		
7.01.04	26	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	99.997.000	100%	100.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	
7.01.05	27	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	-	-	-	100%	90.000.000	100%	217.000.000	100%	249.000.000	100%	261.000.000	100%	
7.01.02	28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	66.139.310	100%	232.182.688	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	
7.01.03	29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	807.729.780	100%	1.381.570.200	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	KECAMATAN DUMAI KOTA
7.01.04	30	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	96.609.900	100%	103.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.05	31	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	99.617.204	100%	35.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	
7.01.02	32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	68.183.700	100%	209.330.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	433.720.000	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.03	33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	603.246.450	100%	1.395.835.117	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	5.271.500.000	100%	
7.01.04	34	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	98.088.900	100%	113.549.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	
7.01.05	35	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	10.400.000	100%	42.560.000	100%	208.175.810	100%	208.175.810	100%	208.175.810	100%	
7.01.02	36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN	100%	100%	42.674.500	100%	182.674.480	100%	580.000.000	100%	595.000.000	100%	595.000.000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
								MEDANG KAMPAI								
7.01.03	37	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	806.882. 200	100%	1.106.979. 000	100%	6.300. 000.000	100%	6.600.000. 000	100%	6.600.000. 000	100%	
7.01.04	38	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	104.970. 600	100%	104.370. 800	100%	120.000. 000	100%	130.000. 000	100%	140.000. 000	100%	
7.01.05	39	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	-	-	100%	2.500.000	100%	354.000. 000	100%	350.000. 000	100%	350.000. 000	100%	
7.01.02	40	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	35.427. 900	100%	370.107. 770	100%	532.000. 000	100%	482.000. 000	100%	535.000. 000	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.03	41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	1.282.199. 100	100%	1.606.786. 140	100%	6.320. 000.000	100%	6.381.350. 376	100%	6.380.000. 000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
7.01.04	42	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	93.164.800	100%	100.000.000	100%	270.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	
7.01.05	43	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	-	-	-	100%	40.000.000	100%	200.000.000	100%	134.500.718	100%	85.000.000	100%	
8.01.02	44	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	119.590.000	100%	199.960.600	100%	1.730.000.000	100%	1.380.000.000	100%	1.380.000.000	100%	
8.01.03	45	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	2.352.277.464	100%	20.744.304.260	100%	34.236.250.192	100%	3.337.802.528	100%	3.337.802.528	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	41.336.000	100%	1.854.490.000	100%	3.825.000.000	100%	726.760.272	100%	726.760.272	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/P ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
8.01.05	47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%	100%	444.857. 000	100%	549.490. 000	100%	510.000. 000	100%	770.000. 000	100%	770.000. 000	100%	
8.01.06	48	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	790.574. 225	100%	897.913. 000	100%	1.455. 000.000	100%	1.390.000. 000	100%	1.390.000. 000	100%	
2.18.04	49	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	80%	80%	53.435. 218	85%	159.761. 100	85%	1.500. 000.000	90%	1.550.000. 000	90%	1.550.000. 000	90%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	549	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI	-	-	-	100%	9.681.400	100%	289.294. 324	100%	285.873. 135	100%	285.873. 135	100%	
			INDEKS LAYANAN SPBE	2,83 INDEKS	2,83 INDEKS		2,85 INDEKS		3 INDEKS		3,1 INDEKS		3,3 INDEKS		3 INDEKS	
2.16.02	1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80%	80%	2.430.160. 983	85%	3.213.960. 000	90%	4.062. 000.000	95%	4.220.000. 000	100%	4.072.500. 000	100%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			PERSENTASE CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN	-	-	-	-	-	71%	4.062. 000.000	86%	4.220.000. 000	100%	4.072.500. 000	100%	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					2.16.03	2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	57,14%	57,14%	3.430.660.119	63,03%	4.283.897.170	67,23%		
2.20.02	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75%	75%	130.483.500	75%	52.020.000	80%	600.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.380.000	80%	
2.21.02	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75%	75%	136.376.710	75%	162.242.500	100%	500.000.000	100%	682.000.000	100%	777.000.000	100%	
			INDEKS INOVASI DAERAH	41,03%	41,03%		42,38%		35,00 - 60,00		35,00 - 60,00		35,00 - 60,00		35,00 - 60,00	
5.05.02	5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	-	-	-	-	-	30%	2.040.000.000	30%	2.340.000.000	30%	2.340.000.000	30%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada BAB III Gambaran Keuangan Daerah, berikutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut sesuai dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 – 2026

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan	768.697.408.803,44	1.276.479.000.849,00	1.796.165.451.457,01	1.915.130.252.083,45	1.864.872.345.534,35
Belanja	1.490.475.312.524	2.027.712.611.612	2.616.807.787.796	2.735.900.360.119	2.664.103.350.763
Belanja Operasional	1.233.209.292.170	1.511.764.542.533	1.900.857.196.406	1.987.891.949.814	1.935.489.526.925
Belanja Pegawai					
BelanjaBarang dan jasa					
Belanja bunga	0	0	0	0	0
Belanja subsidi	0	0	0	0	0
Belanja hibah					
Belanja bantuan sosial					
Belanja Modal	257.005.731.337	515.915.960.853	684.176.470.134	716.276.614.807	696.713.740.254
BelanjaTidak Terduga	260.289.017	32.108.226	31.774.121.255	31.731.795.498	31.900.083.584
Belanja Transfer	0	0	0	0	0

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan diharapkan akan dapat dicapai selama lima tahun. Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah setelah dikurangi dengan belanja wajib untuk membiayai gaji pegawai dan kegiatan rutin pemerintahan. Namun demikian, untuk program-program tertentu kebutuhan pendanaan dari sumber pemerintah lainnya seperti APBD Provinsi dan APBN juga ikut dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan Kota Dumai secara maksimal. Hal ini penting artinya untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara proses pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan Provinsi Riau serta pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).Tabel 7.2 memberikan rincian rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Kota Dumai untuk periode 2022-2026.

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Dumai Tahun 2022 – 2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
01.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN	100%	100%	237.653.317.481	100%	290.082.057.478	100%	327.952.172.569	100%	331.139.853.184	100%	330.674.942.891	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN	100%	100%	70.798.474.313	100%	137.566.953.347	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE TERPENUHINYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN SELURUH JENJANG	-	-	-	-	-	100%	172.247.237.117	100%	169.271.988.491	100%	170.458.439.650	100%	
1.01.03	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL	-	-	-	-	-	100%	1.285.306.687	100%	1.272.535.400	100%	1.272.535.400	100%	
1.01.04	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG MEMILIKI KUALITAS	-	-	-	-	-	100%	138.603.600	100%	400.000.000	100%	200.000.000	100%	
1.01.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE LEMBAGA YANG TELAH MEMILIKI IZIN	-	-	-	-	-	100%	400.000.000	100%	700.000.000	100%	500.000.000	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KEBUDAYAAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.22.02	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN	95%	95%	1.006.475.868	95%	4.046.881.637	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	95%	4.435.380.864	95%	5.608.125.184	95%	5.624.061.590	95%	
2.22.03	7	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PERSENTASE PARTISIPASI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL	-	-	-	-	-	95%	320.805.793	95%	250.000.000	95%	250.000.000	95%	
2.22.05	8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN	-	-	-	80%	49.930.727	42,86%	200.000.000	71,43%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	
2.22.04	10	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DIBINA	-	-	-	-	-	-	-	50%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	
TOTAL						309.458.267.662		431.745.823.189		506.979.506.630		509.742.502.259		510.129.979.531		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KESEHATAN																
01.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)	100%	100%	64.776.057.046	100%	78.207.971.074	100%	88.835.817.000	100%	90.023.444.650	100%	89.611.549.780	100%	DINAS KESEHATAN
1.02.02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)	80%	80%	61.179.113.724	82%	75.298.856.561	84%	85.633.255.531	86%	96.222.060.289	86%	99.596.924.615	86%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.02.03	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR (DINAS KESEHATAN)	82%	82%	70.350.000	83%	864.829.200	84%	8.330.100.000	85%	8.737.330.000	85%	9.164.396.500	85%	
1.02.04	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN	49%	49%	903.894.982,00	79%	964.820.492	80%	1.516.870.513	82%	1.665.707.565,00	85%	1.829.378.321	85%	
1.02.05	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA	4,68 per 1000 balita	4,68 per 1000 balita	263.680.000	4,68 per 1000 balita	1.716.066.700	4,68 per 1000 balita	1.595.000.000	4,68 per 1000 balita	1.615.000.000	4,68 per 1000 balita	1.635.000.000	4,68 per 1000 balita	
TOTAL																
						127.193.095.752		157.052.544.027		185.911.043.044		198.263.542.504		201.837.249.216		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KESEHATAN																
01.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI	100%	100%	255.356.546.948	100%	193.658.828.541	100%	190.953.219.888	100%	207.438.782.271,00	100%	209.597.582.271	100%	
1.02.02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	85,7%	85,7%	57.129.499.969	87%	76.454.289.840	-	-	-	-	-	-	-	
RSUD																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	-	-	-	-	-	89%	113.321.212.371	91%	93.525.100.000	93%	93.731.571.585	93%	
1.02.03	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSentase KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR (RSUD)	88%	88%	7.944.174.786	90%	2.449.518.585	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSentase PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	-	-	92%	4.250.000.000	94%	2.242.250.000	96%	2.250.000.000	96%	
TOTAL						320.430.221.703		272.562.636.966		308.524.432.259		303.206.132.271		305.579.153.856		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
DINAS PEKERJAAN UMUM																
1.03.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSentase PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	100%	35.705.514.980	100%	34.445.075.300	100%	34.445.075.300	100%	
1.03.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSentase PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	14,60%	14,60%	40.951.375.932	39,92%	59.790.542.360	51,91%	106.500.000.000	62,98%	113.500.000.000	75,14%	110.500.000.000	75,14%	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSentase PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2%	2%	11.983.417.779	2%	35.653.104.760	4%	35.000.000.000	4%	48.000.000.000	4%	48.000.000.000	16%	
1.03.07	4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSentase PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	100%	2.663.379.200	-	-	-	-	-	-	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.03.10 1.03.10	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)	-	-	-	-	61,41%	17.996.141.202	63,92%	17.996.141.202	66,42%	17.996.141.202	66,42%		
			PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	56,41%	56,41%	57.781.224.804	58,91%	228.866.388.103	61,41%	143.700.000.000	63,92%	147.900.000.000	66,42%	147.900.000.000	66,42%	
1.03.11	6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15%	15%	43.284.800	15%	201.520.000	15%	1.725.000.000	65%	4.100.000.000	85%	3.800.000.000	85%	
TOTAL						110.759.303.315		327.174.934.423		340.626.656.182		365.941.216.502		362.641.216.502		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG																
01.03.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100%	100%	17.202.181.786	100%	19.222.513.747	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-	-	100%	17.218.119.880	100%	18.374.924.700	100%	17.874.924.700	100%	
1.03.03	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN	3%	3%	12.189.923.272	7,33%	12.735.500.000	11,79%	38.250.000.000	16,63%	43.780.000.000	21,25%	45.100.000.000	21,25%	
1.03.04	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100%	100%	5.264.370.000	100%	11.171.360.000	100%	1.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.03.05	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI	100%	100%	4.756.300.000	100%	693.578.000	100%	4.297.900.000	100%	7.926.400.000	100%	7.754.900.000	100%	
1.03.08	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10%	10%	54.127.605.284	5%	81.819.509.161	5%	80.163.338.917	5%	108.000.000.000	5%	56.000.000.000	5%	
1.03.09	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	216.402.000	100%	400.000.000	100%	4.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	
1.03.12	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG	47,53%	47,53%	1.087.618.187	48,46%	3.023.138.193	50,26%	2.288.000.000	52,94%	10.000.000.000	56,49%	10.000.000.000	56,49%	
2.10.04	10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	-	-	60%	786.500.000	80%	865.150.000	100%	951.665.000	100%	
2.10.10	11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	-	-	60%	1.270.500.000	80%	1.397.550.000	100%	1.537.305.000	100%	
	TOTAL					94.844.400.529		129.065.599.101		149.274.358.797		208.344.024.700		157.218.794.700		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
01.04.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA BIDANG PERTANAHAN	100%	100%	4.783.371.502	100%	6.257.645.262	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	100%	9.937. 955.694	100%	9.152.470. 932	100%	8.826.033. 432	100%		
1.04.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100%	100%	98.570.99 4	100%	377.400.0 00	100%	2.015.80 0.000	100%	2.653.426. 202	100%	2.069.829. 600	100%	
1.04.03	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	11,47%	11,47%	17.874. 662.679	33,60%	910.050. 000	55,73%	21.835. 539.830	77,87%	22.801. 158.017	100%	21.282. 029.420	100%	
1.04.04	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	6,83%	6,83%	2.500.555. 677	18,52%	4.920.940. 000	45,50%	10.000. 000.000	73,02%	10.200. 000.000	100%	10.000. 000.000	100%	
1.04.05	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	60,71%	60,71%	4.007.538. 891	60,71%	2.559.200. 000	71,43%	15.747. 337.440	78,57%	16.190. 984.230	100%	15.785. 026.080	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.04.06	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN	-	-	-	40%	30.000.000	60%	500.000.000	80%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	
1.04.07	7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	40%	325.021.600	-	-	-	-	-	-	40%	
1.04.08	8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	20%	20%	99.384.000	40%	169.978.400	-	-	-	-	-	-	40%	
TOTAL						29.364.083.743		15.550.235.262		60.036.632.964		61.548.039.381		58.512.918.532		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
01.05.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)	100%	100%	8.333.221.931	100%	11.223.571.259	100%	11.676.578.708	100%	11.707.757.413	100%	11.707.757.413	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	462.427.904	100%	1.071.399.800	100%	2.722.480.000	100%	2.573.820.000	100%	2.318.820.000	100%	
TOTAL						8.795.649.835		12.294.971.059		14.399.058.708		14.281.577.413		14.026.577.413		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01.05.2001	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)	100%	100%	7.640.388.956	100%	6.779.741.862	100%	9.400.447.056	100%	9.892.865.395	100%	9.716.672.100	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	78,21%	78,21%	2.085.311.175	78,21%	4.939.955.790	100%	5.347.275.235	100%	5.478.400.000	100%	5.465.500.000	100%	
1.05.04	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	85%	85%	2.732.400.000	85%	871.338.188	-	-	-	-	-	-	85%	
TOTAL						12.458.100.131		12.591.035.840		14.747.722.291		15.371.265.395		15.182.172.100		
01.05.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAMKAR)	-	-	-	-	-	100%	8.170.447.316	100%	8.843.247.316	100%	9.435.247.316	100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	-	-	-	-	-	100%	3.133.000.000	100%	3.133.000.000	100%	3.133.000.000	100%	
TOTAL				-	-	-	-	-	-	11.303.447.316	-	11.976.247.316	-	12.568.247.316	-	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
SOSIAL																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.06.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	100%	4.584.600.968	100%	6.005.088.000	100%	8.209.727.044	100%	8.105.381.730	100%	8.009.381.730	100%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.02	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN	100%	100%	242.556.708	100%	551.164.140	100%	1.160.000.000	100%	1.490.000.000	100%	1.665.000.000	100%	
1.06.03	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/ KELURAHAN ASAL	100%	100%	4.486.000	100%	2.100.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	
1.06.04	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI LUAR PANTI SOSIAL	100%	100%	790.537.687	100%	3.523.998.700	100%	1.685.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.535.000.000	100%	
1.06.05	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	100%	126.531.488	100%	1.932.982.000	100%	15.500.000.000	100%	15.675.000.000	100%	15.735.000.000	100%	
1.06.06	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI	100%	100%	357.401.870	100%	238.280.000	100%	827.277.000	100%	1.075.000.000	100%	1.125.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.06.07	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	100%	100%	207.736.988	100%	17.458.900	100%	100.000.000	100%	175.000.000	100%	250.000.000	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2.13.04	8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE KINERJA DAN MANAJEMEN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	9.870.000	100%	93.568.000	-	-	-	-	-	-	100%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			PERSENTASE KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHNYA	-	-	-	-	-	100%	450.000.000	90%	550.000.000	100%	650.000.000		
2.13.05	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE LPM YANG LEBIH PRODUKTIF DAN MANDIRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	497.635.191	100%	1.539.632.000	-	-	-	-	-	-	100%	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			PERSENTASE LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKTIF	-	-	-	-	-	100%	1.700.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000		
TOTAL						6.821.356.900		13.904.271.740		29.642.004.044		31.720.381.730		32.419.381.730		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
TENAGA KERJA																
2.07.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	100%	100%	5.002.195.316	100%	5.243.748.142	100%	4.905.759.280	100%	8.544.495.767	100%	8.072.265.767	100%	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD	-	-	-	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.07.03	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN	10%	10%	531.437.398	10%	626.569.300	10%	560.000.000	10%	4.047.770.000	10%	4.520.000.000	10%	
2.07.04	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	25%	25%	715.266.459	30%	240.000.000	35%	790.000.000	40%	3.875.000.000	45%	3.875.000.000	45%	
2.07.05	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN	80%	80%	119.985.500	85%	503.480.400	90%	3.955.600.000	95%	1.595.000.000	95%	1.595.000.000	95%	
TOTAL						6.368.884.673		6.693.797.842		10.291.359.280		18.292.265.767		18.292.265.767		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
02.08.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100%	100%	5.611.923.851	100%	6.515.124.778	100%	7.748.267.703	100%	7.915.767.987	100%	8.084.767.987	100%	
2.08.02	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI (%)	10%	10%	271.037.500	15%	263.253.700	20%	650.000.000	25%	662.500.000	30%	662.500.000	30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN (%)	20%	20%	368.537.950	30%	185.546.000	40%	554.527.000	50%	480.000.000	60%	480.000.000	60%	
2.08.04	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	70%	-	-	80%	5.999.300	-	-	-	-	-	-	90%	
			MENURUNNYA JUMLAH USIA PERKAWINAN ANAK					90%	197.782.600	60%	316.000.000	55%	316.000.000	55%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.08.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (%)	30%	30%	16.570.900	35%	40.524.980	40%	201.000.000	45%	203.000.000	50%	203.000.000	50%	
2.08.06	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	MENINGKATNYA CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK (%)	70%	70%	49.630.000	75%	188.990.200	80%	661.000.000	85%	672.000.000	90%	672.000.000	90%	
2.08.07	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (%)	40%	40%	184.199.475	50%	467.453.580	60%	587.473.000	70%	508.000.000	80%	508.000.000	80%	
TOTAL						6.501.899.676		7.666.892.538		10.600.050.303		10.757.267.987		10.926.267.987		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PANGAN																
2.09.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN	100%	100%	11.055.801.602	100%	12.449.030.446	100%	13.265.500.000	100%	13.585.500.000	100%	14.010.500.000	100%	
2.09.03	2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8,50%	8,50%	2.591.820.369	8,96%	2.515.297.480	9,64%	3.562.688.600	10,33%	3.170.000.000	10,91%	3.060.000.000	10,91%	
2.09.04	3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA PENGEMBANGAN TANAMAN PEKARANGAN PADA DAERAH STUNTING	9,38%	9,38%	103.431.200	12,50%	204.185.860	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PENYEDIAAN PETA KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
2.09.05	4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	13,33%	13,33%	99.999.800	13,33%	134.570.300	13,33%	250.000.000	13,34%	250.000.000	13,34%	250.000.000	13,34%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH	
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERTANIAN																
3.27.02	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN	9,09%	9,09%	1.283.190.499	9,09%	3.496.525.840	9,50	3.200.000.000	9,91	3.540.000.000	10,33%	3.740.000.000	10,33%	
3.27.03	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	12,66%	12,66%	1.403.331.600	12,66%	1.712.104.900	12,66%	1.865.000.000	12,66%	2.100.000.000	12,66%	2.160.000.000	12,66%	
3.27.04	7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	3,39%	3,39%	721.873.666	2,89%	1.417.298.666	2,38 %	1.150.000.000	1,87%	1.100.000.000	1,36%	1.300.000.000	1,36%	
3.27.05	8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10,00%	10,00%	640.522.900	10%	781.159.800	10%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	
3.27.07	9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN	11,23%	11,23%	427.308.826	11,58%	1.617.765.520	11,93%	1.450.071.369	12,27%	1.377.590.333	12,61%	1.602.590.333	12,61%	
TOTAL						18.327.280.462		24.327.938.812		25.693.259.969		26.073.090.333		27.073.090.333		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
LINGKUNGAN HIDUP																
2.11.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	9.621.989.314	100%	6.674.297.782	100%	24.857.615.514	100%	25.957.673.271	100%	25.957.673.271	100%	
2.11.02	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	75%	1.792.888.500	80%	1.527.500.000	85%	1.327.500.000	85%	1.877.500.000	85%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.11.03	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	70%	70%	238.209. 640	75%	1.262.451. 930	80%	4.247. 500.000	85%	4.382.500. 000	85%	4.382.500. 000	85%	
2.11.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	70%	70%	7.934.973. 613	70%	12.117. 701.188	72%	8.500. 000.000	75%	10.000. 000.000	80%	10.000. 000.000	80%	
2.11.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	-	-	-	70%	28.701. 700	72%	271.325. 000	75%	286.745. 627	80%	286.745. 627	80%	
2.11.06	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	73%	133.380. 000	75%	1.100. 000.000	80%	1.100.000. 000	85%	1.100.000. 000	85%	
2.11.08	7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70%	70%	39.575. 012	73%	149.435. 087	75%	800.000. 000	80%	800.000. 000	85%	800.000. 000	85%	
2.11.09	8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70%	70%	39.933. 500	75%	65.479. 536	75%	250.000. 000	80%	300.000. 000	85%	300.000. 000	85%	
2.11.10	9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT	70%	70%	29.405. 405	75%	55.463. 061	75%	650.000. 000	80%	650.000. 000	85%	650.000. 000	85%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.11.11	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI	57%	57%	7.763.486.854	65,7%	14.274.600.165	65,7%	17.940.000.000	71,4%	17.940.000.000	71,4%	17.940.000.000	71,4%	
TOTAL						25.667.573.338		36.554.398.949		60.143.940.514		62.744.418.898		63.294.418.898		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2.12.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100%	100%	7.309.900.521	100%	8.518.981.015	100%	10.714.399.465	100%	10.769.571.800	100%	10.802.571.800	100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	85%	237.541.200	87%	777.000.000	88%	847.000.000	90%	847.000.000	90%	
2.12.03	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	-	-	-	85%	99.356.000,00	87%	387.000.000,00	88%	407.000.000,00	90%	387.000.000,00	90%	
2.12.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	-	-	-	69%	79.622.900,00	81%	415.000.000,00	94%	462.463.811,00	100%	439.463.811,00	100%	
2.12.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	-	-	-	67%	20000000	67%	80.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	
TOTAL						7.309.900.521		8.955.501.115		12.373.399.465		12.576.035.611		12.576.035.611		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.14.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100%	100%	3.723.806.646	100%	4.445.052.852	100%	5.554.816.787	100%	6.610.950.060	100%	6.610.950.060	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK	40%	40%	296.468.022	50%	453.720.000	60%	931.800.000	70%	970.800.000	80%	970.800.000	80%	
			PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KAMPUNG KB	50%	50%		51%		52%		53%	54%	54%			
2.14.03	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2,56%	2,56%	2.737.936.298	2,54%	2.600.479.830	2,52%	2.234.853.000	2,50%	2.274.926.677	2,48%	2.274.926.677	2,48%	
			ASFR 15-19	14,00%	14,00%		12,67%		11,30%		10,00%	9,80%	9,80%			
			UKP	22 USIA	22 USIA		22 USIA	22 USIA	22 USIA	22 USIA	22 USIA	22 USIA				
2.14.04	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA	75%	75%	829.799.912	78%	1.721.020.100	80%	1.125.741.511	82%	1.135.423.185	85%	1.135.423.185	85%	
TOTAL						7.588.010.878		9.220.272.782		9.847.211.298		10.992.099.922		10.992.099.922		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERHUBUNGAN																
1.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100%	100%	23.168.990.124	100%	27.742.939.841	100%	34.092.695.476	100%	34.142.695.476	100%	31.302.695.476	100%	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.15.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK	95%	95%	27.873.181.235	95%	46.712.912.299	95%	85.344.392.225	95%	84.260.290.225	95%	67.648.614.244	95%	
2.15.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA	-	-	-	20%	150.000.000	20%	300.000.000	20%	150.000.000	20%	8.000.000.000	20%	
2.15.05	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PRESENTASE PENYEDIAAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR PERKERETAPIAN YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	
TOTAL						51.042.171.359		74.605.852.140		119.737.087.701		119.552.985.701		107.951.309.720		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2.16.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK, DAN BIDANG PERSANDIAN	100%	100%	5.187.204.051,00	100%	6.042.820.688	100%	7.391.999.176	100%	7.391.999.176	100%	8.079.777.094	100%	
2.16.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80%	80%	2.430.160.983	85%	3.213.960.000	-	-	-	-	-	-	85%	
			PERSENTASE CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN	-	-	-	-	-	71%	4.062.000.000	86%	4.220.000.000	100%	4.072.500.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.16.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	57,14%	57,14%	3.430.660.119	63,03%	4.283.897.170	67,23%	7.418.871.348	68,91%	13.688.727.520	71,43%	17.884.876.320	71,43%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
STATISTIK																
2.20.02	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75%	75%	130.483.500	75%	52.020.000	80%	600.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.380.000	80%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERSANDIAN																
2.21.02	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75%	75%	136.376.710	75%	162.242.500	100%	500.000.000	100%	682.000.000	100%	777.000.000	100%	
TOTAL						11.314.885.363		13.754.940.358		19.972.870.524		26.991.026.696		31.882.533.414		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2.17.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100%	100%	5.597.632.508	100%	6.210.455.282	100%	9.979.073.136	100%	12.290.446.824	100%	12.146.896.992	100%	
2.17.03	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	30%	30%	96.505.440	35,5%	185.128.000	35%	770.000.000	40%	947.000.000,00	40%	947.000.000,00	40%	
																DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.17.04	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	11,13%	643.500.000	13,13%	757.850.000,00	15,13%	736.850.000,00	15,13%		
2.17.05	4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	23,55%	544.500.000	25,55%	598.950.000,00	25,55%	598.950.000,00	25,55%		
2.17.06	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	35,5%	100.000.000	38%	385.000.000	40%	423.500.000	37,50%	383.200.000	37,50%	
2.17.07	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA	10%	10%	1.601.056.940	15%	2.073.834.100	20%	2.764.200.000	25%	2.438.900.000	30%	2.988.900.000	30%	
2.17.08	7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	-	-	-	4%	130.410.000	5%	385.000.000	7%	523.500.000	10%	2.073.500.000	10%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERINDUSTRIAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH													
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16							
3.31.02	8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	-	-	-	75%	30.000.000	85%	2.571.000.000	78%	1.881.100.000,00	80%	1.931.100.000,00	80%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN													
3.31.03	9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU	-	-	-	-	-	25%	286.000.000	30%	254.100.000,00	35%	304.100.000,00	35%														
3.31.04	10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSRI DI KAB/KOTA YG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA	-	-	-	-	-	65%	286.500.000	70%	199.650.000,00	75%	199.650.000,00	75%														
TOTAL										7.295.194.888					8.729.827.382					18.614.773.136				20.314.996.824				22.310.146.992	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
PENANAMAN MODAL																													
2.18.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	100%	100%	10.371.771.622	100%	10.910.673.321	100%	13.346.704.852	100%	13.506.000.000	100%	13.506.000.000	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
2.18.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK INVESTASI	36,6%	36,6%	220.945.200	40,26%	255.000.000	44,29%	1.400.000.000	48,71%	1.355.873.959	53,59%	1.355.873.959	53,59%														
2.18.03	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI	10%	10%	21.269.800	10%	38.279.150	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	50%														

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH		
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.18.04	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	80%	80%	53.435.218	85%	159.761.100	85%	1.500.000.000	90%	1.550.000.000	90%	1.550.000.000	90%			
2.18.05	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN	100%	100%	282.407.598	100%	499.968.000	100%	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%			
2.18.06	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI	-	-	-	100%	9.681.400	100%	289.294.324	100%	285.873.135	100%	285.873.135	100%			
TOTAL										10.949.829.438		11.873.362.971		19.035.999.176		19.347.747.094		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																		
2.19.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA	70%	70%	5.420.038.231	75%	6.033.010.537	80%	8.912.780.845	85%	9.625.803.313	90%	10.492.270.634	90%			
2.19.02	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	70%	70%	914.865.791	75%	1.903.308.010	80%	1.550.000.000	85%	1.710.000.000	90%	1.850.000.000	90%			
2.19.03	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIKUTI	70%	70%	1.586.502.298	75%	6.688.993.819	80%	2.641.896.000	85%	2.853.247.680	90%	2.718.122.625	90%			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
PARIWISATA																		
3.26.02	4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN	70%	70%	6.228.112.476	75%	8.173.438.700	80%	11.211.174.050	85%	10.891.600.000	90%	10.941.600.000	90%			

**DINAS
KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA, DAN
PARIWISATA**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			MANCANEGERA													
3.26.03	5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	70%	70%	40.000.000	75%	2.050.424.873	80%	1.263.211.200	85%	1.341.099.136	90%	1.341.099.136	90%	
3.26.04	6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	45%	1.749.600.000	50%	1.749.600.000	55%	1.749.600.000	55%	
3.26.05	7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70%	70%	270.628.550	75%	554.751.370	80%	1.081.512.000	85%	1.144.864.000	90%	927.913.600	90%	
TOTAL						14.460.147.346		25.403.927.309		28.410.174.095		29.316.214.129		30.020.605.995		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PERPUSTAKAAN																
2.23.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN	100%	100%	4.321.809.250	100%	5.102.406.960	100%	7.630.679.588	100%	6.694.075.547	100%	6.694.075.547	100%	
2.23.02	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	20% (10 PERPUSTAKAAN)	381.586.540	40% (10 PERPUSTAKAAN)	498.036.800	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TELAH DIBINA SESUAI NSP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	-	-	-	-	-	60%	1.336.600.000	80%	1.336.600.000	100%	1.336.600.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.23.03	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI/ SIALIHMEDIAKAN (DIGITALISASI) / TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	88,06%	88,06%	17.398.124	40%	15.000.000	60%	200.000.000	80%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	
KEARSIPAN																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.24.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	65,2%	65,2%	180.424.402	38%	230.013.000	-	-	-	-	-	-	-	
			PERSENTASE PD YANG MENERAPKAN PENGELOLAHAN ARSIP SESUAI KAIDAH KEARSIPAN	-	-	-	-	-	58%	973.000.000	77%	830.000.000	100%	805.000.000	100%	
2.24.03	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI KOTA DUMAI	-	-	-	-	-	60%	347.720.000	80%	493.198.000	100%	518.198.000	100%	
TOTAL						4.901.218.316		5.845.456.760		10.487.999.588		9.673.873.547		9.673.873.547		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3.25.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	100%	100%	4.927.587.824	100%	6.024.608.581	100%	7.850.000.000	100%	8.150.000.000	100%	8.400.000.000	100%	
3.25.03	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN KELOMPOK NELAYAN TERBINA	69,23%	69,23%	1.090.129.500	76,92%	213.726.500	84,62%	2.070.000.000	92,31%	2.400.000.000	100%	2.700.000.000	100%	
3.25.04	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA	70%	70%	1.343.828.176	77,5%	1.743.552.298	85%	4.150.400.000	92,5%	4.650.000.000	100%	5.000.000.000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022										TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.05	4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN	-	-	-	-	-	100%	180.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	
3.25.06	5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI	100%	100%	74.994.650	100%	74.999.300	100%	1.580.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.900.000.000	100%	
TOTAL						7.436.540.150		8.056.886.679		15.830.400.000		17.110.000.000		18.250.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
PERDAGANGAN																
3.30.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	53,25%	53,25%	5.481.289.669	56,63%	6.350.603.202	91,31%	9.709.869.751	100%	10.982.615.751	100%	10.982.615.751	100%	
3.30.02	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA	2,12%	2,12%	21.204.764	0,17%	20.000.000	5%	55.000.000	5%	60.000.000	5%	60.000.000	5%	
3.30.03	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN	100%	100%	4.256.922.710	60,67%	3.717.504.543	73,31%	1.428.000.000	100%	1.965.000.000	100%	1.965.000.000	100%	
3.30.04	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN	9,33%	9,33%	25.669.000	26,04%	75.000.000	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	
3.30.05	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE VOLUME EKSPOR	0,52%	0,52%	42.388.580	0	0	1,5%	158.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	150.000.000	1,5%	
3.30.06	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT UTTP YANG DITERA/TERA ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/PENYULUHAN	1,91%	1,91%	87.524.000	1,02%	165.000.000	8,73%	432.099.961	16,67%	860.000.000	16,67%	860.000.000	16,67%	

DINAS PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3.30.07	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	-	14%	181.683.631	14%	193.194.570	14%	193.194.570	14%		
TOTAL						9.914.998.723		10.328.107.745		12.254.653.343		14.510.810.321		14.510.810.321		
UNSUR PENDUKUNG																
SEKRETARIAT DAERAH																
04.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH	100%	100%	46.264.134.022	100%	62.216.151.818	100%	55.436.600.000	100%	60.545.277.449	100%	59.803.950.410	100%	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100%	100%	14.107.731.834	100%	30.323.132.240	100%	68.005.000.000	100%	75.539.446.000	100%	82.419.446.000	100%	
4.01.03	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100%	3.159.326.364	100%	6.035.882.866	100%	3.955.000.000	100%	4.000.000.000	100%	5.440.000.000	100%	
TOTAL						63.531.192.220		98.575.166.924		127.396.600.000		140.084.723.449		147.663.396.410		
UNSUR PENDUKUNG																
SEKRETARIAT DPRD																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	100%	100%	33.752.364.530	100%	46.916.494.813	100%	72.713.820.584	100%	85.830.244.963	100%	77.118.274.414	100%	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	95%	95%	8.932.354.057	95%	13.648.478.765	95%	29.258.601.500	95%	26.360.883.800	95%	29.169.280.820	95%	
TOTAL						42.684.718.587		60.564.973.578		101.972.422.084		112.191.128.763		106.287.555.234		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
UNSUR PENUNJANG																
PERENCANAAN																
05.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN	100%	100%	7.261.970.974	100%	9.534.494.484	100%	12.130.000.000	100%	12.130.000.000	100%	12.130.000.000	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	
			PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	100%	665.074.553	100%	1.311.363.300	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	
5.01.03	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%	
			PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	100%	100%	1.332.068.192	100%	1.781.192.210	100%	3.285.000.000	100%	3.285.000.000	100%	3.285.000.000	100%	
05.05.02	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	20%	20%	134.286.700	25%	289.800.263	-	-	-	-	-	-	25%	
TOTAL						9.393.400.419		12.916.850.257		17.015.000.000		17.015.000.000		17.015.000.000		
UNSUR PENUNJANG																
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
05.05.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	100%	5.510.00 0.000	100%	5.647.750. 000	100%	5.788.943. 750	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	-	-	-	-	30%	2.040.00 0.000	30%	2.340.000. 000	30%	2.340.000. 000	30%		
TOTAL						0	0		7.550. 000.000		7.987.750 .000		8.128.943 .750			
UNSUR PENUNJANG																
KEUANGAN																
5.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEUANGAN (BPKAD)	100%	100%	31.843. 738.770	100%	36.533. 647.169	100%	36.936. 030.134	100%	38.027. 147.845	100%	38.027. 147.845	100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	100%	9.499.481. 113	100%	13.914. 775.126	100%	50.149. 966.984	100%	50.149. 966.984	100%	25.149. 966.984	100%	
5.02.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	100%	100%	1.777.750. 306	100%	2.470.997. 400	100%	13.440. 000.000	100%	13.440. 000.000	100%	13.440. 000.000	100%	
TOTAL						43.120. 970.189	52.919. 419.695		100.525. 997.118		101.617. 114.829		76.617. 114.829			
5.02.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA (BAPENDA)	100%	100%	19.515. 480.269	100%	31.916. 278.276	100%	33.568. 132.866	100%	34.933. 829.109	100%	36.580. 437.284	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA	100%	100%	4.989.951. 918	100%	7.132.856. 912	100%	6.708.04 4.688	100%	7.021.500. 823	100%	7.396.097. 653	100%	
TOTAL						24.505. 432.187	39.049. 135.188		40.276. 177.554		41.955. 329.932		43.976. 534.937			
UNSUR PENUNJANG																
KEPEGAWAIAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5.03.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100%	100%	5.335.920. 771	100%	6.427.109. 297	100%	7.087. 717.685	100%	7.015.217. 685	100%	6.987.717. 685	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK	97,27%	97,27%	1.553.024. 902	94,48%	2.006.492. 743	99,55%	2.843. 509.120	99,65%	2.843.509. 120	99,75%	2.843.509. 120	99,75%	
UNSUR PENUNJANG																
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5.04.02	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	3,70%	3,70%	761.321. 500	5%	1.637.265. 100	6%	4.171. 472.898	7%	4.474.929. 373	8%	4.502.429. 373	8%	
TOTAL							7.650.267 .173		10.070. 867.140		14.102. 699.703		14.333. 656.178		14.333. 656.178	
UNSUR PENGAWAS																
INSPEKTORAT																
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWAS	100%	100%	10.959. 631.046	100%	13.011. 311.248	100%	18.834. 141.260	100%	19.340. 593.038	100%	19.932. 241.299	100%	INSPEKTORAT
6.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	100%	1.280.996. 500	100%	1.983.183. 100	100%	4.477. 859.582	100%	4.525.000. 000	100%	4.525.000. 000	100%	
6.01.03	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	100%	626.660. 200	100%	1.028.782. 600	100%	2.700. 000.000	100%	2.800.000. 000	100%	2.800.000. 000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TOTAL						12.867. 287.746		16.023. 276.948		26.012. 000.842		26.665. 593.038		27.257. 241.299		
UNSUR KEWILAYAHAN																
KECAMATAN																
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	7.953.871. 793	100%	9.066.399. 000	100%	13.167. 707.976	100%	13.004. 642.800	100%	13.787. 338.080	100%	KECAMATAN DUMAI BARAT
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	56.692. 492	100%	217.902. 500	100%	497.951. 176	100%	640.000. 000	100%	560.000. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	755.644. 388	100%	1.118.997. 800	100%	4.720. 000.000	100%	4.840.000. 000	100%	4.150.409. 014	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	81.503. 000	100%	101.000. 000	100%	500.000. 000	100%	612.894. 294	100%	600.000. 000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT	100%	100%	38.830. 900	100%	20.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	
TOTAL						8.886.542 .573		10.524. 299.300		19.035. 659.152		19.247. 537.094		19.247. 747.094		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	9.274.709. 141	100%	11.121. 518.960	100%	13.720. 000.000	100%	13.720. 000.000	100%	13.720. 000.000	100%	KECAMATAN DUMAI TIMUR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	14.540. 200	100%	143.512. 700	100%	610.000. 000	100%	610.000. 000	100%	610.000. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	824.657. 525	100%	1.398.119. 300	100%	6.040. 000.000	100%	6.040.000. 000	100%	6.040.000. 000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	96.350. 000	100%	100.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR	100%	100%	18.340. 660	-	-	100%	165.000. 000	100%	100.000. 000	100%	100.000. 000	100%	
TOTAL						10.228. 597.526		12.763. 150.960		20.685. 000.000		20.620. 000.000		20.620. 000.000		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	9.903.755. 462	100%	12.158.98 6.327	100%	16.046.1 99.012	100%	16.086.45 0.000	100%	16.242.95 0.000	100%	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	24.390. 407	100%	319.979. 500	100%	525.000. 000	100%	575.000. 000	100%	595.000. 000	100%	KECAMATAN BUKIT KAPUR

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	1.483.228. 889	100%	2.088.349. 693	100%	7.876. 000.000	100%	7.911.000. 000	100%	7.917.000. 000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	99.997. 000	100%	100.000. 000	100%	170.000. 000	100%	180.000. 000	100%	180.000. 000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	-	-	-	100%	90.000. 000	100%	217.000. 000	100%	249.000. 000	100%	261.000. 000	100%	
TOTAL						11.511. 371.758		14.757. 315.520		24.834. 199.012		25.001. 450.000		25.195. 950.000		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	9.874.675. 806	100%	10.573. 742.612	100%	12.910. 999.176	100%	13.222. 747.094	100%	13.222. 747.094	100%	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	66.139. 310	100%	232.182. 688	100%	350.000. 000	100%	350.000. 000	100%	350.000. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	807.729. 780	100%	1.381.570. 200	100%	5.500. 000.000	100%	5.500.000. 000	100%	5.500.000. 000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	96.609. 900	100%	103.000. 000	100%	125.000. 000	100%	125.000. 000	100%	125.000. .000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA	100%	100%	99.617. 204	100%	35.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	150.000. 000	100%	
TOTAL						10.944.77 2.000		12.325.49 5.500		19.035.9 99.176		19.347.74 7.094		19.347.74 7.094		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	9.398.107. 707	100%	10.366. 679.696	100%	13.022. 603.366	100%	13.334. 351.284	100%	13.334. 351.284	100%	KECAMATAN DUMAI SELATAN
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	68.183. 700	100%	209.330. 000	100%	433.720. 000	100%	433.720. 000	100%	433.720. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	603.246. 450	100%	1.395.835. 117	100%	5.271. 500.000	100%	5.271.500. 000	100%	5.271.500. 000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	98.088. 900	100%	113.549. 000	100%	100.000. 000	100%	100.000.0 00	100%	100.000. 000	100%	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN	100%	100%	10.400. 000	100%	42.560. 000	100%	208.175. 810	100%	208.175. 810	100%	208.175. 810	100%	
TOTAL						10.178. 026.757		12.127. 953.813		19.035. 999.176		19.347. 747.094		19.347. 747.094		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	6.620.017. 765	100%	7.657.524. 658	100%	11.701. 994.176	100%	11.742. 742.094	100%	11.742. 742.094	100%	
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	42.674. 500	100%	182.674. 480	100%	580.000. 000	100%	595.000. 000	100%	595.000. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	806.882. 200	100%	1.106.979. 000	100%	6.300. 000.000	100%	6.600.000. 000	100%	6.600.000. 000	100%	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	100%	100%	104.970. 600	100%	104.370. 800	100%	120.000. 000	100%	130.000. 000	100%	140.000. 000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	-	-	-	100%	2.500.000	100%	354.000. 000	100%	350.000. 000	100%	350.000. 000	100%	
TOTAL						7.574.545 .065		9.054.048 .938		19.055. 994.176		19.417. 742.094		19.427. 742.094		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	9.060.232. 027	100%	10.965. 364.930	100%	11.713. 999.176	100%	12.084. 896.000	100%	12.082. 747.094	100%	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	35.427. 900	100%	370.107. 770	100%	532.000. 000	100%	482.000. 000	100%	535.000. 000	100%	
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	1.282.199. 100	100%	1.606.786. 140	100%	6.320. 000.000	100%	6.381.350. 376	100%	6.380.000. 000	100%	
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	100%	100%	93.164. 800	100%	100.000. 000	100%	270.000. 000	100%	265.000. 000	100%	265.000. 000	100%	
7.01.05	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	-	-	-	100%	40.000. 000	100%	200.000. 000	100%	134.500. 718	100%	85.000. 000	100%	
	TOTAL					10.471.02 3.827		13.082.25 8.840		19.035.9 99.176		19.347.74 7.094		19.347.74 7.094		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
08.01.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100%	100%	3.975.515. 107	100%	4.753.026. 162	100%	4.743. 749.808	100%	5.467.768. 360	100%	5.467.768. 360	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET AKHIR	PERANGKT DAERAH
					TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8.01.02	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	119.590. 000	100%	199.960. 600	100%	1.730. 000.000	100%	1.380.000. 000	100%	1.380.000. 000	100%	
8.01.03	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	2.352.277. 464	100%	20.744. 304.260	100%	34.236. 250.192	100%	3.337.802. 528	100%	3.337.802. 528	100%	
8.01.04	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	41.336. 000	100%	1.854.490. 000	100%	3.825. 000.000	100%	726.760. 272	100%	726.760. 272	100%	
8.01.05	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100%	100%	444.857. 000	100%	549.490. 000	100%	510.000. 000	100%	770.000. 000	100%	770.000. 000	100%	
8.01.06	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	790.574. 225	100%	897.913. 000	100%	1.455. 000.000	100%	1.390.000. 000	100%	1.390.000. 000	100%	
TOTAL						7.724.149 .796		28.999. 184.022		46.500. 000.000		13.072. 331.160		13.072. 331.160		



**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan lampiran I permendagri nomor 86 tahun 2017 serta Permendagri nomor 18 Tahun 2020.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan indikator kinerja utama Kota Dumai tahun 2022-2026 disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2022-2026

Indikator	Satuan	TARGET					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,36	4,19-4,90	4,36-5,07	4,72-5,43	5,08-6,01	5,08-6,01
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) ADHK	Rp. Triliun	27,73	28,81-29,08	30,25-30,45	31,78-32,00	33,50-33,79	33,50-33,79
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) ADHB	Rp. Triliun	45,06	49,07-51,45	52,42-53,37	56,28-57,53	60,16-60,98	60,16-60,98
PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	83,55	87,61-88,42	90,83-91,45	94,30-94,94	98,24-99,11	98,24-99,11
PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	135,78	149,20-156,42	157,42-160,27	166,98-170,68	176,34-178,84	176,34-178,84
Indeks Gini	Poin	0,32	0,35-0,34	0,314-0,340	0,340-0,32	0,33-0,310	0,33-0,310
Tingkat Kemiskinan	%	3,20	3,49 – 3,20	2,93-3,07	2,93-3,06	2,93-3,05	2,93-3,05
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,38	5,38-5,92	4,89-5,27	5,20-4,70	5,10-4,60	5,10-4,60
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,63	-	73,66	75,12	76,40	76,40
Skor Pola Pangan Harapan (Pph)	Skor	82,9	84,58	-	-	-	-
Ketersediaan Pangan Utama	%	36,03	37,7	-	-	-	-

Indikator	Satuan	TARGET					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,26	75,50-75,73	75,72-75,95	75,93-76,16	76,15-76,42	76,15-76,42
Indeks Kesehatan	Indeks	0,788	0,789-0,790	0,790-0,791	0,790-0,791	0,791-0,792	0,791-0,792
Indeks Pendidikan	Indeks	0,708	0,711-0,714	0,714-0,717	0,717-0,720	0,720-0,724	0,720-0,724
Indeks Pengeluaran	Indeks	0,763	0,767-0,771	0,769-0,773	0,772-0,776	0,775-0,779	0,775-0,779
Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu	%	50	50	-	-	-	-
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	%	-	-	92,35	94,90	97,45	97,45
Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	%	50,21	56,90	60,23	66,38	70,49	70,49
Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	46,09	56,54	64,72	74,29	83,58	83,58
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	47,53	48,46	50,26	52,94	56,49	56,49
Cakupan Pelayanan Persampahan	%	57	65,7	65,7	71,4	71,4	71,4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,34	61,55	61,76	62,1	62,1	62,1
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	GgCO2-e	7195,43	-	-	-	-	-
Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	75	-	-	-	-	-
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	B	B	B	B
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,03	85,44	85,65	85,87	86,1	86,1
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B
Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2	2	3	3	3	3
Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,85	3	3,1	3,3	3,3
Indeks Inovasi Daerah	Skor	41,03	42,38	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah

yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Aspek daya saing meliputi: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Infrastruktur Wilayah, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia.

8.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun awal 2022, kecenderungan perkembangan di masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Guna dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terukur, maka target kinerja yang ditetapkan diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif, kecuali untuk aspek-aspek yang ternyata sangat sulit dikuantifikasikan seperti agama dan budaya. Sedangkan indikator kinerja yang digunakan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dijabarkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan kondisi sosial ekonomi dan pembangunan Kota Dumai. Berdasarkan pertimbangan tersebut. Lebih lanjut Tabel 8.2 memberikan rincian penetapan semua indikator dan target kinerja pembangunan Kota Dumai untuk periode 2022-2026.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Dumai Tahun 2022-2026

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	6,36	6,36	4,19-4,90	4,36-5,07	4,72-5,43	5,08-6,01
1.2	TINGKAT KEMISKINAN	%	3,2	3,2	3,49-3,200	2,93-3,07	2,93-3,06	2,93-3,05
1.3	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	27,73	27,73	28,81-29,08	30,25-30,45	31,78-32,00	33,50-33,79
1.4	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	45,06	45,06	49,07-51,45	52,42-53,37	56,28-57,53	60,16-60,98
1.5	PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	83,55	83,55	87,61-88,42	90,83-91,45	94,30-94,94	98,24-99,11
1.6	PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	135,78	135,78	149,20-156,42	157,42-160,27	166,98-170,68	176,34-178,84
1.7	INDEKS GINI	POIN	0,32	0,32	0,35-0,34	0,314-0,340	0,340-0,32	0,33-0,310
1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	5,38	5,38	5,38-5,92	4,89-5,27	5,20-4,70	5,10-4,60
1.9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	INDEKS	75,26	75,26	75,50-75,73	75,72-75,95	75,93-76,16	76,15-76,42
1.10	INDEKS PENGELUARAN	INDEKS	0,763	0,763	0,767-0,771	0,769-0,773	0,772-0,776	0,775-0,779
1.11	PENGELUARAN PERKAPITA	(RIBU/TAHUN/KAPITA)	12.249	12.249	12.388,21-12.552,05	12.497,38-12.662,65	12.607,50-12.774,24	12.718,60-12.886,81
KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	PENDIDIKAN							
1.1.	INDEKS PENDIDIKAN	%	0,708	0,708	0,711-0,714	0,714-0,717	0,717-0,720	0,720-0,724
1.1.1.	HARAPAN LAMA SEKOLAH	TAHUN	13,32	13,32	13,39-13,43	13,45-13,50	13,52-13,56	13,59-13,68
	RATA - RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	10,15	10,15	10,18-10,21	10,21-10,24	10,25-10,28	10,28-10,31
2	KESEHATAN							
2.1.	INDEKS KESEHATAN	INDEKS	0,788	0,788	0,789-0,790	0,790-0,791	0,790-0,791	0,791-0,792
2.1.1.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,25	71,25	71,29 – 71,33	71,34-71,37	71,38-71,42	71,42-71,46
3	TENAGA KERJA							
3.1.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	5,38	5,38	5,38-5,92	4,89-5,27	5,20-4,70	5,10-4,60
SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA								
1	KEBUDAYAAN							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
1,1.	PERSENTASE PENERAPAN 4 JENIS BUDAYA MELAYU	%	50	50	50	-	-	-
1,2.	PERSENTASE PENEMPATAN KEBUDAYAAN MELAYU PADA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK	%	N/A	80	-	-	-	-
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
1.	PENDIDIKAN							
1.1.	HARAPAN LAMA SEKOLAH	TAHUN	13,32	13,32	13,39-13,43	13,45-13,50	13,52-13,56	13,59-13,68
	RATA - RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	10,15	10,15	10,18-10,21	10,21-10,24	10,25-10,28	10,28-10,31
1.1.1.	ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD	%	32,27	32,27	-	-	-	-
1.1.2.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A/SDLB	%	106,43	106,43	100	100	100	100
1.1.3.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/PAKET A/SDLB	%	96,85	96,85	100	100	100	100
1.1.4.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	%	106,94	106,94	100	100	100	100
1.1.5.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	%	83,74	83,74	100	100	100	100
1.1.6.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 5-6 TAHUN (PAUD)	%	54,48	54,48	100	100	100	100
1.1.7.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	%	74,12	74,12	100	100	100	100
1.1.8.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN (PENDIDIKAN DASAR)	%	98,86	98,86	100	100	100	100
1.1.9.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 13 - 15TAHUN (PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)	%	93,97	93,97	100	100	100	100
1.1.10.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 7-18 TAHUN (PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN)	%	13,34	13,34	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.11.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV	%	84,57	84,57	-	-	-	-
1.1.12.	PERSENTASE GURU PAUD BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	56,21	56,21	58,32	60,12	62,23	64,39
1.1.13.	PERSENTASE GURU SD BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	97,96	97,96	97,66	97,55	98,55	98,55
1.1.14.	PERSENTASE GURU SMP BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	99,55	99,55	92,55	92,55	93,55	93,55
1.1.15.	PROPORSI PTK PAUD BERSERTIFIKAT	%	28,1	28,1	30,12	32,12	34,12	36,12
1.1.16.	PROPORSI PTK SD BERSERTIFIKAT	%	82,55	82,55	85,55	88,55	91,55	94,55
1.1.17.	PROPORSI PTK SMP BERSERTIFIKAT	%	85,75	85,75	88,75	91,55	94,75	97,75
1.1.18.	GURU YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI PENDIDIK	%	38,79	38,79	-	-	-	-
1.1.19.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SD/MI	PER 10.000 SISWA	23,17	23,17	27,5	28	28,34	28,86
1.1.20.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SMP/MTS	PER 10.000 SISWA	29,94	29,94	30,32	30,8	31,25	31,4
1.1.21.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI SIKAP	%	100	100	-	-	-	-
1.1.22.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI PENGETAHUAN	%	100	100	-	-	-	-
1.1.23.	LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI PADA DIMENSI KETRAMPILAN	%	100	100	-	-	-	-
1.1.24.	PERSENTASE SATUAN PAUD DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	%	40,7	40,7	41,59	43,36	45,13	46,9
1.1.25.	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	-	-	-	61,57	64,25	67,57
1.1.26.	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	-	-	-	44,23	46,95	49,08
1.1.27.	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	-	-	-	73,32	76,65	79,67
1.1.28.	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	-	-	-	71,98	75,39	79,39

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.29.	IKLIM KEAMANAN SD	SKOR	-	-	-	75,34	77,54	79,95
1.1.30.	IKLIM KEBHINEKAAN SD	SKOR	-	-	-	80,43	85,76	90,88
1.1.31.	IKLIM INKLUSIVITAS SD	SKOR	-	-	-	64,72	67,84	70,98
1.1.32.	IKLIM KEAMANAN SMP	SKOR	-	-	-	75,28	78,36	81,05
1.1.33.	IKLIM KEBHINEKAAN SMP	SKOR	-	-	-	76,21	80,37	84,09
1.1.34.	IKLIM INKLUSIVITAS SMP	SKOR	-	-	-	62,52	64,97	69,04
2	KESEHATAN							
2.1.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,25	71,25	71,29 – 71,33	71,34-71,37	71,38-71,42	71,42-71,46
2.1.1.	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	17,5	17,5	17	8	8	7.8
2.1.2.	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	24,5	24,5	24	11	10	10
2.1.3.	ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 100.000 KH	101,5	101,5	101	100,5	100	100
2.1.4.	UMUR HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,10	71,10	71,15	72	72	72
2.1.5.	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK	PER 1.000 PENDUDUK	0,9	0,9	0,8	0,1	0,1	0,1
2.1.6.	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN PENDERITA TB PARU BTA +	%	88	88	88	88	88	88
2.1.7.	PREVALENSI PENDERITA HIV TERHADAP PENDUDUK BERESIKO	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2.1.8.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK	PER 100.000 PENDUDUK	55	55	55	54	54	54
2.1.9.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUK	%	1	1	1	1	1	1
2.1.10.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI KURANG	%	3	3	3	2	2	2
2.2	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA DUMAI	%	92,2	92,2	97	100	100	100
2.3	PERSENTASE TERLAKSANANYA MANAJEMEN INTERNAL DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
2.4.	GDR (GROSS DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN UMUM UNTUK SETIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	0/00	42	42	41	40	39	39
2.4.1.	BOR, PERSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR DI RSUD KOTA DUMAI	%	71%	71%	72%	73%	73%	73,5%
2.4.2.	AVLOS, LAMANYA SEORANG PASIEN DIRAWAT RSUD KOTA DUMAI	HARI	4	4	4,2	4,4	4,5	5
2.4.3.	TOI, RATA-RATA DIMANA TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI TELAH DIISI KE SAAT TERISI DI RSUD KOTA DUMAI	HARI	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5
2.4.4.	BTO, FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR	KALI	45	45	44	43	42	41
2.4.5.	NDR (NETT DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN 48 JAM SETELAH DIRAWAT UNTUK TIAP-TIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	0/00	23	23	22	21	21	20
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1.	PEKERJAAN UMUM							
3.1	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM (SEKTOR BINA MARGA, SEKTOR SDA, DAN SEKTOR BINA KONSTRUKSI))	%	23,67	23,67	32,94	42,77	63,97	75,52
3.1.1	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN	%	56,41	56,41	58,91	61,41	63,92	66,42
3.1.2	TIDAK TERJADI GENANGAN >2 KALI DALAM SETAHUN	%	14,60	14,60	-	-	-	-
	PERSENTASE LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	%	-	-	39,92	51,91	62,98	75,14
3.1.3	TINGKAT PENGENDALIAN JASA KONSTRUKSI DAERAH	%	0	0	0	15	65	85
3.2	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM (SEKTOR CIPTA KARYA)	%	43,47	68,47	70,44	71,9	73,22	74,31

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
3.2.1	PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	-	100	100	100	100	100
3.2.2	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN	%	38,89	38,89	40,74	42,59	45,37	47,22
3.2.3	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	%	100	100	100	100	100	100
3.2.4	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA STRATEGIS KOTA YANG DISELENGGARAKAN	%	35	35	41	45	47,5	50
3.2.5.	PERSENTASE TERBANGUNNYA TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS KOTA DUMAI	%	93	93	-	-	-	-
3.3	PENATAAN RUANG							
3.3	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG	%	47,53	47,53	48,46	50,26	52,94	56,49
3.3.1	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN PERUNTUKANNYA	%	47,53	47,53	48,46	50,26	52,94	56,49
4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN							
4.1	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	40,73	40,73	64,77	75,72	85,48	100
4.1.1	PERSENTASE KOTA DUMAI TANPA KUMUH	%	11,47	11,47	33,6	55,73	77,87	100
4.1.2	PERSENTASE RUMAH YANG AMAN PASCA BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	%	100	100	100	-	-	-
	PERSENTASE PENANGANAN RUMAH KHUSUS RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KAB/KOTA		-	-	-	100	100	100
4.1.3	CAKUPAN LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	%	10,71	10,71	60,71	71,43	78,57	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	PERSENTASE 4 JENIS BENCANA DAERAH YANG DITANGANI	%	75	75	-	-	-	-
5.1.1	PERSENTASE PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA	%	78,21	78,21	78,21	-	-	-
5.1.2	RESPONSE TIME RATE KEJADIAN BENCANA	%	100	100	100	-	-	-
5.1.3	CAKUPAN WILAYAH PENANGANAN BENCANA	%	56,42	56,42	56,42	-	-	-
5.2	INDEKS KETAHANAN DAERAH	INDEKS	-	-	-	0,52	0,62	0,8
5.2.1	CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGANAN BENCANA	%	-	-	-	100	100	100
5.2.2	PERSENTASE PENINGKATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA	%	-	-	-	30,56	61,11	100
5.2	PERSENTASE PENANGANAN KEJADIAN KEBAKARAN DALAM WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)	%	-	-	-	100	100	100
5.2.1	PERSENTASE WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)	%	-	-	-	57,14	71,43	85,71
5.2.2	PERSENTASE RESPON TIME RATE KEJADIAN KEBAKARAN DALAM WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK) TIDAK LEBIH 15 MENIT	%	-	-	-	100	100	100
5.3	PERSENTASE PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	%	100	100	100	100	100	100
5.4	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)	%	100	100	100	100	100	100
5.5	PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
6	SOSIAL							
6.1	PERSENTASE PPKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
6.1.1.	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI	%	100	100	100	100	100	100
6.2.	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	100	100	100	100
6.2.1.	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA	%	100	100	100	100	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA							
1.1.	PERTUMBUHAN BESARAN PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	10	10	10	-	-	-
	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN		10	-	-	10	10	10
1.2.	PENINGKATAN PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	%	10	10	10	10	10	10
1.3.	PERTUMBUHAN BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	%	15	15	-	-	-	-
	PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG MENDAPATKAN PELATIHAN		-	-	10	10	10	10
1.4.	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	10	10	-	-	-	-
1.5.	MENURUNNYA ANGKA SENGKETA PENGUSAHA DG PEKERJA PER TAHUN	%	30	30	-	-	-	-

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	PERSENTASE KASUS KETENAGAKERJAAN YANG DAPAT DISELESAIKAN		-	-	20	20	20	20
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1.	SKOR PENCAPAIAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)	SKOR	3862	3862	810	820	830	840
2.1.1.	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR	%	95	95	95	95	95	95
2.1.2.	SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR	700	700	750	800	850	900
3	PANGAN							
3.1.	POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	82,90	82,90	84,58	-	-	-
	INDEKS KETAHANAN PANGAN	INDEKS	72,63	72,63	-	73,66	75,12	76,40
3.2.	KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA	%	36,03	36,03	37,7	-	-	-
3.3.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	%	22,5	22,5	25	27,5	30	32,5
3.3.1.	KETERSEDIAAN PROTEIN / ANGKA KECUKUPAN PROTEIN	GRAM/KAPITA/HARI	59,7	59,7	52,75	-	-	-
	ANGKA KECUKUPAN PROTEIN		-	-	-	53	53,25	53,5
4	PERTANAHAN							
4.1	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PER TAHUN	%	20	20	40	60	80	100
4.1.1	PENYELESAIAN KASUS TANAH PEMRINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT	%	20	20	40	60	80	100
5	LINGKUNGAN HIDUP							
5.1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	61,34	61,34	61,55	61,76	62,1	62,1
5.1.1	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	53,2	53,2	53,3	53,4	53,5	53,6
5.1.2	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	70	70	71	70,5	71,1	71,1
5.1.3	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	61	61	61	61,5	62	62

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.4	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	GGCO2-E	7.195,43	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53
5.1.5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP IZIN LINGKUNGAN IZIN PPLH dan PUU LH d YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	0	0	0	70	70	70
5.2	CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	%	57	57				
	PERSENTASE PELAYANAN PERSAMPAHAN YANG TERTANGANI	%			65,7	65,7	71,4	71,4
5.2.1	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	%	57	57	65,7	65,7	71,4	71,4
6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1.	JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.1.1.	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERINTEGRASI	%	40,70%	40,70%	63%	75%	88%	100%
6.2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INDEKS	92,2	92,2	88	90	91	92
6.2.1.	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	86%	86%	80%	100%	100%	100%
7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1.	NILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (EPDESSEL)	NILAI	> 201-350	> 201-350	> 201-350	> 201-350	> 351	> 351
7.1.1.	PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL (KURANG BERKEMBANG)	%	47	47	42	-	-	-

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	PERSENTASE KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG		-	-	-	80	90	100
7.1.2.	PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF	%	100	100	100	-	-	-
	PERSENTASE PKK AKTIF		-	-	-	100	100	100
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
8.1.	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	%	2,12	2,12	2.08	2.04	2.01	1.98
8.1.1.	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)(%)	%	22,36	22,36	19,93	17,94	16,26	15,3
8.1.2.	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR) (%)	%	45,2	45,2	46,6	47,7	48,8	49,9
8.1.3.	IBANGGA	%	-	-	-	59	60	61
9	PERHUBUNGAN							
9.1	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	%	51,5	51,5	58	68,5	76,5	84,5
9.1.1	PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI	%	-	-	56	67	78	89
9.1.2	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM	%	60	60	-	-	-	-
	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG		-	-	61	68	75	82
9.1.3	PRESENTASE PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN	%	55	55	-	-	-	-
	PRESENTASE PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN		48	48	-	-	-	-
	PERSENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		-	-	60	70	75	80
9.1.4	RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN (TUNGGU DATA)	UNIT/KM	67	67	-	-	-	-
		KM/UNIT	-	-	1198,23: 90.081	1198,23: 94.117	1198,23: 98.424	1198,23: 102.873

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
10.1	INDEKS LAYANAN SPBE	INDEKS	2,83	2,83	2,85	3	3,1	3,3
10.1.1	PERSENTASE AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH	%	57,14	57,14	63,03	67,23	71,43	71,43
10.1.2	PERSENTASE INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA	%	80	80	85	-	-	-
	CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN (KIM)	%	-	-	-	71	86	100
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
11.1.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	68,53	68,53	70,58	71	72	73
11.1.1.	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	%	35	35	45	55	56	58
12	PENANAMAN MODAL							
12.1	LAJU PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	%	3,54	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04
12.1.1.	INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	PERUSAHAAN	1	1	1	-	-	-
	JUMLAH INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)		-	-	-	1	1	1
12.1.2.	NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	RUPIAH	8.505.000.000.000	8.505.000.000.000	9.450.000.000.000	-	-	-
	JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)		-	-	-	10.500.000.000.000	11.550.000.000.000	12.705.000.000.000
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
13.1	TINGKAT CAPAIAN PRESTASI OLAHRAGA	PRESTASI	2	2	3	4	4	4
13.1.1.	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	%	55	55	60	65	70	75
13.1.2.	PRESENTASE WIRAUSAHA MUDA	%	70	70	75	80	85	90

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
13.1.3.	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	CABANG	25	25	26	27	28	29
13.1.4.	JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA	%	2	2	3	4	4	4
14	STATISTIK							
14.1.1	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	75	75	75	80	80	80
14.1.2	PERSENTASE SISTEM DATA DAN STATISTIK YANG TERINTEGRASI	%	-	-	-	75	85	95
15	PERSANDIAN							
15.1.1	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	75	75	75	-	-	-
	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH	%	-	-	-	100	100	100
16	KEBUDAYAAN							
16.1.	PERSENTASE PEMAJUAN BUDAYA MELAYU RIAU	%	-	-	-	36,36	54,55	72,72
16.1.1.	PERSENTASE PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	%	84,21	84,21	85	-	-	-
16.1.2.	PERSENTASE SANGGAR SENI DAN BUDAYA YANG DIBINA	%	58,82	58,82	90	-	-	-
16.1.3.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN	%			-	92,35	94,90	97,45
16.1.4.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN	%			-	41,33	43,88	46,43
16.1.5.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PEMANFAATAN	%			-	10,20	12,76	15,31

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
16.1.6.	PERSENTASE PENERAPAN UNSUR KEBUDAYAAN MELAYU PADA SATUAN PENDIDIKAN	%			-	80	90	100
17	PERPUSTAKAAN							
17.1.	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	20	20	40	60	80	100
17.1.1.	PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DIAKUISISI / DIALIH MEDIA (DIGITALISASI) /TERDAFTAR YANG ADA DI WILAYAH KOTA DUMAI	%	20	20	40	-	-	-
17.1.2.	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	NILAI	-	-	-	65	70	80
17.1.3.	PERSENTASE PEMBINAAN PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	-	-	-	60	80	100
18	KEARSIPAN							
18.1.	PERSENTASE OPD/INSTANSI PEMERINTAH / PERUSAHAAN/ ORGANISASI SOSIAL POLITIK/ ORMAS/ PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA NSPK	%	19	19	38	-	-	-
	PERSENTASE PD PEMKO DUMAI YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA NSPK		-	-	-	58	77	100
18.1.1.	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	INDEKS	-	23,28	75	-	-	-
	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	NILAI	-	-	-	50	75	100
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	PARIWISATA							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	TINGKAT CAPAIAN KUNJUNGAN WISATA	%	48	48	58	68	78	88
		%	48	48	58	68	78	88
1.1.1.	KUNJUNGAN WISATA	ORANG DOMESTIK	39325	39325	84899	93388	102726	112998
		ORANG LUAR NEGERI	3834	3834	12176	13393	14732	16205
1.1.2.	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI	2	2	3	3	3	3
1.1.3.	PAD SEKTOR PARIWISATA	RP.	14.936.812.500,00	14.936.812.500,00	15.586.180.625,00	16.086.180.625,00	16.586.180.625,00	17.086.180.625,00
2	PERTANIAN							
2.1.	PENDAPATAN PERKAPITA PETANI	RP JUTA	228,82	228,82	234,54	-	-	-
	NILAI TUKAR PETANI	INDEKS	-	-	-	138,46	141,92	145,47
2.1.1.	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	KELOMPOK	165	165	170	175	180	185
2.1.2.	PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN	TON	85500	85500	85750	86000	86250	86500
2.1.3.	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN	TON	21250	21250	21500	21750	22000	22250
2.1.4.	POPULASI TERNAK	TERNAK	6600	6600	6800	7000	7200	7400
2.1.5.	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LAINNYA	TON/HA	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
2.1.6.	JUMLAH PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN	UNIT	12	12	14	16	18	20
2.1.7.	JUMLAH KASUS HEWAN MENULAR	KASUS	13	13	11	9	7	5
2.1.8.	JUMLAH KASUS CEMARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)	KASUS	7	7	6	5	4	3
3	PERDAGANGAN							
3.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	14,71	14,71	14,73	14,74	14,76	14,77
3.1.1.	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	NILAI	RP. 6307,49 M	RP. 6307,49 M	RP. 6339,03 M	-	-	-
	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN BERDASARKAN PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN	RP/MILYAR	-	-	-	RP. 6370,72M	RP. 6402,58 M	RP. 6434,59 M
3.1.2.	CAKUPAN PEMBINAAN PEDAGANG USAHA INFORMAL	%	100	100	14,62	14,62	14,62	14,62
3.1.3.	CAPAIAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG	%	-	-	-	20,43	20,43	20,48

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	KEMETROLOGIAN							
3.1.4.	CAPAIAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN TERA/TERA ULANG KEMETROLOGIAN	%	-	-	-	76,58	81,08	85,58
3.1.5.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL	KELOMPOK	3	3	3			
		%				20%	30%	30%
3.2.	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING	%	100	100	100	100	100	100
3.2.1.	CAPAIAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING	KECAMATAN	7	7	7	7	7	7
4	PERINDUSTRIAN							
4.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	61,9	61,9	63,90%	65,90%	66,2	67,07
4.1.1.	PERSENTASE CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	%	9	9	13	14	15	16
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
5.1.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	%	100	100	100	100	100	100
5.1.1.	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	%	100	100	100	100	100	100
5.1.2.	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	%	100	100	100	100	100	100
5.1.3.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN	%	70%	70	77,5	85	92,5	100
5.1.4.	CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	%	69,23	69,23	76,92	84,62	92,31	100
5.1.5.	ANGKA KONSUMSI IKAN	KG/KAPITA/TAHUN	49,64	49,64	50,1	50,6	51,1	51,6
FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
1	PERENCANAAN							
1.1.	INDEKS PERENCANAAN	%	84	84	85	-	-	-

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA	INDEKS	-	-	-	100	100	100
1.1.1.	PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD	%	96,40%	96,40%	100	-	-	-
1.1.2.	PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	%	100%	100%	100	-	-	-
1.1.3.	PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH DIIMPLEMENTASIKAN	%	100%	100%	100	-	-	-
1.1.4.	PERSENTASE RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	%	100%	100%	100	-	-	-
1.1.5.	KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KOTA DUMAI DENGAN DOKUMEN RPJMN	Bobot	-	-	-	9	9	9
1.1.6.	KESELARASAN DOKUMEN RKPD KOTA DUMAI DENGAN DOKUMEN RKP	Bobot	-	-	-	13	13	13
1.1.7.	KESESUAIAN APBD KOTA DUMAI MEMBIAYAI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DALAM RKPD	Bobot	-	-	-	10	10	10
1.1.8.	KESESUAIAN ANTARA ISU STRATEGIS-TARGET DENGAN PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK DI RPJMD KOTA DUMAI ATAU RKPD	Bobot	-	-	-	49	49	49
1.1.9.	INOVASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Bobot	-	-	-	9	9	9
1.1.10	TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI TARGET DAN SASARAN OPD TERKAIT	Bobot	-	-	-	10	10	10
2	KEUANGAN							
2.1	OPINI BPK	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	PERSENTASE SILPA	%	14	14	13,7	13,84	12,91	12,39

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.1.	PERSENTASE DOKUMEN ANGGARAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100	100	100	100	100	100
2.1.2.	PERSENTASE DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN SESUAI STANDAR KEUANGAN DAN TEPAT WAKTU	%	100	100	100	100	100	100
2.1.3.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100	100	100	100	100	100
2.1.4.	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	%	100	100	100	100	100	100
2.2.	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	%	30	30	31	32	33	34
2.2.1.	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%	51	51	52	53	54	54
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
3.1.	INDEKS KEPUASAN APARATUR	INDEKS	91,09	91,09	92	-	-	-
	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	53,67	53,67	65	70	72	76
3.1.1.	PERSENTASE PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	%	97,7	97,7	98	-	-	-
3.1.2.	PERSENTASE PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PETA JABATAN	%	99,4	99,4	98	-	-	-
3.1.3.	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN	%	85,7	85,7	100	-	-	-
3.1.4.	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	%	3,7	3,7	5	-	-	-
3.1.5.	INDEKS SISTEM MERIT	INDEKS	-	-	-	254	255	256
4	PENGAWASAN							
4.1.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	CC	CC	B	B	B	B

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	NILAI	B	B	B	B	B	B
4.3.	INDEKS MANAJEMEN RESIKO	INDEKS	2	2	2	3	3	3
4.4.	LEVEL MATURITAS SPIP	LEVEL	3	3				
	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	NILAI	-	-	3,200	3,225	3,250	3,275
4.5.	LEVEL KAPABILITAS APIP	SKOR	3	3	-	-	-	-
	SKOR KAPABILITAS APIP	LEVEL	-	-	3,31	3,35	3,35	3,36
4.6.	NILAI SAKIP OPD	PREDIKAT	BB	BB				
	RATA-RATA NILAI IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH	NILAI			72	73	74	75
4.7.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN BPK - RI	%	86	86	86	86,3	86,6	87
4.8.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN APIP	%	86	86	87	87,3	87,6	88
4.10	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH	%	100	100	100	100	100	100
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.1.	INDEKS INOVASI DAERAH	SKOR	41,03	42,38	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00	35,00-60,00
5.2.	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	%	20%	20%	25%	30%	35%	40%
6	SEKRETARIAT DAERAH							
6.1.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	NASKAH KERJASAMA	2	2	2	9	10	11
6.2.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	5	5	6	-	-	-
	TERLAKSANANYA KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	-	-	-	15	20	25
6.3.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI	NASKAH KERJASAMA	1	1	1	-	-	-

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
6.4.	TERCAPAINYA PEMBINAAN BUMD	BUMD	3	3	3	3	3	3
6.5.	JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA BERPRESTASI	MAHASISWA	20	20	30	50	50	50
6.6.	JUMLAH KERJA SAMA DAERAH DENGAN INSTITUSI / LEMBAGA PENDIDIKAN	NASKAH KERJASAMA	5	5	6	5	6	7
6.7.	PERSENTASE CAPAIAN PENEKASAN BATAS ANTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	PERSEN	25	25	29,2	33,3	37,5	41,7
6.8.	JUMLAH STRUKTUR PERANGKAT DAERAH YANG DISEDERHANAAN	PERANGKAT DAERAH	30	30	30	-	-	-
	JUMLAH STRUKTUR ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATA		-	-	-	3	3	3
7	SEKRETARIAT DPRD							
7,1	CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	95%	95%	95%	-	-	-
	PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		-	-	-	95%	95%	95%
7.2.	TERSEDIAANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD, SATUANNYA RKT	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
	PERSENTASE TERSEDIAANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD	%	-	-	-	85	85	90
7.3.	TERSUSUNNYA DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENCANA LIMA TAHUNAN (RPJM) MAUPUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENCANA LIMA TAHUNAN (RPJM) MAUPUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN	%	-	-	-	95	95	95
	TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMBENTUKAN PERDA DAN ANGGARAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	ADA/TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	-	-	-
7.4.	PERSENTASE TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	%	-	-	-	95	95	95
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
8.1.	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	%	80	85	-	-	-	-
8.2.	PERSENTASE PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI	%	90	90	90	90	90	90
8.3.	PERSENTASE FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	%	0	0	100	100	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN								

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
1	KECAMATAN DUMAI BARAT							
1.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
1.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	87	88	88	88
1.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
1.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
2	KECAMATAN BUKIT KAPUR							
2.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
2.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85	85	85	85	85	85
2.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
2.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
3	KECAMATAN DUMAI KOTA							
3.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
3.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	89,87	89,87	89,87	89,87	90	90

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
3.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
3.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
4	KECAMATAN MEDANG KAMPAI							
4.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
4.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	87	88	88	88
4.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
4.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
5	KECAMATAN DUMAI SELATAN							
5.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
5.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	87	88	88	88
5.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
5.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
6	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN							

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
6.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
6.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	89	90	90	91
6.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
6.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
7	KECAMATAN DUMAI TIMUR							
7.1	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100	100	100	100	100	100
7.1.1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	87	87	87	88	88	88
7.1.2	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100
7.1.3	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100	100	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR								
1	INFRASTRUKTUR							
1.1.	PERSENTASE INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS	PERSEN	50,22	50,22	56,49	59,12	64,93	68,74
1.2.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR	%	46,13	46,13	55,3	61,4	70,46	78,32

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2022)	2022	2023	2024	2025	2026
	DAERAH							
FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1	PENANAMAN MODAL							
1.1.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85,03	85,03	85,44	85,65	85,87	86,1
1.2.	MUTU PELAYANAN	KATEGORI	B	B	B	B	B	B
1.3.	TINGKAT PENURUNAN ANGKA KRIMINALITAS	%	5	5	5	5	5	5

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021–2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPMN) Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program yang lebih tepat dalam rangka mencapai beberapa target indikator yang sudah dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2021-2026.

9.1 Program Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021–2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2026. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2027, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Dumai 20 tahun berikut arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan nasional serta kepada Visi dan misi kepala daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Dumai Tahun 2027 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit, maka Pemerintah Kota Dumai menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sesuai dengan jadwal dan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2027. Selanjutnya Walikota dan wakil Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026 merupakan pedoman atau acuan bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- b. Sebagai implementasi RPJMD, maka Pemerintah Kota Dumai wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Dumai;
- c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kota Dumai. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, wajib menyesuaikan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kota Dumai.
- d. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana

peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

- e. Pada akhir tahun perencanaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.
- f. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Dumai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

